



PENERBIT ADAB

Isu-Isu Emansipatoris

Pendidikan Islam



❁ Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd,

❁ Dr. Samsul Bahri, MA,

❁ Dr. Batmang, S.Ag, M.Pd,

❁ Dr. Muh. Shaleh, M.Pd.

Isu-Isu Emansipatoris Pendidikan Islam

Indramayu © 2020, Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd, Dr. Samsul Bahri, MA, Dr. Batmang, S.Ag, M.Pd, Dr. Muh. Shaleh, M.Pd

Cetakan Pertama, Agustus 2020

No ISBN : 978-623-7943-63-1

Desain sampul : Nurul Musyafak

Editor : Samsul Bahri

Layouter : Pria Sahuri

Diterbitkan oleh Penerbit Adab

(CV. Adanu Abimata)

Anggota IKAPI : 354/JBA/2020

Jln. Jambal II No 49/A Pabean Udik Indramayu Jawa Barat

Kode Pos 45219

Telp: 081221151025

Surel : Penerbitadab@gmail.com

<http://www.PenerbitAdab.id>

Referensi | Non Fiksi | R/D

X + 315 hlm. ; 15,5 x 23 cm



Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang mengcopy dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa seizin tertulis dari penerbit.

All right reserved

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, sebagai Pencipta dan berkat taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat mempersembahkan buku yang berjudul “Isu-Isu Emansipatoris Pendidikan Islam”. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Semoga kita bisa meneladani.

Buku ini awalnya adalah kumpulan tulisan penulis yang disampaikan pada forum ilmiah membahas dan mengungkap diskursus Pendidikan Islam baik pada persoalan model pembelajaran yang memberdayakan peserta didik, sampai kepada potret lembaga pendidikan Islam di Indonesia dalam perspektif sejarah yang pernah dialaminya. Oleh karena itu, kehadiran buku ini, lebih memperkenalkan, menghargai dan memasyarakatkan bagaimana pendidikan Islam menghadapi era globalisasi 4.0 dan peran institusi-institusi pendidikan Islam di Indonesia. Namun disadari bahwa betapapun kesungguhan dan upaya telah dilakukan penulis, tapi diyakini tulisan ini masih banyak mengandung kelemahan baik dari segi isi, analisis, bahasa serta teknik penulisan yang dilakukan. Untuk itu, saran dan kritik dari pembaca yang budiman guna menyempurnakan buku ini amat penulis harapkan.

Karya kecil ini sulit untuk dapat terwujud, tanpa bantuan dari berbagai pihak, khususnya pada orang tua dan isteri Dr. Ummik Kalsum, MA, dan para penulis Prof. Dr. Faizah Binti Awad, MA. Dr. Moh Saleh, Dr. Batmang, MPd. Dengan perhatian dan pengertian serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya karya sederhana ini dapat kami persembahkan.

Akhirnya, buku ini disajikan kepada para mahasiswa dan civitas akademika khususnya dan masyarakat pada umumnya, sembari mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Kendari, Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 FILSAFAT PENDIDIKAN YANG MEMBEBAHKAN	1
A. Pendahuluan	1
B. Paradigma Pendidikan Pembebasan dalam Islam	2
C. Problematika Pendidikan Islam	10
D. Rekonstruksi Pendidikan Islam Sebagai Upaya Paradigma Pembebasan.	20
E. Penutup	25
BAB 2 PARADIGMA PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT	27
A. Pendahuluan	27
B. Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM).....	28
C. Sejarah Pendidikan Berbasis Masyarakat.....	34
D. Hambatan dan Dukungan	38
E. Penutup	40
BAB 3 POTRET PESERTA DIDIK PADA ZAMAN KEJAYAAN ISLAM.....	41
A. Pendahuluan	41
B. Peserta Didik Pada Zaman Keemasan Islam	42
C. Penutup	46

BAB4 INKLUSIFISME PENDIDIKAN ISLAM	48
A. Pendahuluan	48
B. Eksklusivisme Pendidikan Islam	49
C. Inklusifisme Pendidikan Islam.....	51
D. Penutup	56
BAB5 MENGAGAS PARADIGMA BARU PENDIDIKAN ISLAM	57
A. Pendahuluan	57
B. Pendidikan non dikotomik.....	58
C. Dari <i>Teaching ke Learning</i>	61
D. Penutup	64
BAB 6 MENJADI GURU YANG PROFESIONAL	65
A. Pendahuluan	65
B. Guru Dalam Perspektif Pendidikan Islam	67
C. Profesionalisme Guru	69
D. Mewujudkan Profesionalisme Guru Melalui Sertifikasi	75
E. Penutup	80
BAB 7 PENDIDIKAN AKHLAK PADA PESERTA DIDIK	81
A. Pendahuluan	81
B. Pendidikan Akhlak dalam Perpektif Sejarah	82
C. Peran Institusi Keluarga dalam Menanamkan Nilai	84
D. Peran Institusi Sekolah	86
E. Peran Institusi Masyarakat	94
F. Penutup	97
BAB 8 INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA	98
A. Pendahluan	98
B. Intitusi Pendidikan Di Minangkabau.....	99
C. Intitusi Pendidikan Islam di Aceh.....	103

D. Institusi Pendidikan Islam di Jawa (Pesantren)	105
E. Analisa Perbandingan Pesantren, Surau, Rangkang dan Implikasinya	111
F. Penutup	113
BAB 9 INSTITUSI PESANTREN SEBAGAI LOCAL-GENIUS MAMPU BERTAHAN MENGHADAPI EKSPANSI MODERNISASI PENDIDIKAN	
114	
A. Pendahuluan	114
B. Teori Lahirnya Pesantren	115
C. Pergumulan Pesantren dalam Perspektif Sejarah.....	116
D. Daya Ketahanan dan Kontinuitas Institusi Pesantren.	122
E. Kesimpulan	140
Daftar Pustaka	141
BAB 10 MODERNISASI PENDIDIKAN MADRASAH DALAM PERSPEKTIF SEJARAH.....	145
A. Pendahuluan	145
B. Pengertian Madrasah.....	146
C. Modernisasi Madrasah	148
D. Kebijakan Pemerintah Terhadap Modernisasi Madrasah	149
E. Pembinaan Diversifikasi Kelembagaan Madrasah.....	163
F. Penutup	166
BAB 11 SKB TIGA MENTERI SEBAGAI BENTUK PENGUATAN DAN PELEMAHAN PERAN MADRASAH	167
A. Pendahuluan	167
B. SKB 3 Menteri Dan Implikasi Terhadap Institusi Madrasah	168
C. Penutup	178

BAB 12 INSTITUSI PENDIDIKAN MADRASAH DAN SEKOLAH 180

- A. Pendahuluan180
- B. Wacana Madrasah 181
- C. Institusi Pendidikan Sekolah188
- D. Perbedaan Madrasah dan Sekolah.....190
- E. Penutup195

**BAB 13 Posisi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional .
196**

- A. Pendidikan Islam dalam sistem Pendidikan Nasional.196
- B. Penutup198

BAB 14 PENGAJAR YANG MEMBELAJARKAN 199

- A. Pendahuluan199
- B. Pengajaran Model Gaya Bank sebagai Problem Pembelajaran 200
- C. Pengajaran Hadap Masalah Paradigma yang Membelajarkan210
- D. Kesimpulan214
- Daftar Pustaka215

**BAB 15 KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG KENAIKAN ANGGARAN
PENDIDIKAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM
217**

- A. Pendahuluan217
- B. Multi Persoalan Pendidikan di Indonesia218
- C. Kebijakan dalam Bidang Pendidikan 223
- D. Kebijakan Anggaran Pendidikan..... 230
- E. Kenaikan Anggaran Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam 240

F. Kesimpulan	247
Daftar Pustaka	248
BAB 16 PARADIGMA PEMBELAJARAN CONDITIONING DALAM	
PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM.....	251
A. Pendahuluan	251
B. Teori Pembelajaran <i>Conditioning</i>	252
C. Teori Pembelajaran <i>Conditioning</i> dalam Islam.....	268
D. Kesimpulan	272
Daftar Pustaka	274
BAB 17 ESENSI GURU DALAM VISI-MISI PENDIDIKAN KARAKTER :	
PERSPEKTIF ISLAM	277
A. Pendahuluan	277
B. Esensi Guru dalam pendidikan Karakter	279
C. Visi –Misi Guru Dalam Pendidikan Karakter	286
D. <i>Mal--Praktik Pendidikan: Penghambat Pendidikan</i>	
Karakter	291
E. Kesimpulan	295
Daftar Pustaka	297
DAFTAR PUSTAKA.....	300
PROFIL PENULIS Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd.....	308
PROFIL PENULIS Dr. Samsul Bahri, MA	311
PROFIL PENULIS Dr. Batmang,S.Ag,M.Pd.....	312
PROFIL PENULIS Dr. Muh. Shaleh, M.Pd.....	314



ISU-ISU EMANSIPATORIS PENDIDIKAN ISLAM

Penulis :

Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd,
Dr. Samsul Bahri, MA,
Dr. Batmang, S.Ag, M.Pd,
Dr. Muh. Shaleh, M.Pd

BAB 1

FILSAFAT PENDIDIKAN YANG MEMBEBAHKAN

A. Pendahuluan

Wacana tentang pendidikan tidak akan pernah sepi dari kritikan-kritikan tajam yang dilontarkan oleh para intelektual, hal ini disebabkan karena model-model pendidikan yang diharap sebagai sebuah sarana memanusiakan manusia dan membebaskannya dari distorsi kemanusiaan yang hakiki tidak lagi terjadi, justru sebaliknya pendidikan tidak lagi membebaskan manusia atau peserta didik, serta seluruh komponen pendidikan.

Kenyataan tersebut, menyebabkan lahirnya pemikiran tentang wacana pembubaran lembaga sekolah, Ivan Illic misalnya mengatakan bahwa lembaga-lembaga sekolah yang sudah ada ini harus digusur alias dibubarkan semua. Menurutnya, sekolah bukanlah lembaga pendidikan akan tetapi lembaga penindasan rakyat kecil, lembaga yang melestarikan feodalisme, lembaga yang melanggengkan kolonialisme, lembaga yang menjunjung tinggi *status quo*, bahkan lembaga yang mengabdikan sistem persaingan model hukum rimba. Atau memakai istilah Ainurrafiq "*Emoh Sekolah* " karena sekolah dianggap sebagai biang keladi munculnya dikotomisasi antara pendidikan dan pengajaran atau penyekolahan.¹

Wacana di atas, merupakan bentuk dari kritik kepada dunia pendidikan yang tidak lagi mempunyai filsafat pendidikan yang membebaskan peserta didik dan seluruh komponen pendidikan. Hal ini akan menjadi sangat relevan manakala kita menyadari kondisi

¹Ainurrofiq, *Emoh Sekolah*, Yogyakarta, Inspel Ahimakarya Press, 2003, h. 43.

dan praktek pendidikan di Indonesia, oleh karena itu, pemikiran tersebut merupakan wujud dari kegelisahan seseorang yang masih punya hati nurani kemanusiaan. Dengan kata lain merupakan wujud dari kegelisahan sosial intelektual manusia Indonesia yang tidak menginginkan manusia Indonesia tega memakan teman, saudara, rekan, bahkan orang tua sendiri hanya untuk mendapatkan kekayaan dan kesenangan yang bersifat materi.

Dengan demikian, pendidikan yang berorientasi kepada *human empowering, dialogue oriented* dan simpatik minoritas sudah saatnya mendapat tempat bagi semua elemen akademisi. Atau filsafat pendidikan yang membebaskan, kalau tidak, jangan salahkan Paulo Freire yang mengatakan lembaga sekolah adalah candu. Karena itupun beliau mengagagas pendidikan yang membebaskan.

Tulisan ini akan membahas filsafat pendidikan yang membebaskan dalam perspektif pendidikan Islam. Uraian ini bersifat deskriptif dan literatur yang digunakan adalah buku-buku pendidikan Islam yang otoritatif, adapun metode yang dipakai adalah metode historis.

B. Paradigma Pendidikan Pembebasan dalam Islam

Dalam al-Qur'an, potensi yang dimiliki manusia diistilahkan fitrah atau hati nurani. Potensi tersebut pada esensinya merupakan kemampuan dasar manusia yang meliputi kemampuan rasional, maupun spritual. Hanya saja kemampuan tersebut masih merupakan embrio. Untuk itu, diperlukan upaya untuk mengembangkan dan mengarahkan potensi tersebut secara efektif. Upaya yang efektif adalah melalui media pendidikan. Oleh karena itu, penulis kembali meminjam tesis Muhbib² menyatakan banyak ayat al-Qur'an yang

²Muhbib melalui tesis Magisternya berkesimpulan bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim mayoritas bergaya bahasa dialogis. Ayat-ayat yang dijumpainya mencapai 237 yang tersebar dalam 25 surat. Jumlah ayat tersebut 83%nya (197 ayat dalam 13 surat) bergaya bahasa dialogis. Ayat-ayat tersebut mayoritas (89,85%) ayat (177 ayat dalam 11 surat) tergolong turun pada priode Mekkah. Tema-tema dialog menyangkut kosmologi, sosial, pendidikan, dan eskatalogi yang merupakan perekat dan penguat ketahuidan. Untuk lebih jelasnya Lihat Muhbib, *Konsep Dialog dalam al-Qur'an: Studi tentang kisah Ibrahim AS*, Jakarta, Program Pascasarjana, 1997, h. 164. Bahkan surat-surat pendek dalam al-Qur'an juga banyak dijumpai ayat-ayat yang bernuansa dialog, yang diantaranya perhatikan surat, QS. 114 : 1, 113 : 1, 112: 1, 109, 107, 105, 104, 101, 100.; 9, 96, 95:8, 90, 88. Lihat Suwito, *Pendidikan Yang Memberdayakan*, h. 18.

dapat dipahami sebagai ayat pemberdayaan. Diantara indikatornya adalah terjadinya suasana dialogis dalam berbagai kegiatan termasuk pendidikan.

Ayat al-Qur'an yang pertama turun kepada Nabi Muhammad Saw adalah perintah baca. Ayat tersebut dapat dinilai sebagai pemicu lahir dan berkembangnya tradisi tulisan, sebagai ganti dari tradisi lisan yang saat itu sangat berkembang. Tradisi tulis menulis merupakan cikal bakal dinamika keilmuan.³

Agenda sejarah mencatat bahwa Nabi sudah memulai pendidikan pembebasan. Di mana Nabi mendidik para sahabatnya dari belenggu jahiliyyah, kegelapan spritual dan intelektual yang mencakup sebuah dinamika. Bahkan Nabi memberdayakan para sahabatnya dengan diperintahkan menulis wahyu dan juga tawanan perang diperintahkan untuk mengajar membaca dan menulis. Hal ini sangat menarik untuk digarisbawahi bahwa muslim generasi pertama yang hidup sezaman Nabi dan pernah bertemu Nabi, pendidikan Islam memiliki makna sentral sebagai proses pencerdasan secara utuh. Demikain halnya pada masa Khulafa al-Rasyidin dan setelahnya. Hal ini dikemukakan Zarkowi Soejoeti bahwa ketika abad ke 3 H, pendidikan Islam tidak lagi meyentuh ilmu keislaman saja, akan tetapi ilmu-ilmu diluar keislaman. Ini dibuktikan dengan dibangunnya *Bait al-Hikmah*,⁴ sebagai pusat penterjemahan karya-karya warisan ilmu dari Persia dan Yunani. Sehingga revolusi pendidikan abad itu, menghasilkan banyak aktivitas intelektual yang melahirkan banyak aliran pemikir dan mazhab yang terlibat dalam argumentasi dialektika mengenai dasar-dasar agama (kalam) dan hukum Islam (fikh). Etos kerja ilmiah dan kerja keras tersebut, karena menjadikan al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai motivator.

Umat Islam sekitar sekitar abad abad 8-9 M, filsafat dan Iptek Yunani tersebut diislamkan, dengan mengganti *natural law* dengan *sunnatullah* yakni hukum alam ciptaan Tuhan, dan kebenaran duniawi adalah relatif yang harus terus menerus dikembangkan berdasarkan

³Suwito, *Pendidikan Yang Memberdayakan*, h. 18.

⁴*Bayt al-Hikmah* Baghdad merupakan salah satu pusat kegiatan penterjemahan ilmu-ilmu dari Yunani ke dalam Bahasa Arab. Pimpinannya adalah Hunayn Ibn Ishaq. Philip K. Hitti, *History of Arabs*, London, The Macmillan Press, 1974, h. 312.

perspektif kebenaran Tuhan. Dengan demikian, dalam pemahaman nalar metodologi keilmuan yang secara *intrinstik* menjadi tuntutan universal. Ia didasari, diarahkan, dan dijiwai oleh nilai etik moral Islami, sehingga keduanya akan tetap berkembang dalam perspektif Islam.

Pengembangan filsafat dan Iptek di tangan orang Islam mencapai puncak keemasan pada abad 8-12 M. Pada masa itu pendidikan Islam mampu memimpin kehidupan, di mana manusia berdaya secara maksimal untuk mengendalikan ciptaa-Nya sehingga kehidupan benar-benar nyaman, dan sekaligus maju serta dinamis.

Rahasia kesuksesan pendidikan Islam terletak pada kebebasan mimbar akademik, demokrasi, berpegang teguh pada etika akademik dan estetika. Dalam pandangan Islam antara kebenaran ilmiah, etika, estetika, dan demokrasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, mereka hanya dapat dibedakan menurut posisi dan peran masing-masing.

Dalam pandangan Islam, ilmu sudah terkandung secara esensial dalam al-Qur'an.⁵ Karena itu, pada zaman keemasan Islam orang berilmu berarti beragama dan beragama berarti berilmu, maka tidak ada dikotomi antara ilmu umum dan agama. Ilmu tidak bebas nilai, tetapi bebas dinilai atau dikritik. Menilai dan menggugat kembali keabsahan dan kebenaran suatu pendapat adalah suatu keharusan tanpa menilai yang berpendapat. Bahkan ilmuwan dengan senang hati melemparkan pendapatnya untuk dinilai dan bukan untuk dipertahankan, karena yang dicari adalah kebenaran dan bukan membenaran.

Dapat dipahami bahwa pendidikan pembebasan dalam perspektif Islam sudah terjadi pada masa Nabi Muhammad dan pada zaman keemasan Islam. Hal ini pun sangat didukung dengan menjadikan al-Qur'an dan Sunnah sebagai motivator pengembangan ilmu pengetahuan. sehingga mampu menghasilkan karya-karya dibidang ilmu pengetahuan. Akan tetapi, kuatnya nilai-nilai kebenaran ilmiah yang dilontarkan oleh para ilmuwan Muslim pada zaman keemasan Islam itu, sampai-sampai pendapat ilmiah tersebut berubah menjadi

⁵Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, h. 9.

mitos baru yang hanya perlu dipahami dan dihafalkan serta diamalkan tanpa harus dikritisi.

Pendidikan Islam sesudah abad 12 dirasakan kurang membebaskan terhadap banyak hal. Yang dipelajari ilmu tafsir, fiqih, dan sebagainya. Bahkan nyaris para peserta didik cenderung dipaksa untuk memahami teks tafsir dan bukannya didorong untuk secara kreatif mengembangkan makna ayat al-Qur'an.⁶ Siswa tidak pernah didorong untuk melahirkan ulum al-Qu'an Baru. Yang ada hanya dipaksa memahami ulum al-Qur'an karya orang lain. Para peserta didik tidak diberi kesempatan untuk melahirkan fiqih baru, yang ada hanya pemikiran fiqih lama. Akibatnya, kitab-kitab selain al-Qur'an cenderung menempati posisi atas dalam pembelajaran dan al-Qur'an ditempatkan pada posisi di bawah atau bahkan tidak sempat dikaji secara mendalam.

Dengan demikian, peserta didik kurang memanfaatkan daya pikir yang dimilikinya, sehingga tidak melahirkan manusia yang dinamis akan tetapi fatalistis dan statis.

Selain itu, Islam mengalami kemunduran, dengan ditandainya serangkaian peristiwa dramatis baik Baghdad maupun Andalusia. Akibatnya, Islam tidak lagi dapat mengembangkan pendidikan seperti masa-masa sebelumnya yang telah mampu melahirkan sarjana-sarjana terkemuka. Diantaranya seperti al-Biruni, Abu Musa al-Kharizmi dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena tidak lagi menjadikan al-Qur'an dan as-Sunnah menjadi motivator penggerak bagi pembebasan atau pemberdayaan. Bahkan Harun Nasution menjelaskan bahwa sesudah abad 13, sejarah peradaban Islam memasuki priode kejumudan, karena orang tidak berani berijtihad.⁷ Selain itu, tradisi pemikiran umat Islam masih belum mampu ke luar dari kungkungan, *logosentrisme* yang antara lain didominasi oleh: (1) setiap kegiatan berpikir dikuasai oleh gambaran dogmatis dari suatu nalar yang mampu mencapai keberadaan Allah, (2) dorongan utama dari setiap renungan tidaklah bersifat ilmiah tetapi bersifat estetis etis, (3) nalar akal-budi yang merupakan refleksi dari intelegensi adalah

6 Suwito, *Pendidikan Yang Membebaskan*, h. 20.

7Harun Nasution, "Ijtihad sumber Ketiga Ajaran Islam", dalam Jalaluddin Rakhmat (ed), *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung, Mizan, 1988, h. 113.

ciptaan Allah dan dikuasai oleh gagasan untuk mengenali kembali pencipta pertama, (4) kegiatan-kegiatan nalar adalah menganjarkan sesuatu dalam usaha kembali ke landasan-landasan dengan bertolak dari definisi-definisi universal, substansi-substansi pertama, dan esensi tidak berubah menurut para pemikir tradisional dan belum tentu menurut makna yang sesungguhnya dari kalam Ilahi. Makna sejati kalam Ilahi tetap terbuka dan tidak berkesudahan untuk terus dicari di diketemukan.

Model di atas, tidak pelak lagi mempersempit fungsi dan kemampuan agama dalam merespon tantangan zaman modern dan postmodern, karena dengan model pemikiran tersebut agama terkesan tertutup dan terpisah dari kenyataan keseharian. Karena itu, pendidikan Islam harus mempunyai paradigma baru, yang berdasarkan filsafat *teocentris* dan sekaligus *antroposentris*.⁸

Pendidikan Islam terbatas mengajarkan ilmu-ilmu keislaman saja,⁹ yang makin lama makin tidak kreatif sehingga mengalami zaman kemunduran. Di samping itu, di bawah pemerintahan kolonial, umat Islam hanya mempelajari pengetahuan Islam tradisional dan warisan lama, tanpa diperkenalkan pendidikan modern. Akibat berkembangnya dua sistem pendidikan tradisional dan modern di dunia Islam banyak menimbulkan persoalan.

Kedua kelompok ini saling mencurigai satu sama lain dan saling menuduh terhadap kelemahan pihak lain, sehingga terputuslah antara ilmu pengetahuan keislaman dengan ilmu pengetahuan modern. Yang pada akhirnya menjadi wacana perdebatan dan kritikan. Bahkan terjadinya penyempitan makna pendidikan Islam berlangsung hingga tingkat pelebagaan dan metodenya, khususnya di kalangan Sunni. Para ulama mulai menarik garis tegas antara ilmu sekuler dan ilmu agama. Mereka menentang ilmu sekuler dan mengeluarkannya dari kurikulum madrasah. Peserta didik lebih banyak diminta menghafal teks baku dibandingkan mengembangkan pemikiran kreatif.

⁸Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, h. 15.

⁹ Ilmu keislaman yang dipelajari umat Islam seperti ilmu Tafsir, ulumul Qur'an, Fiqhi, dan semacamnya. Ilmu-ilmu tersebut sebenarnya lahir karena adanya al-Qur'an. Akibat dari itu, para siswa dan mahasiswa cenderung dipaksa untuk memahami teks tafsir dan bukannya didorong untuk secara kreatif mengembangkan makna ayat al-Qur'an.

Sehingga dalam jangka panjang, akan mengakibatkan disiplin ilmu rasional menjadi tidak berkembang di dunia Islam, yang akhirnya mempengaruhi pemikiran Islam secara keseluruhan pun terhambat karena tidak ada tantangan serta dorongan.

Pendidikan merupakan tuntunan pertumbuhan manusia, sejak lahir sampai tercapai kedewasaan jasmani dan rohani, dalam intraksi dengan alam dan lingkungan masyarakat. Pendidikan merupakan proses yang terus menerus, yang tidak kunjung selesai. Karena itu, proses pendidikan harus menempatkan manusia sebagai titik sentral, namun tidak berarti bahwa pengaruh dan tuntutan masyarakat serta lingkungan sama sekali dilepaskan, maka dalam konteks ini pendidikan berfungsi sebagai wacana intraktif antara manusia dan lingkungan.¹⁰ Oleh sebab itu, manusia sebagai subyek di dalam pendidikan, maka dituntut tanggung jawab agar tercapai suatu pendidikan yang baik.

Dengan demikian, jika manusia sebagai subyek dan pendidikan meletakkan hakikat manusia pada hal yang penting, maka perlu diperhatikan juga masalah otonomi pribadi. Maksudnya adalah, manusia sebagai subyek pendidikan harus bebas untuk “ada” dan menjadi dirinya sendiri, yaitu manusia yang berpribadi dan bertanggung jawab. Ali Syariati salah seorang intelektual Iran yang tersohor, mengatakan bahwa kebebasan yang dimiliki manusia merupakan proses tertinggi dari proses menjadi manusia dengan realitas kemanusiaanya.¹¹

Pendidikan pembebasan dalam perspektif Islam sebetulnya telah diterapkan, dan bahkan bagian dari esensi ajaran Islam sebagai agama yang diturunkan Allah untuk manusia. Mulai Nabi Muhammad dengan gerakan dakwahnya merupakan praktek pembebasan manusia dari eksploitasi, penindasan, dan dominasi dan ketidakadilan dalam segala aspeknya. Karena itu, Nabi dalam misi dakwahnya untuk pembebasan umat, tidak langsung menawarkan Islam sebagai sebuah ideologi yang normatif, melainkan sebagai pengakuan terhadap perlunya memperjuangkan manusia dari tragedi penindasan, ketidakadilan, dengan penyusunan kembali tatanan yang

10Malik Fajar, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*, h. 63

11Malik Fajar, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*, h. 64.

telah ada, menjadi tatanan yang tidak eksploitatif, adil dan egaliter.

Oleh karena itu, Islam dengan pilar *lailaha ilallah* adalah agama pemberdayaan dan pembebasan karena Islam memberikan penghargaan terhadap manusia secara sejajar, mengutamakan kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan, mengajarkan berkata benar, dan mengasihi yang lemah dan tertindas.¹² Sejarah membuktikan bahwa dengan pendidikan pembebasan dalam Islam telah mampu melahirkan masyarakat belajar sehingga banyak karya yang dilahirkan.

Dari cerminan tersebut, maka dapat dipahami bahwa pendidikan Islam telah melaksanakan pendidikan pembebasan, hal ini terlihat tidak adanya dikotomi ilmu pengetahuan, artinya menurut Mulyadhi Kartanegara lahirnya epistemologi Islam yang mampu mempersandikan antara ilmu yang fisik-empiris maupun non fisik atau metafisika.¹³ Bahkan boleh dinyatakan, bahwa peranan pendidikan saat itu sebagai sarana menyiapkan peserta didik dalam kehidupan masyarakat baik individu maupun sebagai anggota masyarakat. Atau dengan kata lain pendidikan telah terjadi pada masa Nabi maupun zaman keemasan Islam.

Pendidikan pembebasan dalam dunia pendidikan Islam pernah dilakukan oleh Nabi dan zaman kejayaan Islam. Hanya saja, pada masa kemuduran menurut Syafi'i Ma'arif,¹⁴ merupakan kemandulan intelektual kita dalam kurun waktu yang cukup panjang. Akibatnya kita belum mampu merumuskan dan memperkenalkan secara sistematis hal yang baru dalam dunia pendidikan seperti yang digagas oleh Paulo Freire.

Ironisnya, kita masih saja berada dalam posisi sebagai umat konsumen terhadap gagasan-gagasan intelektual pihak lain. Kenyataan ini harus kita akui secara jujur. Tapi posisi semacam ini sangat tidak sesuai sama sekali dengan kebesaran dan keagungan al-Qur'an.

Posisi subordinat secara intelektual ini, harus secepatnya diubah

¹²Suwito, *Pendidikan Yang Membebaskan*, h. 27.

¹³Mulyadhi Kartanegara, *Mozaik Khazanah Islam*, Jakarta, Paramadina, 2000, h. 117-123.

¹⁴Syafii Maarif, *Pendidikan Islam Sebagai Paradigma Pembebasan, Pendidikan Islam di Indonesia; Antara Cita dan Fakta*, h. 21.

melalui ‘bengkel-bengkel’ kerja intelektual yang bernilai strategis untuk memenangkan masa depan. Jalan ke arah itu sebenarnya terbuka lebar itu sebenarnya terbuka lebar bagi intelektual kita. Yang diperlukan sekarang adalah kemauan dan kesungguhan agar masalah cair secara intelektual. Bila kualifikasi ini telah dimiliki, maka khazanah ilmu akan menjadi akrab dengan kita. Tetapi sebaliknya, jika kita masih beku secara intelektual dan wawasan keagamaan masih tetap sempit dan didominasi oleh mitos, golongan, maka jangan heran jika posisi sebagai konsumen masih tetap berlangsung lebih lama. Di sini akan sangat tergantung pada kecerdasan kita dalam menentukan pilihan yaitu sebagai pilihan yang cerdas dan selalu bersifat kritis. Hanya saja sikap kritis dan tidak puas, tidak dipahami sebagai sebuah pemikiran negatif. Sikap kritis seharusnya perlu dikembangkan agar terjadi perkembangan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan.

Konsep pendidikan sebagai praktek pembebasan yang ditawarkan Paulo Freire, sebenarnya sudah pernah terjadi dalam dunia Islam, kelebihanannya barangkali terletak pada kemampuannya untuk merakit gagasan-gagasan kependidikannya dalam suatu teori yang agak baik. Sehingga mampu membawa masyarakat kepada pembebasan dari budaya verbal serba naif dan membosankan bebas dari budaya otoriter yang mendikte dan memerintah, semua ini, merupakan suatu budaya yang mematikan daya kritis dan daya kreatif manusia, menuju masyarakat yang mempunyai kesadaran kritis.

Kekurangan dari teori yang dikemas Paulo Freire mengenai konsep atau teori pendidikannya adalah masih terlalu terikat pada kepentingan realitas di muka bumi ini, suatu kepentingan yang belum menyentuh aspek spritual, yang memungkinkan manusia berdialog secara intim dan intens dengan Allah SWT. Karena dengan dialog spritual ini akan memberikan makna yang secara mendasar pada pendidikan khususnya dan bagi kegiatan akademik.

Oleh sebab itu, di mata al-Qur’an ekstensi manusia di muka bumi hanyalah bermakna, bila kegiatan di bumi diorientasikan secara sadar ke Allah SWT. Tanpa orientasi semacam itu apapun bentuk kegiatan, termasuk kegiatan pendidikan tidak akan mempunyai nilai disisi-Nya.

Dengan demikian, jika umat Islam ingin mengulang sejarah kesuksesan Islam di masa lalu maka, *pertama* yang harus ditandinginya adalah membenahi dunia pendidikan Islam. Khususnya pengguruan tinggi, harus mampu menciptakan lingkungan akademik yang kondusif bagi lahirnya praktisi-praktisi yang berpikir kreatif, otentik dan orisinal, seperti pada zaman keemasan Islam. Bukan cendikia-cendekia konsumen yang berwawasan sempit, terbatas dan verbal. Untuk menggiring ke arah itu harus mampu membebaskan civitas akademiknya, dari budaya fanatisme golongan, organisasi dan sebagainya. Serta membawa mereka pada suasana kreatif dalam rangka membentuk kampus Qur'ani, anggun dan menantang secara intelektual. Dengan cara tersebut, maka pendidikan dapat menjanjikan sebagai paspor masa depan.

C. Problematika Pendidikan Islam

Ketika pendidikan Islam menerima sistem dikotomi sebagai sebuah fenomena perbendaan antara sistem pendidikan tradisional dan pendidikan modern, maka menjadi sebuah debat dan beragam kritikan dalam dunia pendidikan Islam yang dilakukan oleh para pembaharu Islam. Abu Hasan al-Amiri (w.381H/992M) misalnya menekankan untuk tidak mengadakan dikotomi pembelajaran ilmu-ilmu hasil pemikiran dan ilmu-ilmu keagamaan.¹⁵ Sistem dikotomi pendidikan bukan hanya menyangkut perbedaan dalam struktur luarnya saja tapi juga terjadi di dalam, yang lahir dari pendekatan mereka terhadap tujuan-tujuan pendidikan.¹⁶ Karena itu, lahirlah konsep keilmuan yang Islami dan tidak Islami, akibatnya, di satu pihak akan menghasilkan manusia yang mempunyai rasa ketaatan yang sangat besar, sedangkan di lain pihak akan melahirkan sosok manusia yang beranggapan bahwa tidak ada batasan atau akhir

¹⁵Setidaknya ada lima alasan yang dimajukan oleh al-Amiri tentang ini: (1) Wahyu tidak bertentangan dengan pendapat akal, (2) Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk mempelajari penciptaan alam, (3) bahwa mempelajari penciptaan alam akan mendapatkan hukum kausalitas, 4) menambah keyakinan, (5) bermanfaat secara nyata bagi kehidupan. Ahamad Abd al-Hamid Ghurab, *Abu Hasan al-Amiri wa Ara'uh al-Tarbawiyah*, dalam, *Min A'lami al-Tarbiyah al-Tarbiyyah al-Arabiyyah al-Islamiyyah*, Jilid II, h. 96-97.

¹⁶Syed Sajjad Husain dan Syed Ali Ashraf, *Crisis in Muslim Educaion*, Jeddah King Abdul Aziz Universitas, 1979, h. 56.

dari kemungkinan-kemungkinan di dalam dirinya atau dia dapat membentuk sendiri kehidupan yang dijalannya tanpa tuntunan Ilahi.¹⁷ Kondisi ini, jelas menjadi sangat dilematis, sehingga disadari atau tidak sebenarnya tugas pemikir muslim juga diarahkan pada upaya sosialisasi konsep pendidikan Islam yang non dikotomik.

Problematika pendidikan Islam menurut Mastuhu masih berkuat pada nalar Islami klasik, belum berkuat pada nalar Islami modern.¹⁸ Sehingga paradigma pendidikan Islam cenderung hanya terkait pada aspek ukhrowinya,¹⁹ yang menekankan kepada kepatuhan dan tidak berdaya untuk mengkritisi atau dengan paradigma pemikiran kritis.²⁰ Oleh karena itu, ilmu-ilmu selain al-Qur'an merupakan hasil Ijtihad, maka perlu dikritisi agar tidak terjebak pada paham bahwa ilmu-ilmu tersebut sebagai ilmu yang telah final dan Absolut. Hal ini dikarenakan para ahli bukanlah manusia *ma'shum*.²¹

Secara historis melihat problem pendidikan Islam sudah ada ketika sistem madrasah muncul, bahkan madrasah era klasik telah mempunyai peranan yang besar dalam melonggarkan sistem dualisme pada perkembangan pelaksanaan pendidikan Islam selanjutnya,²² sehingga sistem pendidikan Islam mengalami ketebelakangan.

Namun demikian, pada tataran normatif-filosofis A. Malik Fajar menjelaskan tentang keterbelakangan pendidikan Islam, bahwa hingga kini pendidikan Islam masih berkuat pada perdebatan semantik, apakah pendidikan Islam memakai istilah *tarbiyah*, *ta'dib*, atau *ta'lim*. Dari segi muatan, menurutnya pendidikan Islam masih dihadapkan pada persoalan dualisme-dikotomi antara lain ilmu-

17Syed Sajjad Husain dan Syed Ali Ashraf, *Crisis in Muslim Educaion*, h. 56-57.

18Mastuhu, "Pendidikan Islam di Indonesia Masih Berkuat pada Nalar Klaisk", dalam *Afkar Jurnal Refleksi pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan*, Edisi, No. 11, 2002, h. 77-83.

19Abdurrahmansyah, "Memperbincangkan Sistem Pendidikan Islam", dalam *Jurnal Ta'dib*, h. 15.

20Munir Mul Khan, Islam tidak Hanya Untuk Orang dulu, *Ulumul Qur'an*, Edisi No3, Vol.VI, 1995, h.11-12.

21Ahamad Abd al-Hamid Ghurab, *Abu Hasan al-Amiri wa Ara'uh al-Tarbawiyah*, dalam, *Min A'lami al-Tarbiyah al-Tarbiyyah al-Arabiyyah al-Islamiyyah*, h. 104.

22Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, h. ix-xi.

ilmu agama dan ilmu-ilmu umum.²³ Maka, diperlukan reorientasi dan reformasi pendidikan.

Lain halnya dengan Fazlur Rahman, berpendapat bahwa keterbelakangan sistem pendidikan Islam adalah karena pengucilannya dari kehidupan intelektualisme.²⁴ Atau tertutupnya pintu ijtihad (yakni pemikiran yang orisinal dan bebas) telah membawahkan pada kemacetan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Hal ini diakui Muhammad Iqbal bahwa sistem pendidikan Islam telah digrogoti oleh budaya statisme, sementara dinamisme sangat dihargai oleh Barat.²⁵

Selain itu, Nurcholis Madjid menggambarkan kondisi inferioritas pendidikan dunia Islam praktis merupakan kawasan bumi yang paling terbelakang diantara penganut agama-agama besar. Negeri-negeri Islam jauh tertinggal oleh Eropa, Amerika Utara, Australia, dan Selandia baru yang protestan; oleh Eropa Selatan, Amerika Selatan yang Katolik Romawi; oleh Eropa Timur yang Katolik Ortodoks ; oleh Israel yang Yahudi; oleh India yang Hindu; oleh Cina, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Thailand yang Budhis. Praktis tidak satupun agama besar di muka ini yang lebih rendah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya (Iptek) daripada Islam.²⁶

Secara internal ada dua hal yang menyebabkan ketertinggalan kaum muslimin seperti yang digambarkan di atas yakni: *Pertama*, karena pola pikir muslim yang secara umum sangat kental bercorak fikih oriented, yang selanjutnya bersikap apriori terhadap semua aktivitas penalaran, rasionalistik. *Kedua*, kurangnya sosialisasi konsep filsafat pendidikan Islam. fenomena inferioritas ini setidaknya merupakan konsekwensi logis dari obyektivitas mental kaum muslimin yang dalam konteks sejarah diakui telah meninggalkan tradisi ilmiah radikal yang untuk kemudian larut secara sempurna

23A.Malik Fajar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, h. 79.

24Muhaimin, *Kontroversi Pemikiran Fazlur Rahman, Studi kritis Pembaharuan Pendidikan Islam*, Cirebon, Pustaka Dinamika, 1999, h. 75.

25Ahmad Syafii Maarif, Imron Nasri (Ed), *Islam dan Politik Upaya Membingkai Peradaban*, Cirebon, Pustaka Dinamika, 1999, h. 143. Baca pula, *The Reconstruction of Religions Thought in Islam*, New Delhi, Kitab Bhavan, 1981, h. 146.

26Nurcholis Madjid, *Kaki Langit Peradaban Islam*, Jakarta, Yayasan Wakaf Paramadina, 1997, h. 21

ke dalam dimensi sufistik dan meninggalkan eksplorasi empirik.

Untuk itu, suatu alasan dasar untuk kemudian bermunculan ide-ide islamisasi sebagai kritik terhadap ideologi muatan nilai ilmu dan sosial,²⁷ secara tegas al-Faruqi mengatakan bahwa umat Islam harus menjadi umat yang cerdas dengan menata paradigma pendidikannya yang modern, namun tetap berpijak pada asas moralitas Islami yang paling dasar.²⁸

Apa yang dilakukan Ismail al-Faruqi tentang Islamisasi ilmu merupakan sebuah fenomena yang tidak bisa dielakkan. Ketika membicarakan arti nilai, dalam konteks filosofis, nampaknya kita sangat setuju jika persoalan ini menjadi hal yang dianggap penting oleh peradaban masa depan. Bahkan menyayangkan bahwa penampilan budaya global dan modern cenderung mengabaikan nuansa nilai, sehingga Barat telah berhasil mengalihkan pengetahuan tentang mesin-mesin dan teknologi. Tetapi tidak sukses mengalihkan warisan-warisan moral kebudayaan dan spritual pada generasi.²⁹

Pendidikan Islam dalam konstalasi percaturan masa depan dengan melihat kecederungan dan sekaligus ancaman sebagaimana yang dideskripsikan di atas, seperti diharapkan mampu mengkombinasikan wacana modern dan tradisional dalam bentuk paradigma pendidikan yang dapat memformulasikan kepentingan manusia (humanisasi) dan kebutuhan akan kesejukan Ilahi (teologis). Dengan kata lain konsep pendidikan Islam tidak hanya melihat bahwa pendidikan itu sebagai upaya mencerdaskan (intelektual, kecerdasan), melainkan sejalan dengan konsep Islam tentang manusia dan hakekat ekstensinya.

Dalam pemikiran pendidikan Islam, eksetensi manusia dilihat secara integral dan harmonis. Kesatuan dimensi potensi yang dimiliki manusia, merupakan kekuatan yang ampuh dalam mengantarkan manusia menjadi makhluk yang mulia dan mampu melaksanakan amanat Allah SWT, secara optimal yang nantinya akan dipertanggung

27Muhammad Yasien, *Islamisasi Ilmu Pengetahuan; Studi Perbandingan Faruqi dan Rahman*, dalam *Jurnal Media*, Edisi 22, Tahun IV Juli, Semarang, h. 17.

28Ismail Raji Al-Faruqi, *Islamisasi Ilmu Pengetahuan*, terj. Bandung, Pustaka, 1995, h.xii-xiii.

29H. Harold Titus (ed), *Persoalan-Persoalan Filsafat*, terj. Jakarta, Bulan Bintang, 1984, h. 130.

jawabkan di hadapan-Nya. Untuk itu, posisi dan fungsi pendidikan adalah untuk menstimulir agar semua potensi yang dimiliki peserta didik dapat berkembang secara terpadu semaksimal mungkin, serta mengarahkan agar perkembangan potensi tersebut, senantiasa selaras dengan nilai religius Tuhan.

Untuk mengembangkan konsep ini, pendidikan yang dilaksanakan harus mampu menjalin kerja sama yang harmonis dan integral dengan berbagai pihak yang terkait, baik secara struktural politik maupun struktur sosial, dalam satu visi dan misi. Kesemua unsur dan dimensi yang ada harus senantiasa berjalan beriringan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Kondisi ideal ini, menjadikan pendidikan yang ditawarkan akan lebih menggigit dan lahan kondusif bagi pengembangan manusia seutuhnya.

Sebaliknya, jika pendidikan Islam tidak mampu menjalin kerja sama yang harmonis dan integral, maka ia berfungsi sekedar menara gading di tengah derap globalisasi yang cepat, tidak mustahil pada gilirannya akan tergilas dan akhirnya secara perlahan-lahan mati di telan perubahan.³⁰

Pemikiran yang ditawarkan bersifat dinamis, fleksibel, universal dan mengandung nilai-nilai pembebasan manusia dari atmosfer berfikir teoritis yang kaku dan sakral. Harmonisasi antara pendekatan filosofis dan agama, merupakan langkah yang strategis dalam membantu mengantarkan peserta didik agar mampu membangun sebuah tatanan peradaban yang lebih baik. Melalui pendekatan ini, pemikiran pendidikan Islam akan dapat menemukan arah yang lebih sesuai dan memiliki daya hidup, terutama dalam menentukan kebijaksanaan pendidikan yang universalistik.³¹ Hasim Amir menjelaskan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang idealistik yakni integralistik, humanistik, pragmatik dan berakar budaya yang kuat,³² sehingga pendidikan Islam mampu menyiapkan

30H.M. Irsjad Djuwaeli, *Pembaharuan Pendidikan Islam*, h. 77.

31Samsul Nizar, *Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam*, h. 211.

32Integralistik mengandung komponen-komponen kehidupan yang meliputi, Tuhan, manusia, dan alam pada umumnya sebagai suatu yang integral bagi terwujudnya kehidupan yang baik, serta pendidikan yang manusia sebagai sebuah pribadi jasmani-rohani, intelektual, perasaan dan individu sosial. Pendidikan yang humanistik dapat diharapkan mengembalikan hati manusia ditempatnya yang semula, dengan

kader-kader khalifah, sehingga secara fungsional keberadaannya menjadi pemeran utama terwujudnya tatanan dunia yang *rahmatan lil-'alamin*.

Namun, dalam lintasan sejarah yang panjang, disadari atau tidak, sebagai warisan dari sistem pendidikan priode klasik adalah persoalan sekarang sangat terkait dengan sistem pendidikan yang ditawarkan. Di satu sisi, sistem pendidikan hari ini masih terkesan dikotomi. Sedangkan di sisi lain, orientasi pendidikan masih mengacu pada aspek verbalistik dengan titik tekan pada visi hafalan, bukan pengembangan makna dasar, serta perluasan wawasan intelektual dan moral. Akibatnya, seluruh sistem yang ada di dalamnya terimbas kepada kedangkalan makna dan kemudian kegagalan dalam misinya. Ahmad Syafii Maarif mengatakannya bahwa *out put* pendidikan Islam tak mampu memiliki komitmen spritual dan intelektualisme yang kokoh terhadap nilai esensi ajaran Islam.³³

Sistem pendidikan Islam yang diperlukan saat ini adalah rekonstruksi pendidikan Islam sebagai sebuah paradigma pembebasan, yaitu pendidikan yang mampu menempatkan peserta didik pada posisi sentral dalam setiap perubahan yang terjadi, serta mampu pula mengarahkan dan mengendalikan setiap perubahan itu.

Dengan demikian usaha pembaharuan pendidikan Islam muncul sebagai reaksi bahwa pendidikan Islam tidak mampu menyesuaikan dengan kondisi perkembangan masyarakat, hal ini sebagai konsekuensi logis dari perkembangan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembaharuan pendidikan Islam dapat dilihat dari berbagai

mengembalikan manusia kepada fitrahnya, dengan berfikir, bekemauan dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang bisa mengganti sifat individualistik, egoistik, dengan sifat kasih sayang kepada sesama manusia, sifat ingin mencari kesamaan dan lain sebagainya. Sedangkan pendidikan pragmatik pendidikan yang dapat diharapkan dapat mencetak manusia pragmatik yang sadar akan kebutuhan kebutuhan hidupnya, terhadap masalah-masalah kemanusiaan dan dapat membedakan manusia dari kondisi dan situasi yang tidak manusiawi. Serta pendidikan yang berakar budaya yang kuat dan dapat diharapkan membentuk manusia kepribadian, harga diri, percaya pada diri sendiri, dan membangun peradaban berdasarkan budayanya sendiri yang merupakan warisan monumental dari warisan masa lalu. Akan tetapi bukan orang yang anti kemodernan, yang menolak begitu saja arus transformasi budaya dari luar.

³³Ahmad Syafii Ma'arif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, Bandung, Mizan, 1993, h. 146.

aspek, salah satu aspeknya adalah aspek konseptual.

Untuk mengatasi problematika pendidikan Islam saat ini. Hal ini dapat dilihat agenda pendidikan Islam yang dikemukakan Irsyad Djuawaeli, menurutnya³⁴ pendidikan Islam harus mempunyai paradigma pembelajaran bersifat penguatan dialogis.

Penguatan paradigma dialogis artinya dalam menghadapi era globalisasi seperti sekarang ini pendidikan Islam sering mendapat sorotan tajam dari para praktisi pendidikan. Sorotan itu antara lain mengenai rendahnya mutu pendidikan yang dihubungkan dengan kebutuhan akan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas tinggi. Karena itu, dalam konteks kebutuhan pembaharuan pendidikan sebagai proses penyempurnaan terus dilakukan. Usaha ini berkaitan dengan fenomena meningkatnya jumlah murid/siswa, makin tinggi tingkat kompetisi pendidikan, meningkatnya pengangguran terdidik, dan berbagai persoalan lainnya yang berkaitan dengan kondisi pendidikan.

Jika pada tataran kebijakan, konsep dan pendekatan pendidikan mengalami penyempurnaan, proses pembelajaran pun mengalami perubahan. Sebab kegiatan pendidikan merupakan perjumpaan (interaksi) dan komunikasi timbal balik yang terarah pada pengembangan gagasan, kreativitas, sikap nilai, serta keterampilan, maka proses pembelajaran tidak bisa disederhanakan sekedar kegiatan mendengarkan ceramah. Tetapi proses belajar mengacu kepada bagaimana cara belajar yang memungkinkan siswa berpikir, bersikap dan bertindak menurut ajaran Islam. Artinya dengan interaksi dan komunikasi belajar adalah perjumpaan partisipatif antara guru dengan murid yang ditunjukkan kepada pengembangan gagasan, pikiran, suasana harmonis dan demokratis. Dikatakan perjumpaan partisipatif, karena intraksi dan komunikasi belajar mengajar berlangsung dua arah, sehingga terjadi proses saling mempengaruhi antara subyek belajar (guru dan murid).

Belajar adalah kegiatan yang terorganisasi dan terintegrasi di mana seluruh komponen pendidikan terpusat pada rencana belajar, yakni mengembangkan kreativitas berpikir, bertindak dan

34H. M. Irsyad Djuawaeli, *Pembaruan Kembali Pendidikan Islam*, h. 144-145.

berketerampilan. Karena itu, makin kuat hubungan guru dengan murid dalam proses belajar mengajar, makin dinamis dan kondusif suasana pembelajaran, sehingga menumbuhkan kegairahan bagi murid dan guru dalam mengikuti proses belajar mengajar.

Untuk itu, rencana kegiatan pembelajaran harus sistematis, terarah kepada tujuan berdasarkan tahapan-tahapannya, serta *out put* yang ingin dicapai harus jelas dan terukur berdasarkan waktu yang tersedia. Dalam perencanaan itu pula guru harus menempatkan murid sebagai subyek yang melakukan tindakan ke arah pengembangan berpikir, bertindak dan berkarya nyata. Melalui pembelajaran dialogis akan lahir kesadaran kritis pada diri anak didik, sehingga mereka mampu menanggapi, menilai, membentuk dan mempengaruhi jalannya proses pembelajaran. Dengan demikian kondisi belajar mengajar akan hidup yang gilirannya turut pula memperkuat sikap kepekaan mereka terhadap segala bentuk perkembangan pendidikan dan lingkungan sosialnya. Demikian pula pengalaman hidup akan beragama akan berkembang dinamis dengan memperkaya khazanah intelektual dan kesadaran moralitas pada diri anak didik.

Tokoh pendidikan Islam al-Taumi menuliskan bahwa “pendidikan Islam menekankan pentingnya pengetahuan tentang hubungan dan pertalian paralel di antara unsur-unsur pengalaman pengajaran yang satu dengan lainnya”.³⁵ Hubungan pertalian pembelajaran itu berlaku bagi kegiatan murid dalam membentangkan sayap pengalaman kognitif dan psikomotoriknya antara pengalaman yang lama dengan pengalaman yang baru sehingga terjadi kontinuitas.

Al-Taumi lebih lanjut mengatakan “pengalaman pembelajaran tersebut merupakan pendahuluan untuk menolong peserta didik dalam memperoleh pengalaman masa depan. Dengan begitu akan terbentuk sifat-sifat yang berkelanjutan proses keberlanjutan proses belajar mengajar”.³⁶

Agenda pembaharuan pendidikan Islam harus dapat mengembangkan kemampuan belajar untuk lebih lanjut mengembangkan kemampuan metodologi ilmiah. Karena itu, kepada anak didik harus dikembangkan pemikiran kreatif dan liberal agar

35H. M. Irsyad Djuwaeli, *Pembaruan Kembali Pendidikan Islam*, h. 143.

36H. M. Irsyad Djuwaeli, *Pembaruan Kembali Pendidikan Islam*, h. 143.

mampu membuat pilihan tepat dan akurat serta mengembangkan metode rasional, empiris, *bottom up* dan menjadi.³⁷

Pendidikan Islam harus mampu mencari paradigma baru, salah satu adalah pendidik harus bebas dari masalah komitmen, profesionalisme, serta penghasilan. Dengan kata lain, mereka harus mempunyai komitmen tinggi, dan merasakan pendidikan sebagai panggilan tugas. Kemudian profesionalisme lengkap dengan kepekaan misi dan ketajaman visi serta kecanggihan metodologi, dan guru dan ilmuwan perlu memiliki penhasilan cukup agar benar-benar memiliki tanggapan 30 hari dalam sebulan.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan manusia akan informasi juga makin tinggi. Maka profesionalisme guru merupakan hal yang berarti dalam dunia pendidikan. Kerena itu, makin tinggi kualitas guru, memungkinkan mutu dan produk (*out put*) pendidikan juga tinggi, sehingga mendorong kegairahan pengembangan belajar lebih lanjut bagi anak didik. Tetapi guru yang tidak berkualitas memungkinkan mutu sekolah rendah yang berakibat rendah pula minat dan prestasi belajar siswa. Hal ini pun sangat ditentukan oleh profesionalisme guru, artinya profesionalisme sebuah bidang pekerjaan yang dalam pandangan sebagai suatu pengabdian melalui keahlian tertentu dan menganggap keahlian ini sebagai sesuatu yang harus secara terus menerus diperbaharui dengan memanfaatkan kemajuan-kemajuan yang terdapat dalam ilmu pengetahuan.

Di samping itu, dalam pembelajaran dialogis perlu ditumbuhkan cinta terhadap sesama, artinya interaksi dan komunikasi belajar mengajar harus dibangun di atas fondasi cinta kasih terhadap sesama manusia. Cinta kasih adalah sifat kepada Tuhan (*ar-Rahman* dan *ar-Rahim*) yang juga diberikan pada manusia, sebagai makhluk *theomorfsis*, harus mampu mewujudkan sifat tersebut dalam berbagai aktivitas kehidupan. Melalui pendidikan sifat-sifat luhur itu harus dipelihara, dikembangkan dan diaktualisasikan dalam bentuk yang konkrit.

Melalui sikap cinta kasih ini belajar mengajar akan menumbuhkan

³⁷Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, h. 16

keberanian untuk mengembangkan bakat, minat dan seluruh kemampuan dirinya. Namun sebaliknya, belajar tanpa didasari oleh sifat tersebut akan menumbuhkan rasa takut bagi peserta didik. Karena rasa cinta merupakan sebuah keberanian, bukan ketakutan, maka orang akan merasa iba pada dirinya dan orang lain, sehingga akan membentuk tindakan pengembangan diri melalui belajar, berfikir dan bertindak.

Konsep ini dalam dunia pendidikan memainkan peran penting untuk mendobrak sekat-sekat kehidupan yang membelenggu semangat kemanusiaan. Cinta kasih merupakan potensi untuk memperkuat kebersamaan integritas hidup dalam keberagaman dan perekat kebersatuan dan keterpaduan. Atas dasar itu, maka kegiatan pembelajaran akan dapat berlangsung secara dialogis, antara guru dengan murid. Tanpa rasa cinta terhadap sesamanya, mustahil kegiatan pembelajaran yang komunikatif dan dialogis itu dapat mewujudkan dalam dunia pendidikan.

Agenda pembaharuan pendidikan Islam yang lain adalah kurikulum, merupakan salah satu komponen inti pendidikan, yang kedudukannya tidak seperti kitab fiqh yang sulit dirubah. Pertimbangan masa depan menjadi tuntutan yang harus ada dalam kurikulum. Karena setiap kurikulum dipersiapkan hanya untuk masa tertentu dan tempat tertentu, maka aspek *elastisitas*, integritas dan efektifitas menjadi sangat penting untuk dituangkan ke dalam isi kurikulum. Karena itu, kurikulum tidak boleh didasarkan pada skenario kehidupan masa kini saja. Robert Zais menyebutnya kurikulum “*shaping the individual selves, i.e. determining what men become*”.³⁸ Untuk mencapai hal tersebut, kurikulum berfungsi untuk membentuk peserta didik agar menjadi orang, artinya kurikulum berfungsi untuk membentuk peserta didik agar menjadi seseorang yang diinginkan. Untuk itu, kurikulum harus berorientasi kepada masa depan (*future oriented*), sesuai dengan keadaan kondisi dan situasinya.³⁹ Karena kurikulum yang berorientasi pada masa depan

38S. Robert Zais, *Curriculum: Principles and Foundations*, New York, Harper Z Publishers, 1976, h. 201.

39Moh. Ansyar, 'Kurikulum Dalam Menyongsong Otonomi Pendidikan Di Era Globalisasi, Peluang, Tantangan, dan Arah', dalam *Jurnal Ta'adib*, No. 4, Maret 2001, h.

akan cenderung dapat mengembangkan kreativitas peserta didik sebagai karunia Tuhan yang sangat berharga. Tetapi kurikulum yang berorientasi kepada masa lalu, cenderung menciptakan image diri eksklusif dan anti perubahan.⁴⁰

*Aspek lain yang perlu diusahakan adalah membentuk keterkaitan integratif antara isi kurikulum dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Dalam konteks ini kegiatan pembelajaran senantiasa terkait dengan kehidupan nyata masyarakat, sehingga sekolah berfungsi sebagai wahana bagi perubahan sosial. Aspek ini sangat penting mendapat perhatian dari pengelola dan pengembangan kurikulum, sehingga out put pendidikan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.*⁴¹

Dengan melihat pemikiran pendidikan Islam di atas, baik dari aspek pembelajaran, guru yang profesional maupun pembaharuan kurikulum, pendidikan Islam hendaknya mampu membebaskan seluruh komponen dunia pendidikan baik peserta didik dan pendidik, kurikulum, maupun masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan. Bahkan lebih luas lagi dikatakan H. Syaukani HR, bahwa untuk menemukan titik temu dalam dunia pendidikan seluruh komponen bangsa, yakni pemerintah, pendidik, masyarakat, dan orang tua dalam tanggung jawab pendidikan, bekerja sama menjadi sarana dan media pembelajaran untuk memberikan iklim kondusif tercapainya masyarakat pembelajar.

D. Rekonstruksi Pendidikan Islam Sebagai Upaya ParadigmaPembebasan.

Sistem pendidikan Islam yang ada secara umum terkesan lamban dan kurang produktif dalam membangun sosok pribadi peserta

99-110.

40H. M. Irsyad Djuwaeli, *Pembaruan Kembali Pendidikan Islam*, h. 155.

41Untuk lebih jelasnya dalam Ornestein dan Hunkins yang dikutip Moh. Ansyar, yang mengajukan enam komponen yang dikembangkan kurikulum masa berorientasi masa depan : (1) memiliki akses ke informasi, (2) mampu berpikir kritis, (3) mampu berkomunikasi efektif, (4) memahami lingkungan manusia, (5) memahami individu dan masyarakat, (6) meningkatkan kompetensi berikut: pengetahuan, berpendidikan, bertanggungjawab, peduli pada kesejahteraan sosial. Baca Moh. Ansyar, 'Kurikulum dalam Menyongsong Otonomi Pendidikan di Era Globalisasi, Peluang, Tantangan, dan Arah', dalam *Jurnal Ta'adib*, h. 108.

didik yang berkualitas paripurna. Di lain pihak, dinamika yang ditampilkan pendidikan saat ini telah keropos dari nilai-nilai sakral Ilahiah. Demikian pula sebaliknya pendidikan Islam hanya mampu melahirkan sosok manusia terdidik secara afeksi. Pelaksanaan pendidikan Islam dalam kaitan moralitas dan sikap individual jujur harus dipahami sebagai kesuksesan besar yang tidak perlu diragukan. Akan tetapi jika dihadapkan dengan diskursus kajian modern sistem pendidikan Islam terkesan lesu darah.

Prediksi di atas, nampak merupakan persoalan yang menggejala dan telah merambah hampir seluruh dimensi kehidupan manusia, dan tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini pendidikan Islam hanya melahirkan sosok peserta didik cenderung bersifat dikotomi-parsial. Untuk keluar dari persoalan konsep pendidikan yang dikembangkan seharusnya menjadi pemikiran dan perlu upaya kreatif analitik, untuk mengembangkan rekayasa progresif dalam menata kehidupan di muka bumi ini. Untuk itu, perlu mereformasi pendidikan Islam dari waktu ke waktu tanpa henti. Kita tidak boleh lagi selalu membanggakan keberhasilan pendidikan pada masa lampau (bukan melupakan sejarah) tanpa mengkaji ulang relevansi keberhasilan itu dengan *setting* global masa kini dan masa yang akan datang.⁴²

Usaha pembaharuan dan peningkatan kualitas pendidikan Islam menurut Azyumardi Azra sering bersifat sepotong-potong atau tidak komprehensif dan menyeluruh dan terkesan tambal sulam sehingga sebagian besar sistem pendidikan Islam, belum dikelola secara profesional.⁴³ Bahkan bahwa sistem pendidikan Islam seharusnya senantiasa mengorientasikan diri bagaimana menjawab kebutuhan dan tantangan yang muncul dalam masyarakat sebagai konsekuensi logis dari perubahan. Oleh karena itu, menurut Fazlur Rahman, wacana pendidikan Islam masa depan setidaknya ada tiga hal yang harus diredifinisikan. *Pertama*, tujuan pendidikan Islam yang bersifat defensif dan cenderung berorientasi pada kehidupan akhirat harus segera dirubah. *Kedua*, beban psikologi umat Islam dalam

42Suyanto dan Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*, Yogyakarta, Adicita Karya Nusa, 2000, h. 2.

43Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, h. 59.

menghadapi Barat harus dihilangkan. *Ketiga*, sikap negatif kaum muslimin terhadap pengetahuan Barat semestinya dibuang.⁴⁴

Selanjutnya dalam rangka menemukan jati diri dalam menyongsong masa depan lembaga pendidikan Islam harus menumbuhkan sikap seperti; memahami orientasi, memilah-milah yang terbenar dan terbaik, kemampuan mengelola dan mengendalikan, kemampuan mengembangkan pelajaran, dan kemampuan berijtihad.⁴⁵

Berkaitan dengan itu, Muhammad Iqbal menggambarkan bahwa lembaga pendidikan Islam harus mampu melahirkan peserta didik *mard-e mo'min* sebagai tipe manusia ideal yang mempunyai orientasi spritual, tetapi yang kedua kakinya berpijak di dunia kenyataan. *Mard-e mo'min* adalah manusia yang punya kapasitas tangguh untuk mengarahkan jalan sejarah. Ekstensi *mard-e mo'min* baru punya makna bila mampu membebaskan dirinya dari statisme dan ketergantungan.⁴⁶ Ia mengatakan kualitas utama yang harus dimiliki oleh *mard-e mo'min* keluaran lembaga-lembaga pendidikan Islam harus memiliki dua kualitas; *Pertama*, kemampuan untuk melestarikan dan memelihara kehidupan. Inilah yang diistilahkan dalam bahasa Persi dengan *hefz-e zendgi*. *Kedua*, adalah *taqwim e khudi*, yaitu kemampuan untuk menyatakan dan menegaskan diri dalam kehidupan ini dengan kepala tegak.⁴⁷

44Muhaimin, *Kontroversi Pemikiran Fazlur Rahman, Studi Kritis Pembaharuan Pendidikan Islam*, h. 105-106.

45Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, h. 48-49.

46Ahmad Syafii Maarif, Imron Nasri (Ed), *Islam dan Politik Upaya Membingkai Peradaban*, 143.

47Ungkapan dua kualitas di atas dilukiskan dalam *asrar-e khudi* sebagai berikut :

mendapatkan informasi

Tantangan Pengetahuan dan ilmu

Bukan satu-satunya tujuan.

Kuncup dan kembang

Tidak Mungkin

Menggantikan padang rumput

Pengetahuan haruslah menjadi alat

Untuk memelihara kehidupan

Pengetahuan haruslah menjadi alat

Untuk menyatakan dan menegaskan diri.

Ungkapan *taqwim-e khudi* adalah semakna dengan ungkapan *isbe-e khudi* (penegasan diri). Ini lawan dari doktrin *nafi-e khudi* (peniadaan diri), suatu kualitas yang diagungkan oleh sebagian sufi. Akibat dari doktrin *nafi-e khudi* ini menyebabkan jatuhnya

Dari alur pemikiran Iqbal di atas, dapat dipahami bahwa pendidikan Islam seharusnya mampu melahirkan sosok peserta didik *mard-e mo'min* yang akan membebaskan diri dari sikap defensip intelektual, sehingga dapat berlaku opensif dengan menampilkan karya-karya bermutu tinggi, orisinal dan sejati.

Pelaksanaan pendidikan Islam selama ini, dalam tataran pragmatis sesungguhnya mengalami gap yang cukup besar jika dikaitkan dengan nilai-nilai dasar kefilosofatan pendidikan Islam. Hanya saja dalam dimensi ontologis dan sistemnya, pemikir muslim harus mengalami perubahan mendasar, sebab Islam memandang empiris dan rasio sebagai bagian integral dan eksistensi Ilahi, sehingga tujuan atau aksiologi ilmu tidak bisa dilepaskan dari kehendak-Nya.⁴⁸

Dalam rangka menjembatani gap dari kekeliruan merumuskan konsep pendidikan, al-Faruqi melalui visinya, menentukan paling tidak ada lima agenda mendasar yang disebutnya dengan rencana kerja Islamisasi pengetahuan yang harus dicermati dalam menata paradigma pendidikan. *Pertama*, penguasaan disiplin ilmu modern. *Kedua*, penguasaan khazanah Islami. *Ketiga*, penentuan relevansi Islam bagi masing-masing bidang modern. *Keempat*, pengarahannya aliran pemikiran Islam ke jalan yang mencapai pemenuhan pola rencana Allah.⁴⁹ Apa yang dilakukan al-Faruqi merupakan sebuah upaya menuju model pendidikan terpadu, dimana pembinaan keimanan dan pengetahuan harus bersanding.

Di sisi lain yang perlu diberdayakan dalam pendidikan Islam merupakan sarana pemberdayaan individu dan masyarakat guna menghadapi masa depan. wacana lama praktek pendidikan Islam yang memposisikan siswa sebagai objek yang terkesan pasif adalah salah satu bentuk pengingkaran dari konsep murid dalam diskursus pendidikan Islam. Oleh sebab itu, guru memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi termasuk afeksi, kongnisi dan

citra Islam di tangan umatnya. Baca Ahmad Syafii Maarif, Imron Nasri (Ed), *Islam dan Politik Upaya Membingkai Peradaban*, h. 144.

48Chabib Thoha (Peny), *Reformulasi Filsafat Pendidikan Islam*,h. 49.

49Ismail Raji Al-Faruqi, *Islamisasi ilmu Pengetahuan*, h. 98.

psikomoriknya,⁵⁰ dengan tanggung jawab seperti ini, maka tugas seorang guru bukan lagi *knowledge based*, seperti yang sekarang dilakukan, tetapi lebih bersifat menekankan pada penguasaan secara optimal konsep keilmuan dan perekayasaan yang berdasarkan nilai-nilai etika dan moral. Konsekwensinya, seorang guru tidak lagi menggunakan satu arah yang selama ini dilakukan, melainkan menciptakan suasana kelas yang kondusif sehingga terjadi komunikasi dua arah secara demokratis antara guru dengan murid.⁵¹ Kondisi seperti ini diharapkan dapat menggali potensi kreativitas anak didik.

Dari sisi peserta didik, yang harus dilahirkan dari pendidikan Islam yakni mempunyai paradigma yang kokoh secara spritual, unggul secara intelektual, dan angung secara moral dengan al-Qur'an sebagai acuan yang pertama dan utama.⁵² Peserta didik harus diberi pelajaran al-Qur'an melalui metode yang memungkinkan anak untuk menjadikan al-Qur'an sebagai rujukan dalam segala tindakannya. Untuk itu, ada dua tahap yang harus dilakukan yaitu; memahami makna dari pernyataan al-Qur'an dengan mengkaji situasi dan problem historisnya, dan selanjutnya mengeneralisasikan jawaban spesifik al-Qur'an dan menyatakan sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan moral dan sosial, umum yang dapat disaring dari ayat dengan latar belakang sosial historis.⁵³

Sistem pendidikan yang tawarkan harus dapat harus dapat melepaskan peserta didik dari bentuk kungkungan dalam berbagai bentuk. Sebagai pendidikan pembebasan, pendidikan Islam tidak dapat melepaskan diri dari ketiga domain pendidikan yakni kognitif, afektif dan psikomotorik.⁵⁴ Di samping itu, yang perlu diberdayakan dalam pendidikan Islam adalah penegasan hirarki nilai dan merumuskan kembali konsep-konsep ilmu-ilmu sosial dan alam serta

50Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, h.74-75.

51Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar;Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, h. 39.

52Ahmad Syafi'i Ma'arif, Imron Nasri (Ed), *Islam dan Politik Upaya Membingkai Peradaban*, h. 121-122.

53Fazlur Rahman, *Islam and Modernty ; Transformation of an Intelektual Tradition*, Chicago, University of Chicago Press, 1984, h. 6.

54M. Rusli Karim, *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta*, h. 39.

kemanusiaan.⁵⁵ Kerangka pandang umat Islam tidak perlu lagi terjadi pemisahan antara ilmu agama dengan ilmu umum, tetapi wawasan integratif yang memandang ilmu sebagai satu kesatuan utuh dalam memahami realitas dan rahasia Tuhan adalah opini utama yang harus disosialisasikan kepada kalangan muslim.

Dengan demikian, produk pendidikan Islam sebagai paradigma pembebas seyogyanya mampu menciptakan peserta didik mempunyai daya kritis, dan mempunyai akhlak, menumbuhkan nuansa spritual yang akhirnya mampu mengantisipasi masa depan umat Islam menuju kepada universalisme dan pluralisme. Dengan cara demikian, reformulasi pendidikan Islam tidak akan terserabut dari akar sejarah kegemilangan pendidikan Islam yang sangat konsisten dan kuat memegang prinsip-prinsip moralitas dalam mengkonstruksikan peradaban. Untuk itu, kemampuan metodologis dan rekayasa empiris merupakan salah satu instrumen yang harus dikuasai, dan pada akhirnya pendidikan Islam harus mampu membebaskan peserta didik.

E. Penutup

Berdasarkan pembahasan dari awal sampai akhir, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa filsafat pendidikan yang membebaskan dalam perspektif Islam pernah terjadi dalam dunia pendidikan Islam yakni pada zaman Rasulullah SAW sampai pada zaman keemasan Islam. Namun demikian, setelah kemunduran dunia Islam sampai sekarang praktis virus dikotomi telah terjadi, bahkan filsafat pendidikan pembebasan tidak lagi terjadi dalam dunia pendidikan Islam. Oleh karena itu, pendidikan Islam seharusnya mampu menjadi sarana pembebasan untuk menyiapkan peserta didik untuk terjun dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu, dikotomi ilmu sudah seharusnya ditiadakan dengan memandang bahwa ilmu itu satu semuanya berasal dari Islam. Pendidikan yang membebaskan akan terwujud jika pendidikan Islam mau melakukan reorientasi:

55Syed Ali Ashraf, *Horison Pendidikan Islam*, h. 19.

- a. Memiliki visi, misi, dan orientasi strategis ke depan yang jelas.
- b. Memiliki legitimasi sosial, intelektual dan moral yang kuat.
- c. Bebas pada masyarakat dan meresponi tuntutan zaman
Dikelola dengan manajemen modern yang profesional, rasional, terbuka, akuntabel, humanis, memiliki akses, kerjasama dan kemitraan global.

BAB 2

PARADIGMA PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT

“Jangan pernah menyerah untuk melakukan apa yang telah anda gagas, karena selama anda masih memiliki rasa cinta dan inspirasi untuk merealisasikan maka anda belum berhak merasa salah”.
(Allah Fitzqera)

A. Pendahuluan

Dunia pendidikan, khususnya di negeri ini dilanda kegelisahan. Sistem pendidikan yang telah dibangun selama tiga dasawarsa terakhir ini ternyata belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan dan tantangan nasional dan era globalisasi dewasa ini. Suyanto dan Hasyim, mereka mengatakan bahwa millenium ketiga benar-benar berada pada tingkat persaingan global yang sangat ketat. Artinya siapa saja yang tidak memenuhi persyaratan kualitas alami, akan tersingkir dengan sendirinya.⁵⁶

Karena itu, perlu dilakukan reformasi pendidikan dari waktu ke waktu tanpa henti-hentinya. Namun ketika reformasi digulirkan maka perlu mengingat atau memperhatikan metafora John F.Kennedy yang dikutip oleh Hujair AH, yaitu *Change is way of life. Those who look to the past or present will miss the future.* Metafora ini, menurut Suyanto, pantas diterjemahkan dalam kepentingan reformasi pendidikan kita. Dengan kata lain, melakukan reformasi pendidikan harus berpegang pada tantangan masa depan yang penuh dengan persaingan global. Hal ini semua patut direnungkan untuk melakukan introspeksi:

⁵⁶Suyanto dan Djihar Hasyim, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan Islam di Indonesia Memasuki Melinium III*, Yogyakarta, Adicita Karya Nusa, 2000, h. 2.

apakah bangsa kita sudah yakin memiliki kemampuan yang dituntut dalam persaingan global pada milenium ketiga.⁵⁷

Sekarang ini muncul kekerasan, tawuran antar pelajar, warga masyarakat, aparat dengan warga, siswa terlibat narkoba dan berbagai macam bentuk perilaku kekerasan, sehingga menggambarkan bangsa ini sedang sakit dan membutuhkan dokter spesialis untuk mengobati. Tampaknya ada yang “salah” dari agenda reformasi pendidikan, apakah sistem pendidikan yang salah karena hanya membentuk manusia-manusia yang tidak mampu,⁵⁸ menjadi beban dan brutal atautkah eksekusi dari kebijakan dan praktik pendidikan di masa “rezim Orde Baru”⁵⁹ yang otoriter, sehingga telah melahirkan sistem pendidikan yang tidak mampu melakukan pemberdayaan masyarakat secara efektif.

Para praktisi pendidikan mencoba melakukan reformasi pendidikan melalui Undang-Undang pendidikan Nasional yang lebih menitikberatkan peran pendidikan berbasis masyarakat sebagai komponen yang penting dari sistem pendidikan nasional.⁶⁰

Dengan demikian, tulisan ini akan membahas tentang pendidikan yang berbasis masyarakat. Permasalahannya yang patut dilemparkan dan kemudian dijawab meliputi: 1) Apakah yang dimaksud pendidikan yang berbasis masyarakat, 2) Sejak kapan pendidikan berbasis masyarakat, 3) faktor-faktor apa yang menghambat dan mendukung pendidikan yang berbasis masyarakat.

B. Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM)

Pendidikan berbasis masyarakat merupakan dua variabel yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia pendidikan. Karenanya pendidikan yang berbasis masyarakat adalah pendidikan yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam program pendidikan.

⁵⁷Hujair AH Sanaky, “Reformasi Pendidikan Suatu Keharusan untuk Memasuki Milenium III,” *Jurnal Pendidikan Islam Ta’dib*, Yogyakarta, No. 04, Maret 2001, h. 34.

⁵⁸Soleh Solahuddin, *Urgensi Reformasi Pendidikan Nasional dalam Menuju Indonesia Baru Menggagas Reformasi Total*, (ed), Musa Kazhim, Pustaka Hidayat, 1998, h. 303.

⁵⁹Orde Baru berlangsung selama 32 tahun telah berhasil membuat terlelap dalam tidur panjang.

⁶⁰Suyanto, *Reformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional Badan Peneliti dan Pengembangan, 2001, h. 1

Tamsilnya ialah bila salah seorang anggota keluarga sakit, maka semua ikut merasakan sakit, sekurang-kurangnya prihatin. Begitulah selayaknya yang terjadi dalam dunia pendidikan. Menurut Abuddin Nata, bahwa untuk mewujudkan misi pendidikan seluruh komponen pendidikan seperti kurikulum, guru, metode, sarana, dan prasarana harus dirancang dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat (sosial).⁶¹

Menurut Michael W. Galbraith yang diikuti Zubaidi pendidikan masyarakat adalah proses pendidikan dimana individu (dalam hal ini orang dewasa) menjadi lebih kompeten dalam hal keterampilan sikap dan konsep, sebagai upaya untuk dapat hidup di dalam masyarakat dan mengontrol aspek-aspek local dari masyarakat tersebut lewat partisipasi demokrasi.⁶²

Pendidikan berbasis masyarakat pada dasarnya menekankan bagaimana masyarakat mempunyai peran atau ikut serta memecahkan masalah pendidikan yang ditangani oleh pemerintah. Dengan kata lain, masyarakat ikut dilibatkan dalam merumuskan visi, misi, tujuan program pendidikan.

Sehubungan dengan itu, Indra Djati Sidi, misalnya berpendapat bahwa pendidikan sekolah tidak lagi diartikan secara formal melainkan juga berada di mana-mana, terutama dalam keluarga dan lingkungan masyarakat sekitarnya. Sehingga semua potensi yang ada dalam kehidupan tersebut menjadi sarana dan media pembelajaran. Suasana semacam inilah yang memberikan iklim yang kondusif bagi lahirnya masyarakat belajar (*learning society*).⁶³

Sejalan dengan itu, Al-Jufri B. Syarif juga cukup dilanda kegelisahan karena melihat kenyataan bahwa pembaharuan pendidikan di Indonesia bukan memecahkan masalah fundamental. Selain itu, ia juga resah karena isu pembaharuan pendidikan hampir selalu datang dari pengambil keputusan dan bukan dari lapangan, peserta didik dan guru. Zamroni menilai bahwa proses pendidikan

61 Abuddin Nata, *Paradigma Pendidikan Islam*, Jakarta, Raja Grafindo, 2001, h. 101.

62 Lihat Zubaidi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, h. 132.

63 Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar; Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, Jakarta, Paramadina, 2001, h. 3-9.

yang ada cenderung tidak demokratis dan ini akan menghasilkan lulusan yang tidak memiliki kemandirian dan kreativitas.⁶⁴

Menyangkut relevansi pendidikan, Suyanto mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia juga masih mengalami masalah dalam hal relevansinya dengan tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat.⁶⁵ Prof. Winarno mengatakan bahwa dulu pemerintah hanya meminta partisipasi masyarakat terhadap pendidikan, tetapi tidak pernah mengatakan kepada masyarakat bahwa ini pendidikanmu. Tidak heran jika kemudian masyarakat kurang peduli dengan bidang pendidikan.

Padahal untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional, tidak bisa tidak, pengelola pendidikan harus diserahkan dan dikembalikan kepada masyarakat.⁶⁶ Pengembalian pengelolaan pendidikan kepada masyarakat menuntut prasyaratan ekstensial, yaitu lahirnya masyarakat madani Indonesia.⁶⁷ Untuk itu, reformasi pendidikan nasional harus didasarkan pada paradigma-paradigma baru yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat madani yang demokratis.⁶⁸

Keharusan masyarakat terlibat dalam masalah-masalah pendidikan tersebut sebenarnya sudah menjadi peraturan dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Bab I, ketentuan umum, pasal I butir 10 misalnya dinyatakan bahwa sumber daya pendidikan adalah dukungan dan penunjang pelaksana pendidikan yang terwujud sebagai tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia yang digunakan serta diberdayakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan

64Aljufri B. Syarif, *Pendidikan Indonesia;Aspek yang Terlupakan*. Zamroni, Menuju Praktek Pendidikan Egaliter Demokratis, Jakarta, IKIP Muhammadiyah Press, 1996, h. 15. 177.

65Vietnam yang relatif baru berkembang justru lebih baik yaitu urutan 108. Cina 99, Srilanka 84, Fhilipina 77, Thailand 76, Malaysia 61, dan Singapura 24. Sedangkan negara yang baik sistem pendidikannya adalah Kanada, berada diperingkat satu dunia. Baca *Media Indonesia*, “Pendidikan dan Kebudayaan”, 5 Okt, 2001.

66*Media Indoensia*, “Privatisasi Sekolah Era Otonomi”, 22 Mei 2002. Baca juga *Kompas* 17 April 2002.

67*Media Indoensia*, “Privatisasi Sekolah Era Otonomi”, 22 Mei 2002 h. 14.

68H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*, Magelang, Tera Indonesia, 1998, h. 19.

pemerintah baik sendiri maupun secara bersama-sama.⁶⁹

Namun, kenyataannya akuntabilitas sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat masih sangat rendah. Karena terlalu kuatnya dominasi pemerintah terhadap penyelenggaraan sekolah secara sistematis telah memadamkan akuntabilitas sekolah kepada masyarakat. Kedudukan masyarakat dan orang tua hanya sebagai kosumen pendidikan dengan segala kepentingan diabaikan. Kepala sekolah yang selama ini telah dibina oleh pemerintah menjadi birokrat-birokrat kecil yang lebih takut kehilangan jabatan daripada kegagalan mencapai harapan dan memenuhi aspirasi masyarakat. Hal ini diperburuk oleh iklim birokrasi pemerintahan yang tidak kondusif untuk berprestasi.⁷⁰

Oleh karena itu, para pemikir menilai bahwa pendidikan di Indonesia ternyata dapat dinilai cenderung menghasilkan pendidikan ke arah sistem yang bersifat birokrasi sentralistik. Berbagai kebijakan pendidikan yang ditetapkan pemerintah pusat cenderung sebagai “Sabda Padita Ratu”, yang mesti dilaksanakan di daerah-daerah.⁷¹ Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kemestian penyeragaman pakaian sekolah, penyeragaman kurikulum, menunjukkan sistem pendidikan tersebut menjadikan “keseragaman” sebagai tujuan.⁷² Hasil kebijakan yang demikian akan menghasilkan manusia-manusia yang selalu dalam bayang-bayang ketakutan dan khawatir sehingga harus patut dan tunduk pada perintah yang ada, betapapun anehnya perintah tersebut.

Syamsul Arifin dan Ahmad Barizi dalam sebuah bukunya *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi* memberikan deskripsi tentang pentingnya demokrasi dalam dunia pendidikan dengan harus mengedepankan kebebasan dan keadilan yang bisa dinikmati bersama tanpa harus diskriminasi. Karenanya

69Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pelaksanaannya, Jakarta, Sinar Grafika 1993 Cet IV, h. 3.

70Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarkat Belajar; Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, h. 31.

71Suwito, *Pendidikan Yang Memberdayakan*, dalam Orasi Pengukuhan sebagai Guru Besar, 3 Januari 2002.

72Darmaningtyas, *Pendidikan pada dan setelah Krisis Evaluasi di Masa Krisis*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999, h, 125-129.

tanpa demokrasi akan mengakibatkan terhambatnya proses pendidikan itu sendiri.⁷³

Demokrasi pendidikan adalah demokrasi yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang tanpa membedakan ras (suku) kepercayaan, warna, dan status sosial.⁷⁴ Dan tujuan pendidikan tidak bisa dipisahkan dengan kepentingan masyarakat (sosial) inilah pendidikan yang berbasis masyarakat.

Pendidikan Islam mengakui secara tegas bahwa peranan masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan intelektual dan kepribadian individu, sebab keberadaan masyarakat merupakan laboratorium dan sumber makro yang penuh bagi memperkaya pelaksanaan proses pendidikan.⁷⁵ Untuk itu, pendidikan harus mampu mengakumulasi seluruh potensi dan nilai kebudayaan suatu masyarakat dan sistem pendidikan. Dengan konsep dan upaya kondusif ini, baik masyarakat maupun lembaga pendidikan, akan merasa saling memiliki dan bertanggung jawab atas berhasil atau tidaknya proses pendidikan, dalam mensosialisasikan nilai-nilai kebudayaan dan kemanusiaan.

Pendidikan dalam pemahaman Islami, bukan suatu yang terpisah dari masyarakat. Bahkan pokok-pokok dan pelaksanaannya, selamanya mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Ini berarti bagian dari proses memberi dan menerima.⁷⁶

Konseppendidikanberbasismasyarakatpada dasarnya bagaimana menggali potensi-potensi yang positif untuk diintegrasikan dalam pelaksanaan pendidikan. Dengan kata lain, akan lahir komunitas pendidikan (*Education Community*) yang akan menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan gagasan-gagasan mengenai jenis sekolah yang diinginkan oleh masyarakat dan bangsa.⁷⁷

73Syamsul Arifin dan Ahmad Barizi, *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi*, Malang, Universitas Muhammadiyah, 2001, h. 90.

74Syamsul Arifin dan Ahmad Barizi, *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi*, h. 91.

75Samsul Nisar, *Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam*, Jakarta, Media Pratama, 2001, h. 131

76Muhammad Jamil Khayya, *al-Nazriyah al-Tarbawiyah fi al-Islami*, Makalah al-Safa, 1989, h. 136.

77Sindu Nata, (ed), *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan demokrasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*, Yogyakarta, Kanisius, 2000, h.29.

Sketsa tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep pendidikan yang berbasis masyarakat merupakan konsep yang menyatakan bahwa pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis. Seluruh komponen baik kurikulum, metode, guru, anak didik, sarana dan prasarana, harus dirancang untuk kepentingan masyarakat. Bahkan seluruh komponen bangsa yakni pemerintah, sekolah, masyarakat saling bekerja sama untuk mencapai masyarakat belajar (*Learning Society*).

Landasan hukum PBM adalah UU Sisdiknas No. 20/2003 pasal 55 tentang pendidikan berbasis masyarakat, yang memberikan penjelasan sebagai berikut :

- a. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan social, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- b. Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- c. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat brsumber dari penyelenggaraan, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku.
- d. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemrintah dan/pemerintah daerah.
- e. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pendidikan berbasis masyarakat sebenarnya merupakan pengejawantahan dari prinsip relevansi, yaitu bagaimana materi program pendidikan disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat ikut serta

dalam dunia pendidikan. PBM merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, implementasi, monitoring, serta evaluasi program kerja sekolah. Upaya melibatkan masyarakat dilakukan dengan cara meningkatkan peran serta orang tua dan masyarakat pada level operasional melalui komite (dewan sekolah). Komite ini terdiri dari kepala sekolah, guru senior, wakil orang tua, tokoh masyarakat dan perwakilan siswa.⁷⁸

C. Sejarah Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pendidikan berbasis masyarakat secara historis sudah dilaksanakan dengan menjadikan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai motivator bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Banyak ilmu yang lahir dan berkembang karena adanya al-Qur'an sebagai motivator. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya lembaga-lembaga pendidikan Islam hasil inisiatif masyarakat dan muncul dalam berbagai model. Stanton misalnya menyatakan bahwa lembaga-lembaga tersebut antara lain *Kuttab, Mesjid, Madrasah*.⁷⁹ Hasan Abd'al juga melakukan penelitian khusus mengenai institusi-institusi pendidikan Islam abad keempat hijriyah, menyebut bahwa institusi tersebut meliputi: *al-Kuttab, al-Mesjid, Hawanit, al-Maraqim, Manazil al-Ulama, al-Salun, al-Adabiyah, Duat al-Kuttub wa Daur al-'Ilm al-Madrasah*.⁸⁰

Lembaga pendidikan kuttab suatu pendidikan dasar yang diberikan sebelum mereka masuk ke lembaga mesjid. Menurut Izzuddin Abbas yang disadur Hasan Langgulung ada dua macam kuttab: *pertama*, untuk anak-anak orang kaya yang membayar iuran pendidikan. *Kedua*, untuk anak-anak orang miskin yang disebut kuttab *al-Sabil* (pondok orang dalam perjalanan). Di sini pendidikan cuma-cuma bertujuan menyiapkan murid-murid pada lingkaran (halaqah) mesjid-mesjid atau berbagai sekolah yang didirikan pada

78Kumanana dan JM.Muslimin, (ed), *Paradigma Baru Pendidikan Restropeksi dan Proyeksi Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, IAIN Indonesia Social Equity Project (IISEP), 2008, h. 314.

79Charles Michael Stanton, *Pendidikan Tinggi dalam Islam*, Jakarta, Logos, 1994, Cet I, h. 14-15.

80Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta, Logos, 1999, h. 53.

zaman Abbasiyah.⁸¹

Mesjid sebagai lembaga pendidikan Islam merupakan lembaga pokok pada zaman Nabi SAW dan Khulafa al-Rasyidin. Ketika ilmu-ilmu asing memasuki masyarakat Islam, pusat pengkajiannya di mesjid dan harus dipelajari bersama-sama dengan ilmu agama.⁸² Mesjid di samping, sebagai fungsi utamanya untuk tempat ibadah, juga menjadi sentral kegiatan masyarakat muslim. Masyarakat muslim pada masa-masa awal telah memperluas fungsi mesjid. Mereka menjadikan mesjid sebagai tempat untuk beribadah, lembaga pengajaran, rumah pengadilan, aula pertemuan bagi tentara, rumah penyambutan para duta, dan yang paling umum dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan. Di Bhagdad pada masa itu, terdapat beribu-beribu mesjid diberbagai tempat. Para penguasa seperti Adud al-Daulah (w. 965), al-Sahib bin 'Abbad (w. 995), dan Da'ilil al-Sijitani (w. 9691) merupakan pelopor yang mendukung perkembangan mesjid dan pendidikan,⁸³ atau dengan istilah Nicholas Hans, mesjid dianggap sebagai universitas Islam pertama. Kemajuan ini dicapai oleh masyarakat Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Lembaga-lembaga pendidikan lain mulai yang dalam dunia Islam adalah *Dar al-Hikmah*,⁸⁴ yang tersiar di berbagai dunia Islam, seperti Meusil, Cairo, Fustat, dan Hilb.

Di samping lembaga-lembaga tersebut di atas, muncul juga lembaga-lembaga pendidikan lain yang tidak kalah pentingnya dari lembaga-lembaga tersebut, yang diwujudkan oleh suasana kehidupan zaman Abbasiyah, begitu juga dengan kemajuan ilmiah, kemakmuran ekonomi, yang disaksikan di zaman ini, seperti istana-istana, beberapa perpustakaan, dan lain-lain.

Lembaga-lembaga tersebut tidak mengenal tingkatan-tingkatan pendidikan tertentu. Tidak ada tingkatan rendah atau permulaan, menengah dan lain-lain, tetapi hanya mengenal satu tingkatan saja yang dimulai dengan kuttab atau guru-guru khusus dan berakhir

81Hasan Langgung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, Jakarta, al-Husna Zikra, 2000, Cet I, h. 123.

82A.Hasyim, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1995, h. 146.

83Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, h. 57.

84Dar al-Hikmah didirikan oleh Harun al-Rasyid dan sempurnakan oleh khalifah al-Makmun.

di diskusi berseri (*halaqah*) di mesjid. Juga tidak ada kurikulum khusus yang diikuti oleh seluruh umat Islam. Kadang-kadang kuttub sekedar mengajarkan membaca dan menulis al-Qur'an, kadang juga mengajarkan bahasa, nahwu dan *aurad*. Setiap guru mempunyai metode tersendiri. Di mesjid-mesjid besar terdapat beberapa halaqah untuk berbagai pelajaran. Para siswa bebas mengikuti pelajaran. Para siswa bebas mengikuti dan memilih halaqah dan guru yang disukai. Setelah tamat pada seorang guru, ia berpindah ke guru lain. Juga tidak ada ijazah atau gelar ilmiah yang diberi kepada orang yang menamatkan pelajaran sesudah ujian. Akan tetapi ada ujian-ujian pendapat atau pemikiran sekitar yang dipelajari itu, dari guru-guru dan ulama. Kegiatan ini diistilahkan *Munadlarah*.⁸⁵ Di masa ini pula sebagai zaman keemasan dunia Islam, berkembang ilmu pengetahuan dan lahirnya intelektual dalam berbagai bidang.

Madrasah merupakan sistem pendidikan Islam dan merupakan era baru bagi institusi pendidikan Islam. Madrasah (sekolah) sudah merupakan salah satu organisasi resmi negara, sehingga dengan berdirinya sistem madrasah, maka madrasah berpisah dengan mesjid.⁸⁶

Ada tiga teori yang menimbulkan munculnya madrasah. *Pertama*, karena kegiatan pendidikan di mesjid dianggap telah mengganggu fungsi utama lembaga itu sebagai tempat ibadah. *Kedua*, karena berkembangnya kebutuhan ilmiah sebagai akibat dari berkembangnya ilmu pengetahuan. *Ketiga*, karena timbulnya orientasi baru dalam penyelenggaraan pendidikan.⁸⁷

Pembentukan madrasah telah dimulai pada awal abad ke-9, sekolah tinggi yang sebenarnya ternyata baru pertama kali didirikan di Naisabur Iran, pada awal abad ke-11.⁸⁸ Namun yang paling terkenal yang hingga saat ini menjadi model sistem pendidikan madrasah keseluruhan, dibangun pada tahun 1057 oleh Nizam al-

85Munadharah adalah forum perdebatan umum untuk menguji kekuatan teori dan pandangan ilmuwan. Affandi Mochtar, *Membedah Diskursus Pendidikan Islam*, Jakarta, Kalimah, 2001, h. 90-91.

86Hasan Langgulong, *Asas-asas Pendidikan Islam*, h. 126.

87Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, h. 55-56.

88Ahmad Djaunari, *Pendidikan dan Modernisasi di Dunia Islam*, Surabaya, al-Ikhlash, 2000, h. 80.

Mulk di Bahgdag, dikenal sebagai madrasah Nizamiyah. Karena kemasyhurannya madrasah ini meluas dan merangsang pertumbuhan institusi yang sama. Ensiklopedi Islam menuturkan: “Antusias dan energi Nizam al-Mulk di memberi arti awal periode baru kejayaan madrasah, Sultan dan kaum pria yang berkedudukan tinggi kini tertarik pada madrasah dan tipe yang dikembangkan secara perlahan-lahan oleh Nizam al-Mulk ini kemudian menjadi lebih lazim dengan model pendidikan memasukkan siswa ke asrama.⁸⁹

Selama berabad-abad beberapa universitas Islam memimpin kegiatan intelektual dan ilmu pengetahuan yang menghasilkan prestasi terbaik muslim klasik. Madrasah atau al-Jami’ah dibuka untuk umum dan menjadi pusat pendidikan internasional. Lebih dari itu, pengawasan tertinggi madrasah dipegang oleh ulama dan cendekiawan muslim yang memberikan lingkungan belajar secara individual dan personal. Inilah desentralisasi dalam dunia pendidikan.⁹⁰

Lahirnya lembaga-lembaga pendidikan yang terdiri dari berbagai model ini membuktikan bahwa secara historis pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan umat Islam sudah mempraktekannya. Suasana inilah yang menyebabkan umat Islam sebagai pelopor ilmu pengetahuan dan berbagai bidang lainnya.

Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pendidikan juga dapat dijumpai pada masyarakat di Indonesia, sebelum pemerintah mendirikan sekolah atau madrasah, umat Islam telah melahirkan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti *Surau*, *Rangkang*, *Langgar*, *Pesantren*, *Madrasah*, dan *Sekolah*. Institusi-institusi tersebut lahir dari peran aktif masyarakat dalam bidang pendidikan.⁹¹ Dari lembaga-lembaga inilah, lahir tokoh-tokoh pendidikan Islam seperti Hamka, KH. Abdullah Ahmad, KH. Hasyim Asy’ari, KH Imam Zarkasyi dan beberapa tokoh lainnya.⁹²

⁸⁹Ensiklopedi Islam, Vol.4, Leiden, E.J. Brill, 1913-2938, III, h. 354.

⁹⁰Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta, Logos, 2000, h. 24-25.

⁹¹Abuddin Nata, (ed), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam*, Jakarta, Raja Grafindo, 2002, Cet I, h. 6-100.

⁹²Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Hidakarya Agung, 1996,

Pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam di atas, dalam berbagai bentuk dan coraknya, merupakan upaya pendidikan berbasis masyarakat secara terbuka, sampai muncul pesantren, lembaga pendidikan Indonesia cenderung eksklusif. Bahkan pada zaman penjajahan, sekolah-sekolah pada mulanya didirikan untuk kalangan bangsawan dan kaum penjajah. Baru setelah adanya desakan gerakan pencerahan dan perjuangan kalangan terdidik Indonesia, pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan pendirian sekolah-sekolah rakyat yang lebih terbuka. Hal ini berbeda dengan pendirian madrasah dan sekolah-sekolah Islam semula bersifat terbuka bagi masyarakat luas.⁹³

Uraian singkat di atas, pada dasarnya menjelaskan bahwa ekstensi dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia berasal dari proses interaksi misi Islam dengan tiga kondisi: *Pertama*, pergumulan dengan budaya lokal pra Islam melahirkan pesantren. *Kedua*, interaksi misi pendidikan Islam dengan tradisi Timur Tengah modern telah menghasilkan lembaga madrasah. *Ketiga*, interaksi Islam dengan politik Hindia Belanda telah membuatkan sekolah Islam.⁹⁴

Sejarah telah menuliskan bahwa ternyata masyarakat telah mampu mendirikan, mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Di samping itu, lembaga yang lahir secara mandiri telah melahirkan tokoh-tokoh pendidikan. Hal ini sebenarnya menjadi renungan di tengah arus reformasi, di mana kemampuan pemerintah amat terbatas, maka konsep pendidikan berbasis masyarakat merupakan alternatif yang perlu mendapat dukungan.

D. Hambatan dan Dukungan

1. Hambatan

Hambatan yang diperkirakan akan muncul berkenaan dengan pendidikan berbasis masyarakat ini paling kurang ada tiga. *Pertama*, secara finansial dunia pendidikan pada umumnya sudah terbiasa memperoleh subsidi dari pemerintah. Dengan kata lain,

⁹³Karel A. Steenbrink, *Madrasah, dan Sekolah*, Jakarta, LP3ES, 1986.

⁹⁴Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Logos Wacana, 2001, h. 8.

para penyelenggara pendidikan pada umumnya sudah terbiasa dimanjakan pada masa Orde Baru. *Kedua*, secara umum ekonomi masyarakat berada di bawah garis kemiskinan, sebagai akibat dari sulitnya lapangan pekerjaan, tidak mempunya untuk berkompetisi serta kurangnya kemampuan untuk memperbaiki ekonominya. Dalam kondisi demikian, agak sulit masyarakat untuk mempunyai peran ekonomi dalam mendukung konsep pendidikan yang berbasis pada masyarakat. *Ketiga*, secara umum penyelenggaraan pendidikan kurang memiliki kemampuan, kamauan, keterampilan, dan strategi dalam menggali dana dari masyarakat, sebagai akibat kurangnya pengalaman melobi orang-orang yang memiliki modal atau pihak-pihak para pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan.⁹⁵

2. Dukungan

Pendidikan berbasis masyarakat juga mempunyai faktor pendukung. *Pertama*, motivasi keagamaan. Masyarakat Indonesia yang umumnya beragama Islam, meyakini bahwa setiap orang yang memiliki ilmu pengetahuan wajib mengajarkan kepada orang lain. *Kedua*, dari sekian masyarakat Indonesia yang beragama Islam, sudah banyak tergolong mampu dan berkecukupan dengan berbagai keahlian dan profesi yang beragam. Di antara mereka ada yang tergolong sebagai pengusaha besar yang berhasil, pejabat pemerintah yang memiliki kedudukan yang tinggi dan strategis.

Mereka memiliki fasilitas yang melebihi kebutuhan hidupnya, seperti rumah, tanah, kendaraan, pabrik, lembaga pendidikan dan sebagainya. Kondisi yang dimiliki umat Islam jika didayagunakan dan diintegrasikan ke dalam dunia pendidikan akan dapat membantu memperlancar pelaksanaan konsep pendidikan yang berbasis masyarakat. *Ketiga*, di kalangan masyarakat Islam sendiri saat ini sudah banyak yang berhasil menyelenggarakan pendidikan secara mandiri dengan hasil yang dapat dibanggakan. Banyak lembaga pendidikan Islam swasta yang cukup memiliki kredibilitas. Keadaan yang demikian itu dapat mendukung pelaksanaan konsep pendidikan yang berbasis masyarakat, manakala mereka mau membantu lembaga

95Abuddin Nata, *Pendidikan Berbasis Masyarakat dalam Perspektif Islam*, dalam Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual "Jauhar", Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2001, Vol.2, No.2, h. 194.

pendidikan Islam swasta yang belum maju.⁹⁶

E. Penutup

Berdasarkan uraian dari lembaran awal sampai akhir, penulis dapat memberi kesimpulan bahwa konsep pendidikan berbasis masyarakat adalah konsep yang menggali seluruh potensi yang ada dalam masyarakat serta mengikut sertakan masyarakat dalam masalah-masalah pendidikan. Konsep ini mengharuskan adanya lembaga yang bersifat demokrasi, di mana seluruh komponen pendidikan harus mempertimbangkan kepentingan dan tuntutan masyarakat (sosial), agar tercipta masyarakat belajar (*learning society*). Secara historis pendidikan berbasis masyarakat sudah dipraktekkan umat Islam pada zaman klasik, termasuk umat Islam di Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang merupakan hasil dari usaha masyarakat sendiri. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut telah berhasil mendorong peran masyarakat, sehingga menghasilkan lulusan yang mempunyai kredibilitas yang bisa diperhitungkan. Pelaksanaan konsep pendidikan berbasis masyarakat sebenarnya sudah tersedia pada masyarakat. Tinggal kerjasama antar masyarakat itu sendiri dan lembaga-lembaga yang berhasil membantu lembaga pendidikan yang tertinggal serta dibarengi dengan keteguhan untuk mewujudkan konsep pendidikan yang berbasis masyarakat. Terwujudnya konsep pendidikan berbasis masyarakat tersebut merupakan usaha yang mulia dan harus menjadi gerakan nasional, bahkan konsep inipun menjadi tujuan agenda reformasi.

⁹⁶Abuddin Nata, *Pendidikan Berbasis Masyarakat dalam Perspektif Islam*, h. 196.

BAB 3

POTRET PESERTA DIDIK PADA ZAMAN KEJAYAAN ISLAM

A. Pendahuluan

Dalam dunia pendidikan peserta didik adalah salah satu dari komponen pendidikan yang selalu tertindas, bahkan kurang diberdayakan potensinya. Sentral dari terlaksananya dan tercapainya tujuan pendidikan salah satunya adalah memberdayakan peserta didik.

Menyinggung dunia pendidikan, maka mengingatkan kita pada buku yang ditulis oleh Syaukani; *Titik temu dalam Dunia Pendidikan*, yang antara lain menjelaskan bahwa semua aspek dalam komponen pendidikan hendaknya menjadi sarana dan media pembelajaran untuk mencapai masyarakat pembelajar (*learner society*).⁹⁷

Salah satu komponen pendidikan adalah peserta didik, yang turut menentukan tercapainya tujuan pendidikan. Dengan demikian, dilihat dari segi kedudukannya, peserta didik adalah makhluk yang sedang dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Karena itu, mereka memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuannya.⁹⁸

Dalam pandangan yang lebih modern, peserta didik tidak hanya dianggap sebagai obyek atau sasaran pendidikan sebagaimana disebutkan di atas, melainkan juga harus diperlakukan sebagai subyek

97 Syaukani, HR, *Titik Temu dalam Dunia Pendidikan*, Jakarta, Nuansa Madani, 2002.

98H.M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1991, h. 144.

pendidikan. Hal ini antara lain dilakukan dengan cara melibatkan mereka dalam memecahkan masalah dalam proses belajar.⁹⁹ Atau dengan kata lain terjadinya hubungan dialogis antara peserta didik dengan guru sebagai inti pendidikan,¹⁰⁰ yang akan melahirkan peserta didik yang kritis.

Pendidikan kritis pada dasarnya mempersentasikan gugatan terhadap dunia pendidikan, yang dinilai telah gagal melahirkan peserta didik yang kompeten baik dari segi keilmuan, keahlian, keterampilan, baik untuk kehidupannya maupun kaitannya dengan kehidupan kemasyarakatan lebih luas. Singkatnya, pendidikan sekarang gagal membebaskan peserta didik dari keterbelakangan, kemiskinan, serta terjadinya ketertindasan bagi peserta didik.¹⁰¹

Dengan demikian, secara historis tidak dapat dipungkiri oleh agenda sejarah bahwa pendidikan Islam pernah melahirkan peserta didik yang berkompeten dari segi keilmuan dan keahlian maupun profesionalisme dalam bidangnya. Uraian berikut akan membahas bagaimana potret peserta didik pada zaman keemasan Islam.

Adapun pendekatan yang dipakai adalah pendekatan historis yaitu mengumpulkan buku-buku sejarah pendidikan Islam, dan sumber-sumber yang otoritatif.

B. Peserta Didik Pada Zaman Keemasan Islam

Di lihat dari segi sejarah atau periodenya, pendidikan Islam mencakup: *pertama*, periode pembinaan yang berlangsung pada zaman Nabi Muhammad SAW. Masa ini berlangsung sejak Nabi Muhammad menerima wahyu dan pengangkatan sebagai rasul, sampai dengan lengkap dan sempurnanya ajaran Islam menjadi warisan budaya umat Islam.

Kedua, Periode pertumbuhan pendidikan Islam yang berlangsung sejak zaman Nabi Muhammad wafat sampai akhir Bani Umayyah

99Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997, Cet III, h. 79.

100Baca Willam A. Smith, *Conscientizacao, Tujuan Pendidikan Paulo Freire*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001, h. 116.

101Azyumardi Azra, "Pendidikan Kritis, Demokrasi, dan *Civil Society*," dalam buku Achmad Syahid dan Abas Al-Jauhari, (editor), *Bahasa, Pendidikan, dan Agama*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2002, h. 199.

yang diwarnai dengan perkembangan ilmu-ilmu naqliyah.

Ketiga, Periode kejayaan pendidikan Islam, yang berlangsung sejak permulaan Daulat Abbasiyah sampai dengan jatuhnya Baghdad, yang diwarnai oleh perkembangan ilmu aqlia dan timbulnya madrasah, serta memuncaknya perkembangan kebudayaan Islam.¹⁰²

Pada masa kejayaan pendidikan Islam telah banyak melahirkan peserta didik yang menjadi tokoh-tokoh pendidikan dan banyak memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan. Yang antara lain seperti al-Jahiz (160-255 H/775-868 M) yang mengarang buku yang paling terkenal adalah *bayan wa al-Tabyin, al-Hayawan, al-Bukhala, al-Taj fi Akhlaq al-Muluk*, dan *Risalah al-Mu'allimin*.

Menurut Ahmad Syalabi sebagaimana mengatakan bahwa buku-buku al-Jahiz adalah ensiklopedi penuh dengan segala macam ilmu pengetahuan dalam berbagai segi khusus membicarakan mengenai pendidikan.¹⁰³ Selain itu, peserta didik yang berhasil menjadi pendidik adalah al-Kindi (w. 259 H./873 M.), al-Farabi (w.339 H./951 M.), Ibnu Sina (w. 432 H./1027 M.), al-Ghazali (w. 505 H./ 1111 M.), Ibnu Rusyd (w. 599 H./1198 M.), dan akhirnya Ibnu Khaldun (w. 808 H./1406).

Akhirnya dapat dikatakan, bahwa keadaan yang menyebabkan munculnya peserta didik yang menjadi tokoh dalam pendidikan Islam karena menjadikan Al-Qur'an sebagai motivator pengembangan ilmu pengetahuan dan mendapat dukungan para khalifah dengan berbagai penghargaan yang sangat tinggi kepada para ilmuwan atau peserta didik. Di antaranya mereka memberi imbalan berupa emas seberat kertas hasil terjemahan.¹⁰⁴

Nicholson dalam bukunya *History Of The Arab* yang dikutip oleh Fachrudin, menjelaskan bahwa Abbasiyah mempunyai kesan besar sekali dalam menciptakan kemajuan ilmu pengetahuan, hingga kelihatan semua orang dari khalifah sampai rakyat jelata mempunyai kedudukan, yang mana mereka serentak menjadi penuntut ilmu,¹⁰⁵ sehingga peradaban Islam menampakkan karakteristiknya

102Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta, Raja Grafindo, 2000, h. 293-294

103Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, Jakarta, Al-Husna Zikra, 2000, h. 138.

104*Bayt al-Hikmeh* Bagdad merupakan salah satu pusat kegiatan penerjemah ilmu-ilmu dari bahasa Yunani dan Suryani ke dalam Bahasa Arab.

105Fuad Mohd Fachruddin, *Perkembangan Kebudayaan Islam*, Jakarta, Bulan Bintang,

dalam konfigurasinya yang Islami dalam rentangnya yang luas.¹⁰⁶

Oleh sebab itu, jika kita perhatikan karya para tokoh-tokoh pendidikan Islam seperti Ibnu Sahnun dengan kitabnya *Adab al-Mu'alimin*; Ibnu Miskawaih dengan *Tahzibul al-Akhlaq wa Tathir al-A'araq*,¹⁰⁷ (menghalusi akhlak dan membersihkan Keturunan); Burhanuddin al-Zanuji, dengan kitabnya *Ta'lim al-Muta'alim, Tariq al-Ta'allumi* (mengajar pelajar dan cara belajar).

Karya-karya para tokoh-tokoh pendidikan zaman keemasan Islam di atas, maka hampir-hampir yang menjadi fokus kajian adalah bagaimana memberdayakan peserta didik. Hal ini menjadi prinsip ideal pendidikan Islam adalah pendidikan yang berdikari, bergantung pada diri sendiri, kebebasan dan demokrasi dalam pendidikan, memperlakukan peserta didik sesuai dengan akalunya, bergaul dengan baik kepada mereka, serta mengajar mereka berakhlak.¹⁰⁸

Dengan bahasa lain, pada masa keemasan Islam peserta didik diberi kebebasan untuk belajar dengan tidak mengenal dikotomi ilmu pengetahuan. Untuk tercapainya perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman keemasan Islam, pola pikir rasional ditumbuh kembangkan kepada peserta didik,¹⁰⁹ sehingga mampu menghasilkan karya-karya di berbagai bidang ilmu pengetahuan.¹¹⁰

Pendidikan Islam sesudah abad 12 dirasakan kurang memberdayakan terhadap banyak hal. Yang dipelajari ilmu tafsir, fiqh dan semacamnya. Bahkan nyaris para peserta didik cenderung dipaksa untuk memahami teks tafsir dan bukannya didorong untuk secara kreatif mengembangkan makna ayat al-Qur'an.¹¹¹ Para siswa tidak pernah didorong untuk melahirkan ulumul al-Qur'an Baru.

1985, h. 6.

106Djamaluddin dan Abdullah Aly, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 1998, h. 26.

107Suwito, *Konsep Pendidikan Ahklak Menurut Ibn Miskawaih*, Disertasi, Pascasarjana IAIN, Jakarta, 1995.

108Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, h. 145.

109Harun Nasution, *Islam Rasional, Gagasan dan pemikirannya*, Bandung, Mizan, 1995, h. 146.

110Di bidang ilmu pengetahuan dikenal nama Ibn Haitsm, Ibn Hayyan, al-Kharwarzimi dan al-Razi.

111Suwito dalam upacara pengukuhan sebagai Guru Besar pada tanggal 3 Januari 2002 yang berjudul *Pendidikan Yang Membebaskan*, h. 20

Yang ada hanya dipaksa memahami ulumul al-Qur'an karya orang lain. Para peserta didik tidak didorong dan diberi kesempatan melahirkan fiqih baru, yang ada hanya pemikiran fiqih lama. Akibatnya, kitab-kitab selain al-Qur'an cenderung menempati posisi atas dalam pembelajaran dan al-Qur'an ditempatkan pada posisi di bawahnya atau bahkan tidak sempat dikaji secara mendalam.¹¹² Dengan demikian, peserta didik kurang memanfaatkan daya pikir yang dimilikinya,¹¹³ sehingga tidak melahirkan manusia yang dinamis tetapi fatalistis dan statis.

Di samping itu, peserta didik pada zaman keemasan pendidikan Islam mempunyai forum yang dinamai *munadharah*¹¹⁴ yang dapat diselenggarakan dimana saja, baik di mesjid, istana, atau di lapangan terbuka. Konon, di istana Harun Al-Rasyid, Iman Malik dalam forum studinya, melaksanakan *munadharah* yang menghadapkan mahasiswanya, Utsman dengan Abu Yusuf. Karena kemampuannya, menjelang kepergian Iman Malik Utsman dipercaya untuk menjadi profesor dalam lingkaran studi milik seorang pemimpin *madzhab*.¹¹⁵

Dengan demikian, *munadharah*, sebagai salah satu metode skolastik, yang tidak saja berarti cara menyampaikan pandangan, tetapi juga menjadi pola berpikir untuk menyusun pandangan-pandangan peserta didik. Dengan kata lain, *munadharah*, seringkali diselenggarakan dalam rangka latihan antara guru dengan murid (*sparing partner*).

Setting di atas, memberikan gambaran bahwa pada peserta didik pada zaman keemasan Islam diberi kebebasan, demokrasi, kreatif, serta mandiri sehingga menjadi manusia pembelajar atau istilah sekarang *Learning how to learn*, (belajar bagaimana belajar).¹¹⁶ Itulah yang terjadi dalam sejarah pendidikan Islam pada zaman

112Pendidikan Yang Membebaskan, h. 20.

113Baca Suwito, *Konsep Pendidikan Ahklak Menurut Ibn Miskawaih*, h. 6.

114Munadharah adalah forum perdebatan umum yang menguji kekuatan teori dan pandangan seorang anak didik. Bahkan salah satu kebanggaan seorang peserta didik (ilmuan) adalah apabila ia bisa terlibat dalam forum seperti itu; berhadapan dengan ilmuwan-ilmuan lain..

115Afandi Mochtar, *Membedah Diskursus Pendidikan Islam*, Jakarta, Kalimah, 2001, h. 91.

116Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar; Menggagas paradigma Baru Pendidikan*, Jakarta, Paramadina, 2001, h. 26.

keemasannya. Di mana peserta didik menciptakan suasana kondusif yakni *learning society* (masyarakat belajar).

Oleh sebab itu, ciri-ciri umum pendidikan Islam di zaman keemasan yakni : *Pertama*, masuknya Ilmu akal, yang antara lain ilmu fisika, matematik, geometri, al-Jabar, falak, kedokteran, kimia, musik, dan sejarah. *Kedua*, Berdirinya sekolah-sekolah atau lembaga tempat belajar para peserta didik. *Ketiga*, Munculnya tokoh-tokoh pemikir pendidikan yang unik seperti yang penulis sebutkan sebelumnya.¹¹⁷

Dari cerminan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peserta didik pada saat itu tidak mengenal dikotomi ilmu pengetahuan, atau epistemologi Islam yakni mampu mempersandingkan antara ilmu yang fisik-empiris maupun non fisik atau metafisika.¹¹⁸ Sehingga periode tersebut peserta didik mampu melahirkan karya-karya baik dibidang ilmu umum maupun agama, hal ini terlihat dari buah karya mereka.¹¹⁹ Bahkan boleh dinyatakan, peranan pendidikan saat itu sebagai sarana menyiapkan peserta didik dalam kehidupan masyarakat baik individu maupun sebagai anggota masyarakat. Atau dengan kata lain, pendidikan yang memberdayakan peserta didik terjadi pada zaman keemasan Islam.

C. Penutup

Berdasarkan gambaran mulai dari awal sampai akhir makalah ini, maka dapat disimpulkan bahwa potret peserta didik pada zaman keemasan Islam, mencerminkan suasana kondusif untuk dikatakan sebagai masyarakat belajar. Hal ini dikarenakan peserta didik tidak mengenal dikotomi ilmu pengetahuan, dan kemudian

117Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, h. 90-93.

118Mulyadhi Kartanegara, *Mozaik Khazanah Islam*, Jakarta, Paramadina, 2000, h. 1171-123.

119Ibnu Sina menghasilkan karya *al-Qanun fi Al-Thibb*, dalam bidang kedokteran; demikian juga Ibn Haitsm dalam eksperimennya di bidang optik mengenai cahaya dan teori penglihatan atau vision yang brlian, yang hasilnya diabadikan dalam karya besarnya, *Al-Manazhi*; di sampain itu, ada juga karya Suhrawardi (w. 1191 M) *Hikmah Al-Israq* dan Mulla Shadra (w. 1641 M), *Al-Asfar Al-Arbaah*. Karya-karya besar mereka telah banyak menyumbangkan khazanah intelektual Muslim. Karya tulis ini pun telah mengambil banyak ide dari karya-karya mereka dan tidak mungkin terwujud tanpa sumbangan mereka yang begitu kaya.

peserta didik menjadikan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai motivator pengembangan ilmu, serta para tokoh pendidikan memberdayakan peserta didik dengan meniupkan pola pikir rasional, sehingga mampu melahirkan karya-karya dalam berbagai ilmu pengetahuan.

Di samping itu, ada forum *munadharah*, sehingga liberalisasi peserta didik mampu memotivasi untuk berprestasi, berkreasi dan berbudi pekerti. Dengan kata lain, pendidikan pada zaman keemasan Islam berfungsi sebagai wahana pemberdayaan peserta didik.

BAB 4

INKLUSIFISME PENDIDIKAN ISLAM

A. Pendahuluan

Gagasan utama dari seluruh kegiatan pendidikan adalah bagaimana mengarahkan peserta didik mempunyai nilai positif yang tumbuh kuat dalam dirinya, sehingga nilai negatif tidak tumbuh.¹²⁰ Dalam bahasa yang sama yang bahwa pendidikan Islam seharusnya mampu melahirkan peserta didik yang kreatif, inovatif, dinamis, bermoral, mandiri dan penuh percaya diri, menghargai waktu, memanfaatkan peluang, dan menjadikan orang lain sebagai mitra serta mempunyai kecerdasan spritual.¹²¹ Untuk mencapai tujuan di atas, pendidikan Islam tersandung dengan berbagai problematika dan kelemahannya. Hal ini disebabkan model pembelajaran pendidikan Islam yang tidak pernah memberikan kebebasan pada peserta didik, untuk membuat ruang bebas berkreasi dan berkreatif merupakan barang langka dan mahal, sehingga muncul pemberontakan peserta didik yang selama ini diperlakukan tidak adil yang hak-hak dasarnya ditindak. Bahkan pendidikan Islam hanya akan melahirkan peserta didik yang menurut istilah Azyumardi Azra yakni kesalehan individual saja, sementara kesalehan sosial hanya hiasan bibir (*live service*).

Persoalan yang muncul adalah mampukah pendidikan Islam memecahkan persoalan di atas? Tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan mendasar dan memberikan solusi. Adapun sumber-

120Munir Mulkan, "Humanisasi Pendidikan Islam", Jurnal *Afkar*, edisi N0. 11, 2001, h. 17.

121Baca Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan Islam*, Jakarta, Prenada Media, 2003, h. 170.

sumbernya merujuk pada buku-buku pendidikan yang otoritatif, dan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis.

B. Eksklusivisme Pendidikan Islam

Eksklusivisme pendidikan adalah suatu bentuk pendidikan yang membelenggu dan tidak memberikan kebebasan kreatif kepada komponen pendidikan. Tragedi inilah yang menimpa pendidikan Islam seperti disinyalir Muhammad Abduh (1849-1905) bahwa model pembelajaran yang diajarkan bersifat hafalan, bahkan Abduh mengkritik keras pengajaran di al-Azhar Mesir.¹²²

Hasil dari proses pembelajaran tersebut menurut Abduh hanya akan menghasilkan lulusan dan masyarakat yang *jumud*, membeku, statis, tidak ada perubahan. Oleh karena itu, pendidikan Islam pengajarannya lebih merupakan indoktrinasi tunggal tentang kebenaran yang tak mungkin dibantah. Ruang kelas bagaikan sebuah “penjara” tanpa peluang kreatif. Hal ini diakui oleh Mastuhu¹²³ bahwa para peserta didik tidak perlu menanyakan keabsahan dan kebenarannya serta tidak perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya elaborasi, provokatif, dan antisipatif dianggap tidak menghargai guru.

Di ruang kelas, peserta didik hampir tak memiliki ruang eksperesi, sosok anak hanya akan berharga di mata guru jika sesuai dengan pendapat guru, pengelola pendidikan, elit agama dan pemerintah selalu menggap makhluk yang tidak pernah salah atau istilah lain moralitas. Para siswa tidak pernah mengerti, mengalami, dan menyadari kebaikan dan kebenaran di saat paket-paket pembelajaran

122Di antara kritik yang dimajukan ketika itu ialah: kurikulum al-Azhar banyak menekankan kepada perbedaan pendapat dari pada mempelajari nilai argumentasinya, perbedaan bahasa daripada arti dan tujuan gramatika bahasa, hukum-hukum fiqh yang timbul dalam saat tertentu daripada metode penilaian hukum-hukum tersebut telah dijadikan pedoman. Oleh karena itu, Abduh mencari ilmu-ilmu yang disebut oleh Syaikh Darwisy di luar al-Darwasy di luar al-Azhar. Ilmu-ilmu itu ia jumpai pada seorang ulama yang bernama Syaikh Hasan Thawil yang mengetahui filsafat, logika, ilmu ukur, soal-soal dunia dan politik. Akan tetapi Abduh kurang puas dengan pengajaran yang diberikan. Kepuasan dalam mempelajari filsafat, matematik, teologi dan sebagainya ia peroleh dari Jamal al-Din al-Afgani yang datang ke Mesir pada tahun 1870.

123Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta, Logos Wacana, 1999, h. 10.

sudah tersedia. Tuhan pun tak pernah dikenal dan disadari, kecuali sifat-sifat hebat yang harus dihafalkan tanpa bertanya.

Dunia pendidikan disadari atau tidak secara sengaja menjerat generasi ke dalam lorong gelap peradaban. Di ujung lorong itu mungkin tersisa harapan, namun banyak yang tak acuh, dan menerima nasibnya sebagai takdir dari sang Ilahi. Hasil dari proses pembelajaran seperti inilah yang dimaksud Fazlur Rahman dengan *memorizing*, yakni proses pembelajaran yang memakai sistem hafalan daripada sistem pemahaman. Atau dengan kata lain menjadikan belajar berifat studi teks daripada pemahaman.¹²⁴ Sinyelemen ini diperkuat oleh Tibi bahwa dunia pendidikan Islam khusus universitas Arab dan Afrika dengan berbagai bidang studinya, berdasarkan semata-mata pada kapasitas belajar model hafalan (*rote learning*) dalam rangka mencapai lulusan.¹²⁵

Pendapat di atas memberikan pemahaman, bahwa model pembelajaran hafalan hanya akan melahirkan peserta didik *lack of spirit of inquiry*, artinya lemahnya kemampuan untuk melakukan penelitian/penyelidikan. Hal inilah yang dikritik Syed Hussein Alatas dengan mengutip pendapat al-Afgani bahwa salah satu penyebab mundurnya dunia Islam adalah rendahnya semangat intelektual (*the intellectual spirit*), rasa cinta untuk mencari ilmu, penghormatan terhadap ilmu pengetahuan, serta ilmu-ilmu rasional tidak berkembang luas di kalangan umat Islam.¹²⁶

Oleh karena itu, jika ilmu pengetahuan ingin berkembang, maka perlu menekankan adanya perubahan sikap dari mental tradisional menjadi sikap mental rasional.¹²⁷ Lain halnya dengan Fazlur Rahman bahwa kemunduran pendidikan Islam, karena jumlah buku-buku yang tertera dalam kurikulum sedikit sekali, maka waktu yang diperlukan untuk belajar terlalu singkat bagi siswa-siswa, sehingga

124Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago, The University of Chicago Press, 1982, h. 189.

125Bassam Tibi, *Islam and the Cultural Accommodation of Social Change*, San Fransisco, Westview Press, 1985, h. 110.

126Bassam Tibi, *The Crisis of Modern Islam: A. Preindustrial Culture in the Scientific-Technological Age*, Salt Lake City, Universitas of Utah Press, 1988, h. 15.

127Baca uraian Harun Nasution dalam, *Islam Rasional; Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr.Harun Nasution*, Bandung, Mizan, 1995, h. 146.

materi-materi yang seringkali sulit untuk dimengerti, tentang aspek-aspek tinggi ilmu keagamaan pada usia yang relatif muda dan belum matang.

Di sisi lain pendidikan Islam kurang memperhatikan kepada upaya penyelesaian masalah (*problem-solving*) konsep pendidikan inilah yang perjuangkan oleh Paulo Freire seorang pendekar pedidikan dari Brasil, sehingga harus diusir oleh pemerintah untuk meninggalkan Brasil. Inti dari konsep pendidikan hadap masalah adalah sebuah upaya untuk menjawab diskomunikasi antara guru dan murid menuju suasana dialogis.¹²⁸

Model-model pendidikan seperti inilah yang membudaya dalam simbol keunggulan peradaban dan kemutlakan keagamaan. Atas nama agamanya, seorang atau bangsa, berhak menindas dan menghancurkan sesama anak bangsa sebagai cara paling sah pertahanan diri untuk membangun peradaban.¹²⁹ Atau istilah lain yakni klaim kebenaran (*truth claim*) untuk dirinya, kelompok, di luar agamanya adalah salah.¹³⁰

Oleh karena itu, bisakah kita menemukan kembali kearifan sebagai dasar pendidikan yang mendorong peserta didik untuk menyadari diri dan mampu menjalani hidup dalam kebersamaan.

C. Inklusifisme Pendidikan Islam.

Kata Inklusifisme sebuah kalimat asing dalam wacana tarbiyah Islam, namun demikian jika diterjemahkan dalam bahasa agama maka akan berarti nahi munkar, dalam bahasa sehari-hari mencegah manusia dari perbuatan-perbuatan yang melanggar ajaran agama Islam.¹³¹ Inti dari seluruh kegiatan tarbiyah adalah memanusiakan manusia, dalam arti menciptakan manusia atau peserta didik yang cerdas dan terampil sekaligus memiliki kesadaran Ilahiya. Dengan bahasa *trend* yang dipakai dalam dunia pendidikan saat ini adalah

128Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*, Jakarta, 2000, Cet III, h. 61.

129Munir Mul Khan, "Humanisasi Pendidikan Islam", *Jurnal Afkar*, edisi NO. 11, 2001, h. 23.

130Baca Ismail dkk (ed), *Paradigma Pendidikan Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001, h. 303.

131Baca Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu*, Bandung, Teraju, 2004 h. 1-10.

peserta didik mempunyai tiga kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ), dan kecerdasan spritual SQ.

Pendidikan Islam saat ini seharusnya mampu melahirkan peserta didik dengan memiliki tiga kecerdasan di atas, sehingga fokusnya bukanlah semata-mata kemampuan ritual dan keyakinan tauhid, melainkan juga memiliki akhlak sosial, dan kemanusiaan.¹³²

Namun demikian, harus diakui bahwa proses pembelajaran pendidikan Islam masih memberikan pengajaran dotrinisasi dengan kemas surga dan neraka atau istilah lain yang sering dipakai Mastuhu berkuat pada nalar Islami klasik,¹³³ yang tidak pernah diajari untuk berlaku kritis dan kreatif. Bahkan ironisnya para siswa dan mahasiswa tidak pernah dilatih untuk melahirkan ilmu baru, semisal tafsir baru karena mereka cenderung dipaksa untuk memahami teks tafsir, bukan untuk mengembangkan makna ayat-ayat al-Qur'an.¹³⁴ Mahasiswa dipaksa untuk mempelajari fiqh lama bukan didorong untuk melahirkan fiqh baru.

Proses pembelajaran di atas, sangat dibungkus oleh normatifikasi yang tidak pada tempatnya, sehingga harus dibayar mahal dengan absurditas peradaban, yang pada gilirannya melahirkan generasi dengan proses belajar mengajar yang salah.

Dengan demikian lahirlah manusia atau peserta didik dan dosen yang tampil dengan gaya arogansi dan egoismenya, sehingga klaim-klaim kebenaran bahwa dirinya dan pendapatnya yang paling dan benar sementara orang lain berada dalam kesalahan. Lihatlah anggota DPR kita sebagai wakil rakyat telah mempertontongkan pendidikan arongansi dan egoismenya masing-masing hanya karena perbedaan pendapat. Inilah generasi anak bangsa yang lahir dari proses pembelajaran yang salah.

Boleh jadi serangkai Pertikaian dan perpecahan itulah yang melanda bumi pertiwi ini, tragedi berdarah di Maluku kembali meletus, Poso, kasus Bojong, bom Bali yang kedua yang banyak menelan

132Munir Mulkhan, "Humanisasi Pendidikan Islam", Jurnal *Afkar*, edisi N0. 11, 2001, h. 17.

133Mastuhu, "Pendidikan Islam di Indonesia Masih berkuat pada Nalar Islami Klasik", Jurnal *Afkar*, edisi N0. 11, 2001, h. 78-79.

134Suwito, "Pendidikan Yang Meberdayakan", dalam pidato pengukuhan Guru Besar di bidang Sejarah dan Pemikiran Islam, 3 Januari, 2003, h. 20.

korban antar aparat dan warga, perusakan rumah Bupati Gorontalo, perkelahian antar warga tak pernah berhenti seakan menjadi sebuah tradisi, ibarat benang kusut yang tiada ujung pangkalnya. Tidak ada lagi yang dapat dibanggakan oleh bangsa ini, ketika seluruh citra tentang dirinya yang santun dan beradab tiba-tiba terkubur oleh kenyataan yang menunjukkan hal yang sebaliknya. Inilah sebuah cermin besar untuk menatap wajah bangsa kita dengan pemimpin baru, alunan lagu-lagu indah tentang persada nusantara nan elok, kini telah berubah menjadi musik perang yang mengantarkan putra-putri ibu pertiwi ini nan gagah perkasa itu ke medan pertempuran sesama warga. Mandau, clurit, perang, dan senjata dan bom rakitan adalah bahasa kemonuikasi yang kini muncul dalam museum peradaban Tanah Air tercinta ini. Tak mau ketinggalan sekolah “masyarakat ilmiah” atau perguruan tinggi, perkelahian antar pelajar merupakan salah satu materi pelajaran di luar sekolah, perkelahian mahasiswa, bahkan suhu politik yang diperagakan di kampus mengarah pada perilaku primodialisme, yang melihat dari etnis mana ia, isu otonomi daerah dijadikan senjata pamungkas untuk menduduki suatu jabatan tertentu, seringkali terjadi pentas republik ini, RUU Sisdiknas menjelang disahkan juga menjadi pertikaian. Inilah gambaran bangsa Indonesia, bangsa yang gemar bertikai dengan saudaranya sendiri. Ternyata dibalik retorika tentang cita-cita masyarakat madani, kita mungkin pantas disebut masyarakat barbar atau kanibalisasi.

Selama model pendidikan yang membelenggu peserta didik dengan kamufase normatif yang semakin verbalistik, maka selamanya itu pendidikan Islam tidak akan pernah beranjak dari titik absurditas. Model pembelajaran keagamaan yang indoktrinatif hanya akan melahirkan satu generasi seragam, bertali sepatu sama, perilaku dan berfikir sama. Tentu saja polah dan sistem ini tidak hanya berlaku dalam hubungan guru dengan murid, tetapi juga antara kepala sekolah-guru, antara yayasan dan guru-guru serta kepala sekolah. Bahkan dalam banyak kasus sering terbentuk suatu jaringan yang sangat menindas. Sementara itu, pihak pengelolah pendidikan dan guru, menempatkan diri sebagai yang lebih bermoral (suci), sumber kebaikan dan kesuksesan hidup. Pada saat yang sama, nasib guru

yang memprihatinkan masih harus jadi pelayan setia penguasa. Bisa dikatakan bahwa kekerasan dalam dunia pendidikan adalah resiko dan harga sosial yang harus dibayar kekurang pedulian pada nasib guru.

Model dan pola pendidikan seperti ini sulit diharapkan lahirnya suatu generasi muda kreatif, inovatif dan mandiri. Apalagi kalau keluarga dan masyarakat juga mempraktekan sistem dan pola hubungan yang sejenis. Yang pada gilirannya hanya akan menghasilkan generasi muda pembeo yang tidak pernah mampu berkreasi dan berinovasi secara mandiri.¹³⁵ Bahkan boleh jadi kuroptor-koruptor yang ada di bumi pertiwi ini, pelaku-pelaku KKN, adalah bagian dari pola atau model pendidikan di atas.

Pendidikan seharusnya sebagai wahana manusia belajar hidup guna menyelesaikan problem yang sedang dan akan dihadapi. Sayang, pendidikan lebih sebagai paket peniruan gaya hidup versi penguasa, birokrat pendidik dan orang dewasa. Karena itulah pendidikan sering terperangkap ke dalam praktek penindasan atas peserta didik dan perlakuan tidak adil.¹³⁶

Munir Mulkhan,¹³⁷ menjelaskan bahwa pendidikan seolah hak mutlak negara, sehingga praktek pendidikan berubah sebagai praktek ideologisasi, bukan bagi pencerahan rakyat sebagai manusia yang bebas dan otonom. Praktek ini bersumber dari konsep pendidikan sebagai transfer nilai atau transfer ilmu, bukan sebagai proses kebudayaan. Karena itu, pendidikan kemudian berubah sebagai praktek indoktrinasi nilai dan kebenaran ilmiah menurut versi penguasa, kelas elite, guru. Akibatnya, kearifan, kecerdasan, kesadaran manusia terhadap makna hidup, lingkungan sosial dan alamnya, gagal tumbuh dan menjadi mati.

Demikian halnya dengan Fazlur Rahman bahwa dunia pendidikan Islam, dengan landasan al-Qura'an dan Sunnah gagal dibaca seperti dirinya sendiri. Kedua sumber ajaran Islam itu cenderung dibaca sepanjang versi mufassir. Karena itu, al-Qur'an dan Sunnah gagal ditempatkan sebagai sumber otentik pengembangan pemikiran

135Suwito, "Pendidikan Yang Meberdayakan", h. 26.

136Munir Mulkhan, *Nalar Spritual Pendidikan Islam*, h. 273.

137Munir Mulkhan, *Nalar Spritual Pendidikan Islam*, h. 274.

teoritis atau praktis bagi tujuan merumuskan panduan atau hudan kehidupan dunia. Di sinilah Fazlur Rahman menyerahkan pentingnya etika yang digali dari al-Qur'an untuk dijadikan dasar pengembangan pemikiran dan praktek pendidikan.¹³⁸ Atau dengan kata lain, aktualisasi nilai-nilai al-Qur'an dalam sistem pendidikan Islam, artinya sistem pendidikan Islam harus mampu mentransformasikan nilai-nilai al-Qur'an dalam menghadapi masa depan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendidikan seharusnya menuju pada perubahan sikap dan prilaku toleran lapang dada dalam berbagai hal dan bidang, terutama toleran dalam perbedaan pendapat dan penafsiran ajaran Islam, tanpa melepaskan pendapat atau prinsip yang diyakini.¹³⁹

Pendidikan menjadi penting jika secara signifikan mendorong peserta didik belajar hidup, belajar sukses dan belajar atas kegagalan.¹⁴⁰ Atau dengan kata lain bahwa pendidikan Islam mampu melahirkan peserta didik yang hanya mengetahui sesuatu secara benar (*to know*), melainkan juga harus disertai dengan mengamalkan secara benar (*to do*), mempengaruhi dirinya (*to be*), dan membangun kebersamaan hidup dengan orang lain (*to live together*).¹⁴¹

Jika demikian halnya, maka Inklusifisme pendidikan Islam sangat diperlukan, artinya reformasi kepada seluruh sistem pendidikan agar mampu membebaskan model pembelajaran, pendidik, peserta didik, kurikulum serta seluruh komponen pendidikan.

Ke arah sistem liberalsisasilah, pendidikan Islam dapat menyongsong masa depan yang lebih menjanjikan. Dengan kata lain, harapan dari liberalisasi pendidikan Islam akan mampu melahirkan manusia atau peserta didikan yang mempunyai kesalehan pribadi dan kesalehan sosial. Bahkan pendidikan Islam mampu melahirkan tokoh pendidikan yang handal seperti Ibnu Arabi, al-Kindi, Ibnu sina, Ibnu Miskawaih baru yang akan mampu memberikan keemasan

138Munir Mul Khan, *Nalar Spritual Pendidikan Islam*, h. 255.

139Musli Usa (ed), *Pendidikan Islam di Indonesia; Antara Cita dan Fakta*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1991, h.46.

140Munir Mul Khan, "Humanisasi Pendidikan Islam", h. 23.

141Abuddin Nata, *Pendidikan Islam di Indonesia; Tantangan dan Peluang*, dalam pidato pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta, 20 Maret 2004, h. 46.

pada dunia pendidikan Islam.

Untuk tokoh pendidikan Indonesia harusnya mampu melahirkan Hamka, Harun Nasution, Hasyim Asy'ari, Hasan Langgulung, Imam Zarkasyi baru. Hal ini bisa tercapai atau melahirkan tokoh-tokoh baru tersebut sebagai pendekar pendidikan, jika kita bersedia melakukan liberalisasi pada seluruh komponen pendidikan khusus pendidikan Islam. jika tidak, dunia pendidikan akan selalu berada dalam dunia kegelapan.

D. Penutup

Dengan demikian makalah ini dapat memberikan kesimpulan bahwa kegiatan pendidikan Islam harus melakukan Inkulusifisme pendidikan, baik kurikulum, sistem pembelajarannya, pendidik dengan titik sentralnya adalah memberdayakan potensi peserta didik.

Proses pembelajarannya harus dialogis, sehingga peserta didik memiliki nilai kritis dan kreatif. Dengan cara inilah pendidikan Islam akan meninggalkan titik absurditas peradaban menuju peradaban yang maju, bahkan peserta didiknya memiliki kecerdasan Intelektual IQ, kecerdasan emosional EQ, kecerdasan spritual SQ dengan tiga kecerdasan ini, maka menjadilah peserta didik sebagai *rahmatan lil alamin*.

BAB 5

MENGAGAS PARADIGMA BARU PENDIDIKAN ISLAM

A. Pendahuluan

Menggagas Paradigma Baru pendidikan Islam ini penting untuk diperkenalkan, hal ini disebabkan: *pertama*, banyak lembaga-lembaga pendidikan Islam yang melaksanakan pendidikan cenderung tidak bersentuhan dengan paradigma pembelajaran modern. Dengan kata lain, model pembelajarannya sangat keakhiratan. *Kedua*, pendidikan saat ini, umumnya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang melaksanakan paradigma pendidikan modern cenderung melahirkan peserta didik yang sekuler, materialistik, rasionalistik, empiris dan skeptis.¹⁴²

Dua sebab inilah yang terlihat dan bahkan menjadi problematika dunia pendidikan Islam saat ini, padahal pendidikan Islam tidak memberikan pemisahan atau salah satu forsi diantara dua sebab di atas, bahkan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Atau dengan kata lain paradigma pendidikan non dikotomik (integral)

Oleh sebab itu, makalah ini akan membahas lebih jauh tentang pendidikan Islam dengan paradigma barunya, sehingga dapat dirumuskan konsep pendidikan yang berwawasan duniawi dan ukhrawi. Untuk itu kajian ini bersifat normatif filosofis, yakni mendalami dan membaca buku-buku pendidikan Islam untuk selanjutnya dianalisa melalui pendekatan filosofis, substansial mengenai sesuatu. Uraian yang dikemukakan ini bersifat deskriptif

¹⁴²Baca Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan Islam*, Jakarta, Kencana, 2003, h.175.

yang didukung dengan sumber yang otoritatif.

B. Pendidikan non dikotomik

Berangkat dari sebuah Hadis yang berbunyi “*Didiklah anak-anakmu karena ia hidup masa akan datang*”. Ke arah inilah, dunia pendidikan Islam menyelenggarakan pendidikan dengan memikirkan masa depan peserta didik. Atau meminjam istilah Mucthar Buchori pendidikan antisipatoris.¹⁴³ Oleh karena itu, dalam upaya untuk membangun dan melahirkan figur insan yang bertaqwa dan berkualitas, baik dari segi materil maupun spritual diperlukan pendidikan yang bersifat integral dan berorientasi aspek duniawi dan ukhrawi yakni seimbang (*balance*) sekaligus.

Sistem pendidikan integral yang berorientasi pada pengembangan seluruh dimensi baik dunia maupun dimensi akhirat serta potensi anak didik secara proporsional. Hal ini didasarkan pada tiga alasan, yaitu: *Pertama*, peserta didik merupakan makhluk Allah Swt multi dimensi yang dibekali multi potensi yang dinamis dan potensial. *Kedua*, peserta didik adalah manusia yang dinamis dan merdeka. *Ketiga*, Anak didik merupakan makhluk Allah Swt yang menerima amanah dari Allah yang mempertanggung jawabkannya baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Dengan demikian teori maupun praktek dari pendidikan Islam mampu mengakomodir semua dimensi dan potensi dalam sebuah sistem yang integral dan utuh. Jika tidak, pendidikan akan stagnansi dan mengalami kegagalan. Hal inilah yang dikritik oleh Fazlur Rahman dalam bukunya *Islam and Modernity; Transformation of Intellectual Tradition*, bahwa dunia pendidikan Islam cenderung berorientasi pada keakhiratan semata, bahkan cenderung anti kepada modernisasi,¹⁴⁴ sehingga tidak bisa melahirkan peserta didik yang mempunyai komitmen spiritual dan intelektual yang mendalam terhadap ajaran Islam.

Dalam praktek, cukup banyak lembaga-lembaga pendidikan

¹⁴³Mucthar Buchori, *Pendidikan Antisipatoris*, Yogyakarta, Kanisius, 2001.

¹⁴⁴ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity; Transformation of An Intellectual Tradition*, Chicago and London, The University of Chicago Press, 1984, h. 86.

Islam cenderung mementingkan dimensi keakhiratan daripada dimensi duniawi. Sebab kehidupan akhirat dipandang sebagai kehidupan yang hakiki sedangkan kehidupan dunia hanyalah sementara tetapi bukan berarti melupakan dimensi duniawi, hanya saja meletakkannya secara proporsional. Maka untuk mencapainya dibutuhkan pola pendidikan Islam yang ideal yang akan diterapkan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam. Dalam rangka mencari paradigma yang ideal dalam pendidikan Islam dibutuhkan paradigma baru yang akan dikembangkan secara berkesinambungan dan belajar dengan sistem pendidikan pada zaman keemasan Islam dahulu.

Prinsip-prinsip paradigma baru dalam pendidikan Islam yang dikembangkan berdasarkan paradigma yang berorientasi pada;¹⁴⁵ *pertama*, *teosentris* dan *antroposentris* sekaligus, dengan menghilangkan dikotomi keilmuan antara ilmu agama dengan ilmu umum, ilmu yang tidak bebas nilai tetapi bebas untuk dinilai dan dengan mengajarkan agama dengan bahasa ilmu pengetahuan dan tidak hanya mengajarkan sisi tradisional melainkan juga sisi rasionalnya.

Munculnya dikotomi keilmuan dalam sistem pendidikan Islam menimbulkan kritikan dari para tokoh pemikir Islam. Seperti Menurut Syed Husain dan Ali Asraf bahwa sistem dikotomi pendidikan bukan hanya menyangkut perbedaan struktur luarnya tapi juga terjadi di dalam, yang lahir dari pendekatan mereka terhadap tujuan pendidikan. Karena itulah lahir konsep keilmuan yang Islami dan tidak Islami hingga akhirnya di satu pihak akan menghasilkan manusia yang mempunyai rasa ketaatan yang sangat besar sedangkan di lain pihak akan melahirkan manusia yang beranggapan bahwa tidak ada batasan atau akhir dari kemungkinan-kemungkinan di dalam dirinya atau dia dapat membentuk sendiri kehidupan yang dijalaninya tanpa tuntunan Ilahi.

Kondisi ini sangat dilematis hingga disadari atau tidak,

145Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam Membangun Masyarakat Madani Indonesia*, Yogyakarta, Safiria Insanis Press, Cet. I, 2003, h. 122-125 dan Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, h. 15.

sebenarnya pemikir muslim juga diarahkan pada upaya sosialisasi konsep pendidikan Islam yang non dikotomik dengan upaya pengembangan pendidikan Islam yang men-integritas-kan antara ilmu agama dengan ilmu umum.¹⁴⁶

Secara historis sebenarnya dikotomi keilmuan di Indonesia berasal dari warisan penjajahan Belanda.¹⁴⁷ Dampak negatif yang ditimbulkan sistem pendidikan dualistis adalah mengakibatkan arti agama menjadi dipersempit hanya sejauh hal-hal yang berhubungan dengan aspek teologis saja seperti yang diajarkan selama ini pada sekolah-sekolah agama, padahal Islam ajarannya sangat universal dan dinamis maka untuk itu harus dipahami dan diterjemahkan berdasarkan setting sosial dan dimensi ruang dan waktu tertentu sehingga melingkupi sistem ekonomi, sosial politik, pendidikan dan sebagainya.

Dalam mengembangkan teori ilmu yang tidak bebas nilai dari ajaran Islam yang akan dioperasionalkan dalam kehidupan sehari-hari bukanlah hal yang sulit, seperti dikemukakan Mastuhu.¹⁴⁸ Sebab sekarang ini banyak lembaga-lembaga yang mengakomodasi nilai-nilai Islam sebagai prinsip dasar dalam mengoperasionalkannya di lapangan seperti adanya bank-bank syari'ah dan sekolah-sekolah Islam.

Untuk itu, *pertama* pendidikan Islam mampu lebih mengembangkan kemampuan dalam bidang metodologi ilmiah. *Kedua*, Pendidikan Islam mampu membangun keilmuan dan kemajuan yang integratif antara nilai spritual, moral dan material dalam kehidupan manusia. *Ketiga*, Pendidikan Islam mampu membangun kompetisi manusia dan mempersiapkan kehidupan yang lebih baik yang demokratis, kompetitif, inovatif yang berdasarkan Islam. *Keempat*, Pendidikan Islam disusun berdasarkan kondisi lingkungan sosial dan berwawasan masa depan.

146Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam Membangun Masyarakat Madani Indonesia*, h.100 dan Samsul Bahri, *Pemikiran Pendidikan Paulo Freire dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Jakarta, Tesis PPS Magister Studi Islam UMJ, 148-149.

147Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam Membangun Masyarakat Madani Indonesia*, h.98-99.

148Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, h. 15-16.

Kelima, Pendidikan Islam diupayakan dengan memberdayakan potensi umat. *Keenam*, Pendidikan Islam diubah menjadi pendidikan yang demokratis dari desentralistik dalam manajemen maupun dalam kurikulum disesuaikan dengan tuntutan pendidikan. *Ketujuh*, pendidikan lebih menekankan dan diorientasikan pada proses pembelajaran, diorganisir dalam struktur yang lebih fleksibel, menghargai dan memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki potensi dan berkreasi sehingga peserta didik lebih bebas mengembangkan potensi yang ia miliki.

Kedelapan, Pendidikan Islam diarahkan pada dua dimensi *horizontal*, pendidikan dengan mengembangkan pemahaman dalam hubungan manusia dengan lingkungannya dan dimensi *vertikal*, yaitu pendidikan sebagai sarana untuk memahami setiap individu dengan Sang Khalik. Dan *sembilan*, pendidikan Islam lebih diorientasikan pada upaya proses pembebasan, proses pencerdasan dan pendidikan menjunjung tinggi hak-hak anak.

C. Dari *Teaching ke Learning*

Untuk menuju kepada pendekatan integralistis, dan dalam upaya memadukan keunggulan warisan Islam klasik dengan kemajuan sistem modern, maka langkah-langkah berikut perlu dipikirkan antara lain:

(1) Arti dan makna pendidikan, dalam Islam bukan sekedar pengajaran (*ta'lim*), tetapi juga pelatihan seluruh diri peserta didik (*tarbiyah*). Pendidik bukan sekedar *mu'alim* (penyampai pengetahuan), tetapi sekaligus seorang *murabbi* (pelatihan jiwa dan kepribadian). (2) Sistem pendidikan tidak pernah memisahkan pelatihan pikiran dari jiwa dan keseluruhan pribadi secara utuh. Bahkan pendidikan Islam tidak pernah memandang alih pengetahuan (*transfer of knowlegde*) dan cara memperoleh absah tanpa dibarengi dengan kualitas-kualitas moral maupun spritual (*transfer of moral and spiritual*)

Dengan sistem seperti ini, akan melahirkan insan-insan yang memiliki kualitas intelektual dan kualitas spritual. (3) Restrukturisasi

kurikulum.¹⁴⁹(4) Tujuan pendidikan adalah menyempurnakan dan mengaktualisasikan seluruh potensi yang dimiliki peserta didik untuk mencapai pengetahuan tertinggi tentang Tuhan yang merupakan tujuan hidup manusia.¹⁵⁰

Jika prinsip-prinsip di atas, dijadikan sebagai paradigma pendidikan Islam serta dipadukan dengan gagasan Indra Djati Sidi yang menyorot dari segi visi pendidikan Islam itu sendiri maka pendidikan Islam akan lebih optimal dalam menjalankan misi dan visinya dan akan lebih berhasil dalam mencapai tujuannya. Adapun gagasan yang ditawarkan Indra¹⁵¹ lebih mengarah pada sistem pembelajaran, yaitu:

Pertama, dengan mengubah paradigma *teaching* (mengajar) menjadi *learning* (belajar). Di mana proses pendidikan yang dianut selama ini diubah dan menjadikan suasananya menjadi proses belajar bersama antara guru dan anak didik. Bukan hanya anak didik yang belajar namun posisi guru juga masih dalam proses belajar. Jadi anak didik tidak hanya didoktrin dengan materi-materi pelajaran tetapi diberikan kebebasan untuk mengembangkan kreativitas dan potensi yang ia miliki.

Kedua, pendidikan harus bersifat *learning to do* (belajar berbuat/hidup). Aspek yang diinginkan dicapai dengan proses ini adalah siswa bisa mandiri dengan belajar mengatasi problem yang ia hadapi dalam kehidupan sehari-harinya sebab pendidikan juga diarahkan pada cara mengatasi sendiri masalah yang ia hadapi.

Ketiga, *learning to live together* (belajar hidup bersama) dan *terakhir*, *learning to be*, pendidikan merupakan tempat sarana belajar menjadi diri sendiri yang berkepribadian. Jadi intinya, paradigma pendidikan yang diinginkan adalah *learning how to learn* (belajar bagaimana belajar).

149Dalam pendidikan kurikulum dipandang penting dalam proses pendidikan, karena ia akan memberikan arahan dan patokan keahlian apa yang dipunyai oleh peserta didik. Dalam persoalan ini, para ilmuwan muslim mengklasifikasikan gradasi sains. *Pertama*, sains keagamaan (*sains naqli*), dan Ilahi (*sains syari'ah*), prinsip-prinsipnya (ushul) dan jurisprudensi (*fiqh*). *Kedua*, sains-sains intelektual (*sains aqli*), yang meliputi matematika, fisika dan sains kealaman lainnya, filsafat, logika dan semacamnya.

150Ali Maksud dan Luluk Yunan Ruhendi, *Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern dan Post Modern*, Yogyakarta, IRCisod, 2004, h. 304-305.

151Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar*, h. 24-28.

Pendidikan tidak hanya berorientasi pada nilai akademik semata yang bersifat pemenuhan aspek kognitif saja tetapi juga berorientasi pada aspek afektif serta psikomotorik. Oleh karena itu, dalam era globalisasi ini pendidikan Islam mampu melahirkan lulusan yang berorientasi masa depan, bersikap progresif, mampu memilah dan memilih secara bijak dan membuat perencanaan dengan baik.

Pendidikan Islam seharusnya mampu menghasilkan anak didik yang memiliki keseimbangan antara penggunaan otak kiri dan otak kanan,¹⁵² manusia yang mempunyai kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Dengan kata lain, Pendidikan Islam juga memberikan keseimbangan antara pendidikan jasmani dan rohani, keseimbangan antara pengetahuan alam dan pengetahuan sosial dan budaya serta keseimbangan antara pengetahuan masa kini dan pengetahuan masa lampau.

Dengan demikian dapat dirinci bahwa pendidikan Islam harus mampu melahirkan peserta didik yang mempunyai ciri-ciri; 1) Terbuka dan bersedia menerima hal-hal baru hasil inovasi dan perubahan, (2) berorientasi demokratis dan mampu memiliki pendapat yang tidak selalu sama dengan pendapat orang lain, (3) berpijak pada kenyataan, menghargai waktu, konsisten dan sistematis dalam menyelesaikan masalah, (4) selalu terlibat dalam perencanaan dan pengorganisasian, (5) memiliki keyakinan bahwa segalanya dapat diperhitungkan, (6) menyadari dan menghargai pendapat orang lain, (7) rasional dan percaya pada kemampuan Iptek, (8) menjunjung tinggi keadilan berdasarkan prestasi, kontribusi, dan kebutuhan, (9) berorientasi pada produktivitas, efektivitas, dan efisiensi.¹⁵³

Peserta didik yang memiliki ciri-ciri seperti itulah yang harus dihasilkan oleh dunia pendidikan Islam, yaitu manusia yang penuh kepercayaan diri (*Self confident*) serta mampu melakukan pilihan

152Dalam psikologi kontemporer dikatakan bahwa otak kiri cenderung bekerja secara linear, matematis, kuantitatif, repetitif, dan parsial. Sedangkan otak kanan cenderung bekerja secara inovatif, kontemplatif, sintetik, holistik dan komprehensif. Komaruddin Hidayah, et.al., *Agama di Tengah Kemelut*, Jakarta, Mediacita, 2001, cet II, h. 93.

153Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999, Cet. II, h.47.

secara arif serta bersaing dalam era globalisasi yang kompetitif.¹⁵⁴

D. Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa paradigma baru pendidikan Islam ialah menghilangkan pemikiran-pemikiran dikotomi dikalangan pendidik dan peserta didik atau seluruh komponen pendidikan. Atau dengan kata lain pendidikan non dikotomi (integral).

Demikian halnya dengan peserta didik dalam gagasan baru paradigma pendidikan Islam seharusnya diberikan bagaimana mengembangkan potensi yang dimilikinya, sehingga mampu belajar menyelesaikan seluruh problematika kehidupan atau dengan istilah *learning how to learn* (belajar bagaimana belajar).

¹⁵⁴Abuddin Nata, *Pendidikan Islam di Indonesia; Tantangan dan Peluang*, dalam pidato pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta, 20 Maret 2004, h. 47.

BAB 6

MENJADI GURU YANG PROFESIONAL

A. Pendahuluan

Guru dalam perspektif dunia pendidikan adalah salah satu komponen yang menjadi indikator kemajuan pendidikan, hal ini disebabkan guru memegang peranan penting dalam mencerdaskan peserta didik. Tentu saja pernyataan ini harus dibarengi kerja profesional yang merupakan sebuah keniscayaan dalam proses pendidikan. Guru kini atau termasuk para dosen sudah banyak melupakan komitmen yang dibangun cendikiwaan pendidikan Khajar Dewatara

Dalam proses pendidikan guru adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Hal ini disebabkan guru tidak hanya menjalankan fungsi alih ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi juga berfungsi untuk menanamkan nilai (*values*), serta membangun karakter (*Charcter building*) pesrta didik. Secara jujur bahwa dalam proses pendidikan yakni belajar mengajar, sangat ditentukan oleh faktor guru, bahkan guru adalah pahlawan tanpa jasa. Kedudukan guru memang belum bisa disejajarkan dengan penyandang profesi lain seperti dokter, hakim, wartawan, dan insiyur. Karena itu, secara jujur diakui bahwa guru amat penting dan tidak seorang pun yang bisa baca tulis tanpa adanya guru.

Guru sebagai aktor utama dalam praksis pendidikan selama ini belum memperoleh apresiasi yang baik oleh pemerintah termasuk masyarakat. Sebagai penyandang profesi, kedudukan guru masih berada di kelas bawah dibandingkan dengan profesi lain. Padahal tugas yang disandang guru tidak lebih ringan bila dibandingkan

dengan profesi lainnya, karena guru berhadapan dengan manusia yang senantiasa menghabiskan energi psikis dari pada fisik. Guru adalah salah satu komponen dalam proses belajar mengajar yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan.

Kenyataan yang terjadi dalam dunia pendidikan adalah rendahnya kualitas dan kualifikasi guru dalam proses belajar mengajar, hal ini terjadi pada pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, dalam menghadapi persaingan globalisasi guru dituntut bersaing dengan pekerja profesional lainnya, seperti ekonomi, globalisasi misalnya menuntut teknologi produksi yang semakin lama semakin tinggi hasilnya, sehingga berakibat pada semakin tinggi kualitas dan kompetensinya yang dituntut kepada para guru.

Problematika yang dihadapi pendidikan Islam saat ini adalah masih banyaknya para guru yang mengajar di sekolah-sekolah tidak berdasarkan pada kualifikasi dan kompetensi dasar,¹⁵⁵ atau bidang keahlian pada mata pelajaran yang diajarkan, karena dalam proses pembelajaran mereka hanya menekankan pada materi pelajaran sementara teknik dan metode mengajar cenderung diabaikan, sehingga akhirnya kegiatan belajar mengajar menjadi vakum dan monoton sehingga guru kehabisan bahan/materi pelajaran dan siswa tidak memiliki kemampuan atau keterampilan yang diharapkan.

Banyak guru SD yang hanya memiliki dasar pendidikan SGA dan dari sisi kemampuan dianggap tidak kompeten. Oleh karenanya sangat jelas bahwa penilaian guru masih terbatas pada kemampuan mengajar dan tidak diukur dari kemampuan memberikan suri tauladan kepada murid-muridnya. Seharusnya guru memiliki kemampuan dalam mengelola proses pembelajaran di kelas, di mana fungsi guru sudah tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar tetapi beralih pada pelatih, pembimbing atau sebagai manajer belajar

¹⁵⁵Yang sangat memprihatinkan adalah banyaknya para guru yang diangkat berdasarkan pada nepotisme yang lebih mementingkan karib kerabat dibandingkan nilai profesionalisme atau *capability*, sehingga guru tersebut tidak semaksimal dalam mentransfer ilmunya dan mendidik siswa sesuai dengan yang diharapkan. H. Syaikani, HR, *Titik Temu dalam Dunia Pendidikan; Tanggung Jawab Pemerintah, Pendidik, Masyarakat dan Keluarga dalam Membangun Bangsa*, Jakarta, Nuansa Madani, 2002, Cet. I h. 94.

yang mampu membimbing siswanya dalam mengembangkan potensi dan memiliki kreatifitas yang tinggi serta sikap inovatif sehingga mereka dapat bersaing dalam masyarakat global.¹⁵⁶

B. Guru Dalam Perspektif Pendidikan Islam

Guru dalam literatur kependidikan Islam biasa disebut sebagai *ustadz*, *mu'allim*, *murabby*, *mursyid*, *mudarris*, dan *mu'addib*.¹⁵⁷ Kata *ustadz*, biasa digunakan untuk memanggil seorang profesor. Ini mengandung makna bahwa seorang guru dituntut untuk komitmen terhadap profesionalisme dalam mengemban tugas. Kata *mu'allim*, berasal dari kata *'ilm* yang berarti menangkap hakekat sesuatu. Hal ini mengandung makna bahwa seorang guru dituntut untuk mampu menjelaskan hakikat ilmu pengetahuan yang diajarkannya, serta menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya, dan berusaha membangkitkan siswa untuk mengamalkannya.

Kata *murabbi* berasal dari kata dasar *Rabb*. Tuhan adalah sebagai *Rabb al-'alamin* dan *Rabb al-nas* yakni menciptakan, mengatur, dan memelihara alam seisinya termasuk manusia. Di lihat dari pengertian ini, jadi tugas guru adalah mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi, sekaligus mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat dan alam sekitarnya. Kata *mursyid* dalam arti tersebut guru harus berusaha menularkan penghayatan (*transinternalisasi*) akhlak/kepribadiannya kepada peserta didiknya, baik yang berupa etos ibadah, etos kerja, belajar, maupun dedikasinya yang mengharapkan ridha Allah semata. Dalam konteks ini mengandung makna bahwa guru merupakan model atau sentral identifikasi diri, yaitu pusat panutan dan teladan bahkan konsultan bagi peserta didiknya.

Kata *mudarris* berasal dari akar kata *darasa-yudrusu-darsan wa durusan wa dirasatan*, yang berarti: terhapus, hilang, bekasnya, menghapus, menjadikan usang, melatih serta mempelajari. Maka

156Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar; Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, Jakarta, Paramadina, 2001, cet. h. 39.

157Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, h. 209.

tugas guru adalah berusaha mencerdaskan peserta didiknya, menghilangkan ketidaktahuan, atau memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan mereka sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan. Sedangkan kata *mu'addib* berasal dari kata *adab* yang berarti moral, etika, dan adab atau kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir dan batin. Kata peradaban (Indonesia) juga berasal dari kata *adab*, sehingga guru adalah orang yang beradab sekaligus memiliki peran dan fungsi untuk membangun peradaban (*civilization*) yang berkualitas di masa depan.

Dari hasil telaah terhadap istilah-istilah dan makna guru dalam kajian literatur kependidikan Islam ditemukan bahwa guru adalah orang yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Mempunyai Komitmen terhadap profesionalitas, yang melekat pada dirinya sikap dedikatif.
- b. Mempunyai komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap *continous improvement*.
- c. Menguasai Ilmu dan mampu mengembangkan serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya, atau sekaligus melakukan *transfer ilmu pengetahuan, internalisasi*, serta *amaliah* (implementasi).
- d. Mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi, serta mampu mengatur memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, alam sekitarnya.
- e. Mampu menjadi model atau sentral *identifikasi diri*, atau menjadi pusat panutan, telandan dan konsultan bagi peserta didiknya.
- f. Memiliki kepekaan intelektual dan informasi, serta memperbaharui pengetahuan dan keahlian secara berkelanjutan, dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat kemampuannya.
- g. Mampu bertanggung jawab dalam dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan

C. Profesionalisme Guru

Profesi seorang pendidik dalam garis besarnya ada tiga yaitu: *Pertama*, seorang guru yang profesional harus menguasai bidang ilmu pengetahuan yang akan diajarkannya dengan baik. Ia benar-benar seorang ahli dalam bidang yang diajarkannya. *Kedua*, seorang guru yang profesional harus memiliki kemampuan yang menyampaikan atau mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada peserta didik secara efektif dan efisien. Untuk itu, seorang guru harus memiliki ilmu keguruan. *Ketiga*, seorang guru yang profesional harus berpegang teguh kepada kode etik profesional. Kode etik disini perlunya tekanan memiliki akhlak mulia. Dengan akhlak mulia guru akan dijadikan panutan.¹⁵⁸

Sehubungan dengan itu, sebagai tenaga profesional yang memiliki *accountabilitas* yang handal setidaknya guru memiliki tingkatan kualifikasi *capabel personal*, maksudnya guru memiliki pengetahuan, kecakapan dan keterampilan serta sikap yang lebih mantap dan memadai dalam mengelolah proses belajar mengajar. Untuk itu, guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses belajar mengajar yaitu:

- a. Perlu memposisikan diri sebagai inovator. Artinya sebagai tenaga pendidik perlu memiliki komitmen terhadap upaya perubahan dan pembaharuan dalam menyampaikan ide-ide dan konsep pembaharuan dalam pengembangan ilmu lebih lanjut.
- b. Motivator, posisi ini penting artinya dalam meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa. Dengan kata lain, guru memberikan *stimulus* dan dorongan serta *reinforcement* untuk mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan aktivitas dan kreativitas dalam proses belajar mengajar.
- c. Selain itu guru juga harus bertindak sebagai Organisator, dalam hal ini guru adalah pengelolah kegiatan akademik silabus,

158Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan; Mengatasi Kelemahan Pendidikan di Indonesia*, h. 142-143.

jadwal pelajaran, dan komponen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar demi tercapainya efektivitas dan efisiensi kondisi pembelajaran.

- d. Guru mempunyai posisi sebagai direktor artinya jiwa kepemimpinan bagi guru lebih menonjol, karena ia harus membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
- e. Sebagai fasilitator dalam hal ini, guru memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar seperti menciptakan suasana yang kondusif atau memberi bimbingan dalam pengembangan potensi pada diri siswa.
- f. Guru sebagai evaluator, pada peran ini, guru memiliki otoritas untuk menilai prestasi siswa dalam bidang akademik maupun dalam tingkah laku sosialnya sehingga dapat diketahui berhasil atau tidak. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan tidak hanya bagaimana siswa dapat menjawab soal, tetapi perlu diperhatikan pula bentuk perilaku mereka terutama yang berkaitan dengan *values*.¹⁵⁹

Secara umum Dede Rosyada menjelaskan bahwa secara umum guru harus memenuhi dua kategori yaitu pertama, memiliki *capability* dan *loyalty*, yakni guru itu harus memiliki kemampuan dalam bidang ilmu yang diajarkannya, memiliki kemampuan teoritik tentang mengajar yang baik, dari mulai perencanaan, implementasi sampai evaluasi. kedua, memiliki loyalitas keguruan, yakni terhadap tugas-tugas keguruan yang tidak semata-mata di dalam kelas, tapi sebelum dan sesudah di kelas.¹⁶⁰ Di samping itu seorang guru harus memiliki kemampuan memadai dalam bidang ilmu yang akan diajarkannya, yakni memiliki penguasaan bidang ilmu dan loyal dengan ilmu tersebut, yakni terus mengikuti perkembangan dengan senantiasa meningkatkan keilmuannya lewat bacaan, menulis, serta mengikuti tulisan-tulisan dalam jurnal.¹⁶¹

Pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang guru harus profesional dalam bidang ilmu yang ditekuni, dan senantiasa

159Herwina Bahar dan Samsul Bahri, *Diktat Ilmu Pendidikan*, h. 32.

160Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis*, h.112.

161Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis*, h.118.

mengembangkan keilmuannya serta mempunyai loyalitas yang tinggi sesuai dengan kode etik dalam hal ini yang dimaksud akhlak yang mulia. Dalam hubungan dengan keberhasilan dalam mendidik Abuddin Nata menjelaskan bahwa guru harus mampu melaksanakan kegiatan mengajarnya, dan menghidupkan gagasan-gagasan yang besar, keinginan yang besar pada murid-muridnya.¹⁶²

Di samping itu, untuk menjadi guru yang baik, ia harus merenung dan membaca. Untuk ini guru membutuhkan waktu. Kalau waktu dihabiskan untuk mengajar dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain setiap hari, dari pagi, sampai malam, maka tidak ada kesempatan baginya untuk meningkatkan kemampuan sebagai pendidik.¹⁶³

Sementara itu, Dede Rosyada menjelaskan untuk menjadi guru yang baik, seseorang harus memiliki berbagai kriteria atau sifat-sifat yang diperlukan untuk profesi keguruan yaitu antusias, stimulatif, mendorong siswa untuk maju, hangat, berorientasi pada tugas, dan bekerja keras, toleran, sopan dan bijaksana, bisa dipercaya, fleksibel, dan mudah menyesuaikan diri, demokratis penuh harapan bagi siswa, tidak semata-mata mencari reputasi pribadi, mampu mengatasi stereotipe siswa, bertanggung jawab terhadap kegiatan belajar siswa, mampu menyampaikan perasaannya dan memiliki pendengaran yang baik.¹⁶⁴ Lebih jelasnya Zakiah Darajat menjelaskan bahwa seorang guru hendaknya mengetahui bagaimana cara siswanya belajar dengan baik dan berhasil,¹⁶⁵ untuk itu perlu memperhatikan unsur-unsur di bawah ini:

1. Kegairahan dan kesediaan untuk belajar

Seorang guru yang berpengalaman tidak berusahahan mendorong

162Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan; Mengatasi Kelemahan Pendidikan di Indonesia*, h. 146.

163Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan; Mengatasi Kelemahan Pendidikan di Indonesia*, h. 147.

164Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis*, h.118.

165Zakiah Darajat, *Kepribadian Guru*, Jakarta, Bulan Bintang, 1982, Cet 3, h. 16-47.

siswanya untuk mempelajari sesuatu di luar kemampuannya dan tidak pula memaksakan pengetahuan ke otaknya yang tidak sesuai dengan kematangan atau sejalan dengan pengalamannya. Guru juga perlu memperhatikan metode yang dipergunakan supaya sesuai materi yang diberikan.

2. Membangkitkan minat siswa

Titik permulaan dalam mengajar yang berhasil adalah membangkitkan minat siswa dalam belajar dengan memberikan rasa senang terhadap materi pelajaran yang diberikan sehingga mereka merasakan manfaatnya.

3. Mengatur proses belajar mengajar

Mengatur pengalaman belajar dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengannya adalah faktor utama dalam berhasilnya proses belajar mengajar. Hal ini memudahkan siswa dalam memperoleh pengalaman belajar dan dapat merasakan makna belajar secara langsung.

4. Terciptanya hubungan manusiawi dalam situasi pengajaran

Kegairahan siswa atau penolakan terhadap pelajaran, kecondongannya untuk pergi ke sekolah atau lari dari padanya, seringkali disebabkan oleh adanya hubungan antara ia dengan gurunya atau sesama teman. Oleh karena itu, perlu guru membangun harmonisasi dalam kelas dan kesenangan belajar.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa tugas pokok seorang guru adalah mengajar dan mendidik. Mengajar mengacu pada pemberian pengetahuan dan melatih keterampilan dalam melakukan sesuatu, sedangkan mendidik mengacu pada upaya membina kepribadian dan karakter anak didik dengan nilai-nilai tertentu, sehingga nilai-nilai tersebut mewarnai kehidupannya dalam bentuk perilaku dan pola hidup sebagai manusia yang berkhilak.

Selanjutnya Abuddin Nata menjelaskan bahwa kehadiran era millenium ketiga atau globalisasi¹⁶⁶ dunia pendidikan mendapat

¹⁶⁶Globalisasi acapkali dipahami sebagai suatu kekuatan raksasa yang mempengaruhi tata kehidupan dunia secara menyeluruh, simultan, dan berdampak *multiplayer effects*. Pengaruh globalisasi, dunia terasa menjadi kecil dan transparan. Hampir tidak ada rahasia suatu negara yang tidak diketahui oleh negara lain. Misalnya untuk menghadiri seminar internasional orang tidak perlu ke luar negeri, setiap peserta dapat berada di

tantangan serius, sehingga guru sebagai pemeran utamanya, harus mampu membangun profesionalismenya.¹⁶⁷ Oleh karena itu, seiring dengan perubahan di era globalisasi ini paradigma komponen pendidikan, maka paradigma guru harus mengalami perubahan. Keadaan guru pada era globalisasi berbeda dengan keadaan guru pada era agrikultural. Jika pada era agrikultural guru merupakan satu-satunya tempat untuk digugu dan ditiru, dimuliakan, dihormati dan seterusnya, maka pada era globalisasi sekarang ini, guru bukan satu-satunya lagi *agen of information* karena masyarakat sudah memiliki banyak jaringan informasi yang dapat diakses lewat peralatan teknologi canggih.¹⁶⁸

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka fungsi guru mengalami perubahan dan pengembangan. Guru dapat berfungsi sebagai *motivator* yang menggerakkan anak didik pada sumber belajar yang dapat diakses, *dinamisator* yang memacu anak didik agar mengembangkan kreativitas dan imajinasinya, *evaluator* dan *justificator* yang menilai dan memberikan catatan, tambahan, pembenaran, dan sebagainya terhadap hasil temuan siswa. Pengajar tidak lagi berfungsi jadi kyai yang didatangi santri, guru yang mendatangi siswa, melainkan sebagai mitra.¹⁶⁹ Hal inilah yang dimaksud Paulo Freire seorang tokoh pendidikan dari Brazil yang memakai istilah pendidikan hadap masalah suatu pendidikan yang menjadikan mitra peserta didik atau membangun hubungan dialogis antara murid dan guru, sehingga tidak ada kontradiksi¹⁷⁰

Pendidikan hadap masalah yang dikemukakan Paulo Freire sebenarnya mengisyaratkan bahwa dunia pendidikan seharusnya mampu memerdekakan atau membebaskan seluruh komponen pendidikan baik guru, peserta didik, kurikulum, maupun lembaga pendidikannya. Oleh karena itu, sosok guru dalam pendidikan

negeri masing-masing. Demikian seterusnya. Dunia benar-benar menjadi semakin kecil, pengaruh globalisasi merambah ke seluruh dunia dan menjamah setiap aspek kehidupan tanpa mengenal batas, termasuk bidang pendidikan. Lihat Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, h. 43.

167Abuddin Nata, *Paradigma Pendidikan Islam*, h. 147.

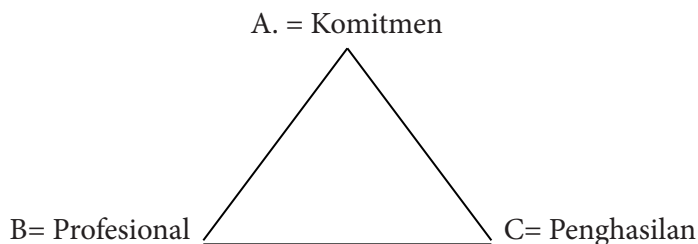
168Abuddin Nata, "Tantangan dan Peluang Pendidikan di Indonesia", h. 50.

169Abuddin Nata, "Tantangan dan Peluang Pendidikan di Indonesia", h. 50.

170Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*, Terj. Jakarta, LP3ES, 2000, h. 61.

ini seharusnya dapat menjadi guru merdeka atau guru yang membebaskan dalam proses pendidikan. Guru yang merdeka harus mampu melihat kenyataan atau realitas, harus mampu membangun demokratis dalam kelas, mampu menciptakan suasana dialogis, serta guru harus mampu menjadi seniman.¹⁷¹

Untuk dapat melakukan fungsi itu, guru di masa sekarang harus memiliki sikap-sikap sebagai manusia yang modern, yaitu manusia yang berpikir rasional, dinamis, kreatif, inovatif, berorientasi pada produktivitas, bekerja secara profesional, berwawasan luas, berpikir jauh ke depan, menghargai waktu, dan seterusnya.¹⁷² Hal itu dilakukan kerana masyarakat yang perlu dipersiapkan oleh guru di masa sekarang adalah manusia yang akan memasuki era modern. Oleh sebab itu, guru era modern menurut Mastuhu harus bebas dari tiga masalah berikut :



- Mereka harus memiliki komitmen tinggi, mengabdikan, dan merasakan pendidikan sebagai panggilan tugas. Jangan menjadi guru atau dosen karena tidak ada pekerjaan lain.
- Profesional lengkap dengan kepekaan misi dan ketajaman visi serta kecanggihan metodologi.
- Guru, dosen, dan ilmuwan perlu memiliki tanggapan 30 hari dalam sebulannya.¹⁷³

Seorang guru di masa sekarang adalah seorang guru yang berkepribadian dan berakhlak mulia dan tangguh. Hal itu dirasakan perlu karena pada masa tersebut arus informasi yang berasal dari

¹⁷¹Baca Paulo Freire, *Menjadi Guru Yang Merdeka*, Terj. Yogyakarta, LkiS, 2001, h. 36-74.

¹⁷²Abuddin Nata, *Paradigma Pendidikan Islam*, h. 149.

¹⁷³Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, h. 17-18

dunia Barat akan semakin berat.¹⁷⁴ Demikian pula tantangan yang dihadapi murid di bidang moral juga semakin berat. Untuk itu, seorang guru harus memperlihatkan sikap yang besar terhadap pembinaan akhlak para murid.

D. Mewujudkan Profesionalisme Guru Melalui Sertifikasi

Sertifikasi guru merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam upaya membangun profesionalisme sang guru, dan untuk meningkatkan kesejahteraannya yang terus terpinggirkan. Namun demikian, mutu profesionalisme guru yang masih belum memadai dan optimal yang dikemukakan di atas, diperlukan upaya peningkatan terhadap profesionalisme guru tersebut.

Upaya penilaian terhadap kinerja guru secara berkala untuk menjamin agar kinerja guru tetap memenuhi syarat profesionalisme. Tanpanya, Menteri Pendidikan Nasional, mencanangkan guru yang profesional. Tetapi, wacana yang mencuat ini terkait dengan rencana kebijakan tersebut adalah sertifikasi dan uji kompetensi guru, sebagai suatu wujud langkah untuk meningkatkan kualitas guru. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, tanpanya pemerintah memandang perlu pembentukan sebuah badan independen profesi guru yang menilai profesionalisme guru.

Badan tersebut, nantinya akan mengeluarkan sertifikat bagi para guru yang dinilai memiliki kompetensi atau memenuhi persyaratan sebagai profesi guru. Rencana tersebut, dikuatkan dengan keputusan Presiden dan kini sedang digodok oleh tim kecil dengan unsur di antaranya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan [LPTK] dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, mengatakan bahwa badan independen tersebut nantinya berada di luar LPTK dan anggotanya juga tidak harus berprofesi sebagai guru, tetapi siapa saja yang memiliki keperdulian dan integritas untuk itu dapat menilai dan menjaga kewibawaan profesi guru. Badan tersebut mewakili *stakeholder* atau kepentingan publik, mulai dari pengguna, penyedia, pengatur, dan pengawas

174Abuddin Nata, *Paradigma Pendidikan Islam*, h. 150.

tenaga kependidikan.

Lebih lanjut menurutnya, bahwa program dan penetapan kelulusan pendidikan profesi, juga ditentukan oleh badan profesi tersebut dan akan disusun persyaratan sehingga tidak semua LPTK dapat menyelenggarakan pendidikan profesi tersebut¹⁷⁵.

Kebijakan ini, tentu berdampak serius pada lembaga-lembaga pendidikan yang memproduksi tenaga keguruan, karena lembaga-lembaga pendidikan yang berkualifikasi sajalah yang dapat dibenarkan untuk mendidik para calon guru. Para calon guru harus mencapai gelar sarjana dahulu baru kemudian mengambil profesi guru dan untuk menjaga kualitas profesi guru direncanakan semacam lisensi guru yang tidak berlaku selamanya, tetapi harus diperbaharui dalam jangka waktu tertentu. Lisensi guru dapat dicabut jika guru tersebut membuat kesalahan atau melanggar kode etik profesinya¹⁷⁶

Kebijakan ini, perlu dihargai bagi pihak-pihak yang terlibat dalam dunia Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, karena kebijakan tersebut untuk mengangkat harkat dan wibawa guru, sehingga lebih dihargai oleh pemakai tenaga profesi ini yang juga akan diikuti dengan standar gaji dan penghargaan yang layak bagi guru yang memiliki sertifikat tersebut. tetapi, dalam kebijakan tersebut ada hal yang perlu dicermati yaitu "badan independen sertifikasi guru" tersebut berada di luar Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan [LPTK]. Artinya anggotanya juga tidak harus berprofesi sebagai guru, tetapi siapa saja yang diambil dari unsur-unsur yang "tidak berprofesi guru", tetapi memiliki keperdulian dan integritas untuk dapat menilai dan menjaga kewibawaan guru. Hal ini, tentu akan menjadi tantangan dan persoalan serius bagi orang yang memiliki profesi guru itu sendiri dan mungkin juga guru yang sekarang sudah mengajar akan dinilai ulang oleh lembaga tersebut. Suatu hal yang sangat ironis sekali, guru-guru akan dinilai oleh "badan independen sertifikasi guru" yang tidak memiliki kompetensi kependidikan. Abdorrahman Gintings, pengamat pendidikan dari Universitas Buya Hamka [Uhamka], menyatakan bahwa sungguh sangat tidak profesional jika masyarakat terkait guru dan pengelola pendidikan

¹⁷⁵kompas, 24, Nopember, 2004.

¹⁷⁶kompas, 24, Nopember, 2004

tidak diajak bicara dan juga tidak tepat jika nantinya keanggotaan badan independen sertifikasi guru dapat diambil dari unsur-unsur yang tidak berprofesi guru yang kelak mengeluarkan sertifikasi bagi guru yang dianggap kompeten.

Penilaian terhadap profesi guru mungkin dapat dilakukan oleh badan tersebut dengan baik, tetapi hasilnya mungkin kurang valid dan akurat, karena kemampuan guru dinilai oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi dalam bidang kependidikan dan keguruan. Sebab, penilai terhadap profesi guru tidak hanya sekedar pada aspek kualitas, administrasi dan manajemen saja, tetapi masalah guru lebih luas dan kompleks yaitu menyangkut dengan kemampuan profesional, personal, sosial termasuk perilaku dan kurangnya penghargaan yang layak terhadap profesi guru. Abdorrahman Gintings,¹⁷⁷ mencontohkan bagaimana tingginya pengetahuan seseorang tentang medis, tetapi dia bukan dokter, tetap tidak pantas ikut menyertifikasi profesi dokter. Begitu juga sertifikasi guru, bagaimana tingginya pengetahuan seseorang tentang pendidikan, tetapi dia bukan berprofesi sebagai guru, maka tidak pantas ikut menyertifikasi profesi guru.

Guru yang setiap harinya menggeluti profesinya dalam proses belajar mengajar dan tahu betul tentang prinsip-prinsip keguruan yang memiliki kompetensi atau memenuhi persyaratan untuk profesinya itu yang pantas dan layak dilibatkan dalam “badan independen sertifikasi guru” untuk melakukan sertifikasi terhadap guru dan bukan dari unsur-unsur yang tidak memiliki profesi sebagai guru.

Menurut Abdorrahman, jika kebijakan ini “dipaksakan, maka pemerintah bakal melecehkan dan mengusik nurani 2,2 juta guru di Tanah Air” Indonesia ini. Maka, jangan sampai kebijakan tentang guru yang sifatnya fundamental ditetapkan terburu-buru dan sepihak tanpa melibatkan masyarakat guru itu sendiri. Kemampuan guru dalam upaya mendidik jangan disederhanakan dengan kemampuan mengajar saja, sehingga dapat dinilai sepiantas oleh siapa saja. Tetapi, mendidik bukan sekedar membutuhkan pemahaman tentang materi

177Kompas, 26, Nopember, 2004

pelajaran, tetapi juga melibatkan hati dan nurani dalam wujud interaksi antara guru dan murid, karena mendidik membutuhkan penjiwaan.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Oleh karena itu, dari pemahaman tersebut sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tersebut. Ketentuan mengenai sertifikasi secara normatif dimaksudkan untuk memberikan jaminan profesionalitas guru dan dosen.¹⁷⁸

Dalam hal ini sertifikasi merupakan prosedur untuk menentukan apakah seorang calon guru layak diberikan izin dan kewenangan untuk mengajar. Ini diperlukan karena lulusan lembaga pendidikan tenaga keguruan sangat bervariasi, baik di kalangan perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Menurut E. Mulyasa, pada hakikatnya standar kompetensi dan sertifikasi guru adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan pada umumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁷⁹ Dalam upaya menjamin mutu guru agar memenuhi standar kompetensi, maka sertifikasi merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Oleh karena itu, tujuan sertifikasi guru adalah:

- a. Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
- b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan.

¹⁷⁸Baca Asrorun Ni'am Sholeh, *Membangun Profesionalitas Guru*, Jakarta, elsas, 2006, h. 90.

¹⁷⁹Baca E.Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung, Rosdakarya, 2007, h. 17.

- c. Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidik, dengan menyediakan rambu-rambu dan instrument untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten.
- d. Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
- e. Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan.¹⁸⁰

Dengan demikian proses sertifikasi guru merupakan bagian esensial dalam upaya memperoleh pengakuan atas kompetensi guru untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Oleh sebab itu, sertifikasi guru perlu dihargai sebagai wujud perhatian terhadap nasib guru yang terpinggirkan. Tetapi, pemerintah harus mengikutsertakan guru-guru atau tenaga kependidikan sebagai variabel penting dalam "badan independen sertifikasi guru" tersebut dan badan tersebut tetap berada dalam Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan [LPTK] atau pemerintah tidak perlu membentuk badan baru untuk melakukan sertifikasi tetapi akan lebih baik jika Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan [LPTK] atau universitas keguruan eks IKIP diberdayakan untuk melakukan sertifikasi guru. Lembaga-lembaga kependidikan yang menyelenggarakan program Akta IV sebagai upaya untuk sertifikasi guru, perlu ditingkatkan kualitasnya baik dari sisi profesional penyelenggaraan, kurikulum, metode pembelajaran, sistem penilaian dan manajemennya, sehingga memiliki "kualifikasi" untuk dapat mendidik para calon guru yang profesional. Membangun profesionalisme guru, maka permasalahan guru harus diselesaikan secara komprehensif yang menyangkut dengan semua aspek yang terkait, yaitu aspek kualifikasi, kualitas, pembinaan, training profesi, perlindungan profesi, manajemen, kesejahteraan guru, dan tersedianya fasilitas yang memadai. Penghargaan pada profesi guru yang kurang optimal, dan para guru selalu dinilai kinerjanya rendah dan kurang optimal. Maka menurut Hujair AH. Sanaky¹⁸¹

180Baca E.Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, h. 35.

181Hujair AH. Sanaky adalah dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

perlu ada perhatian yang serius kepada para guru, yaitu mereka harus selalu mendapatkan pelatihan dalam bidang pengetahuan dan keterampilan baru yang diperlukan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Perlu ada sistem peningkatan pengetahuan bagi guru secara tersistem dan berkelanjutan atau ada *inservice training* yang baik bagi para guru.

E. Penutup

Dari Pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk membangun profesionalisme guru, maka permasalahan guru harus diselesaikan secara komprehensif yang menyangkut dengan semua aspek yang terkait, yaitu aspek kualifikasi, kualitas, pembinaan, training profesi, perlindungan profesi, manajemen, kesejahteraan guru, dan tersedianya fasilitas yang memadai. Sungguh berat tugas guru, tetapi penghargaan pada profesi guru kurang optimal, tetapi para guru selalu dinilai kinerjanya rendah dan kurang optimal. Perlu ada perhatian yang serius kepada para guru, yaitu mereka harus selalu mendapatkan pelatihan dalam bidang pengetahuan dan keterampilan baru yang diperlukan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Perlu ada sistem peningkatan pengetahuan bagi guru secara tersistem dan berkelanjutan atau ada *inservice training* yang baik bagi para guru. Dengan adanya sertifikasi guru para guru dituntut harus siap untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu kinerjanya agar memiliki kompetensi yang optimal dalam usaha membimbing siswa agar siap menghadapi kenyataan hidup [*the real life*] dan bahkan mampu memberikan contoh tauladan bagi siswa, memiliki pribadi dan penampilan yang menarik, mengesankan dan menjadi dambaan setiap peserta didiknya.

BAB 7

PENDIDIKAN AKHLAK PADA PESERTA DIDIK

A. Pendahuluan

Pendidikan akhlak merupakan permasalahan utama yang selalu menjadi tantangan manusia sepanjang sejarahnya. Sejarah bangsa-bangsa, baik yang diabadikan dalam al-Qur'an seperti kaum Ad, Samud, Madyan dan negeri Saba, maupun yang ada dalam buku-buku sejarah menunjukkan bahwa suatu bangsa akan kokoh apabila akhlaknya kokoh dan sebaliknya suatu bangsa akan runtuh apabila akhlaknya rusak.¹⁸²

Nabi Muhammad Saw, yang diyakini oleh ummat Islam sebagai pembawa risalah Tuhan yang mempunyai tugas utama adalah penyempurna akhlak manusia (*innama bu'istu li utammima ma karima al-akhlaq*). Karena ketinggian Akhlak yang dimilikinya, menempatkan Nabi Muhammad sebagai tokoh urutan pertama yang paling berpengaruh dalam sejarah sebagai mana yang ditulis Michael H. Hart melalui bukunya yang berjudul *The 100, a Ranking of the Most Influential Persons in History*. Demikian halnya dunia pendidikan, khususnya di negeri ini dilanda kegelisahan, karena sistem pendidikan yang telah dibangun selama tiga dasawarsa terakhir ini ternyata belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan dan tantangan nasional dan era globalisasi dewasa ini. Atau meminjam istilah Azyumardi Azra "telah gagal" dalam membentuk peserta

¹⁸²Lihat Disertasi Suwito, *Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Ibn Miskawaih*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1995, h.1

yang memiliki akhlak, moral atau budi pekerti yang baik.¹⁸³ Hal ini tampaknya kita sudah terbiasa menyaksikan perilaku orang-orang terpelajar yang cenderung tampil kebablasan. Dalam artian, tidak asing lagi jika kita menyaksikan orang-orang cerdas yang kebetulan bertengger di "kursi panas", suka mengambil yang tidak pantas diambilnya. Pasalnya, selain memang tujuan pendidikan nasional belum berorientasi pada upaya pembentukan karakter, juga anak-anak bangsa terus dibombardir oleh berbagai jenis virus fungsional mematikan hati nurani.

Sekarang ini juga muncul kekerasan, tawuran antar pelajar, warga masyarakat, aparat dengan warga, siswa terlibat narkoba dan berbagai macam bentuk perilaku kekerasan, sehingga menggambarkan bangsa ini sedang sakit dan membutuhkan dokter spesialis untuk mengobati. Tampaknya ada yang "salah" dari agenda reformasi pendidikan, apakah sistem pendidikan yang salah karena hanya membentuk manusia-manusia yang tidak mampu,¹⁸⁴ menjadi beban dan brutal atautkah eksekusi dari kebijakan dan praktik pendidikan di masa "rezim Orde Baru"¹⁸⁵ yang otoriter, sehingga telah melahirkan sistem pendidikan yang tidak mampu melakukan pemberdayaan masyarakat secara efektif.

Makalah ini akan membahas urgensi pendidikan akhlak bagi peserta didik dengan memotret peran keluarga dan sekolah dalam menanamkan nilai. Uraian ini bersifat deskriptif dan literatur yang digunakan adalah buku-buku pendidikan yang otoritatif, adapun metode yang dipakai adalah metode historis dan komparatif.

B. Pendidikan Akhlak dalam Perpektif Sejarah

Dalam perspektif sejarah pendidikan akhlak sudah menjadi perhatian utama dan sangat menggelisahkan, karena itu, para tokoh-tokoh pendidikan Islam membuat karya tentang penting akhlak bagi

183Baca Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta, Kompas, 2002, h. 178.

184Soleh Solahuddin, *Urgensi Reformasi Pendidikan Nasional dalam Menuju Indonesia Baru Menggagas Reformasi Total*, (ed), Musa Kazhim, Pustaka Hidayat, 1998, h. 303.

185Orde Baru berlangsung selama 32 tahun telah berhasil membuat terlelap dalam tidur panjang.

peserta didik. Ini dapat dilihat karya Ibnu Sahnun dengan kitabnya *Adab al-Mu'alimin*; Ibnu Miskawaih dengan *Tahzibul al-Akhlaq wa Tathir al-A'araq*,¹⁸⁶ (menghalusi akhlak dan membersihkan Keturunan); Burhanuddin al-Zanuji, dengan kitabnya *Ta'lim al-Muta'lim, Tariq al-Ta'allumi* (mengajar pelajar dan cara belajar).

Karya-karya para tokoh-tokoh pendidikan zaman keemasan Islam di atas, maka hampir-hampir yang menjadi fokus kajian adalah bagaimana pentingnya akhlak bagi peserta didik. Hal ini menjadi prinsip ideal pendidikan adalah pendidikan yang berdikari, bergantung pada diri sendiri, kebebasan dan demokrasi dalam pendidikan, memperlakukan peserta didik sesuai dengan akalunya, bergaul dengan baik kepada mereka, serta mengajar mereka berakhlak.¹⁸⁷

Lebih jauh dari itu, memang sejak zaman kenabian telah menjelma orang-orang pintar dalam potret penyair ternama yang memiliki kemampuan estetika, cendikia-cendikia yang sangat ahli dalam berbagai cabang pengetahuan, dan bahkan muncul pula pebisnis tangguh dengan jaringan berskala multi-nasional. Namun zaman yang melahirkan banyak orang cerdas itu diklaim zaman *jahiliyah*. Kenapa ? Karena ketika itu, otak mereka cemerlang, tetapi iman dan akhlaknya menyedihkan.

Dalam konteks inilah, urgensi redefenisi atas tujuan dasar pendidikan nasional yang mengarah pada pembentukan karakter, atau pendidikan akhlak perlu segera diwujudkan. Pasalnya, ketika karakter dan kepribadian digapai, maka sudah pasti kecerdasan pun ikut serta menyusul. Namun sebaliknya, upaya penggapaian kecerdasan yang boleh jadi sukses gemilang, tetapi belum tentu berperilaku etis sebagaimana kini telah menjadi kenyataan pahit. Betapa banyak orang yang memang benar-benar mengagumkan kepintarannya. Akan tetapi, kebrutalannya pun tak pilih tanding. Atas dasar itulah, maka perspektif **dunia tauhid aktual** – meminjau istilah Fauzil Adhim, pendidik berkewajiban membangun kekuatan penggerak (*driving force*) dalam konteks pendidikan yang berbasis

186Suwito, *Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Ibn Miskawaih*, Disertasi, Pascasarjana IAIN, Jakarta, 1995.

187Hasan Langgulang, *Asas-asas Pendidikan Islam*, h. 145.

kultural sebagai masyarakat berbudaya dan religiusitas sebagai umat bergama. Seyogyanya, nilai budaya dan agama kita mampu menjadi motivasi internal yang mengkristal. Oleh karena itu, institusi dalam hal ini keluarga dan sekolah menjadi tempat yang paling utama untuk membentuk karakter peserta didik.

C. Peran Institusi Keluarga dalam Menanamkan Nilai

Keluarga menurut Abu Ahmadi dalam bukunya *Psikologi sosial* ,mengatakan keluarga adalah merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami istri dan untuk menciptakan dan membesarkan anak.¹⁸⁸ Sedangkan dalam arti normatif, keluarga adalah kumpulan beberapa orang yang karena terikat oleh sesuatu ikatan perkawinan, lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai sesuatu gabungan yang khas dan bersama memperteguh gabungan itu, untuk kebahagiaan, kesejahteraan dan ketenteraman semua anggota yang ada di dalam lingkungan tersebut.¹⁸⁹ Untuk itu, B. Clarce sebagaimana dikutip Hery Noer Ali mengungkapkan bahwa sistem pelajaran paling kuno adalah terjadinya proses harmonisasi dalam keluarga.¹⁹⁰ Dengan demikian, keluarga tetap merupakan pusat pendidikan pertama, tempat anak berinteraksi dan memperoleh kehidupan, bahkan keluarga juga merupakan lingkungan pendidikan yang urgen, tempat anak memulai hubungannya dengan dunia sekitarnya serta membentuk pengalaman-pengalaman yang membantunya untuk berinteraksi dengan lingkungan fisik dan sosial.

Karena itu, proses peletakan dasar-dasar Pendidikan (*basic education*) di lingkungan keluarga, merupakan tonggak awal keberhasilan proses pendidikan selanjutnya, baik secara formal maupun non formal. Demikian pula sebaliknya kegagalan pendidikan rumah tangga akan berdampak cukup besar pada keberhasilan pendidikan anak selanjutnya. Hal ini disinyalir Munir Mulkan bahwa terjadinya perilaku menyimpang dalam berbagai kebijakan pengelola pendidikan dan praktek pendidikan yang KKN (korupsi, kolusi dan

188Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991, h. 113

189 Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, h. 113.

190Hery Noer Ali ,H. Munzier S, *Watak Spritual Pendidikan* , h 74.

nepotisme) salah satu sebabnya karena terjadinya pemasangan daya kritis dan kreatif peserta didik dalam lingkungan keluarga dan di ruang kelas.¹⁹¹ Sebab menurut Reymond W. Murray, keluarga juga berfungsi sebagai, kesatuan keturunan (biologis) dan kebahagiaan bermasyarakat dan keluarga juga berkewajiban untuk meletakkan dasar pendidikan, rasa keagamaan, kemauan, rasa kesukaan kepada keindahan, kecakapan berekonomi dan pengetahuan penjagaan diri pada si anak.¹⁹² Peranan dan tanggung jawab keluarga atau kedua orang tua sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama yang mendidik dan mengasuh serta membina pribadi peserta didik harus senantiasa memberikan dan mewariskan pengalaman edukatif-Ilahiah yang dialogis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Kondisi ini sangat baik bagi tumbuhnya kepribadian anak secara optimal. Ini berarti tanggung jawab orang tua terhadap keberlangsungan pendidikan anaknya, pada dasarnya tidak bisa dipikulkan kepada orang lain.

Sementara itu keberadaan pendidik sebagai tenaga profesional dan keikutsertaan masyarakat dalam membantu proses pendidikan kepada peserta didik hanya merupakan keikutsertaan mereka membantu orang tua untuk mendidik dan membina peserta didik ke arah tercapainya suatu tujuan tertinggi secara optimal. Tidak berlebihan jika Nurcholis Madjid mengatakan aktor utama perkembangan anak didik adalah peran keluarga.¹⁹³ Meskipun ada sekolah atau guru berhasil memerankan pendidikan yang lebih bersifat afektif namun yang jelas bahwa segi afektif itu lebih mendalam diperoleh anak di rumah tangga melalui orang tua dan suasana umum di rumah. Peran orang tua di sini adalah peran dalam bertingkah laku, teladan dan pola-pola hubungannya dengan anak yang dijiwai dan disemangati oleh nilai-nilai keagamaan menyeluruh. Kemudian beliau mengutip pepatah, bahasa perbuatan adalah lebih fasih dari bahasa ucapan.

191Abdul Munir Mulkan, *Nalar Spritual Pendidikan*, h. 74.

192A. Muri Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, h. 26.

193Baca Kata Pengantar, *Nurcholis Madjid*, Pendidikan Langkah strategis Mempersiapkan SDM Berkualitas, dalam buku Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar, Menggagags Paradigma Baru Pendidikan*, h. Xii.

Jadi pendidikan menuntut tindakan percontohan karena hal itu lebih banyak daripada pengajaran verbal. Istilah yang populer di kalangan masyarakat dikatakan bahwa pendidikan dengan bahasa perbuatan untuk anak adalah lebih efektif dan lebih mantap daripada pendidikan dengan bahasa ucapan. Hal ini diakui Phillips, bahwa institusi keluarga hendaklah kembali *school of love*, sekolah untuk kasih sayang. Dalam perspektif Islam menurut Azra disebut *madrasah mawaddah wa rahmat*, tempat belajar yang penuh cinta sejati dan kasih sayang.¹⁹⁴ Lebih lanjut Muhammad Ali Murshafi menambahkan bahwa unsur terpenting nilai pendidikan yang ditanamkan institusi keluarga adalah nilai kejujuran dan amanah,¹⁹⁵ sehingga bekal peserta didik dalam proses pembelajaran di sekolah.

D. Peran Institusi Sekolah

Secara historis keberadaan sekolah sudah diakui keberadaannya sebagai lembaga penting dalam hal pendidikan setelah keluarga, sebab sekolah sangat berperan dalam menumbuhkan karakter anak. Di samping itu, sekolah merupakan tempat para peserta didik melakukan interaksi proses belajar mengajar sesuai dengan tingkatan tertentu secara formal.¹⁹⁶ Oleh karena itu, batasan yang ditawarkan memberikan gambaran bahwa fungsi sekolah untuk mewujudkan keterikatan, integrasi, homogenitas dan keharmonisan antar siswa.

Penyatuan siswa dalam satu sistem persekolahan menyebabkan anak-anak yang seharusnya ceria dan bebas merasa terikat oleh ikatan sosial yang menyatukan diri mereka. Dengan demikian sekolah harus berupaya menyatukan mereka dan meminimalisasi perbedaan-perbedaan di antara mereka. Dan sekolah tidak akan mampu menjadi pengikat hubungan bathin antar warga negara jika tidak dibangun atas dasar landasan pendidikan Islam. Menurut Arifin bahwa institusi sekolah merupakan cermin cita-cita masyarakat dan pada saat tertentu menjadi *agen of social change*, mencambuk kemunduran dan

194Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, h. 174.

195Muhammad Ali Murshafi, *Mendidik Anak Agar Cerdas dan Berbakti*, Surakarta, Ziyad Visi Media, 2009, h. 108.

196Anton Moeliono, et-al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, h. 892.

keterbelakangan masyarakat. Jadi antara sekolah dengan dinamika masyarakat berada dalam kompetisi ideal dan moral bagi kehidupan yang dicita-citakan.¹⁹⁷ Jadi institusi sekolah merupakan sarana yang paling vital dalam proses pemunculan kepribadian manusia seutuhnya. Bahkan Skinner seorang ahli Psikologi pendidikan asal Amerika yang dikutip H.M. Arifin tetap mempertahankan keberadaan sekolah sebagai suatu hal yang sangat penting, hanya saja sekolah harus mampu berperan aktif dalam pembudayaan masyarakat melalui teknologi untuk kesejahteraan hidupnya sehingga dapat menjalankan fungsinya¹⁹⁸ yakni membentuk warga negara yang efektif dan berpengetahuan.

Gagasan utama dari seluruh kegiatan pendidikan sekolah adalah bagaimana mengarahkan peserta didik mempunyai nilai positif yang tumbuh kuat dalam dirinya, sehingga nilai negatif tidak tumbuh.¹⁹⁹ Dalam bahasa yang sama yang bahwa pendidikan sekolah seharusnya mampu melahirkan peserta didik yang kreatif, inovatif, dinamis, bermoral, mandiri dan penuh percaya diri, menghargai waktu, memanfaatkan peluang, dan menjadikan orang lain sebagai mitra serta mempunyai kecerdasan spritual.²⁰⁰ Untuk mencapai tujuan di atas, pendidikan tersandung dengan berbagai problematika dan kelemahannya. Hal ini disebabkan model pembelajaran pendidikan Islam yang tidak pernah memberikan kebebasan pada peserta didik, untuk membuat ruang bebas berkreasi dan berkreatif merupakan barang langka dan mahal, sehingga muncul pemberontakan peserta didik yang selama ini diperlakukan tidak adil yang hak-hak dasarnya ditindak. Bahkan pendidikan hanya akan melahirkan peserta didik yang menurut istilah Azyumardi Azra yakni kesalehan individual

197H.M. Arifim, *Kapita Selekta Pendidikan, Islam dan Umum*, h. 68

198Fungsi sekolah ada delapan, yaitu: (1) untuk mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan, (2) memberikan keterampilan dasar, (3) membuka kesempatan memperbaiki nasib, (4) menyediakan tenaga pembangunan, (5) membantu memecahkan masalah sosial (6) mentranmisikan kebudayaan, (7) membentuk manusia sosial dan (8) mentranformasi kebudayaan. Lihat, S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 1995, h. 14-17.

199Munir Mulkhan, "Humanisasi Pendidikan Islam", *Jurnal Afkar*, edisi N0. 11, 2001, h. 17.

200Baca Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan Islam*, Jakarta, Prenada Media, 2003, h. 170.

saja, sementara kesalehan sosial hanya hiasan bibir (*live service*). Namun demikian wacana tentang lembaga pendidikan sekolah tidak akan pernah sepi dari kritikan-kritikan tajam yang dilontarkan oleh para intelektual, hal ini disebabkan karena model-model pendidikan sekolah yang diharap sebagai sebuah sarana memanusiakan manusia dan membebaskannya dari distorsi kemanusiaan yang hakiki tidak lagi terjadi, justru sebaliknya pendidikan tidak lagi membebaskan manusia atau peserta didik, serta seluruh komponen pendidikan.

Kenyataan tersebut, menyebabkan lahirnya pemikiran tentang wacana pembubaran lembaga sekolah, Ivan Illic misalnya mengatakan bahwa lembaga-lembaga sekolah yang sudah ada ini harus digusur alias dibubarkan semua. Menurutnya, sekolah bukanlah lembaga pendidikan akan tetapi lembaga penindasan rakyat kecil, lembaga yang melestarikan feodalisme, lembaga yang melanggengkan kolonialisme, lembaga yang menjunjung tinggi *status quo*, bahkan lembaga yang mengabdikan sistem persaingan model hukum rimba. Atau memakai istilah Ainurrafiq "*Emoh Sekolah* " karena sekolah dianggap sebagai biang keladi munculnya dikotomisasi antara pendidikan dan pengajaran atau penyekolahan.²⁰¹ Eksklusivisme lembaga sekolah adalah suatu bentuk pendidikan yang membelenggu dan tidak memberikan kebebasan kreatif kepada komponen pendidikan. Tragedi inilah yang menimpa pendidikan Islam seperti disinyalir Muhammad Abduh (1849-1905) bahwa model pembelajaran yang diajarkan bersifat hafalan, bahkan Abduh mengkritik keras pengajaran di al-Azhar Mesir.²⁰² Hasil dari proses pembelajaran tersebut menurut Abduh hanya akan menghasilkan lulusan dan masyarakat yang *jumud*, membeku, statis, tidak ada perubahan. Oleh

201Ainurrofiq, *Emoh Sekolah*, Yogyakarta, Inspel Ahimakarya Press, 2003, h. 43.

202Di antara kritik yang dimajukan ketika itu ialah: kurikulum al-Azhar banyak menekankan kepada perbedaan pendapat dari pada mempelajari nilai argumentasinya, perbedaan bahasa daripada arti dan tujuan gramatika bahasa, hukum-hukum fiqh yang timbul dalam saat tertentu daripada metode penilaian hukum-hukum tersebut telah dijadikan pedoman. Oleh karena itu, Abduh mencari ilmu-ilmu yang disebut oleh Syaikh Darwisy di luar al-Darwasy di luar al-Azhar. Ilmu-ilmu itu ia jumpai pada seorang ulama yang bernama Syaikh Hasan Thawil yang mengetahui filsafat, logika, ilmu ukur, soal-soal dunia dan politik. Akan tetapi Abduh kurang puas dengan pengajaran yang diberikan. Kepuasan dalam mempelajari filsafat, matematik, teologi dan sebagainya ia peroleh dari Jamal al-Din al-Afgani yang datang ke Mesir pada tahun 1870.

karena itu, pengajarannya lebih merupakan indoktrinasi tunggal tentang kebenaran yang tak mungkin dibantah. Ruang kelas bagaikan sebuah “penjara” tanpa peluang kreatif. Hal ini diakui oleh Mastuhu²⁰³ bahwa para peserta didik tidak perlu menanyakan keabsahan dan kebenarannya serta tidak perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya elaborasi, provokatif, dan antisipatif dianggap tidak menghargai guru.

Di ruang kelas, peserta didik hampir tak memiliki ruang eksperesi, sosok anak hanya akan berharga di mata guru jika sesuai dengan pendapat guru, pengelolah pendidikan, elit agama dan pemerintah selalu menggap makhluk yang tidak pernah salah atau istilah lain moralitas. Para siswa tidak pernah mengerti, mengalami, dan menyadari kebaikan dan kebenaran di saat paket-paket pembelajaran sudah tersedia. Tuhan pun tak pernah dikenal dan disadari, kecuali sifat-sifat hebat yang harus dihafalkan tanpa bertanya.

Lembaga sekolah disadari atau tidak secara sengaja menjerat generasi ke dalam lorong gelap peradaban. Di ujung lorong itu mungkin tersisa harapan, namun banyak yang tak acuh, dan menerima nasibnya sebagai takdir dari sang Ilahi. Hasil dari proses pembelajaran seperti inilah yang dimaksud Fazlur Rahman dengan *memorizing*, yakni proses pembelajaran yang memakai sistem hafalan daripada sistem pemahaman. Atau dengan kata lain menjadikan belajar berifat studi teks daripada pemahaman.²⁰⁴ Sinyelemen ini diperkuat oleh Tibi bahwa dunia pendidikan khusus universitas Arab dan Afrika dengan berbagai bidang studinya, berdasarkan semata-mata pada kapasitas belajar model hafalan (*rote learning*) dalam rangka mencapai lulusan.²⁰⁵

Pendapat di atas memberikan pemahaman, bahwa model pembelajaran hafalan hanya akan melahirkan peserta didik *lack of spirit of inquiry*, artinya lemahnya kemampuan untuk melakukan penelitian/penyelidikan. Hal inilah yang dikritik Syed Hussein Alatas dengan mengutip pendapat al-Afgani bahwa salah satu

203Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta, Logos Wacana, 1999, h. 10.

204Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago, The Universty of Chicago Press, 1982, h. 189.

205Bassam Tibi, *Iskam and the Cultural Accommodation of Social Change*, San Fransisco, Westview Press, 1985, h. 110.

penyebab mundurnya dunia Islam adalah rendahnya semangat intelektual (*the intellectual spirit*), rasa cinta untuk mencari ilmu, penghormatan terhadap ilmu pengetahuan, serta ilmu-ilmu rasional tidak berkembang luas di kalangan umat Islam.²⁰⁶ Oleh karena itu, jika ilmu pengetahuan ingin berkembang, maka perlu menekankan adanya perubahan sikap dari mental tradisional menjadi sikap mental rasional.²⁰⁷ Di sisi lain lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah kurang memperhatikan kepada upaya penyelesaian masalah (*problem-solving*) konsep pendidikan inilah yang perjuangkan oleh Paulo Freire seorang pendekar pedidikan dari Brasil, sehingga harus diusir oleh pemerintah untuk meninggalkan Brasil. Inti dari konsep pendidikan hadap masalah adalah sebuah upaya untuk menjawab diskomunikasi antara guru dan murid menuju suasana dialogis.²⁰⁸

Model-model pendidikan seperti inilah yang membudaya dalam simbol keunggulan peradaban dan kemutlakan keagamaan. Atas nama agamanya, seorang atau bangsa, berhak menindas dan menghancurkan sesama anak bangsa sebagai cara paling sah pertahanan diri untuk membangun peradaban.²⁰⁹ Atau istilah lain yakni klaim kebenaran (*truth claim*) untuk dirinya, kelompok, di luar agamanya adalah salah.²¹⁰ Oleh karena itu, bisakah kita menemukan kembali kearifan sebagai dasar pendidikan sekolah yang mendorong peserta didik untuk menyadari diri dan mampu menjalani hidup dalam kebersamaan dengan budi pekerti yang baik. Dengan demikian, sekolahpun harus berupaya menyatukan mereka dan meminiliasi perbedaan-perbedaan di antara mereka. Artinya menurut An-Nahlawi dalam membangun seperti yang diinginkan di atas, diperlukan landasan keimanan sejalan dengan fitrah manusia, hanya karena dengan iman perbedaan, kedengkian, perselisihan

206Bassam Tibi, *The Krisis of Modern Islam: A. Preindustrial Culture in the Scientific-Technological Age*, Salt Lake City, Universitas of Utah Press, 1988, h. 15.

207Baca uraian Harun Nasution dalam, *Islam Rasional; Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr.Harun Nasution*, Bandung, Mizan, 1995, h. 146.

208Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*, Jakarta, 2000, Cet III, h. 61.

209Munir Mulkhani, "Humanisasi Pendidikan Islam", *Jurnal Afkar*, edisi N0. 11, 2001, h. 23.

210Baca Ismail dkk (ed), *Paradigma Pendidikan Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001, h. 303.

sirna dari diri mereka, diganti dengan upaya untuk mewujudkan kebahagiaan batin dan ketentrangan hati dalam menggapai keridhaan Allah.²¹¹

Kegelisahan ilmuwan pendidikan di atas, menunjukkan adanya perubahan tentang nilai-nilai dalam masyarakat yang membawa konflik ke dalam dunia pendidikan sekolah. Masing-masing mereka melihat dari segi-segi kelemahan dan kekuatan sekolah sebagai lembaga pembudayaan masyarakat. Karena itu, sekolah tetap harus menjalankan tugas pokoknya yaitu membudayakan umat manusia dengan nilai-nilai ideal, yang mampu menjadi fondasi moral dan spritual bagi tegaknya masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera serta bahagia rohani dan jasmani.

Agar misi intstitusi sekolah dapat tercapai diperlukan suatu sistem yang dialogis, adaptik dan kondusif bagi optimalisasi pencapaian tugas dan fungsinya baik secara makro maupun mikro.²¹² Secara makro, suatu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan menyediakan dan memperhatikan lewat pendekatan filosofis religius dengan berbagai sarana dan prasarana yang dapat menunjang bagi kelancaran proses belajar mengajar secara optimal. Meliputi letak dan penataan gedung yang cukup strategis dan kondusif bagi suatu proses pendidikan, sarana dan prasarana yang mendukung, baik itu peralatan kelas, perpustakaan, ruang praktek, rumah ibadah dan lain sebagainya. Semuanya harus bernilai edukatif dan tidak bertentangan dengan prinsip pokok ajaran agama yang diyakini (Islam), serta adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tanggung jawab tidak terlepas dari peran serta aktif para pemegang kekuasaan dan kebijaksanaan pendidikan, masyarakat, stabilitas negara, dan falsafah hidup bangsa.

Sedangkan secara mikro, suatu upaya yang ditempuh lebih berorientasi pada aspek sistem oprasional intraksi proses belajar mengajar: *Pertama*, tenaga pendidik yang memiliki kompetensi profesional, baik secara akademik maupun kepribadian. Ahmad Tafsir memberikan definisi mengenai pendidik adalah orang-orang

211Abdurrahman An Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat* h. 160

212Samsul Nizar, *Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam*, h. 129-130.

yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan seluruh potensi anak didik, baik afektif, kognitif dan psikomotor.²¹³ Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mereka mencapai kedewasaannya, mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, khalifah di muka bumi, sebagai makhluk sosial, dan sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri.²¹⁴

Tugas seorang pendidik yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan hati manusia untuk ber-*taqqarrub* kepada Allah.²¹⁵ Ramayulis menyebutnya, tugas pendidik sebagai *warasat al-anbiya*, yang pada hakikatnya mengembang misi *rahmatan li al-'alamin*, yaitu suatu misi yang mengajak manusia untuk tunduk dan patuh pada hukum-hukum Allah, guna memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian misi ini dikembangkan kepada pembentukan kepribadian yang berjiwa tauhid, kreatif, beramal saleh dan bermoral tinggi.²¹⁶

Tugas yang diemban tenaga pendidik (guru) merupakan tugas berat dan memerlukan profesionalisme. Jika guru mampu tampil secara profesional dari hari ke hari dalam melaksanakan tugasnya maka akan baik pulalah dunia pendidikan. Sehingga dapat memperbaiki situasi pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan sebab guru adalah komponen pendidikan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Karena itu, pendidikan tak akan pernah ada kontribusi dan inovatif bila guru tidak diberdayakan. Dengan demikian, profesionalisme guru yang tinggi niscaya menjadi salah satu kunci keberhasilan pendidikan.

Tugas pendidik dalam konteks ini, meliputi: (1). Penyucian, yakni pengembangan, pembersihan dan mengangkat jiwa peserta didik kepada nilai Rabbani penciptanya, menjauhi semua bentuk

213Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung, Remaja Rosadakarya, 1994, h. 75.

214Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta, Ciputat Press, 2002, h. 72.

215Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam; kajian Filosofis dan kerangka Oprasional*, Bandung, Trigenda Karya, 1993, h. 165.

216Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, Kalam Mulia, 2002, h.85.

kejahatan, dan menjaga agar peserta didik senantiasa berada pada nilai fitrahnya yang hanif, (2). Pengajaran, yakni melakukan proses pengalihan berbagai pengetahuan dan akidah kepada akal dan hati kaum mukmin (peserta didik), agar mereka senantiasa mampu merealisasikannya dalam setiap aktivitas tingkah laku sehari-hari.²¹⁷

Maka tanggung jawab pendidik adalah, mendidik individu supaya beriman kepada Allah dan melaksanakan syari'atnya, mendidik diri supaya beramal saleh, dan mendidik masyarakat untuk saling menasehati agar tabah dalam menghadapi kesusahan, beribadah kepada Allah serta menegakkan kebenaran.²¹⁸ Melihat kenyataan tersebut, tanggung jawab pendidik bukan hanya sebatas tanggung jawab moral terhadap anak didik, akan tetapi lebih jauh dari itu. Pendidik mempertanggung jawabkan atas segala tugas yang dilaksanakannya kepada Allah.

Kesemua dimensi di atas, adalah sebuah sistem komponen pendidikan yang saling berkaitan antara satu dan lainnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.²¹⁹ Dengan kata lain, semua dimensi itu harus berjalan secara serasi dan seimbang, serta dinamis. Dengan terformulasinya sistem pendidikan dan pengajaran yang sedemikian kondusif dan dialektis, maka lahirlah sosok peserta didik yang memiliki kepribadian paripurna, baik sebagai intelektual maupun sebagai pemeluk agama dan makhluk sosial.

Harmonisasi dan keutuhan kepribadian yang demikian, akan melahirkan sosok sumber daya manusia yang berkualitas paripurna secara utuh dan dinamis. Atau memakai istilah Hasan Langgulung melahirkan sosok peserta didik insan saleh dan masyarakat saleh.²²⁰ Akhirnya dimensi dan upaya ini, merupakan tantangan dan sekaligus tugas yang cukup berat yang harus diemban oleh lembaga pendidikan (sekolah). Secara kongkrit Azyumardi Azra menjelaskan bahwa usaha pembentukan dan pendidikan karakter atau akhlak melalui

217Abdurrahman An Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*, h. 170

218Abdurrahman An Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*, h. 81-19.

219Lihat Abd. Gafur, *Disain Instruksional*, Solo, Tiga Serangkai, 1989, h.15.

220Baca Hasan Langgulung, *Peralihan Paradigma dalam Pendidikan Islam dan Sain Sosial*, h. 25-28

lembaga sekolah setidaknya melalui pendekatan sebagai berikut:²²¹

Pertama, menerapkan pendekatan *modeling* atau *uswatun hasanah* yakni mensosialisasikan dan menegakkan nilai-nilai akhlak dan moral yang benar melalui model dan teladan. *Kedua*, menjelaskan atau mengklarifikasi kepada peserta didik secara terus menerus tentang berbagai nilai yang baik dan yang buruk. *Ketiga*, menerapkan pendidikan berdasarkan karakter (*character-based education*). Hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan *character-based approach* ke dalam setiap mata pelajaran yang ada di samping mata pelajaran khusus untuk pendidikan karakter, seperti pelajaran agama, sejarah, Pancasila, dan sebagainya.

Memandang kritik di atas, maka perlu dilakukan reorientasi baik dari segi isi/muatan, metode dan pendekatan, sehingga mereka tidak hanya menjadi verbalisme dan sekedar hafalan, tetapi betul-betul berhasil membantu pembentukan akhlak atau karakter.

E. Peran Institusi Masyarakat

Manusia sebagai makhluk sosial, senantiasa berhubungan dan memerlukan bantuan orang lain. Manusia tidak mungkin bisa hidup secara layak tanpa berinteraksi dengan lingkungan masyarakat di mana mereka berada. Masyarakat secara sederhana diartikan sebagai kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan dan agama.²²² Sejalan dengan itu, Muhammad Amir mengatakan masyarakat adalah kumpulan manusia atau individu-individu yang terjewantahkan dalam kelompok sosial dengan suatu tatanan budaya atau tradisi tertentu.²²³ Pendapat ini agak berbeda dengan Aguste Comte,²²⁴ yang menjelaskan bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukum sendiri dan berkembang

221Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, h. 176-177

222Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, h. 44.

223Muhammad Amir, *Konsep Masyarakat Islam*, Jakarta, Fikahati Aneska, 1992, h. 13.

224Auguste Comte berasal dari Perancis, pendiri mazhab positivistik. Filosofinya bersifat eklektis dan sintesis. Karyanya antara lain: *The Course of Positive Philosophy* (Filosofi Positif 1842). *General View of Relativism* (Tinjauan Umum tentang Relativisme, 1848). *The Catechism of Positive Religion* Katekisasi Agama Positif, 1852).

menurut pola perkembangannya sendiri.²²⁵ Jadi dapat dimengerti bahwa masyarakat terdiri dari individu-individu, hubungan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, undang-undang yang dipegang teguh serta hal ihwal yang mengatur masyarakat.

Bila penjelasan di atas ditarik dalam dataran pendidikan, maka masyarakat sangat besar peranannya dan pengaruhnya terhadap perkembangan intelektual dan kepribadian individu peserta didik. Sebab keberadaan masyarakat merupakan laboratorium dan sumber makro yang penuh alternatif untuk memperkaya pelaksanaan proses pendidikan.²²⁶ Untuk itu, setiap anggota masyarakat memiliki peranan dan tanggung jawab moral terhadap terlaksananya proses pendidikan. Hal ini disebabkan adanya hubungan timbal balik antara masyarakat dan pendidikan. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dalam dunia pendidikan merupakan sesuatu hal penting untuk kemajuan pendidikan, atau dengan istilah Abuddin Nata pendidikan berbasis masyarakat.²²⁷

Pendidikan berbasis masyarakat pada dasarnya menekankan bagaimana masyarakat mempunyai peran atau ikut serta dalam memecahkan masalah, merumuskan visi, misi, tujuan pendidikan yang ditangani oleh pemerintah, sehingga pada gilirannya akan menciptakan masyarakat belajar (*learning society*).²²⁸

Untuk itu, pusat pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat ketiganya memiliki tugas yang saling melengkapi, sehingga harus berjalan secara harmonis dan integral dalam upaya mewujudkan jiwa peserta didik agar mampu mendorong terwujudnya semua perbuatan bernilai baik dan mulia menuju masyarakat utama.²²⁹

Gagasan tentang pendidikan berbasis masyarakat, manajemen

225Abdul Syani, *sosiologi dan Perubahan masyarakat*, Lampung, Dunia Pustaka Jaya, 1995, h. 46-47

226Zakiah Darajat dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, h. 45.

227Baca Abuddin Nata, Pendidikan Berbasis Masyarakat dalam Perspektif Islam, dalam *Jauhar, Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual*, Vol. 2, No. 2, Jakarta, IAIN Jakarta, 2001, h. 185-197.

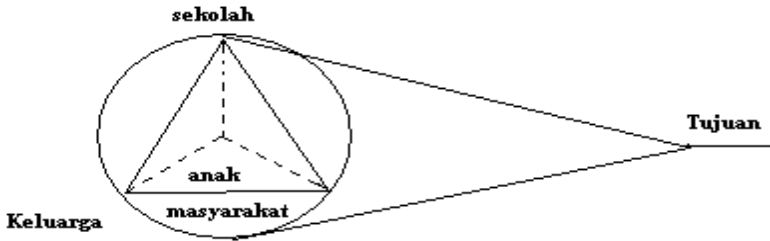
228Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam; Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*, Jakarta, Ciputat Press, 2002, h. 175-190.

229Suwito, Pembinaan Akhlak Kampus Menuju Masyarakat Utama, dalam buku Yunan yusuf dkk (ed), *Masyarakat Utama Konsepsi dan Strategi*, Jakarta, Perkasa, 1995, h. 205-207.

berbasis sekolah, tidak lain adalah suatu upaya reformasi dan reorientasi kembali konsep pendidikan yang dilaksanakan, agar mampu melibatkan ketiga unsur tersebut dalam satu kesatuan visi dan misi pendidikan secara aktif dan dinamis. Dengan kesatuan visi dan misi itulah, pelaksanaan proses pendidikan dapat mencapai tujuan secara sempurna, baik sebagai *agen of change*, pembentukan pribadi individu muslim yang paripurna dan mampu menjalankan tugasnya di muka bumi ini serta pencipta insan masa depan yang siap pakai, terutama dalam menghadapi milledium ketiga yang semakin kompleks dan menantang.

Reformasi pendidikan tidak saja melibatkan sekolah tetapi juga keluarga serta masyarakat pada umumnya, dengan sentuhan-sentuhan kerja mereka akan mampu membuat rumah sebagai mesjid yang menumbuhkan nilai-nilai Islam. Rumah mampu berperan sebagai sekolah yang turut membantu mengembangkan akidah, amal dan akhlak, akal diri anak didik sebagai amanah Allah. Karena itu rumah, sekolah, dapat tampil sebagai benteng yang melindungi seluruh penghuninya. Serta rumah dan sekolah dapat pula berperan sebagai rumah sakit yang memelihara kesehatan jasmani dan rohani para warganya. Bahkan para sentuhan para pendidik rumah, sekolah maupun mesjid akan mampu melahirkan suatu komunitas sebagai tentara Allah, yang siap untuk mengibarkan panji-panji pendidikan madani.²³⁰ Dengan demikian, terwujudlah apa yang dikehendaki hadits rumahku adalah surgaku. Hal ini dapat diperankan dan diperagakan oleh pendidik rumah dan sekolah yang secara implisit berusaha mengibarkan bendera reformasi pendidikan yang utuh. Dibawah ini akan dilakukan kerja sama timbal balik antara ketiga lingkungan pendidikan untuk mengembangkan diri peserta didik pentingnya mempunyai akhlak yang baik harus melakukan kerjasama ketiga lingkungan tersebut:

230)Jalaluddin Rahmat, *Islam Alternatif*, Bandung, Mizan, 1991, h. 123.



- Lingkaran adalah hasil kerjasama ketiga lingkungan.
- Garis putus-putus menerangkan, bahwa masing-masing lingkungan ingin menjadikan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.
- Anak berada diposisi sentral yang menjadi pusat lingkaran untuk dipengaruhi melalui pendidikan.
- Segitiga merupakan perpaduan kerjasama yang erat ketiga lingkungan dengan tujuan yang sama.

F. Penutup

Dengan demikian tulisan ini dapat membuktikan bahwa pendidikan akhlak bagi peserta didik sangat penting, hal ini dapat dilakukan dengan *pertama*: lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, menetapkan pelaksanaan pendidikan agama dengan memakai metode dialogis. *Kedua*, mengintegrasikan antara pendidikan dan pengajaran. *Ketiga*, harus didukung oleh kerjasama ketiga lembaga tersebut secara sungguh-sungguh melakukan penanaman nilai-nilai kejujuran dan amanah, dengan berupaya menciptakan lingkungan yang bernuansa religius.

BAB 8

INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

(Studi Perbandingan Surau, Rangkang, Pesantren)

A. Pendahuluan

Agenda sejarah telah mencatat bahwa pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia antara lain ditandai oleh munculnya berbagai lembaga pendidikan secara bertahap, mulai dari yang amat sederhana, sampai dengan tahap yang sudah terhitung modern dan lengkap.²³¹ Karena itu membicarakan wacana kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia, yang berada di Jawa, Minangkabau, dan Aceh, pada masa awal merupakan persoalan yang sangat menarik untuk dikaji.

Namun demikian antara satu dan yang lainnya memiliki hubungan substansial dan fungsional. Dinamika pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan Islam tersebut selain dipengaruhi oleh faktor internal oleh para pendirinya, juga tidak lepas dari pengaruh eksternal yang bersifat global. Kedua pengaruh ini satu dan lainnya secara akumulatif berpadu menjadi satu dan menghasilkan bentuk dan corak dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Dari berbagai lembaga-lembaga pendidikan Islam²³² yang

²³¹Lihat Abuddin Nata (ed), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2001, h. vii.

²³²Usaha pengembangan lembaga pendidikan Islam memerlukan kerjasama (*networking*) antara berbagai pusat pendidikan. Kenyataan akan keanekaragaman lembaga pendidikan menandakan adanya kekuatan dan kelemahan tertentu pada masing-masing lembaga. Hal ini meniscayakan adanya kerjasama untuk saling menguatkan tanpa menghilangkan ciri khusus masing-masing lembaga. Lihat Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Logos wacana Ilmu, 2001, h. xiii.

beraneka ragam tersebut, tidak dapat dipungkiri telah banyak menghasilkan figur-figur pemimpin umat dan bangsa yang tangguh serta berperang besar dalam panggung sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia, dan sekaligus sebagai basis dimulainya kegiatan intelektual di tanah air. Bahkan bersamaan dengan itu pula, lembaga-lembaga tersebut terkadang terlibat secara intens dalam mengambil peran sosial budaya dan politik yang tidak harus diabaikan oleh pemerintah.

Oleh sebab itu makalah ini, akan menyoroti bagaimana peranan ketiga lembaga pendidikan Islam tersebut serta bagaimana perbedaannya?

B. Intitusi Pendidikan Di Minangkabau

Di Minangkabau, Surau sebagai suatu lembaga pendidikan Islam –sejak masa awal telah mendapat perhatian yang cukup besar. Melalui lembaga ini telah melahirkan sejumlah ulama dan pemimpin bangsa. Bahkan keberadaannya telah ikut “membakar” semangat untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan.²³³ Banyak tokoh-tokoh besar dan sekaligus ulama seperti Tuanku Nan Tuo, Tuanku Nan Kacik, Imam Bonjol, dan Malin Basa,²³⁴ sebagai pejuang dan sekaligus ulama yang memperoleh momentum perjuangan melalui surau. Kenyataan ini tak dapat dipungkiri, bahwa sesungguhnya kemunculan surau sebagai lembaga pendidikan Islam era awal, telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam membangun sikap nasionalisme dan dinamika intelektual umat yang selama ini terbelenggu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

1. Surau Sebagai Lembaga Pendidikan Islam

Munculnya surau²³⁵ sebagai lembaga pendidikan Islam

233Abudin Nata (ed), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, h. 7.

234Karel A. Steenbrink, *Beberapa aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, Jakarta, Bulan Bintang, 1984, h. 32-3.

235Tiadak adanya data yang lengkap untuk mengetahui siapa yang mempopulerkan dan kapan istilah ini dipakai dalam tradisi Islam di Indonesia. Hanya saja, menurut Dobbin, eksistensi *surau* sebagai lembaga keagamaan, sesungguhnya telah ada sebelum datangnya Islam di Minangkabau, yaitu zaman Hindu Budha. Lembaga tersebut semacam biara yang dibangun oleh Adityawarma pada tahun 1356 M. lembaga ini sebagai tempat

selengkapnya pertama kali dikembangkan Syekh Burhanuddin di Ulakan, Pariaman,²³⁶ dengan meminjam tipologi Martin Van Bruinessen –merupakan tradisi agung lembaga keagamaan Indonesia.²³⁷ Pada masa ini, eksistensi surau digunakan sebagai tempat shalat dan juga sebagai tempat mengajarkan agama Islam, khususnya tarekat (suluk). Surau dipimpin oleh seorang “Syekh” sebagai figur utama pada suatu surau. Namun lingkungan sosio-kultural dan keagamaan di Minangkabau serta proses-proses dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat ini sangat mempengaruhi kedudukan Syekh bahkan nyaris surau itu terancam.²³⁸

Ekstensi surau sebagai lembaga pendidikan yang sangat berpengaruh bagi pengembangan awal ajaran Islam di Minangkabau. Dengan kesalehan dan kedalaman ilmunya, merupakan daya tarik tersendiri bagi masyarakat Minangkabau untuk belajar dengan syekh Burhanuddin di Surau Ulakan.²³⁹ Dalam pendidikan surau, tidak ada tingkatan atau kelas. Kadang-kadang ada semacam pembagian, tetapi ini di dasarkan pada tingkat kompetensi atau penguasaan ilmu tertentu, bukan pada jumlah tahun yang dihabiskan belajar di surau. Metode utama yang dipakai dalam proses belajar adalah ceramah, pembacaan dan penghapalan, yang lazimnya berpusat pada **halaqah**.²⁴⁰ Sebagai lembaga pendidikan tradisional, Surau menggunakan sistem pendidikan **halaqah**. Materi pendidikan yang diajarkan pada awalnya masih seputar belajar huruf hijaiyah dan membaca Al-Qur’an,

untuk mempelajari pengetahuan suci (keagamaan) dan tempat bernusyawarah dan untuk memecahkan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Lihat Cristine Dobbin, *Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah : Sumatra Tengah 1784-1847*, Terj. Lillian D. Tedjasukandhana, Jakarta, INIS, h. 142.

236Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2000, h. 119.

237Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*, Bandung, Mizan 1995, h. 17.

238Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru*, h. 130-137.

239Pada masa ini, tidak diketahui secara pasti sistem pendidikan dan kitab apa saja yang digunakan oleh Syekh Burhanuddin dalam memberikan pendidikan di Surau Ulakan. Dalam catatan Mahmud Yunus, setelah meninggalnya Syekh Burhanuddin, ditemukan beberapa catatan pribadinya dengan menggunakan bahasa Arab dan sebuah kitab *Fathul wahab* yang dikarang Abi Yahya Zakaria Anshari.

240Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru*, h. 121.

disamping ilmu-ilmu keislaman lainnya, seperti keimanan lainnya, seperti keimanan, akhlak dan ibadah.²⁴¹ Pada umumnya pendidikan ini hanya dilaksanakan pada malam hari.

Menurut Mahmud Yunus ada dua jenjang pendidikan surau yakni Pengajaran Al-Qur'an. Untuk mempelajari Al-Qur'an ada dua macam tingkatan. **Pertama**, pendidikan rendah, yaitu pendidikan untuk memahami ejaan huruf Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an. Disamping itu, juga dipelajari cara berwudhu dan cara shalat yang dilakukan dengan metode praktik dan menghafal. **Kedua**, pendidikan Atas, yaitu pendidikan membaca Al-Qur'an dengan lagu, qasidah, berzanji, tajwid, dan Kitab Perukunan. Kedua jenis pendidikan tersebut tidak ditentukan. Seorang siswa baru dikatakan tamat bila ia telah mampu menguasai materi-materi di atas dengan baik.²⁴² Setelah menamatkan kedua jenis pendidikan di atas, kemudian siswa diperkenalkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu pengkajian kitab. Materi pendidikan pada jenjang ini meliputi ilmu sharaf dan nahwu, ilmu fiqih, ilmu tafsir dan ilmu-ilmu lain-lainnya.

Melihat metode di atas dan materi yang diajarkan menurut hemat penulis adalah wajar jika surau banyak melahirkan ulama dan guru agama, tetapi jika hal ini, dianalisis, dengan membandingkan metode pendidikan modern, maka sesungguhnya metode pendidikan surau memiliki kelebihan dan kelemahan. **Pertama**, kelebihan adalah pada kemampuan menghafal muatan teoritis keilmuan. Seperti kemampuan berdakwa dan menjadi guru agama. Kelemahannya adalah **Kedua**, lemahnya kemampuan memahami dan daya analisis kritis siswa terhadap teks. Disisi lain metode pendidikan ini diterapkan secara keliru. Siswa banyak yang bisa membaca dan menghafal isi suatu kitab, tetapi tidak bisa menulis apa yang dibaca dan di hafalkannya itu. Hal ini diakui oleh Hamka sebagai suatu kelemahan sistem pendidikan Islam di Minangkabau waktu itu.²⁴³

2. Surau Sebagai Institusi Tarekat

Tumbuhnya Surau sebagai lembaga pendidikan agama dan

²⁴¹Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Hidakarya Agung, 1993, h. 34.

²⁴²Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, h.35-41.

²⁴³Hamka, *Kenang-Kenangnngan Hidup*, Jakarta, Bulan Bintang, 1979, h. 57-7.

tarekat (suluk) terus berkembang dengan pesat. Bahkan setiap ulama Minangkabau, memiliki surau tersendiri, baik sebagai tempat pelaksanaan pengajaran agama maupun tarekat. Pada era ini, perkembangan tarekat menemukan momentumnya, sehingga dapat dikatakan eksistensi surau bukan saja menunjukkan suatu jenis lembaga pendidikan masyarakat, melainkan lebih dari itu menunjukkan bentuk tarekat yang dianut oleh suatu komunitas masyarakat Islam Minangkabau.²⁴⁴ Bahkan Ansharullah dalam penelitiannya mengenai *konsep pendidikan adat Minangkabau* mengatakan bahwa di Minangkabau ajaran tarekat ini berkembang yaitu dengan berdirinya tarekat Syatariyyah yang dipelopori oleh Syekh Burhanuddin, kemudian tarekat Naqsabandiyah oleh Syekh Ismail Simabur dan terakhir tarekat Qadariyah.²⁴⁵ Ketiga tarekat ini menjadikan surau sebagai basis, dan untuk menjadi seorang guru tarekat, seorang murid di syaratkan membangun surau.²⁴⁶ Maka cukuplah untuk dikatakan bahwa surau merupakan basis perkembangan tarekat di Minangkabau.²⁴⁷

Upaya untuk menanamkan ajaran Islam dalam seluruh kehidupan dan pranata sosial, terlihat sangat efektif. Hal ini terlihat, bahwa jika sebelumnya kedudukan kaum agama berada di bawah

244Cristine Dobbin, *Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah : Sumatra Tengah 1784-1847*, Terj. Lillian D. Tedjasukandhana, 142.

245Ansharullah, *Konsep Pendidikan dalam Adat Minangkabau*, Tesis yang tidak terbitkan, Jakarta, Uneversitas Muhammadiyah, 2001, h. 61.

246Ansharullah, *Konsep Pendidikan dalam Adat Minangkabau*, h. 62.

247Namun demikian telah menimbulkan polemik, dimana ekstensi adat yang diselimuti dengan busana khurafat, dan bid'ah, masih mengkrystal dalam kehidupan umat Islam di Minangkabau, dan sulit untuk dihapuskan. Hal ini terbukti, meskipun mereka telah memeluk Islam, praktik adat yang bercampur dengan khurafat dan bid'ah masih tetap dipertahankan. Sehingga pada abad ke-19 para ulama setelah kembali dari Mekka, mengadakan pembaharuan, yang pembaharuannya sangat dipengaruhi apa yang dikembangkan Muhammad bin Abdul Wahab. Karena itu, masyarakat Minangkabau terpecah menjadi dua kelompok yang kemudian menggunkan atribut-atribut tertentu. Kaum Tua dengan pakaian hitam dan kaum muda memakia pakaian putih. Perseteruan kedua kelompok ini tidak dapat dikompromikan lagi, sehingga terjadilah perang Padri, yaitu peperangan antara kaum Tua yang dibantu pihak kolonial dengan Kaum Muda. Kaum Tua yang berupaya memepertahankan adat, sedangkan Kaum Muda berupaya meluruskan akidah umat Islam sekaligus mengusir penjajah dari wilayah Minangkabau. Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, h. 26. Lihat juga Abudin Nata (ed), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, h. 16.

“bayang-bayang” pemangku adat, namun kemudian telah mampu berdiri di atas posisi adat. Penerimaan ini dapat dilihat dari pepatah Minangkabau yang mengatakan, *Adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah. Syara’ mangato, adat mamakai. Camin nan indak kabau, palito nan indak padam*. Hal ini juga dipertegas oleh Hamka yang dikatakan bahwa kebudayaan Minangkabau adalah paduan adat dengan syarak atau syarak yang dijadikan adat.²⁴⁸

Dari cerminan di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa adat Minangkabau dapat menerima kehadiran agama Islam, karena adanya kesamaan konsep dasar, sehingga adat pun dapat menerima pemikiran yang berasal dari agama Islam. Jadi esensinya adat Minangkabau adalah ajaran Islam yang berasaskan Al-Qur’an, Sunnah serta Ijtihad. Di samping itu pula, tidak dapat dipungkiri bahwa ekstensi surau yang pada awalnya merupakan tempat ibadah dan lembaga pendidikan Islam, telah mampu menghasilkan sejumlah ulama²⁴⁹ Minangkabau yang memiliki komitmen terhadap ajaran Islam dan menumbuhkan serta membentuk sikap militan dan rasa nasionalisme umat Islam untuk menentang kaum adat yang mempraktikkan Islam sinkretis maupun intervensi kolonial. Sehingga mereka terlepas dari belenggu kaum penjajah.

C. Intitusi Pendidikan Islam di Aceh

Perkembangan pendidikan di Aceh berjalan seiring dengan proses islamisasi. Kegiatan pendidikan pada mulanya dilakukan oleh ulama-ulama yang datang dari luar Aceh, dari Mekka, Gujarat,

248Hamka, *Islam Dan Adat Minangkabau*, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1985, h. 133.

249Ulama-ulama yang besar jasanya dalam mengadakan pembaharuan di Minangkabau ialah (1) Syekh Ahmad Khotib (Kota Gadung, Bukit Tinggi), (2) Syekh, Muh. Thaib Umar Sungayang, Batu Sangkar, (lahir tahun 1291 H. wafat tahun 1338 H. = 1874-1920 M.) (3) Syekh H. Abdullah Ahmad Padang (lahir tahun 1879 M. wafat tahun 1933) (4) Syekh H. Abdullah Karim Amrullah, Maninjau (1879-1945) (5) Syekh H. M. Jamil Jambek Bukittinggi (1806-1947) (6) Syekh H. Sulaiman Ar-Rusli Candung, Bukittinggi. (7) Syekh Ibrahim Musa Parabek, Bukittinggi. (8) Syekh H. M. Jamil Jaho, Padang panjang. (9) Syekh Abdul Wahid Tabat Gadang, Padang Panjang, (10) Syekh H. Abbas Abdullah, Padang Panjang dan saudaranya (11) Syekh H. Mustafa Abdullah. Lihat Akhria Nazwar : *Syekh Ahmad Khatid*, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1983, h. 4.

dan Persia. Karena perhatian yang besar dari penguasa terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, menjadikan Aceh sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang terkenal di Asia Tenggara.

Dari literatur yang ada tidak menjelaskan secara nyata bentuk-bentuk dari jenis pendidikan saat itu. Namun, dapat diduga bahwa bentuk bahwa bentuk pengajaran saat itu barulah berbentuk halaqah atau Zawiyah, karena itu bentuk-bentuk seperti ini sangat berkembang di Masjidil Haram. Halaqah ini diikuti oleh orang dewasa dengan duduk melingkar mengelilingi guru di pojok mesjid, mendengar ceramahnya serta mendiskusinya masalah yang timbul. Begitu diminatinya halaqah ini bukan lagi orang dewasa melainkan juga anak-anak. Dari sini timbullah kebutuhan untuk memberikan pendidikan khusus bagi anak-anak dan lahirkan institusi pendidikan Islam di Aceh.

Hasyim dalam *Bunga Rampai Revolusi dari Tanah Aceh*, mengelompokkan pendidikan Islam di Aceh menjadi lima tingkatan, yaitu meunasa, rangkang, daya Tengku Cik, dan jami'ah. Selain itu, Ibrahim Husein hanya membagi menjadi dua kelompok, yaitu menuasah untuk tingkat rendah dan daya untuk tingkat tinggi.²⁵⁰ Ia memasukkan rangkang ke dalam pendidikan daya. Dalam hal ini penulis cenderung menggunakan gabungan pembagian yang dilakukan oleh Ibrahim Husein dan Hasyim yakni: menuasa, daya, rangkang dan bale. Namun demikian penulis hanya membahas pendidikan rangkang sebagai pendidikan yang menengah di Aceh.

Sistem pendidikan Rangkang

Sebagai lembaga pendidikan lanjutan, murid yang diterima di rangkang ini umumnya mereka yang sudah belajar di Menuasah. Walaupun demikian, persyaratan khusus tidak diberikan untuk memasuki pendidikan rangkang. Sebagai lembaga pendidikan menengah, di rangkang diajarkan pendidikan pendidikan fikih, ilmu Tauhid, akhlak, dan bahasa Arab. Buku-buku yang digunakan umumnya berbahasa Melayu dan sedikit buku-buku yang berbahasa

²⁵⁰Azyumardi Azra, "Akar-Akar Pembaruan Islam di Indonesia", dalam *Muhammadiyah Kini dan Esok*, Ed. Din Syamsuddin, Jakarta, Pustaka Panji Mas, 1990, h. xiii. Akhria Nazwar : *Syekh Ahmad Khatid*, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1983, h. 4.

Arab. Buku yang digunakan untuk belajar bahasa Arab adalah *Kitab Dlammun Raf'un* dengan pengantar bahasa Melayu. Dalam pelajaran bahasa Arab penekanan dititik beratkan pada ilmu alat seperti nahu sharaf. Kemudian murid dibimbing membaca kitab tafsir, hadis, dan fikih yang berbahasa Arab, serta menerjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Buku yang digunakan umumnya bermazhab Syafi'i.²⁵¹ Mengenai lama belajar tidak ditentukan oleh batasan tahun, tetapi ditentukan oleh kemampuan murid dalam menyelesaikan pelajarannya. Murid yang dapat menyelesaikan pelajarannya dapat melanjutkan ke dayah sebagai institusi tertinggi.

Dari gambaran di atas dapatlah dipahami bahwa tradisi keilmuan Aceh berkembang seiring dengan proses islamisasi itu sendiri, yang pada gilirannya melahirkan intitusi pendidikan dengan gradasi, *meunasah, rangkang, dan dayah*. Pada masa kejayaan institusi ini sangat berperang dalam mencetak ulama yang datang bukan saja dari dalam Aceh sendiri, melainkan juga dari Asia Tenggara.

D. Institusi Pendidikan Islam di Jawa (Pesantren)

Dunia pesantren²⁵² tampaknya mempunyai daya tarik

251M. Sadli Z.A. *Pendidikan Islam di keSultanan Aceh*, dalam *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, Editor, Abudin Nata, h. 47.

252Pesantren atau pondok adalah lembaga yang dapat merupakan wujud proses yang wajar perkembangan sistem pendidikan dan selanjutnya, ia dapat merupakan bapak dari pendidikan Islam. Karena itu dalam buku *sistem Pendidikan Pesantren* Mastuhu mendefinisikan sebagai berikut : suatu lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Pesantren sendiri menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri. Sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu. Disamping juga kata "pondok" mungkin juga berasal dari bahasa Arab "Funduq" yang berarti "Hotel atau asrama". Namun demikian kelangsungan hidup suatu pesantren amat tergantung kepada daya tarik tokoh sentral (kiai) yang memimpin, meneruskan atau mewarisinya. Oleh sebab itu jika membicarakan mengenai pesantren berarti praktis mempunyai ; pondok, mesjid, santri, kiai, serta kitab-kitab Islam klasik. Lihat Andi M. Ramli, *Gambaran Singkat tentang Pendidikan di Pesantren*, dala Buletin *Bina Pesantren*, Depag RI, Juli 1999, h. 6. Lihat Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindi Persada, 1999, h.138 Lihat Mastuhu, *Dinamika Pendidikan Pesantren*, Indonesia, Netherlands corporation in Islamic Studies, seri Inis, XX, jakarta, 1994, h. 55. bandingkan dengan Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, Jakarta, LP3ES, 1983, h. 18.

tersendiri, sehingga banyak mengundang minat dan perhatian untuk mengkajinya. Meskipun dicap sebagai sebuah lembaga pendidikan tradisionan, namun menurut Karel A. Steenbrink, bahwa keberadaan pesantren merupakan cikal bakal dari sistem pendidikan model madrasah dan sekolah.²⁵³ pada mulanya pesantren²⁵⁴ merupakan lembaga pendidikan tradisional,²⁵⁵ dan penyiaran Islam, konon tertua di Indonesia yang sekarang tetap mampu bertahan menghadapi tantangan zaman. Jika pada masa lalu, khususnya sebelum kemerdekaan, pesantren banyak mendapat tantangan dari sistem pendidikan Belanda yang sekuler kini keberadaannya mendapat tantangan dari sistem pendidikan modern yang lebih maju. Sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat, fungsi pesantren telah berkembang menjadi semakin kaya dan bervariasi, walaupun pada intinya tidak lepas dari fungsinya yang mula-mula. Namun demikian menurut Abdurahman Wahid, Kemampuan pesantren untuk bertahan (*survive*) terutama disebabkan oleh posisinya sebagai pusat belajar masyarakat (*community learning center*). Selama berfungsi demikian, pesantren akan tetap menjadi *Oase* masyarakat.²⁵⁶ Secara historis, lembaga pesantren telah dikenal luas dikalangan masyarakat Indonesia pra-Islam. Islam datang dan tinggal mengislamkannya. Dengan kata lain pesantren kata Nurcholish Madjid, tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia, lantaran lembaga yang merupakan pesantren ini

253Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah*, Jakarta, LP3ES, 1986, h. 1-27

254Selain istilah pesantren ditemukan juga istilah lain dengan makna yang sama "pesantren" atau "pondok" atau pondok pesantren (Jawa, Sunda, dan Madura), "Dayah" atau Rangkang, (Aceh) dan "Surau" (Minangkabau). Lihaat Dawan Raharjo (ed), dalam *Pesantren dan Pembaruan*, Jakarta, LP3ES, 1985, h. 2.

255Disebut " tradisional karena lembaga pendidikan ini lebih berorientasi kepada pengajaran dan penyebaran ilmu-ilmu keislaman tradisional seperti Tauhid, tafsir, hadis, fiqh, tasawuf, akhlak dan sebagainya. Meskipun di berbagai pesantren telah mengalami perubahan, terutama dalam struktur kurikulumnya. Seperti pada pesantren Darul Fallah Bogor. " pesantren" Insan Cendekia Serpong, dan beberapa pesantren yang termasuk dalam kategori "modern" pada umumnya pelajaran agama masih mendapat porsi yang cukup dominan (50-58 %). Baca Suwito, Muhbib, *Jaringan Intelektual Kyai Pesantren di Jawa-Madura Abad XX*, dalam Laporan Hasil Penelitian Kompetitif, Jakarta, Depertemen Agama RI, 2000, h. 1.

256Baca Suwito, Muhbib, *Jaringan Intelektual Kyai Pesantren di Jawa*. Yang dikutip dari *Kompas*, 14 Oktober 1996.

sebenarnya sudah ada sejak masa kekuasaan Hindu-Budha.²⁵⁷

Pondok pesantren di Indonesia, menurut sebagian ahli, mulai berdiri sejak masa-masa permulaan Islam ke Indonesia. Meski tidak diketahui namanya. Pesantren yang dianggap paling tua di Indonesia adalah pesantren yang terletak di daerah Aceh.²⁵⁸ Akan tetapi, menurut tinjauan lain, yang dianggap sebagai pendiri pertama pondok pesantren adalah Syekh Maulana²⁵⁹ Malik Ibrahim (wafat 18 April 1419 M.) yang berasal dari Gujarat, India²⁶⁰ Sejarah telah mencatat, ribuan pesantren besar dan kecil, tumbuh berkembang dan akhirnya mati.sebab seperti yang dikatakan Darban, daya hidup sebuah pesantren tampaknya sangat bergantung pada besar-kecilnya kapasitas kiai pendirinya, dan kesadaran tanggung jawab keturunannya.²⁶¹

Dari perspektif historis, posisi dan peran pesantren di Nusantara dapat dijelaskan secara kronologis sebagai berikut :

- a. Abad 12 sampai dengan pertengahan abad 15 pesantren berkembang sebagai sarana sosialisasi Islam dan pendidikan kader ulama dan pemimpin. Pada fase ini, ulama-ulama dari luar Nusantara berperan mengislamkan wilayah Nusantara.
- b. Akhir abad 15 sampai pertengahan abad 16, pesantren menjadi salah satu pusat pendidikan dan penyiapan kader elite birokrasi kerajaan dan ulama lokal sudah menjadi penyebar Islam di Nusantara.
- c. Pertengahan abad 16 sampai abad 17 pesantren menjadi alat legitimasi kekuasaan.
- d. Pertengahan abad 17 sampai akhir abad 17 mulai muncul jarak atau rivalitas antara pesantren dengan elit birokrasi, khususnya ketika pusat Islam bergeser ke pedalaman

257Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren : Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta, Paramadina, 1997, cet ke- I, h. 3.

258Imron Arifin, *Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*, Malang, kalimasahada, 1993, h. 17.

259Maulana, adalah sebutan khas India-Pakistan yang diperuntukkan bagi ulama yang berpengetahuan luas atau ulama sufi. Baca Martin van Bruinessen, *Kitab kuning*, h. 249.

260Marwan Sarijo, *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*, Jakarta, Dhanna Bakti, 1980, h. 24.

261Darban, “Kiai dan Politik pada Zaman Kerajaan Islam”, dalam majalah *Pesantren*, No.2/Vol V1998, h. 33-34.

(Mataram Islam)

- e. Akhir abad 17 sampai akhir abad 18 peranan pesantren sebagai acua legitimasi merupakan alat salah satu elite birokrasi kerajaan.
- f. Akhir abad 18 fenomena sejarah menunjukkan adanya pesantren dihancurkan (Kajoran, Giri, Sumenep, dan lain-lain)
- g. Akhir abad 18 hingga 19 pesantren “menjauhi” pusat kekuasaan yang banyak menjadi perpanjangan tangan kekuasaan kolonial, sementara pesantren kembali menjadi sandaran aspirasi umat.²⁶²

Ambary tampaknya belum menganalisis lebih jauh mengenai dinamika pesantren di abad ke-20. Oleh karena itu, patut diduga kuat bahwa pesantren di abad tersebut mengalami perubahan yang sangat signifikansi.²⁶³ Pesantren tidak hanya menjadi pusat dan lembaga pendidikan Islam tradisional dan lembaga penyiaran/dakwa Islam, melainkan juga merupakan lembaga sosial, yang memberikan warna khas bagi perkembangan masyarakat sekitarnya dan masyarakat daerah asal santri.²⁶⁴

Dari gambaran tersebut diketahui bahwa pesantren, sebagai subsistem dari masyarakat Indonesia, mengalami kesinambungan dan perubahan (*continuitas and change*) dengan berbagai ragam pola, model dan peran yang dimainkannya.

Atas dasar inilah Nurcholish Madjid,²⁶⁵ mambagi para lulusan pesantren pada hal-hal berikut: nahwu –sharf, fiqhi, aqidah, tasawuf, tafsir, hadist, bahasa Arab dan lain-lain. Melihat pada bidang keahlian para lulusan pesantren tersebut, Nurcholish khawatir bahwa pesantren tidak mampu memikul peranan besar dan menentukan dalam ruang lingkup nasional. Hal ini adanya kesenjangan antara dunia pesantren dan dunia kenyataan abad XX ini. Sementara dunia

262Suwito, Muhib, *Jaringan Intelektual Kyai Pesantren di Jawa-Madura Abad XX*, 34-35. Yang dikutip dari Hasan Muarif Ambary, *Meenemukan Peradaban : Jejek Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*, Jakarta, Logos, 1998, Cet I, h. 314.

263Suwito, Muhib, *Jaringan Intelektual Kyai Pesantren di Jawa-Madura Abad XX*, 35.

264Andi M. Ramli, *Gambaran Singkat tentang Pendidikan di Pesantren*, dala Buletin *Bina Pesantren*, Depag RI, Juli 1999, h. 6.

265Baca Dawam Raharjo, *Pergulatan Dunia Pesantren*, Jakarta, LP3ES, 1985, h. 4-11.

kenyataan sekarang sedang dikuaisai oleh pola budaya Barat dan diatur mengikuti pola-pola itu, pesantren—karena faktor historisnya tidak menguasai pola tersebut. Akibatnya, justru karena keasliannya, pesantren merupakan fosil masa lampau yang cukup jauh.

Hubungan Kiai dan Santri

Hubungan antara kiai²⁶⁶ dengan santri, atau Pesantren dengan masyarakatnya, sering diungkapkan dalam pola hubungan patro-klien dan, dengan demikian, relasi yang timbul bersifat paternalistik.²⁶⁷ Tak dapat dipungkiri bahwa kyai adalah top figur pesantren, mesjid sebagai jantung aktivitasnya dan keikhlasannya sebagai roh penggerakannya. Sentral figur kyai dalam pesantren, ini disebabkan karena perjuangan dan pengorbanannya tidak terbatas pada ilmu, tenaga, dan waktu, tetapi juga tanah dan hal-hal material lainnya pun diberikan semua demi kemajuan dan kejayaan Islam.²⁶⁸ Mengingat profil itu, tidaklah mengherankan jika kiai mempunyai ekstensi dalam pesantren merupakan lambang kewahyuan yang selalu disegani, dipatuhi, dan dihormati secara ikhlas, jauh dari hipokrit. Sehingga para santri dan masyarakat selalu berusaha agar dapat dekat dengan para kiai untuk memperoleh berkah dari mereka.²⁶⁹ Bahkan menurut Horikoshi, kepatuhan para santri dan masyarakat karena kiai dipandang sebagai orang suci dan dekat dengan Tuhan.²⁷⁰ Karena

266Figur Kiai sangat mempunyai peranan dalam dunia pesantren menurut penulis ada tiga hal yakni *pertama*, keunggulan di bidang ilmunya dan kepribadian yang dapat dipercaya dan patut diteladani. *Kedua*, keberadaan kiai sebagai pendiri, pemilik, dan pewakaf pesantren. *Ketiga*, kultur pesantren yang sangat kondusif bagi terciptanya pola hubungan santri -kiai yang bersifat atas-bawahan, dengan model komunikasi satu arah; sistem komando. Atau dengan menggunakan Istilah Gusdur, lingkungan pesantren mirip dengan akademik militer atau biara yang sarat dengan aturan main yang harus ditaati. Inilah yang menjadi faktor penting sentralitas peran kiai di pesantren dan masyarakat pada umumnya, sehingga mereka pun menjadikan kiai sebagai sesepuh dan tempat mengembalikan berbagai persoalan hidup.

267Fajrul Falakh, *Pesantren dan Proses-Politik Demokratis*, dalam *Pesantren Masa Depan*, Penyunting, Marzuki Wahid, Suwendi, Bandung, Pustaka Hidayah, 1999, h. 163.

268Moh. Akhayadi, *Pesantren, Kyai, Dan Tarekat*, dalam *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, Editor, Abudin Nata, h. 141.

269Abdurahhman Wahid, "Pesantren sebagai Subkultur" dalam Dawam Raharjo (ed), h.49.

270Hiroko Horikoshi, *Kiai dan Perubahan Sosial*, terj. Umar Basalain dkk, Jakarta, P3M,

itu, tidaklah mengherankan jika dalam banyak hal masyarakat masyarakat mempercayakan penyelesaian permasalahan hidup mereka; tegasnya, kiai tempat bertanya sumber referensi, tempat menyelesaikan segala urusan, meminta nasehat serta fatwa.

Kepemimpinan kyai dalam pondok pesantren menarik beberapa peneliti seperti Matsuhu yang telah meneliti suksesi kepemimpinan kyai dalam pesantren, kemudian yang diteliti oleh Imron Arifin, mengenai kepemimpinan kyai pesantren Tebuireng Jombang. Hasil penelitiannya memperlihatkan terjadinya perubahan kiblat kyai dalam memaknai pola dan gaya kepemimpinan kyai tradisional yang menganut konsep *wilayat al-imam* yang bersifat individu *profetik* ke dalam pola dan gaya kepemimpinan Barat yang lebih egalitarian dan kolektif. Kesimpulan ini mengimplikasikan terjadinya perubahan pola dan gaya kepemimpinan dari individual ke kolektif, dimana perubahan dari pola kepemimpinan dari kharismatik ke tradisional, dan kharismatik ke rasional, sedangkan gaya kepemimpinan kyai berubah dari gaya religio-paternalistik kepersuasif-partisipatif.²⁷¹

Selain yang di atas, masih banyak yang melakukan penelitian tentang dunia pesantren seperti misalnya Abdul Rahman Wahid (1984 dan 1989),²⁷² Abdul Munir Muhkan (1992),²⁷³ para peneliti ini berusaha memberikan sketsa dunia pesantren dari berbagai sudut pandang dan pendekatan. Bahkan para penulis ini, banyak memberikan catatan tantangan dan agenda yang harus dijawab oleh dunia pesantren dalam menghadapi arus modernisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian ekistensi dan dinamika perkembangan pesantren sangat bergantung pada peranan atau ketelibatan kyai di dalamnya; yang merupakan nahkoda yang berperang secara sentral. Dengan kata lain kyai dan pesantren merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

1987, h. 232.

271Baca Suwito, Muhibb, *Jaringan Intelektual Kyai Pesantren di Jawa-Madura Abad XX*, yang dikutip dari Imron Arifin, *Kepemimpinan Kyai : Kasus Pondok Pesantren*, Malang, Kalimashada Press, 1993, h. 153.

272Abdurrahman Wahid, *Bunga Rampai Pesantren*, Jakarta, Dharman Bahkati, 1989, dan Asal-Usul Tradisi Keilmuan di Pesantren, “ dalam *Pesantren*, Jakarta, Edisi Perdana, 1984.

273Abdul Munir Muhkan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri*, Yogyakarta, Sipress, Cet I, 1992.

E. Analisa Perbandingan Pesantren, Surau, Rangkang dan Implikasinya

Wacana tentang perbandingan ketiga lembaga di atas, kurang mendapatkan perhatian oleh para praktisi pendidikan. Hal ini mungkin saja disebabkan adanya anggapan bahwa pesantren, surau, dan rangkang merupakan lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia yang mempunyai sistem dan metode yang sama. Sehingga tidak menggelitik para peneliti untuk membandingkan ketiga lembaga tersebut di atas. Padahal sesungguhnya pesantren, surau, rangkang, jika dilihat dengan cermat, ternyata mempunyai perbedaan yang paling fundamental. Surau sebagai lembaga pendidikan Islam di Minangkabau, menurut hemat penulis lebih memberikan kebebasan berfikir dan berjihad, sehingga dengan demikian surau akan cenderung melahirkan suatu masyarakat yang dinamis. Hal itu dibuktikan dengan lahirnya beberapa surau mulai dari yang tradisional sampai kepada yang modern sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Modernisasi surau lebih tampak ketika berdirinya surau parabek yang diprakarsai oleh Ibrahim Musa yang baru kembali dari Mekka pada tahun 1916. Surau ini makin terkenal di seluruh wilayah. Selanjutnya, organisasi ini berganti nama menjadi Thuwalib.²⁷⁴ Dan surau Jembatan Besi, yang masing-masing mempunyai ciri khas pada setiap surau. Lebih lanjut, modernisasi surau ditandai oleh berdirinya institusi pendidikan Islam yang modern, seperti sekolah Adabiyahh, Sumatera Thawalib, madrasah Diniyah, dan sebagainya yang cikal bakalnya dari surau Jembatan Besi. Selanjutnya, perkembangan organisasi-organisasi pendidikan yang berasal dari surau ini, semakin memodernkan surau sebagai lembaga pendidikan Islam. Dari gambaran tersebut, penulis dapat memberikan pernyataan bahwa busana kemerdekaan dan dinamis lebih dimiliki oleh surau. Demikian halnya dengan Rangkang sebagai institusi pendidikan Islam di Aceh, juga memiliki baju dinamis.

²⁷⁴Daliar Noor, *Gerakan modernisasi Islam Di Indonesia 1900-1942*, Jakarta, LP3ES, 1991, h. 55-56.

Berbeda halnya dengan pesantren, yang lebih cenderung membawa masyarakat statis yang senantiasa menghendaki *status quo* atau keamanan produk keilmuan masa lalu- yang tentu saja, diyakini masih relevan. Kenyataan ini tak dapat dipungkiri oleh dunia pesantren. Karena itu, menurut tesis yang dilakukan oleh Suwito dan Muhibb,²⁷⁵ mengatakan ada beberapa alasan kenapa pesantren cenderung dianggap *status quo Pertama*, para kyai pesantren dan para santri cenderung sebagai konsumen kitab-kitab klasik. Dari sekian banyak kyai, hanya sedikit saja yang tergolong mewariskan karyanya. Sehingga khazana intelektual Islam produk abad 18-19 dan abad sebelumnya tetap dipertahankan menjadi kajian, sementara usaha-usaha untuk mereproduksi karya bermutu dan reformasi belum tampak.²⁷⁶ *Kedua*, meskipun dalam tradisi pesantren ditanamkan satu ungkapan, “*al-muhafazhah ala’al-qadim al-shalih wa al-ahdzu hi al-jadid al-aslah*” (mempertahankan tradisi lama yang lebih baik dan mengambil hal baru yang lebih baik). Kenyataan menunjukkan bahwa sikap konservatif (mempertahankan *status quo*) dikalangan para kyai-santri lebih dominan daripada sikap reformatif. Hal ini terlihat jelas dari sikap hormat dan *ta’zhim* para kyai – dan tentu saja para santri – terhadap ulama-ulama salaf berikut karya-karya mereka. Implikasinya kemudian menyebabkan santri hanya mampu menerima dan mengamalkan tradisi daripada menilai, mengkritisi dan merekonstruksi hal-hal yang memang perlu direkonstruksi.²⁷⁷ *Ketiga*, etika relasi kyai- santri diberbagai pesantren cenderung “feodalistik”. Kyai diposisikan sebagai “segala-galanya”, sehingga santri harus merunduk jika berjalan di depannya, bersalaman dengan mencium tangannya, dan haram didebat pendapatnya.

275Baca Suwito, Muhibb, *Jaringan Intelektual Kyai Pesantren di Jawa-Madura Abad XX*, h. 44-46.

276Lihat Hasan Saefullah, *Pemikiran Mahmud Yunus tentang Pendidikan Islam di Indonesia*, Tesis Magister tidak diterbitkan, Jakarta, IAIN Syahid, 1999.

277Di antara doktrin “etika belajar “ disebagian pesantren adalah ungkapan: *Man qala li ustadzih li lima, lan yufiha abadan*” (siapa yang mengatakan kepada guru/ kyainya “mengapa” (begini atau begitu), ia tidak akan beruntung selama-lamanya). Doktrin menempatkan supermasi kyai di atas para santri, sehingga mereka cenderung mengambil posisi “diam dan tidak kritis” terhadap kyai mereka. Mereka boleh jadi juga merasa “kualat” bila bertanya atau mengkritisi kyainya.

Keempat, konsep aswaja²⁷⁸ yang menjadi pandangan hidup sebagian besar kyai dan santri cenderung melegitimasi dan bersifat taklid terhadap salah satu mazhab fiqh, yakni Syafi'i. Pembelaan mereka terhadap penganut madzhab itu sejalan dengan paham tentang taklid yang berposisi menjadi lawan ijtihad. Pemahaman tersebut memberikan sinyal kepada kita bahwa pesantren abad 18-19 cenderung melahirkan manusia-manusia statis, yang hanya mampu sebagai konsumen terhadap pendapat kyai. Bahkan nyaris mereka tak mampu mengkritisi suatu pendapat dan terbelenggu pada satu mazhab. Dengan kata lain warna konservatif masih dominan, serta jiwa reformasi tidak mereka miliki.

F. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan besar dari makalah ini sebagai berikut: *Pertama*, bahwa pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan Islam seiring dan sejalan dakwa Islamiyah. Di samping itu, lembaga pendidikan Islam tumbuh secara gradual, dari keadaan yang sangat sederhana sampai pada keadaan yang lebih mapan.

Kedua, Tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga tersebut mempunyai peranan yang sangat signifikan, dimana banyak melahirkan tokoh-tokoh pejuang dan sekaligus ulama. Serta lembaga-lembaga tersebut memiliki harga tersendiri dalam pergumulan politik nasional karena sebagai kekuatan moral (*moral force*) yang dimilikinya

Ketiga, lembaga-lembaga pendidikan Islam mempunyai kesamaan dan perbedaan. Mengenai sistem, metode pengajarannya mempunyai kesamaan. Sementara perbedaannya terlihat dimana, Surau dan Rangkan lebih cenderung melahirkan masyarakat dinamis sedangkan Pesantren lebih cenderung melahirkan masyarakat yang statis.

278Mengenai kerangka pengembangan doktrin *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* (aswaja), lihat Abdurrahman Wahid, *Muslim di Tengah Pergumulan*, Jakarta, Lapeenas, 1983, Cet I, .h. 38-45.

BAB 9

INSTITUSI PESANTREN SEBAGAI LOCAL-GENIUS MAMPU BERTAHAN MENGHADAPI EKSPANSI MODERNISASI PENDIDIKAN

A. Pendahuluan

Pesantren merupakan sistem institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia yang lahir dari suatu kearifan lokal (*local-genius*) Nusantara yang telah bertahan secara eksistensial sampai sekarang. Pesantren adalah lembaga pendidikan yang unik mampu mengikuti kesinambungan dan perubahan,²⁷⁹ yang dalam perkembangan sejarah Indonesia mempunyai andil yaitu:²⁸⁰ *Pertama*, pada awal perkembangan di Indonesia abad 7-8 pesantren memfokuskan pada upaya penyebaran Islam di Nusantara. Pesantren ketika itu, melakukan kegiatan Islamisasi. *Kedua*, pesantren pada masa penjajahan memosisikan dirinya sebagai sentral perlawanan terhadap Belanda dan sebagai tempat belajar serta pusat penyebaran ajaran Islam. Apa yang diperlukan bangsa saat itu adalah bagaimana menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme, dan semangat jihad melawan kolonialisme dan imperialisme untuk mengusir dan memerdekakan bangsa dari kungkungan bangsa lain.

Ketiga, pada awal kemerdekaan, antara tahun 1945-1986,

279Zamakharyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, hlm. 197

280Atha Mudzhar, "Pesantren Transformatif: Respon Pesantren Terhadap Perubahan Sosial", dalam *Jurnal Edukasi*, (Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Volume 6. No. 2, 2008), hlm. 7-9.

pesantren kembali mewujudkan misi penyebaran agama di samping tetap melakukan penguatan semangat dan patriotisme dan kebangsaan agar tetap mampu melanjutkan perjuangan bangsa mencapai cita-citanya. *Keempat*, pada awal Orde Baru, terutama sejak dimulainya Pembangunan Jangka Panjang (PJP1), saat kebijakan pendidikan diorientasikan pada perwujudan masyarakat demokratis, rasional, dan pemilikan keterampilan teknis, maka sebagian besar pesantren membantu dalam berbagai kiprah dalam pembangunan. Tercatat pada masa Orde Baru, pesantren mampu membantu menyukseskan program keluarga berencana terutama di daerah pedesaan. *Kelima*, pada PJP1 yang dimulai sejak 1994, kebijakan pendidikan diarahkan pada upaya peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata (*real needs*) bangsa yang tengah menjalani proses industrialisasi. Pada saat pesantren mengalami perubahan orientasi relatif menyolok. Ragam pesantren pun menjadi sangat bervariasi dilihat dari orientasi dan strategi pembelajarannya. Menurut M. Dawam Rahardjo eksistensi pesantren, khususnya setelah paruh kedua abad keduapuluh, benar-benar telah menyebar ke hampir seluruh belahan bumi Indonesia. Salah satu pemicu percepatan penyebaran lembaga pesantren ke berbagai pelosok nusantara adalah respon pemerintah untuk membangun pesantren.²⁸¹ Gambaran tersebut, menjelaskan bahwa pergulatan dan pergumulan pesantren di Indonesia mempunyai sejarah panjang, sehingga menarik untuk dikaji mengapa pendidikan pesantren sebagai lembaga *local genius* mempunyai daya ketahanan yang kuat sampai sekarang?

B. Teori Lahirnya Pesantren

Ada dua teori utama dalam perdebatan tentang asal usul pesantren di Indonesia. Menurut Dhofier menyebut bahwa pesantren berasal dari tradisi pesantren Timur tengah, bukan asli dari Indonesia. Model pesantren yang ada di Jawa sekarang merupakan model gabungan antara madrasah dengan pusat tarekat yang ada di Timur Tengah. Demikian juga dengan Martin van Bruinessen dalam buku yang berjudul *Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat*, yang tidak

²⁸¹Lihat M. Dawam Rahardjo(ed), *Pesantren dan Perubahan*, hlm. 1

sepakat dengan argumen bahwa pesantren merupakan kelanjutan dari sistem pendidikan Hindu-Budha sebelum datangnya Islam ke Indonesia. Menurut Martin, Al-Azhar merupakan tipologi awal dari model pesantren yang ada di Indonesia.

Teori kedua menyatakan bahwa pesantren berasal dari tradisi pendidikan pra Islam atau pendidikan dalam tradisi Hindu Budha. Pendapat ini dikemukakan Manfred Zambek dalam buku *Pesantren dan Perubahan Sosial*. Menurutnya pola kelembagaan pesantren sekarang ini secara paralel merupakan kelanjutan dari lembaga pendidikan pra Islam yang sudah melembaga sebelumnya. Pendapat yang sama dikemukakan Nurcholish Madjid dalam buku *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*: mengakui bahwa pesantren yang ada sekarang ini merupakan kelanjutan dari pesantren era Hindu-Budha. Ketika Islam datang, tinggal memberi warna Islam pada lembaga pendidikan yang sudah ada.

Kedua teori di atas, memunculkan teori konvergensi menjadi acuan dalam melihat pesantren. Secara kelembagaan merupakan asimilasi dari model pendidikan luar baik pendidikan Islam di Timur Tengah maupun pendidikan Hindu-Budha yang masuk ke Indonesia.²⁸² Ciri pesantren yang ada pada pendidikan Hindu-Budha dengan tradisi asrama dan mandala, sedangkan model pendidikan kitab kuning mengacu pada pendidikan Timur Tengah.²⁸³ Karena itu, teori tersebut saling melengkapi antara satu dengan yang lain.

C. Pergumulan Pesantren dalam Perspektif Sejarah

Dalam perspektif sejarah lembaga pesantren sudah ada sejak 300-400 tahun yang lalu dan telah mulai dikenal di bumi Nusantara ini dalam priode abad ke 13-17 M, dan di Jawa terjadi pada abad ke-15-17 M.²⁸⁴ Tetapi pesantren di Indonesia, menurut sebagian ahli, mulai berdiri sejak masa-masa permulaan Islam ke Indonesia.

282Wakhid Khozin, dkk, *Pendidikan Kewargaan Pada Komunitas Pesantren*, (Jakarta: Prasasti, 2007), hlm. 5.

283Hanun Asrohah, *Pelembagaan Pesantren: Asal Usul dan Perkembangan Pesantren di Jawa*, (Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Informasi Penelitian dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI. 2004), hlm. 5.

284Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, hlm. 20

Meski tidak diketahui namanya. Pesantren yang dianggap paling tua di Indonesia adalah pesantren yang terletak di daerah Aceh.²⁸⁵ Akan tetapi, menurut tinjauan lain, yang dianggap sebagai pendiri pertama pondok pesantren adalah Syekh Maulana²⁸⁶ Malik Ibrahim (wafat 18 April 1419 M.) yang berasal dari Gujarat, India²⁸⁷

Menurut sumber yang lain, pesantren di Indonesia baru diketahui keberadaannya dan perkembangannya setelah abad ke-16. Banyak pesantren yang mengajarkan berbagai kitab Islam klasik dalam bidang fiqh, teologi dan tasawuf,²⁸⁸ dan sejarah telah mencatat, ribuan pesantren besar dan kecil, tumbuh berkembang dan akhirnya tergusur. Hal ini disebabkan karena daya tahan sebuah pesantren sangat bergantung pada besar-kecilnya kapasitas kiai sebagai pendiri, dan kesadaran tanggung jawab keturunannya.²⁸⁹ Menurut Ahmad Tafsir bahwa lembaga pesantren yang besar jumlahnya dan luas penyebarannya di berbagai pelosok tanah air telah banyak memberikan saham dalam pembentukan manusia Indonesia yang religius. Bahkan, lembaga tersebut telah banyak melahirkan pemimpin bangsa di masa lalu, kini, dan agaknya juga masa datang. Lulusan pesantren tak pelak lagi banyak yang mengambil partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa.²⁹⁰

Pesantren dalam lintasan sejarah sangat berkaitan erat dengan sejarah Islam. Hal ini dibuktikan bahwa pesantren pada abad ke-16 sangat produktif dan menjadi dinamisator dalam setiap proses sejarah dan perjuangan bangsa.²⁹¹ Harri J. Benda mengakui bahwa

285Imron Arifin, *Kepemimpinan Kiai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*, (Malang: kalimasahada, 1993), hlm. 17.

286Maulana, adalah sebutan khas India-Pakistan yang diperuntukkan bagi ulama yang berpengetahuan luas atau ulama sufi. Baca Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning*, hlm. 249.

287Marwan Sarijo, *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*, (Jakarta: Dhanna Bakti, 1980), hlm. 24.

288Samsul Nizar et. al, *Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara*, hlm. 90

289Darban, "Kiai dan Politik pada Zaman Kerajaan Islam", dalam majalah *Pesantren*, No.2/Vol V, 1998, hlm. 33-34.

290Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 290.

291Hasan Muarif Ambariy, *Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*, hlm. 318.

sejarah Islam Indonesia adalah sejarah perluasan peradaban santri dan pengaruhnya terhadap kehidupan agama, sosial dan politik Indonesia.²⁹² Bahkan menurut Suwito, dunia pesantren dalam lintas sejarah Indonesia, utamanya di Jawa dan Madura, tidak hanya memainkan peran penting dalam transmisi ilmu-ilmu pengetahuan Islam (tradisional), melainkan juga menjadi mitra penguasa dalam memandu rakyat. Pesantren juga menjadi pusat studi, bahkan juga merupakan basis kaderisasi ulama dan pemimpin politik saat itu.²⁹³

Abad ke-18 dalam lintasan sejarah dunia pesantren di Indonesia mengalami perubahan. Hal ini diakui Aqib Suminto bahwa abad 18-19 menjadikan lembaga pesantren merupakan perlawanan terhadap kekuatan kolonial Belanda yang dilakukan oleh tokoh-tokoh jebolan pesantren. Cara mereka melawan kolonial adalah tidak memperdulikannya, menutup kerjasama. Bahkan Riwayat pendirian pondok pesantren K.H. Hasyim Asy'ari di Tebuireng Jombang, K.H. As'ad Syamsul Arifin di Asem Bagus Situbondo, K.H. Hamid di Pasuruan, K.H. Kholil Bangkalan Madura, adalah contoh dan tipe pondok yang melakukan reservasi kultural dengan cara menarik diri ke alam pedalaman.²⁹⁴ Di samping itu, muncul gerakan perlawanan non akomodatif. Gerakan perlawanan ini umumnya dilakukan tokoh-tokoh agama, terutama para haji dan organisasi gerakan tarekat. Misalnya, perang Banjar oleh Pangeran Antasari (1859-1862), perang Diponegoro (1825-1830) di Jawa, perang Aceh (1873-1909) hingga perang Paderi (1821-1838) di Sumatera Barat.²⁹⁵ Karena itu, pada masa penjajahan Belanda, pondok pesantren memang di samping melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pendidikan Islam, juga banyak berperan menjadi pusat-pusat perjuangan bangsa melawan penjajah. Akan tetapi, hal ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, seperti membekali para santri dengan bela diri dan kanuragan.

292Bahkan ia lebih lanjut mengatakan para penguasa yang baru dinobatkan, selalu bersandar diri kepada para ahli agama, karena hanya merekalah yang dapat mengesahkan pentasbihan mereka. Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Islam di Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, Terj. (Jakarta: Pustaka Jaya, 1985), hlm. 33.

293Suwito & Muhibb, *Jaringan Intelektual Kiai Pesantren*, hlm. 39.

294Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 202.

295M. Annas Mahduri dkk, *Pesantren dan Pengembangan Ekonomi Umat: Pesantren al-Ittifaq dalam Perbandingan*, hlm. 27.

Respon sistematis pemerintah kolonial terhadap pendidikan pesantren dengan mendirikan sekolah-sekolah umum dengan tujuan²⁹⁶ menandingi sistem pendidikan pesantren. Tujuan pendidikan Belanda menurut Abuddin Nata adalah melahirkan manusia yang bermental Budak. Hal ini bisa dilihat dari misi yang dirumuskannya sehingga menghasilkan²⁹⁷: 1) orang-orang yang tidak mempunyai jiwa merdeka, 2) orang-orang yang telah mulai menunjukkan sifat-sifat individualistis dan kehilangan perasaan kemasyarakatan dan kekeluargaan; 3) orang-orang yang mempunyai pengetahuan tanpa disertai kecakapan-kecakapan praktis dan sikap susila; 4) orang-orang yang pada umumnya bersikap pasif dan tidak memiliki inisiatif serta mudah menyerah pada keadaan. Di samping itu, pemerintahan kolonial juga tidak memberikan bantuan finansial kepada dunia pesantren dengan alasan bahwa kebijakan pemerintah tidak mencampuri urusan agama. Dengan pendirian sekolah-sekolah sekuler tersebut secara massal menyebabkan adanya dikotomi pendidikan di Indonesia.²⁹⁸ Akibat dari kebijakan ini, maka timbullah sikap *verbalisme* dan *intelektualisme*, hanya mementingkan bahan pelajaran belaka, tidak melatih anak berfikir melalui analisa dan sintesa sehingga mereka tidak menjadi kritis dan tidak kreatif.²⁹⁹

Di masa lalu ketika bangsa ini menghadapi penindasan kaum penjajah, pesantren telah memainkan peranan penting berupa menggerakkan, memimpin, dan melakukan perjuangan dalam rangka mengusir kaum penjajah. Seorang pakar sejarah dari Universitas

296Tujuan-tujuan sekolah tersebut antara lain: (1) untuk menghilangkan fanatisme keislaman kaum muslimin dari hati dan pikirannya dan (2) untuk mengimbangi model pendidikan yang dilakukan pesantren. Di samping itu, pemerintahan kolonial menerbitkan Ordonansi Guru Agama, sebuah kebijakan yang dinilai umat Islam sebagai taktik yang tidak hanya sekedar membatasi perkembangan pesantren atau pendidikan Islam saja, tetapi sekaligus menghapus peran penting Islam di Indonesia. Machnun Husein, *Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983), hlm. 6.

297Abuddin Nata, "Pendidikan Islam di Indonesia: Tantangan dan Peluang", dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Tanggal 20 Maret 2004, hlm. 5.

298Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah*, hlm. 6-7.

299Soegarda Poerbakawatja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*, Jakarta, Gunung Agung 1970, Cet I hlm. 242. Yang dikutip oleh Abuddin Nata, "Pendidikan Islam di Indonesia: Tantangan dan Peluang", dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar, hlm. 5.

Padjadjaran, Muhammad Mansur Suryanegara, sebagai mana dikutip Tafsir, menyatakan bahwa sulit mencari gerakan melawan penjajah di Indonesia yang bukan digerakkan dan dipimpin oleh orang pesantren.³⁰⁰ Bahkan pesantren secara riil memiliki basis kekuatan, pada satu pihak, terletak pada corak dan paham keislaman masyarakat Jawa itu sendiri dan pada pihak lain, basis ekstensial pesantren terletak pada integrasi lembaga ini ke dalam struktur sosial yang ada.³⁰¹ Dengan demikian, pesantren dalam masyarakat Indonesia berfungsi memberikan pelayanan pendidikan dan keagamaan, dan bimbingan sosial, kultural, serta ekonomi bagi masyarakat dilingkungannya.³⁰²

Perspektif historis, posisi dan peran pesantren di Nusantara dapat dijelaskan secara kronologis sebagai berikut:

- a. Abad 12 sampai dengan pertengahan abad 15 pesantren berkembang sebagai sarana sosialisasi Islam dan pendidikan kader ulama dan pemimpin. Pada fase ini, ulama-ulama dari luar Nusantara berperan mengislamkan wilayah Nusantara.
- b. Akhir abad 15 sampai pertengahan abad 16, pesantren menjadi salah satu pusat pendidikan dan penyiapan kader elite birokrasi kerajaan dan ulama lokal sudah menjadi penyebar Islam di Nusantara.
- c. Pertengahan abad 16 sampai abad 17 pesantren menjadi alat legitimasi kekuasaan.
- d. Pertengahan abad 17 sampai akhir abad 17 mulai muncul jarak atau rivalitas antara pesantren dengan elit birokrasi, khususnya ketika pusat Islam bergeser ke pedalaman (Mataram Islam).
- e. Akhir abad 17 sampai akhir abad 18 peranan pesantren sebagai acua legitimasi merupakan alat salah satu elite birokrasi kerajaan.
- f. Akhir abad 18 fenomena sejarah menunjukkan adanya pesantren dihancurkan (Kajoran, Giri, Sumenep, dan lain-lain)
- g. Akhir abad 18 hingga 19 pesantren “menjauhi” pusat

300Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, hlm. 192.

301Azyumadi Azra, *Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, hlm. 88.

302Azyumadi Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi*, hlm. 108.

kekuasaan yang banyak menjadi perpanjangan tangan kekuasaan kolonial, sementara pesantren kembali menjadi sandaran aspirasi umat.³⁰³

Ambary tampaknya belum menganalisis lebih jauh mengenai dinamika pesantren di abad ke-20. Karena itu, patut diduga kuat bahwa pesantren di abad tersebut mengalami perubahan yang sangat signifikansi.³⁰⁴ Di mana pada pertengahan abad ke-20, lembaga pendidikan Islam tradisional ini banyak melakukan ekspansi dari wilayah pedesaan ke berbagai wilayah perkotaan.³⁰⁵ Pesantren tidak hanya menjadi pusat dan lembaga pendidikan Islam tradisional dan lembaga penyiaran/dakwa Islam, melainkan juga merupakan lembaga sosial, yang memberikan warna khas bagi perkembangan masyarakat sekitarnya dan masyarakat daerah asal santri.³⁰⁶ Dengan kata lain, lembaga pendidikan pesantren telah berhasil seperti yang diistilahkan Mastuhu perang nilai, antara pesantren dengan masyarakat sekitarnya, dan diakhiri dengan kemenangan pada pihak pesantren, sehingga pesantren dapat diterima hidup di dalam masyarakat dan menjadi panutan di bidang moral.³⁰⁷

Menurut Atho Mudzar dunia pendidikan pesantren memperhatikan perubahan sosial yang terjadi dengan mengagendakan beberapa hal:³⁰⁸ *Pertama*, pesantren memosisikan sebagai lembaga pendidikan kegamaan (keislaman) yang tetap menjadi sentral *tafaqquh fi al-dien* yang berfungsi memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan ilmu-ilmu keislaman. Strategi pembelajarannya, pesantren tidak perlu anti-iptek modern, tetapi menggunakannya untuk mencapai efektifitas belajar.

Kedua, pesantren dapat mengembangkan ilmu-ilmu umum semaksimal mungkin dalam upaya beradaptasi dengan kemajuan

303Suwito, Muhib, *Jaringan Intelektual Kiai Pesantren di Jawa-Madura Abad XX*, 34-35. Yang dikutip dari Hasan Muarif Ambary, *Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis dan Historis Islam*, hlm. 314.

304Suwito, Muhib, *Jaringan Intelektual Kyai Pesantren di Jawa-Madura*, hlm. 35.

305Ahmad Syafi'ie Noor, *Orientasi Pengembangan Pendidikan Pesantren*, hlm. 3

306Andi M. Ramli, Gambaran Singkat tentang Pendidikan di Pesantren, dala Buletin *Bina Pesantren*, Depag RI, Juli 1999, hlm. 6.

307Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, hlm. 20.

308Atho Mudzhar, "Pesantren Transformatif: Respon Pesantren Terhadap Perubahan Sosial", hlm. 13-14.

iptek yang berkembang dan dibutuhkan dimasyarakat. Dalam konteks ini pendidikan pesantren dapat menjalankan fungsi islamisasi ilmu (*Islamization of sciences*). *Ketiga*, sebagai lembaga peradaban, pesantren sudah saatnya memperhatikan tuntutan ideologi global yang berkembang. Di samping menjalankan fungsi pemeliharaan atau pelestarian nilai-nilai local (*localities*) yang baik, positif dan bermanfaat bagi pesantren juga sudah saatnya mengadaptasinya selama tidak menghancurkan lokalitas.

Keempat, sebagai agen perubahan sosial-ekonomi, yang *notabene* merupakan lembaga pendidikan dari dan untuk masyarakat, atau lembaga berbasis masyarakat, maka pesantren dituntut berpartisipasi aktif dalam perekonomian masyarakat sekitarnya. *Kelima*, dalam aspek kurikulum pesantren mengembangkan keunggulan sesuai visi, misi, dan tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat, dengan memanfaatkan kemajuan iptek yang berkembang.

D. Daya Ketahanan dan Kontinuitas Institusi Pesantren

Azyumardi Azra mengemukakan bahwa tidak banyak lembaga-lembaga pendidikan tradisional Islam seperti pesantren yang mampu bertahan menghadapi ekspansi sistem pendidikan umum untuk tidak menyebut sistem pendidikan sekuler. Dengan begitu, sebagai konsekuensinya; *pertama*, pesantren lenyap setelah tergusur oleh pendidikan umum; *kedua*, pesantren mengalami transformasi menjadi lembaga pendidikan umum; dan *ketiga*, pesantren setidaknya menyesuaikan diri dan mengadopsi sedikit banyak isi dan metodologi pendidikan umum.³⁰⁹ Hal tidak terjadi karena faktanya pendidikan pesantren mampu merespon perkembangan di sekitarnya tanpa meninggalkan ciri aslinya.

Ada beberapa kekuatan pesantren sehingga mampu bertahan sampai sekarang: *Pertama*, kekuatan tradisi yang melekat pendidikan pesantren menjadikan dan membuktikan peranannya pesantren sebagai salah satu institusi yang melahirkan ulama dan pemimpin umat serta mampu memelihara tradisi keilmuan Islam. Makna

309Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, hlm. 95.

Tradisi bagi Masyarakat Islam di kawasan Asia Tenggara memiliki sejarah – paling tidak – tujuh abad, dan selama itu Islam telah dipengaruhi oleh lingkungan Asia Tenggara yang unik.³¹⁰ Dengan kata lain, Islam telah menjadi suatu tradisi tersendiri yang secara kokoh tertanam dalam konteks sosio ekonomi dan politik selama tujuh abad sejarah kawasan ini. Lebih jauh semakin disadari bahwa pemahaman kita terhadap tradisi ini semakin rumit, hal ini bisa terjadi karena adanya keharusan menerima banyak hal yang telah melalui jaringan kebijakan dan penafsiran kolonial, yang banyak di antaranya cenderung mengenyampingkan tradisi Islam untuk disesuaikan dengan aspirasi kolonial dan kepentingan administratif.

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita mendengar istilah “tradisi” seperti ungkapan tradisi Jawa, tradisi kraton, tradisi petani, tradisi pesantren dan lain-lain. Tetapi istilah “tradisi” biasanya secara umum dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma dan adat kebiasaan yang berbau lama, dan yang lama tersebut hingga kini masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan oleh masyarakat tertentu.³¹¹

Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang turun-temurun dari nenek moyang, ada pula yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata *traditium* yaitu segala sesuatu yang ditransmisikan, menurut peneliti tradisi pesantren menjadi kekuatan pendidikan pesantren, banyak penelitian yang kemudian membuktikan bahwa kekuatan pesantren ada pada kekuatannya. Kajian Martin van Bruinessen yakni *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Membuktikan bahwa dalam pandangan Bruinessen, pesantren telah sukses membangun tradisi agung (*great tradition*) dalam pengajaran agama Islam berbasis kitab-kitab klasik yang populer dengan sebutan kitab kuning. Tradisi yang dikembangkan yang dikembangkan pesantren memiliki keunikan dan perbedaan jika dibandingkan dengan tradisi dari entitas Islam lainnya di Indonesia seperti kaum modernis. Keunikan pesantren

310Taufik Abdullah, et.al, Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara (Jakarta: PT. Karya Unipress, 1988), hlm.1.

311Lihat Jurnal Pendidikan, Tadris. Volume 3. Nomor 2. 2008, hlm. 154

tentu terlihat pada kegigihannya merawat tradisi keilmuan klasik yang nyaris terabaikan oleh kaum modernis.

Penelitian Zamakhsrari Dhofier tentang *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai* (1994) yang memberikan gambaran dunia pesantren dari sudut yang lebih adil, suatu cara pandang yang diabaikan oleh peneliti pesantren yang berasal dari luar pesantren. Dhofier menyebut tiga nama sebagai sasaran kritik. Dua nama yang disebut pertama adalah Clifford Geertz dan Alan Samson yang menggambarkan dunia pesantren cukup fatal dengan menggolongkan pesantren sebagai Islam kolot yang akrab dengan elemen-elemen sinkretis yang bertentangan dengan Islam. Anehnya, kesalahan cara pandang peneliti asing dilakukan pula oleh peneliti dari Indonesia, yakni Deliar Noer terhadap dunia pesantren. Menurut Dhofier cara pandang Deliar Noer terhadap pesantren tidak jauh berbeda dengan Samson dan Geertz yang cenderung memosisikan pesantren secara dikotomik; tradisionalisme pesantren di satu pihak dengan modernisme di pihak lain. Tidak puas dengan cara pandang dikotomik, Dhofier menawarkan cara pandang baru yang disebut *continuity and change* (kesinambungan dan perubahan). Melalui sudut pandang epistemik ini, Dhofier berhasil menunjukkan bahwa kreativitas pesantren dalam merespon perubahan dengan tetap merujuk pada tradisi keilmuan klasik.

Kajian Manfred Ziemek tentang *Pesantren dalam Perubahan Sosial* (1986). Dalam edisi berbahasa Jerman, *Pesantren Islamische Bildung in Sozialen Wandel*, terbit 1983. Kajian ini tidak hanya membahas pada tradisi keilmuan pesantren, tetapi juga pada peran-peran sosial pesantren dalam mengembangkan masyarakat di sekitarnya. Temuan Ziemek ini memberikan pencitraan terhadap pesantren yang sering disalahpahami sebagai institusi yang cenderung mengisolasi dari dunia luar.

Selanjutnya kajian Horikoshi (1976) yang berjudul *Kiai dan Perubahan Sosial*. Temuan penting Horikoshi adalah bahwa kiai ternyata tidak hanya memainkan peran sebagai makelar budaya (*cultural broker*) yang cenderung pasif, tetapi menjadi agen perubahan sosial sehingga baik pesantren maupun masyarakat di sekitarnya

tidak mengalami kesenjangan budaya (*cultural lag*) dengan dunia luar. Meskipun kiai mendorong pesantren dan masyarakat di sekitar pesantren terbuka terhadap dunia luar, pesantren tetap berpijak pada kearifan klasiknya yakni memelihara yang baik dari tradisi lama, dan mengambil lebih baik dari perubahan baru. Kajian yang dilakukan oleh Mardiyah (Jurnal),” Kepemimpinan Kiai dalam Memelihara Budaya Organisasi; di Pondok Modern Gontor, Liboyo Kediri, dan Pesantren Tebuireng Jombang”, dalam *Tsaqafah*, vol. 8. no. 1 April 2012. Penelitian menyimpulkan bahwa bahwa pesantren Lirboyo Kediri dan pesantren Modern Gontor, serta Tebuireng Jombang adalah pesantren yang besar dan bertahan, karena peran besar kiai dalam memelihara budaya organisasi pesantren.

Para peneliti di atas, memberikan pemahaman bahwa tradisi pesantren adalah hal yang harus dipelihara dan dipertahankan dalam mengembangkan pendidikan pesantren di tengah arus modernisasi pendidikan.

Kedua, dalam proses pendidikan pesantren menurut KH. Abdurrahman Wahid model pembelajarannya bukanlah sekedar menguasai ilmu-ilmu keagamaan, melainkan juga proses pembentukan pandangan hidup dan perilaku para santri yang nantinya setelah keluar dari pendidikan pesantren mampu masuk ke dalam kehidupan masyarakat.³¹² Sebaliknya para kiai adalah mereka yang telah memiliki kesempurnaan pandangan (*wâshilun*). Di dalam pengertian tasawuf, pesantren merupakan tempat pertempuran moral berlangsung diantara para *sâlikun*, yang akan dirubah perilakunya oleh *wâshilun*.³¹³

Dalam pandangan Husni Rahim proses pendidikan pesantren memiliki kekuatan karakter budaya yang memungkinkan santrinya belajar secara tuntas, dalam konsep modern budaya belajar tuntas sama dengan konsep *mastery learning*. Dalam konsep ini, proses pendidikan dilakukan tidak terbatas pada pola transfer ilmu-ilmu pengetahuan dari guru ke murid, melainkan juga termasuk aspek pembentukan kepribadian secara menyeluruh. Proses pendidikan

312KH. Abdurrahman Wahid, *Menjawab Kegelisahan Rakyat*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 134.

313KH. Abdurrahman Wahid, *Menjawab Kegelisahan Rakyat*, hlm. 135.

pesantren lebih menekankan pada penguasaan detail-detail konsep secara tuntas, tanpa terbelengguh oleh batasan waktu tertentu, bahkan dalam proses pendidikan pesantren hal yang penting diperhatikan kiai dan ustadz bukanlah pencapaian kuantitas materi yang bisa diselesaikan santri, melainkan kualitas penguasaannya.³¹⁴

Proses pendidikan pesantren dikenal dengan menggunakan berbagai metode³¹⁵ yakni *wetonan* berasal dari bahasa Jawa yang berarti waktu. Dhofier menerangkan bahwa metode *wetonan* adalah suatu metode pengajaran dengan cara guru membaca, menerjemahkan, menerangkan dan mengulas buku-buku Islam dalam bahasa Arab sedang sekelompok santri mendengarkan dan memperhatikan bukunya sendiri serta membuat catatan tentang kata-kata atau buah pikiran yang sulit.³¹⁶ Proses pengajaran model ini dilakukan pada waktu-waktu tertentu, biasanya sesudah mengerjakan shalat fardhu. Sistem *weton* ini juga dikenal dengan istilah *bandongan* adalah model pengajian yang dilakukan seperti kuliah terbuka yang diikuti oleh sekelompok santri sejumlah 100-500 orang atau lebih. Sang kiai membaca, menerjemahkan, menerangkan dan mengulas kitab-kitab salaf berbahasa Arab yang menjadi acuan. Sedangkan para santri mendengarkan dan memperhatikan kitabnya sambil menulis arti dan keterangan tentang kata-kata atau pemikiran yang sukar. Termasuk dalam kelompok sistem ini adalah *halaqah*, yaitu model pengajian yang umumnya dilakukan dengan cara mengitari gurunya. Para santri duduk melingkar untuk mempelajari atau mendiskusikan suatu masalah tertentu di bawah bimbingan seorang guru.

Menurut Mujamil Qomar *wetonan* (*bandongan*) dalam prakteknya selalu berorientasi pada pemompaan materi tanpa melalui kontrol tujuan yang tegas, bahkan dalam metode ini, santri bebas mengikuti pelajaran karena tidak diabsen, serta santri

314Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 150.

315Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Lihat Moeliono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990), hlm. 580-581.

316Zamakharyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, hlm. 54.

yang mengikuti *wetonan* adalah mereka pada tingkat menengah.³¹⁷ Proses pengajaran menekankan pada kualitas penguasaan materi ajar, dimana para santri mempunyai kesempatan untuk bertanya atau meminta penjelasan lebih lanjut atas keterangan kiai.³¹⁸ Namun demikian, penerapan metode *wetonan* mengakibatkan santri bersikap pasif, sebab kreatifitas dalam proses belajar-mengajar didominasi kiai, sementara santri hanya mendengarkan dan memperhatikan keterangannya.

Sedangkan pada sistem metode *sorogan* berasal dari kata Jawa yang berarti sodoran maksudnya suatu sistem belajar secara individual di mana santri berhadapan maju satu persatu untuk membaca dan menguraikan isi kitab dihadapan seorang guru atau kiai.³¹⁹ Metode *sorogan* ini dalam proses pendidikan pesantren yang tidak hanya dilakukan oleh santri bersama kiai dan ustadznya, melainkan juga antara santri dengan santri lainnya. Dengan *sorogan*, ini para santri diajak untuk memahami kandungan kitab secara perlahan-lahan secara detail dengan mengikuti pikiran atau konsep-konsep yang termuat dalam kitab kata per kata.³²⁰ Inilah yang memungkinkan santri menguasai kandungan kitab secara keseluruhan, dan memungkinkan untuk *mereview* pemahamannya dengan memberikan penjelasan kepada santri lainnya. Menurut Dhofier sistem *sorogan* ini adalah sistem yang paling sulit dari keseluruhan metode proses pendidikan pesantren, sebab sistem ini menuntut kesabaran, kerajinan, ketaatan dan disiplin santri dan pribadi kiai³²¹

Selanjutnya metode *hafalan* ialah suatu metode di mana santri menghafal teks atau kalimat tertentu dari kitab yang dipelajarinya. Biasanya metode menghafal ini memudahkan santri untuk menghafal, baik ketika sedang belajar maupun saat berada

317Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 143.

318Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 151.

319Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 50. Bandingkan dengan Ahmad Syafi'ie Noor, *Orientasi Pengembangan Pendidikan Pesantren Tradisional*, hlm. 71-73.

320Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 151.

321Zamakhysari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kiai*, hlm. 54.

di luar jam belajar. Kebiasaan menghafal dalam sistem pendidikan pesantren merupakan tradisi yang sudah berlangsung sejak awal berdirinya. Hafalan tidak saja terbatas pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits, tetapi juga isi atau teks kitab tertentu. Karena itu, sebagian kiai mengajarkan kitab kepada santrinya tidak sekaligus, tetapi secara berangsur-angsur (*gradual*), kalimat demi kalimat sehingga santrinya mengerti benar apa yang diajarkannya.³²²

Metode *halaqah* merupakan kelompok kelas dari sistem *weton/badongan*. *Halaqah* dari segi kebahasaan berarti lingkaran belajar santri. Pelaksanaan metode ini, beberapa orang santri dengan jumlah tertentu membentuk *halaqah* yang dipimpin langsung oleh seorang kiai dan ustadz atau santri senior untuk membahas dan mengkaji suatu persoalan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya para santri dengan bebas mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau pendapatnya.³²³ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *halaqah* memiliki arti diskusi untuk memahami isi kitab bukan untuk mempertanyakan kemungkinan benar salahnya yang diajarkan kitab. Metode ini lebih menitikberatkan kepada kemampuan perseorangan dalam menganalisis dan memecahkan suatu persoalan dengan argumen logika yang mengacu pada kitab-kitab tertentu.

Dari metode-metode yang disebutkan di atas dapat dikategorikan menjadi dua yaitu *sorogan* dan *wetonan* yang sama-sama memiliki ciri pemahaman yang sangat kuat pada pemahaman tekstual atau literal.³²⁴ Karena itu, dalam perkembangannya metode *sorogan* banyak mendapat kritikan karena tidak efektif dan membuat pihak kiai atau ustadz cepat lelah lantaran melayani muridnya satu persatu,³²⁵ akan tetapi akhir-akhir ini, metode ini

322Abuddi Nata (Ed), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm. 108-109.

323Samsul Nizar, *Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara*, hlm. 163.

324Husein Muhammad, "Kontektualisasi Kitab Kuning: Tradisi Kajian dan Metode Pengajaran", dalam Marzuki Wahid dkk (Peny), *Pesantren Masa Depan Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 281.

325Kelemahan metode *sorogan* efesiensi waktu tidak dapat terwujud. Hal ini mengingat karena banyak santri yang harus berhadapan dengan kiai.

kembali dipandang sebagai metode yang baik, karena ternyata justru sesuai dengan pandangan terbaru di bidang pendidikan. Bila dilihat dari sisi teoritis pendidikan, metode *sorogan* sudah termasuk metode modern, karena antara kiai dan santri dapat saling kenal dan mengenal, kiai memperhatikan pembelajaran belajar santri, sedangkan santri aktif dalam belajar dan mempersiapkan diri sebelum belajar.³²⁶ Hal ini juga diakui Mujamil Qomar mengakui bahwa metode *sorogan* secara didakti-metodik memiliki efektivitas dan signifikansi yang tinggi dalam mencapai hasil belajar.³²⁷

Lain halnya dengan metode *wetonan* atau *bandongan*, kelemahan dasar dari metode ini dianggap relatif kurang efektif untuk pengembangan ranah kognitif karena tidak ada sistem kontrol terhadap kehadiran santri dan penilaian terhadap hasil belajar mereka tidak memberikan kesempatan kepada santri untuk mengemukakan idenya ataupun memberikan kritik kepada kiainya. Tetapi metode ini juga realistis, karena menuntut pada setiap santri untuk mandiri dan kreatif sebab santri yang bisa cepat menyelesaikan satu kitab akan pindah untuk mempelajari kitab yang lainnya.³²⁸ Sebenarnya dalam proses pengajaran baik metode *sorogan* dan *bandongan* memang mempunyai kesempatan bertanya itu memang ada, tetapi jarang dimanfaatkan santri. Jika santri bertanya maka sifatnya konfirmasi, bukan mengkritik, menentang, atau menggugat pandangan pengarang kitab atau kiai. Hal ini terjadi menurut Mastuhu, karena teknik proses belajar mengajar bertolak dari keyakinan bahwa isi kitab yang diajarkan benar dan kiai tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang keliru dan menyesatkan, jadi sifatnya mekanis, dan mempelajari kitab

326Kelebihan metode *sorogan* terjadinya komunikasi antar kiai dan santri, sehingga proses pengawasan dan penilaian serta bimbingan secara maksimal kemampuan santri dalam menguasai materi.

327Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, hlm. 145.

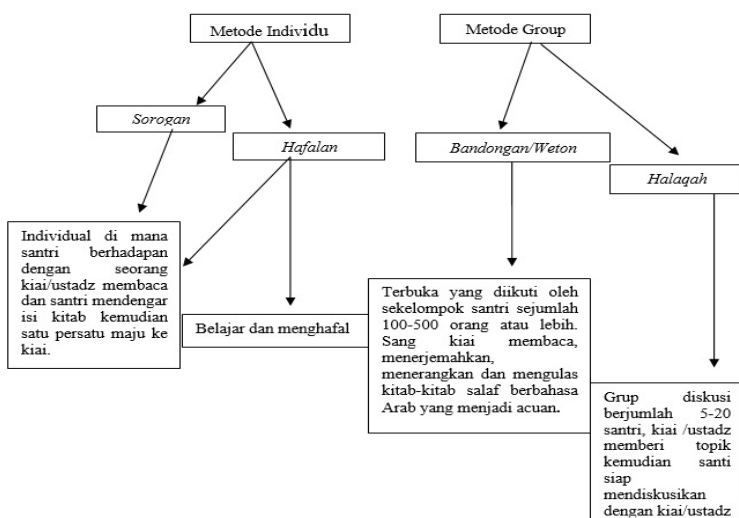
328Secara keluruhan kelemahan kedua metode ini adalah tidak ada pelaksanaan evaluasi belajar yang baku, tidak ada standar kitab dan peserta didik yang akan belajar, tidak ada ketentuan standar kapan seorang santri dapat dikatakan tamat belajar, dan proses belajar yang tumpang-tindih karena kedisiplinan kurang diperhatikan. Samsul Nizar, *Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara*, hlm. 126-165.

berurutan tidak melompat-lompat.³²⁹

Proses pengajarannya di lembaga pendidikan pesantren menurut KH. Abdurrahman Wahid lebih banyak bersifat doktriner,³³⁰ dan ciri tersebut tetap harus dipertahankan sampai kepada sistem sekolah dan madrasah.³³¹ Proses pendidikan di lingkungan pesantren dengan menggunakan teknik proses belajar mengajar dengan menggunakan metode *sorogan*, *wetonan*, *halaqah* dan *hafalan*. Hal ini terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar. 4.6.

Proses pendidikan di pesantren



Dari metode di atas, baik yang model individu maupun sistem group merupakan kekhususan dari proses pembelajaran pada pendidikan pesantren. Metode ini, juga mengindikasikan peranan kiai sangat dominan dalam kegiatan pembelajaran. Karena itu, menurut Endin Mujahidin proses pembelajaran ini mengarah

329Bagi santri belajar itu sendiri sudah merupakan ibadah kepada Tuhan, karena itu, diperoleh tidaknya ilmu sebagai hasil belajar sangat tergantung pada rida Tuhan, diperolehnya melalui usaha dengan segenap kesucian jiwa, puasa, shalat dan sebagainya. Matuhu, *Dinamikan Sistem Pendidikan Pesantren*, hlm. 144.

330KH. Abdurrahman Wahid, *Bunga Rampai Pesantren*, hlm. 28-9.

331Karena memiliki kelebihan yakni: *pertama*, kemampuan menciptakan sebuah sikap hidup universal yang merata, yang diikuti oleh semua warga pesantren sendiri, dilandasi dengan tata nilai di atas. *Kedua*, kemampuan memelihara subkultur sendiri. KH. Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren*, hlm. 73.

pada orientasi yang mendorong santrinya untuk menguasai materi secara utuh, sehingga pesantren menghasilkan lulusan yang sangat kuat penguasaan materinya tetapi sangat lemah dalam metodologi berfikirnya.³³² Hal ini disebabkan, karena teknik proses pendidikan pesantren di atas, dapat dikatakan sebagai pendidikan tuntas adalah model pembentukan kepribadiannya. Karena proses pendidikan pesantren, santri tidak didik pada aspek kognitif saja, melainkan yang lebih fundamental adalah aspek afektif dan psikomotoriknya. Latihan-latihan spiritual dan hormat kepada kiai, ustadz, sangat ditekankan, juga didorong untuk mencontoh perilaku kiai sebagai tokoh panutan, serta santri dilatih untuk mandiri baik dalam belajar maupun dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Kesemuannya ini dilakukan melalui pola relasi kiai dengan santri, dalam waktu 24 jam kiai dan ustadz memantau dan mengarahkan seluruh aktivitas santri agar mempunyai pengetahuan keagamaan dan prilakunya yang dikembangkan di pendidikan pesantren.³³³ Dengan demikian proses pembentukan kepribadian santri dilakukan secara sistematis dengan pola komunikasi kiai, ustadz dan santrinya dengan baik.

Adapun proses pendidikan di pesantren yang dilaksanakan adalah :

- a. Adanya hubungan yang akrab antara santri dengan kainya. Kiai sangat memperhatikan santrinya, hal ini memungkinkan karena sama-sama tinggal dalam suatu kompleks dan sering bertemu baik disaat belajar maupun dalam pergaulan sehari-hari.
- b. Kepatuhan santri kepada kiai, para santri menganggap bahwa menentang kiai, selain tidak sopan juga dilarang agama, bahkan tidak memperoleh berkah karena durhaka kepada guru.
- c. Hidup hemat dan sederhana benar-benar terwujud dalam lingkungan pesantren.
- d. Kemandirian amat terasa di pesantren, para santri mencuci

332Endin Mujahidin, *Pesantren Kilat Alternatif Pendidikan Agama di Luar Sekolah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 48.

333Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 152.

- pakaian sendiri, membersihkan kamar tidurnya sendiri.
- e. Jiwa tolong menolong dan suasana persaudaraan (*ukhuwah*) sangat mewarnai pergaulan di pesantren.
 - f. Disiplin sangat dianjurkan di pesantren. Pagi-pagi antara pukul 04.30 atau pukul 05.00 kiai membangunkan santrinya untuk shalat malam dan shubuh berjamaah.
 - g. Berani menderita untuk mencapai suatu tujuan merupakan salah satu segi pendidikan yang diperoleh para santri di pesantren. Ini merupakan pengaruh dari kebiasaan puasa sunnat, zikir, dan iktikaf, shalat tahajjud di malam hari, dan latihan-latihan spiritual lainnya.³³⁴

Bila dilihat dari sistem pengajarannya yang diterapkan dalam proses pendidikan pesantren adalah penghormatan yang besar oleh santri kepada kainya. Sehubungan dengan itu, Nurcholish Madjid menggambarkan proses itu, dimana kiai duduk di atas kursi yang dilandasi bantal dan para santri duduk mengelilinginya. Proses seperti ini menimbulkan sikap hormat dan sopan oleh para santri terhadap kainya, bahkan santri dengan tenang mendengarkan uraian-uraian yang disampaikan kiai.³³⁵ Inilah yang distilahkan James C. Scott yang kutip Sukamto yakni model *patron-client relation*,³³⁶ yang oleh Dhofier dijelaskan bahwa kiai merupakan patron karena memiliki otoritas dan kekuasaan mutlak dalam mewarnai pendidikan pesantren pada seluruh aspek kehidupan yang berlangsung seumur hidup baik bagi kiai maupun santrinya.³³⁷

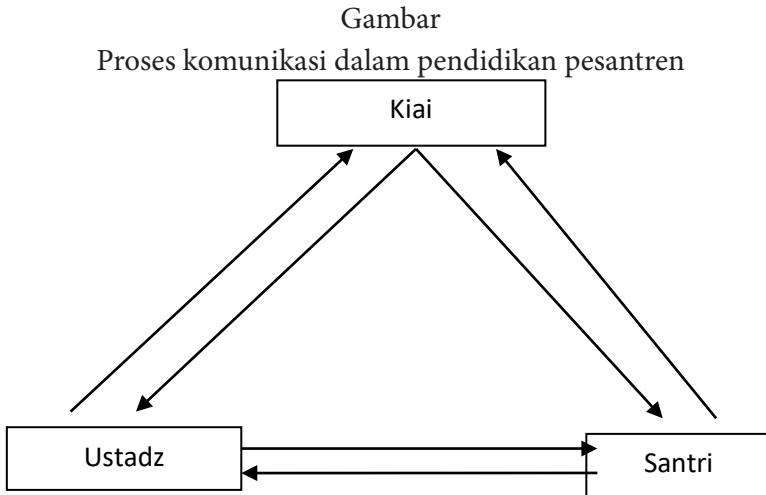
334Perlu dicatat bahwa ciri-ciri di atas merupakan gambaran sosok pesantren dalam bentuk yang masih murni, yaitu pola proses pendidikan pesantren tradisional. Abuddin Nata (Ed), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 118-120.

335Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren*, hlm. 22.

336Pola hubungan *patron-client* adalah hubungan timbal balik di antara dua orang dapat diartikan sebagai sebuah kasus khusus yang melibatkan perkawanan secara luas, dimana individu yang satu memiliki status sosial-ekonomi yang lebih tinggi (patron) yang menggunakan pengaruh dan sumber-sumber yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan atau keuntungan-keuntungan kepada individu lain yang memiliki status lebih rendah (klien), dalam hal ini klien mempunyai kewajiban membalas dengan memberikan dukungan dan bantuan secara umum, termasuk pelayanan-pelayanan pribadi kepada patron. Lihat Sukamto, *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1999), hlm. 78.

337Hubungan saling ketergantungan, kesabaran, ketulusan, kecintaan, antara kiai dan santri merupakan faktor yang sebenarnya yang menjamin kelangsungan pesantren.

Proses pendidikan pesantren, peran kiai sangat fenomenal dan signifikan dalam keberlangsungan atau eksistensi sebuah pesantren.³³⁸ Dengan sumber-sumber kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki berarti kiai secara normatif ditempatkan dalam status paling tinggi dari unsur-unsur lain yang ada di lingkungan pendidikan pesantren. Hal ini dapat gambarkan sebagai berikut:



Dari penjelasan di atas, tampak bahwa hubungan kiai sebagai patron dengan ustadz dan santri sebagai klien diperkuat oleh sistem nilai yang melembaga, yaitu tradisi *sami'na wa atho'na* (mendengar dan mentaati). Nilai ini dibarengi dengan nilai lainnya yang mengatur proses pendidikan di pesantren, yang oleh KH. Abdurrahman Wahid disebut *subkultur*.

Menurut Sukamto pola relasi kiai dengan santri terbentuk ada tiga yaitu:³³⁹ *Pertama*, hubungan patron-klien mendasarkan diri pada pertukaran yang tidak seimbang, yang mencerminkan

Zamakhasyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya*, hlm. 129.

338Intensitas kiai memperlihatkan peran otoriter, hal ini disebabkan karena kiai adalah perintis, pendiri, pengelolah, pengasuh, pemimpin, dan bahkan juga pemilik tunggal sebuah pesantren. Oleh sebab itu, alasan ketokohan kiai di atas, banyak pesantren akhirnya bubar lantaran ditinggal wafatnya sang kiai, sementara kiai tidak mempunyai keturunan yang dapat melanjutkan usahanya. Lihat Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1993), hlm. 90.

339Sukamto, *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren*, hlm. 79-80.

perbedaan status. Seorang santri mendapat dan menerima banyak jasa dari patron, dalam hal ini kiai, sehingga klien bergantung pada patron. *Kedua*, hubungan patron-klien bersifat personal bersifat prosional antara kiai dan santri menciptakan rasa kepercayaan dan ketergantungan di dalam mekanisme hubungan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari budaya penghormatan santri ke kiai yang cenderung bersifat kultus individu. *Ketiga*, hubungan patron tersebar menyeluruh, fleksibel dan tanpa batas kurun waktunya.³⁴⁰

Teori yang dibangun oleh Sukanto di atas, mencerminkan kecenderungan menyamakan konsep patron-klien yang ada di masyarakat dengan yang ada di institusi pendidikan pesantren. Padahal proses pendidikan pesantren sangat unik, karena memakai sistem kepemimpinan pra-modern yang dibangun di atas landasan kepercayaan, bukan patron-klien sebagaimana dilakukan masyarakat pada umumnya. Bahkan ketaatan santri kepada kiai lebih dikarenakan mengharap *barakah*, sebagaimana dipahami dari konsep sufi.³⁴¹

Gambaran di atas, memberikan pemahaman bahwa proses pendidikan pesantren adalah terjadinya komunikasi timbal balik dalam proses pengajaran dimana kiai mempunyai otoritas tinggi yang setiap kebijakannya harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh ustadz dan santri. Bahkan seorang kiai dengan para pembatunya merupakan hierarki kekuasaan satu-satunya yang secara eksplisit diakui dalam tradisi lingkungan pendidikan pesantren, yang ditegakkan di atas kewibawaan moral sang kiai sebagai penyelamat para santrinya dari kemungkinan melangkah ke arah kesesatan.³⁴² Dengan demikian, proses pendidikan pesantren menjadi hal menarik untuk diterapkan dalam modernisasi pendidikan, hal ini disebabkan karena sesuai dengan pembentukan pendidikan karakter di bangsa ini.

Ketiga, dari segi organisasi sosial ketahanan dan kontinuitas sistem pendidikan pesantren jika dianalisis dengan

³⁴⁰Hal dimungkinkan karena sosialisasi nilai ketika menjadi santri berjalan betahuntahun. Suatu bentuk nilai yang senantiasa dipegang teguh santri, misalnya tidak adanya keberanian santri berdebat soal apa pun dengan kiai atau membantahnya karena bisa *kuwalat* dan ilmunya tidak bermanfaat.

³⁴¹KH. Abdurrahman Wahid, *Pesantren Masa Depan*, hlm. 14.

³⁴²KH. Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan*, hlm. 94.

teori struktur fungsional³⁴³ yang digagas oleh Talcott Parsons dengan mengemukakan bahwa agar sistem organisasi sosial dapat bertahan (*survive*) maka sistem harus memiliki empat hal yaitu AGIL:³⁴⁴

1. *Adaptation* (adaptasi), sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan.
2. *Goal attainment* (mempunyai tujuan), sebuah sistem harus mendefinisihkan dan mencapai tujuan utamanya.
3. *Integration* (integrasi), sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya.
4. *Latency* (pemeliharaan pola), sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Keempat fungsi tersebut menurut Parsons berlangsung ke dalam empat sistem tindakan yaitu: *pertama*, organisasi perilaku yang melaksanakan adaptasi. *Kedua*, sistem kepribadian, yang melaksanakan pencapaian tujuan. *Ketiga*, sistem sosial yang menanggulangi fungsi integrasi, dan *keempat*, sistem kultural, yang melaksanakan fungsi pemeliharaan pola. Kelemahan teori yang dibangun Talcott Persons tidak membicarakan tentang kepemimpinan sebuah organisasi, padahal kepemimpinan menjadi kunci melaksanakan program-program di atas, dalam struktur organisasi.

Struktur Sistem Organisasi Parsons: AGIL

Organisasi perilaku (<i>adaptasi</i>)	Sistem kepribadian, tujuan (<i>goal attainment</i>)
Sistem Sosial (<i>integration</i>)	Sistem Kultural (<i>latency</i>)

Dari teori sturuktur fungsional di atas, dapat dianalisis bahwa sistem pendidikan pesantren mempunyai daya tahan kuat karena

³⁴³Fungsionalisme Struktural adalah salah satu paham atau perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain.

³⁴⁴George Ritzer dan Goodman J. Doglas, *Teori Sosiologis Modern*, terj. Alimadan (Jakarta: Prenada, 2004), h. 121.

sesuai dengan struktur sosial suatu sistem organisasi dalam menghadapi perubahan atau modernisasi. Hal terlihat dalam konsep operasional dalam sistem pendidikan pesantren yaitu: *pertama*, sistem adaptasi yang dilakukan dipesantren sangat jelas ketika melihat fungsi pesantren yang memosisikan sebagai lembaga pendidikan keagamaan (keislaman) yang tetap menjadi sentral *tafaqquh fi al-dien* yang berfungsi memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan ilmu-ilmu keislaman.³⁴⁵ Bahkan peran nilai antara masyarakat dan pesantren yang diakhiri oleh kemenangan pesantren, sehingga selama masa kolonial pesantren merupakan pendidikan yang banyak beradaptasi dengan rakyat dan tidak berlebihan kirannya untuk menyatakan pesantren sebagai lembaga pendidikan *grass root people* yang menyatu dengan kehidupan masyarakat.

Adaptasi pesantren dengan lingkungan masyarakat sebagai lembaga pendidikan yang besar dan luas penyebarannya telah banyak memberikan saham dalam pembentukan manusia Indonesia yang religius.³⁴⁶ Peranan pesantren dengan berbagai komponennya menjadi bekal dalam proses pembangunan dan perubahan sosial yang menuju tatanan masyarakat berkarakter serta menjadi manusia seutuhnya (*insan kamil*).³⁴⁷ Pesantren mempunyai peran terhadap pengembangan karakter ilmu pengetahuan, baik secara kultur yang dimulai dari konstruksi tentang tradisi kiai, mengaji kitab kuning sampai konstruksi pengetahuan dan amaliah.³⁴⁸ Sebagai lembaga peradaban, pesantren sudah saatnya memperhatikan tuntutan ideologi global yang berkembang. Di samping menjalankan fungsi pemeliharaan atau pelestarian nilai-nilai lokal (*localities*) yang baik, positif dan bermanfaat bagi pesantren juga sudah saatnya mengadaptasinya selama tidak menghancurkan lokalitas. Karena itu, sebagai agen perubahan sosial-ekonomi, yang *notabene* merupakan

345Atha Mudzhar, "Pesantren Transformatif: Respon Pesantren Terhadap Perubahan Sosial", h. 13-14.

346Lembaga tersebut banyak melahirkan pemimpin bangsa di masa lalu, kini dan sekarang dan agaknya juga di masa datang. Lulusan pesantren banyak mengambil partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa.

347Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi-tradisi Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 44.

348Ahmad Baso, *Pesantren Studies 2a, Kosmopolitanisme Peradaban Kaum Santri di Masa Kolonial* (Jakarta: Pustaka Afid, 2012), h. 320.

lembaga pendidikan dari dan untuk masyarakat, atau lembaga berbasis masyarakat, maka pesantren dituntut berpartisipasi aktif dalam perekonomian masyarakat sekitarnya.

Kedua, sistem kepribadian yaitu pencapaian tujuan (*goal attainment*) pesantren sangat jelas, dalam perspektif historis tujuan pendidikan pesantren pada awal perkembangannya ialah untuk mengembangkan agama Islam, dan lebih memahami ajaran Islam, terutama dalam bidang fiqih, bahasa Arab, tafsir, hadits, dan tasawuf.³⁴⁹ Sementara itu, tujuan pendidikan pesantren adalah terintegrasinya pengetahuan agama dan non agama, sehingga lulusan yang dihasilkan memiliki kepribadian yang utuh dan bulat dalam dirinya tergabung unsur-unsur keimanan dan pengetahuan secara berimbang.³⁵⁰

Jika dilihat dari konteks gagasan di atas, tujuan pendidikan pesantren ada dua hal, yaitu: (1) Tujuan khusus yakni mempersiapkan para santri untuk memiliki ilmu agama dan non agama. (2) Tujuan umum adalah membimbing santri untuk menjadi manusia yang berkpribadian Islam yang mampu mengamalkan ilmunya.³⁵¹ Inilah yang diistilahkan KH. Abdurrahman Wahid sebagai watak hidup mandiri, yang bersumber pada sistem nilai sendiri.³⁵² Sistem kepribadian telah dibentuk oleh institusi pesantren adalah menjadi manusia yang melahirkan santri yang memiliki kepribadian Islam dan mampu mengaplikasikan ilmunya serta mempunyai akhlak.

Ketiga, Sistem Sosial (*integration*) dari awal pendidikan pesantren selalu melakukan integrasi seperti pesantren Maba-ul Ulum Surakarta, Tebuireng Jombang dan pondok pesantren Gontor, baik secara kelembagaan maupun kurikulum. Bahkan pesantren yang melakukan integrasi mampu menjadi pesantren besar. Perkembangan terakhir, jenis Pesantren Salafiyah telah berkurang diperkirakan tinggal 5.512 pondok pesantren salafiyah dari 11.211 pondok pesantren yang ada di Indonesia.³⁵³ Ini berarti lebih dari

349Departemen Agama, *Seri Monografi Pondok Pesantren dan Angkatan Kerja* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000/2003), h. 12-13.

350Abdurrahman Wahid, *Bunga Rampai Pesantren*, h. 172-2.

351M. Arifin, *Kapita Seletakta Pendidikan Islam dan Umum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 248.

352KH. Abdurrahman Wahid, *Menggrakkan Tradisi*, h. 142.

353Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Logos

separuh pondok pesantren di Indonesia telah memodernisasi dirinya dengan mengadopsi sistem klasikal. Pengadopsian sistem klasikal sebagai ciri madrasah memicu pesantren bukan hanya mengadopsi sistem klasikal *ansich*, tetapi bahkan mengakomodasi lembaga madrasah secara utuh sebagai bagian tidak terpisahkan dari pesantren.

Keempat, Sistem pemeliharaan pola (*latency*). Sistem ini digagas KH. Abdurrahman Wahid dengan istilah teori subkultural pesantren, yang memiliki beberapa aspek:³⁵⁴ (a) aspek kegiatan pesantren berputar pada pembagian periode berdasarkan waktu sembahyang wajib. Kegiatan pokok dipusatkan pada pemberian pengajian buku-buku teks pada setiap habis menjalani sembahyang wajib. Sistem nilai kepesantrenan yang unik dan terpisah dari sistem nilai masyarakat di luarnya. (b) dalam pesantren terpeliharanya literatur universal selama berabad-abad dan diwariskan dari generasi ke generasi. (c) pola kepemimpinan³⁵⁵ yang berdiri sendiri dan berada di luar kepemimpinan pemerintahan desa. (d) struktur pengajarannya yang unik dan memiliki ciri khas sudah tentu juga menghasilkan pandangan hidup dan aspirasi yang khas pula. Visi untuk mencapai penerimaan di sisi Allah di hari kelak menempati kedudukan terpenting dalam tata nilai di pesantren yang kenal dengan keikhlasan yang mengandung arti ketulusan dalam menerima, memberi dan melakukan sesuatu di antara sesama makhluknya. Oleh sebab itu, pesantren tetap berpegang

Wacana Ilmu, 2005), h. 76.

354KH. Abdurrahman Wahid, *Bunga Rampai Pesantren*, h. 19-42

355Watak sub-kultur yang ditemukan KH. Abdurrahman Wahid dalam nilai, cara hidup, dan model kepemimpinan di atas, pada perjalanannya telah menempatkan pesantren dalam peran ganda: subsistem unik yang terpisah, dan oleh karena itu menjelma alternatif ideal bagi krisis sistemik masyarakat di sekelilingnya. Posisi ideal ini menurutnya sangat sesuai dengan perwujudan kultural Islam yang sampai ke Nusantara. Perwujudan kultural Islam ini mewujudkan dalam perpaduan antara doktrin formal Islam dengan kultus para wali (berpuncak pada kultus wali songo), sebagai sisa pengaruh pemujaan orang-orang suci (hermits) dalam agama Hindu. Perwujudan kultural tersebut nampak nyata dalam asetisme (az-zuhud, kealiman) yang mewarnai kehidupan agama Islam di kepulauan Nusantara, tidak sebagaimana terjadi di negeri-negeri Arab. Disisi lain, posisi keterpisahan kultural tersebut kemudian dibarengi oleh posisi menjadi bagian dari masyarakat, dalam arti keterlibatan aktif pesantren dalam proses perubahan sosial. Lihat, KH. Abdurrahman Wahid, *Bunga Rampai Pesantren*, h. 23.

pada tradisi nilai-nilai dianutnya sehingga dapat berperan sebagai lembaga yang mampu memberikan sumbangan yang berarti dalam membangun sistem nilai dan kerangka moral pada individu dan masyarakat. Seperti sifat kesederhanaan, *qanaah*, keikhlasan serta etos kerja.

Sistem nilai atau tradisi inilah yang harus dipertahankan dalam sistem pendidikan pesantren dan sepanjang pesantren mempertahankan pranata-pranata atau budaya organisasi yang dimilikinya, maka pesantren bukan hanya sebagai lembaga penyaring kebudayaan, tetapi kemampuan pesantren dalam mengontrol perubahan nilai. Peran inilah yang diharapkan, bukan hanya mampu menjalankan fungsi tradisionalnya, tetapi atau bahkan peran sosial lainnya, seperti menjadi pusat rehabilitasi sosial. Dalam konteks terakhir ini, banyak keluarga yang mengalami kegoncangan atau krisis sosial-keagamaan, pesantren merupakan alternatif untuk menyelamatkan anak-anak bangsa.

Keempat sistem di atas adalah modal pesantren untuk mempunyai daya tahan dan kontinuitas sistem pendidikan. Hanya saja sistem struktur fungsional di atas hanya bisa berjalan jika pesantren memiliki kepemimpinan kiai. Pesantren besar dan bertahan karena peran kiai dalam memelihara budaya organisasi.³⁵⁶ Kaitannya dengan kiai sebagai figur sentral di pesantren, kepemimpinan kiai di pesantren adalah sesuatu yang unik, relasi sosial antara kiai dan santri dilakukan atas dasar kepercayaan, bukan karena patron-klien sebagaimana yang dilakukan masyarakat pada umumnya. Ketaatan santri pada kiai lebih karena mengharapkan *barokah* misalnya dengan mencium tangan kiai ketika berjabat tangan, mengunjungi rumah kiai, meminta doa untuk momen tertentu. Menurut Horikoshi, kepatuhan para santri dan masyarakat itu disebabkan karena kiai dipandang sebagai orang suci dan dekat dengan Tuhan.³⁵⁷ Sehingga masyarakat dalam banyak hal mempercayakan penyelesaian permasalahan hidup mereka; tegasnya, kiai tempat bertanya sumber referensi, tempat menyelesaikan segala urusan, meminta nasehat serta fatwa.

356Mardiyah, "Kepemimpinan Kiai dalam Memelihara Budaya Organisasi", h. 27.

357Hiroko Horikoshi, *Kiai dan Perubahan Sosial*, h. 232.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa corak kepemimpinan kharismatik tidak dapat dihindari dalam dunia pendidikan pesantren, karena kepemimpinannya diaktori langsung oleh kiai yang mempunyai banyak kelebihan, sehingga pengaruh kiai sangat kuat di pesantren dan masyarakat.

Ketahanan sistem pendidikan pesantren dapat dipahami bahwa pesantren sesuai dengan teori ilmu sosial dalam budaya sebuah organisasi, karena itu pesantren yang besar dan memiliki daya tahan dan kontinuitas adalah pesantren yang melakukan empat sistem fungsi di atas. Jika tidak, maka dapat dipastikan pendidikan pesantren tidak mempunyai daya tahan yang kuat, bahkan akan tergusur sebagai lembaga pendidikan Islam alias menjadi pendidikan umum. Dengan kata lain meninggalkan salah satu fungsi sistem di atas, maka pendidikan pesantren tidak mempunyai ketahanan, dan mengikuti perkembangan zaman. Inilah yang diistilahkan dalam dunia pesantren yang berbunyi: *al-muhafazah 'ala-al-qadim al-salih wa al-akhdu bi al-jadid al-aslah* (memelihara dan melestarikan nilai-nilai lama yang masih positif dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih positif).

Dengan demikian, pendidikan pesantren dalam arus modernisasi pendidikan tetap akan bertahan dan menjadi kekuatan dan modal bagi pesantren dalam mengembangkan pendidikan pesantren di masa depan.

E. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, maka makalah ini menyimpulkan bahwa pesantren sebagai local genius mempunyai daya tahan yang kuat dalam menghadapi ekspansi modernisasi pendidikan, hal ini dikarenakan institusi pesantren memiliki modal tradisi yang dipegangi, proses pendidikan, serta sesuai dengan teori sosial fungsional dalam sebuah organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Ali. *Pembaharuan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri*. Jakarta: Disertasi UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Arifin, M. *Kapita Seletakta Pendidikan Islam dan Umum*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana, 2000.
- Baso, Ahmad. *Pesantren Studies 2a, Kosmopolitanisme Peradaban Kaum Santri di Masa Kolonial, Juz Pertama*. Jakarta: Pustaka Afid, 2012.
- Bruinessen, Martin van. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1999.
- Departemen Agama. *Seri Monografi Pondok Pesantren dan Angkatan Kerja*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2000/2003.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren, Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES, 2011.
- Faturahman, Pupuh. *Keunggulan Pendidikan Pesantren; Alternatif Sistem Pendidikan Terpadu Abad XXI*. Bandung: Tunas Nusantara, 2000.
- Ritzer, George dan Goodman J. Douglas. *Teori Sosiologis Modern*, terj. Alimadan. Jakarta: Prenada, 2004.
- Haedari, Amin. *Jurnal Pondok Pesantren Mihrab*, vol. II No. 1 Juli 2007.
- Hasingsih, Sri. "Peran Strategis Pesantren, Madrasah, dan Sekolah Islam di Indonesia", *El-Tarbawi Jurnal Pendidikan Islam*, No. 1. Vol. 1. 2008.

- Hidayat, Ma'arif. *Kinerja Manajemen dan Proses Pembelajaran pada Pondok Pesantren Ibnu Amin Pamangkih*. Darussalam Martapura: 2002.
- Hiroko, Horikoshi, *Kiai dan Perubahan Sosial*, terjemahan Umar Baslim dan Andy Muarly Sunrawa. Jakarta: P3M, 1987.
- Husaini, Adian. *Wajah Peradaban Barat; Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular-Liberal*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Khafidin, Zaenal. "Model Pendidikan Pesantren Madrasah," dalam *Jurnal Penelitian*, STAIN Kudus, Vol. 2, No. 1, 2008.
- Mahduri, M. Annas dkk. *Pesantren dan Pengembangan Ekonomi Umat: Pesantren al-Ittifaq dalam Perbandingan*. Jakarta: Depag RI, 2002.
- Madjid, Nurcholish. *Bilik-Bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina 1997.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LkiS, 1994.
- Mardiyah. "Kepemimpinan Kiai dalam Memelihara Budaya Organisasi: di Pondok Pesantren Modern Gontor, Lirboyo Kediri, dan Tebuireng Jombang", *Jurnal*, Vol. 8. No. I. April 2012.
- Mastuhu. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS, 1994).
- . *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Muchlis Solihin, Mohammad. "Modenisasi Pendidikan Pesantren", *Jurnal Tarbiyah, Tadris*, STAIN Pemekasan, Volume 6, Nomor 1 Juni 2011.
- Mudzhar, Atho. "Pesantren Transformatif: Respon Pesantren Terhadap Perubahan Sosial"
- Munawwar Mansur, Fadlil, "Kekayaan Budaya Pesantren", dalam *Jurnal Humaniora*. Fakultas Ilmu Budaya UGM, Volume xiv, No. 2/2004.
- Nata, Abuddin. *Pemikiran Para Tokoh-Tokoh Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- . *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Bandung: Angkasa,

2003.

- Noer, Delier. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Putra Daulay, Haidar, *Historisitas dan Eksistensi, Pesantren, sekolah dan Madrasah*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2000.
- Raehani. *Islam dan Kemajemukan Indonesia, Studi Kasus Pesantren dan Pendidikan Multikultural*. (Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) ke-10, Bajarmasin: 2010.
- Rahardjo, Dawam. "Mozaik Pesantren", *Jurnal Modernisasi Manajemen Pendidikan Pesantren*", Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren: PT. Ababil Citra Media, Edisi 02/Tahun I/Nopember 2005.
- Husni, Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005.
- Steenbrink, Karel A. *Pesantren Madrasah Sekolah*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Sudibyo, Rahmat Pulung. "Integrasi, Sinergi dan Optimalisasi dalam Rangka Mewujudkan Pondok Pesantren Sebagai Pusat Peradaban Muslim Indonesia", *Jurnal fakultas Pertanian dan Peternakan, Universitas Muhammadiyah Malang*, Volume 13, No. 2 Juli-Desember, 2010.
- Sumpeno, Ahmad dkk. *Pembelajaran Pesantren; Suatu Kajian Komparatif*. Jakarta: Kemenag RI, 2002.
- Suparta, Mundzier. *Perubahan Orientasi Pondok Pesantren Salafiyah, Terhadap Prilaku Keagamaan Masyarakat Keagamaan*. Jakarta: Asta Buana Sejahtera, 2009.
- Supriyono Edy. "Pesantren di Tengah Arus Globalisasi" dalam M. Affan Hasyim et.al., *Menggagas Pesantren Masa Depan*, Yogyakarta, 2008.
- Zarkasyi, Abdullah Syukri. *Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren*. Jakarta: Rajawali, 2005.
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Tilaar, H.A.M. *Pendidikan Dan Pembangunan Nasional Menyongsong*

Abad XXI. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Wahid, Abdurrahman. *Menggerakkan Tradisi-Tradisi Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, 2010.

_____, *Bunga Rampai Pesantren; Kumpulan Karya Tulis*. Jakarta: Dharma Bhakti, 1984.

BAB 10

MODERNISASI PENDIDIKAN MADRASAH DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

A. Pendahuluan

Madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang mempunyai sejarah panjang dipentas Republik ini, dan tidak dapat disangkal, bahwa institusi madrasah mempunyai andil besar dalam perjalanan bangsa, baik Indonesia sebelum merdeka maupun sesudah merdeka. Meskipun sistem pendidikan madrasah sebelum Indonesia merdeka masih sangat tradisional, banyak diantara pendiri tanah Air, terutama kelompok Islam (santri) adalah produk dari madrasah.³⁵⁸ Hanya saja rancang bangun madrasah yang pernah ada sebagai lembaga pendidikan Islam seringkali dihadapkan dengan perubahan, sehingga mengubah *performance* madrasah dari lembaga pendidikan tradisional menjadi lembaga pendidikan modern.

Perubahan itu, harus dipandang sebagai implikasi logis dari modernisasi madrasah yang selama ini memakai sistem tradisional. Meminjam istilah Karel A. Steenbrink, perubahan itu digambarkan sebagai perkembangan pendidikan Islam dari pesantren, madrasah, sekolah.³⁵⁹ Bahkan perubahan itu diharapkan dapat meruntuhkan tembok dualisme pendidikan yang selama ini dianggap sebagai biang keladi rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Gaung modernisasi madrasah dikalangan pembaharu sesungguhnya dilatarbelakangi dua

358Maskuri Abdillah, "Peningkatan Kualitas Pendidikan Madrasah", Dalam *Jurnal Madrasah*, vol. 1. no. 2 1996, Jakarta, Depag, h. 14.

359Baca Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, Jakarta, LP3ES, 1986.

faktor penting yaitu: *pertama*, lembaga pendidikan Islam (pesantren, surau, masjid) dianggap tradisional, kurang sistematis dan kurang memberikan kemampuan pragmatis yang memadai. *Kedua*, laju perkembangan sekolah-sekolah *gubememen* dikalangan masyarakat cenderung meluas dan membawa watak sekularisme, sehingga harus memiliki model dan organisasi yang lebih teratur dan terencana.³⁶⁰

Dengan demikian makalah ini akan mendeskripsikan dua hal yakni apa pengertian modernisasi madrasah, karakteristik madrasah, dan bagaimana kebijakan pemerintah terhadap modernisasi madrasah awal kemerdekaan sampai era 60-an, serta usaha-usaha yang dilakukan, model-model madrasah serta kondisi madrasah pasca UUD pendidikan Nasional. Penulisan ini menggunakan sumber-sumber rujukan (referensi) yang otoritatif, yang dideskripsikan melalui pendekatan historis.

B. Pengertian Madrasah

Perkataan madrasah dalam bahasa Arab adalah bentuk kata ketetapan tempat (*zharaf makan*) dari akar kata “*darasa*” secara harfiah madrasah diartikan sebagai tempat belajar para pelajar atau tempat untuk memberikan pelajaran.³⁶¹

Sedangkan Departemen Agama merumuskan arti madrasah melalui SKB 3 Menteri 1975 menjelaskan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum.³⁶² Dan dalam Undang-undang pendidikan Nasional No.2. tahun 1989, madrasah lembaga pendidikan yang berciri khas Islam.

Uraian di atas dapat memberikan pengertian bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang mempunyai tata cara yang sama dengan sekolah, mata pelajarannya agama Islam menjadi mata

³⁶⁰Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, Jakarta, logos, 2005, h. 15.

³⁶¹Mehdi Nakosteen, *Kontribusi Islam Atas Dunia Intelektual Barat; Deskripsi Analisis Abad Keemasan*, edisi Indonesia, Surabaya, Risalah Gusti, 1996, h. 66. lihat juga, Ibrahim Anised, *al-Mu'jam al-Wasit*, Kairo, Dar al-Ma'arif, 1972, h. 280.

³⁶²Lihat Surat Keputusan Bersama 3 Menteri (SKB 3Menteri), tahun 1975 pasal I

pelajaran pokok, di samping diberikan mata pelajaran umum, serta berciri khas Islam.

Karakteristik Madrasah

Karakteristik madrasah adalah ciri khas yang melekat pada madrasah yang merupakan kekuatan dari madrasah itu sendiri. Karakteristik madrasah meliputi:³⁶³ *pertama*, Madrasah adalah milik masyarakat (*Community Based Education*). Madrasah tumbuh dan berkembang dari masyarakat dan untuk masyarakat, karena itu dari segi kuantitas berkembang sangat pesat namun dari segi kualitas perkembangan madrasah sangat lamban. Konsekwensi madrasah yang bersifat “*populis/massif*” yang selalu cenderung memekar dan belum sempat mendalam. Keterikatan masyarakat terhadap madrasah lebih dinampakkan sebagai ikatan emosional keagamaan yang tinggi. Ikatan ini muncul karena bertemu dua kepentingan, yakni hasrat kuat masyarakat untuk berperang serta dalam pendidikan dan motivasi keagamaan untuk *tafaqqun fid dien*, dengan kekuatan ini, akhirnya masyarakat mempunyai rasa memiliki (*sence of biloging*) dan rasa tanggung jawab (*sence of responsibility*) yang tinggi dan dapat menjamin keberlangsungan madrasah. Tetapi dipihak lain madrasah menjadi kendala karena merasa sebagai pemilik dan pendiri. Dan tidak muda ide-ide reformasi.

Kedua, madrasah sebagai manajemen berbasis sekolah (*school based Management*). konsep manajemen berbasis sekolah merupakan konsep yang memberikan kewenangan, kepercayaan dan tanggung jawab yang luas bagi sekolah berdasarkan profesionalisme untuk menata organisasi sekolah, mencari dan mengembangkan serta mendayagunakan sumber daya pendidikan yang tersedia, dan memperbaiki kinerja sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan atau sekolah yang bersangkutan. Madrasah sejak awal kemunculannya didasari *shool based management*. Keberanian madrasah menentukan jenis keunggulan apa dari madrasahnyanya dan ciri khas apa yang membedakan dengan madrasah lain. Keragaman dan ketidaktergantungan dengan pemerintahan pusat dan birokrasi telah membuat madrasah pada masa lalu, banyak yang bergensi.

³⁶³Husni Rahim, *Madrasah Dalam Politik di Indonesia*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2005, h. 38-40.

Ketiga, madrasah sebagai lembaga *tafaqqun fin dien*, konsep dasar dari madrasah adalah untuk memberi kesempatan pada peserta didik mempelajari dan memahami serta mendalami agama sebagai kewajiban dari setiap individu, kemudian meneruskan ilmu yang didapat kepada orang lain. Ini pulalah yang menyebabkan madrasah tidak dapat dipisahkan dari lembaga dakwah yang bukan fokus utamanya.

Keempat, madrasah sebagai lembaga kaderisasi dan mobilitas umat, dari proses pendidikan ini melahirkan pribadi muslim yang saleh dengan penguasaan dan pengalaman ajaran Islam yang luas, mendalam, dan konsisten.

Adapun tujuan didirikan madrasah yakni untuk mentransmisikan nilai-nilai Islam, untuk memenuhi kebutuhan modernisasi pendidikan,³⁶⁴ sebagai respon atau jawaban dalam menghadapi lembaga kolonialisme dan Kristen. Untuk mencegah memudarnya semangat keagamaan pendidikan akibat meluasnya lembaga pendidikan Belanda.

C. Modernisasi Madrasah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia modernisasi diartikan proses pergeseran sikap mental dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan tuntutan hidup masa sekarang.³⁶⁵

Harun Nasution memberikan definisi modernisasi adalah pikiran, gerakan, usaha untuk mengubah paham-paham, adat-istiadat, institusi-institusi lama, untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern.³⁶⁶ Sedangkan Mukti Ali memberikan arti modernisasi adalah paham yang memberi kebebasan berfikir dan tidak bertentangan dengan tujuan untuk memurnikan Islam dengan cara mengajak para umat

364 Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Logos wacana Ilmu, 2001, h. 192-193.

365 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, h. 589.

366 Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1994, h. 11.

Islam untuk kembali kepada al-Qur'an dan sunnah.³⁶⁷

Dalam kaca mata Yuzril Ihza Mahendra bahwa modernisasi adalah aliran pemikiran keagamaan yang melakukan penafsiran terhadap doktrin agama sehingga tidak bertentangan dengan semangat zaman yang dominan, terutama apa-apa yang dijumpai dalam masyarakat yang maju.³⁶⁸

Pengertian di atas, memberikan penjelasan bahwa modernisasi merupakan suatu perubahan yang baru dan berbeda dari hal-hal yang sebelumnya serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, modernisasi adalah suatu keniscayaan dan tak terhidarkan sebagai konsekuensi logis dari adanya perubahan kompleksitas dari tuntutan kehidupan masyarakat yang majemuk. Jadi modernisasi madrasah adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk menata kembali sistem madrasah dari konservatisme menuju ke arah modern untuk menuju persaingan global. Hal ini selalu berkesinambungan dan signifikan dengan berbagai perubahan yang terjadi di masa depan, sehingga madrasah memiliki kesiapan menghadapi tantangan dan mampu mengantisipasinya.

Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama, terus berupaya melakukan berbagai terobosan dan perubahan yang diperlukan. Di awal kemerdekaan upaya-upaya untuk melakukan modernisasi madrasah telah dilakukan, dan telah banyak perubahan kebijakan-kebijakan pemerintah, baik terhadap pembelajarannya, kelembagaan, tenaga pengajar serta kurikulumnya, sehingga telah berhasil mentransformasikan institusi madrasah yang tradisional menjadi lembaga pendidikan Islam yang modern.

D. Kebijakan Pemerintah Terhadap Modernisasi Madrasah

Secara historis madrasah di Indonesia pada garis besarnya dapat dibagi tiga periode: masa kesultanan, masa penjajahan dan masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan ini dapat dikelompokkan pada

367A. Mukti Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa ini*, Jakarta, Raja wali Press, 1988, h. 14.

368Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*, Jakarta, Paramadina, 1999, h. 12.

masa awal kemerdekaan 1945-1958, masa Orde Lama 1958-1965, masa Orde Baru 1966-1998 dan masa reformasi sampai sekarang. Kalau dikelompokkan berdasarkan produk Undang-Undang kependidikan, maka awal kemerdekaan, masa lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 1950, UU No.12 Tahun 1954, masa UU No. 2 Tahun 1989, dan masa UU No.20 Tahun 2003.³⁶⁹ Institusi madrasah mulai diperhatikan oleh Badan Pekerja Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) dalam pengumumannya tanggal 22 Desember 1945(berita RI tahun II Nomor 4 dan 5, pada halaman 20 kolom 1) yang antara lain menganjurkan :”Dalam memajukan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya diusahakan agar pengajaran di langgar-langgar dan madrasah berjalan terus dan dipercepat”, kemudian tanggal 27 Desember 1945 BPKNIP menyarankan agar madrasah dan pondok pesantren mendapat perhatian dan bantuan.³⁷⁰

Memasuki alam Indonesia merdeka, sejak awal institusi madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam berada langsung di bawah Departemen Agama (Depag) yang berdiri sejak 1946. Sejak saat itulah perkembangan madrasah sepenuhnya berdasarkan tanggung jawab dan kebijakan pendidikan yang dilansir depag. Departemen Agama adalah salah satu lembaga pemerintahan yang menentukan proses belajar mengajar di madrasah, termasuk pengadaan tenaga pengajar dan penetapan kurikulum.³⁷¹ Usaha-usaha yang dilakukan depag terhadap modernisasi madrasah meliputi pengajaran agama disekolah negeri dan partikulir, memberi pengetahuan di madrasah, dan mengadakan pendidikan guru agama (PGA) dan pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN).³⁷² Dengan demikian, Departemen Agama dapat dikatakan sebagai representasi dari umat Islam dalam memperjuangkan penyelenggaraan pendidikan Islam secara lebih luas di Indonesia. Dalam konteks modernisasi madrasah, Depag menjadi sandaran yang sangat signifikan dan dapat mengangkat posisi madrasah, sehingga madrasah memperoleh perhatian dari para

369Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, h. 89.

370H.A. Timur Djaelani, *Kebijaksanaan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam*, Jakarta, Dharma Bhakti, 1982, h. 38.

371*Jurnal Madrasah*, vol. 5 no. 2001, Jakarta, Depag, h.6

372Maksum, *Madrasah dan Sejarah Perkembangannya*, Jakarta, Logos, 1999, h. 123.

pengambil kebijakan.³⁷³

Pada masa awal kemerdekaan pemerintah masih menghargai lembaga pendidikan Islam yang ada dan mendorong tidak eksklusif dengan melakukan integrasi dengan memasukkan pelajaran umum ke madrasah. Hal ini terlihat pada laporan Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia (PPPRI) yang dibuat pada tanggal 2 Juli 1946 yang disebut sebagai SK 2 Menteri itu mengusulkan antara lain:³⁷⁴ (1) Pelajaran agama di semua sekolah diberikan pada jam pelajaran sekolah. (2) Para guru dibayar oleh pemerintah. (3) Di sekolah dasar pendidikan agama diberikan mulai kelas IV. (4) Pendidikan agama diselenggarakan 1 minggu sekali pada jam tertentu. (5) Para guru diangkat oleh Depag. (6) Para guru diharapkan pula mampu dalam pelajaran umum. (7) Pemerintah menyiapkan buku untuk pendidikan Agama. (8) Diberikan pelatihan bagi guru agama. (9) Kualitas madrasah dan pesantren harus diperbaiki. (10) Pengajaran bahasa Arab tidak dibutuhkan.

Ketentuan nomor 6, 8, 9, dan 10 dilakukan untuk menyempurnakan sistem pendidikan di madrasah dan pesantren yang telah berlangsung lama, dianggap terlalu menitikberatkan pada pelajaran agama *an sich*. Tetapi setelah keputusan itu dijalankan, muncul kemudian dualisme pendidikan yaitu pendidikan agama di madrasah oleh Depag dan sekolah umum oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.³⁷⁵

Akibatnya, menjadi polemik berkepanjangan, karena di satu sisi Depag hanya menjalankan urusan pendidikan agama, sementara segala hal yang berurusan dengan pendidikan umum diserahkan pada Kementerian PP&K. Hal ini menimbulkan kesan bahwa pemerintahan RI memisahkan pendidikan agama dari pendidikan umum.

Modernisasi madrasah terus dilakukan oleh pemerintah dengan membenahi secara terus menerus mencari bentuk atau format madrasah yang tepat. Untuk itu, pemerintah dalam hal ini Departemen Agama melakukan usaha-usaha modernisasi madrasah baik kualitas

373Badri Yatim dkk, *Sejarah Perkembangan Madrasah*, Jakarta, Depag, 1999, h. 150.

374Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Mutiara Sumber Widya, 1995, h. 91.

375Badri Yatim dkk, *Sejarah Perkembangan Madrasah*, h. 153.

maupun kuantitas yang dilakukan dalam berbagai bidang. Hal ini terlihat ketika Kementerian Agama mengeluarkan peraturan Menteri Agama Nomor I Tahun 1952. dan disempurnakan dengan peraturan Menteri Agama No. 7 tahun 1952. Menurut ketentuan ini, yang dinamakan madrasah ialah tempat pendidikan yang diatur sebagai sekolah dan memuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajarannya.

Berdasarkan ketentuan ini, jenjang pendidikan madrasah terdiri dari:

1. Madrasah rendah, sekarang namanya disebut Madrasah Ibtidaiyah.
2. Madrasah lanjutan tingkat pertama, sekarang disebut dengan Madrasah Tsanawiyah.
3. Madrasah lanjutan atas, sekarang disebut namanya Madrasah Aliyah.³⁷⁶

Pada masa Orde Lama pemerintah mendirikan dan mengembangkan Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). Kedua lembaga ini menurut Maksud, menandai perkembangan yang signifikan, di mana madrasah dimaksudkan mencetak tenaga-tenaga profesional keagamaan, di samping mempersiapkan tenaga-tenaga yang siap mengembangkan madrasah. Selanjutnya usaha-usaha untuk memodernisasikan madrasah terus dilakukan secara simultan dan sistematis yang diprakarsai Depag. Masalah pokok yang dihadapi madrasah pada masa Orde Lama adalah masalah legitimasi. Meskipun pemerintah telah menempatkan agama pada posisi sentral dalam negara, pemerintah berkeinginan agar pendidikan agama diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional.

Dalam pandangan pemerintah, sebaiknya pendidikan diurus oleh satu atap, yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Usaha tersebut ternyata mengalami kegagalan, karena kegigihan umat Islam mempertahankan eksistensi madrasah di bawah Depag. Meskipun demikian, pemerintah tetap memberikan perhatian khusus untuk

³⁷⁶Baca Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah*, Yogyakarta, Tiara wacana, 2001, h. 75.

memodernisasikan madrasah.³⁷⁷ Dengan cara memberikan bantuan berupa uang, alat-alat ataupun tenaga, bagi madrasah yang memenuhi persyaratan yang diantaranya:

- a. telah berdiri secara terus menerus minimal 1 tahun.
- b. memiliki organisasi yang teratur,
- c. pendirian madrasah tersebut diinginkan oleh masyarakat,
- d. di samping pendidikan agama, madrasah tersebut memberikan pengajaran umum sekurang-kurangnya 30% dari jumlah jam pelajaran seluruhnya seminggu.³⁷⁸ Bila semua terpenuhi, maka madrasah berhak untuk mendapatkan bantuan. Madrasah yang menerima bantuan mempunyai kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan yang diterima dan harus bersedia menerima inspeksi dari jawatan Pendidikan agama agar dengan demikian mutu madrasah yang bersangkutan dapat ditingkatkan.

Upaya-upaya pemerintah selanjutnya adalah melakukan peningkatan dan pembinaan madrasah antara lain:³⁷⁹

a. Madrasah Wajib Belajar (MWB)

Pengembangan institusi madrasah tampaknya tidak dapat ditangani secara parsial atau setengah-setengah, tetapi memerlukan pemikiran pengembangan secara utuh sebagai konsekuensi dari identitas sebagai lembaga pendidikan Islam. Oleh karena itu, manusia yang berkualitas setidaknya mempunyai dua kompetensi, yaitu kompetensi bidang Iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) dan kompetensi bidang imtaq (iman dan taqwa).³⁸⁰ Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pada periode Orde lama usaha-usaha untuk melahirkan peserta didik yang mempunyai dua kompetensi di atas telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Depag.

Untuk itu, pemerintah menggariskan kebijaksanaan kepada

³⁷⁷Badri Yatim dkk, *Sejarah Perkembangan Madrasah*, h. 158

³⁷⁸Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999, h. 177-178

³⁷⁹Maksum, *Madrasah dan Sejarah Perkembangannya*, h. 124.

³⁸⁰Wardiman Joyonegoro, *Potensi serta Peran Pendidikan dan Pengajaran Pondok Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Makalah. Disajikan pada Musyawarah Nasional IV RMI di PP Ash-Shiddiqiyah, 1 Februari 1994.

intituti madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang menyelenggarakan kewajiban belajar harus memenuhi syarat, dan terdaftar dalam pada Kementerian Agama. Syarat yang harus dipenuhi adalah lembaga madrasah yang bersangkutan harus memberikan pelajaran agama sebagai pelajaran pokok yang paling sedikit 6 jam seminggu atau 25 persen dari seluruh mata pelajaran.³⁸¹ Salah satu usaha pemerintah adalah menyelenggarakan Mandrasah Wajib Belajar (MWB). Oleh karena itu, makalah ini akan membahas Madrasah wajib belajar.

Perhatian pemerintah dalam hal ini Departemen Agama terhadap institusi madrasah terus saja bergulir bagaikan bola yang tak pernah berhenti bergulir dilakukan oleh pemerintah untuk mencari model madrasah yang ideal. Hanya saja kebijakan-kebijakan pemerintah untuk memodernisasikan madrasah mendapat perlawanan dari kaum muslimin yang ingin mempertahankan institusi madrasah di bawah Depag dan tidak menhendaki satu atap dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Meskipun mengalami kegagalan pemerintah tetap memberikan perhatian secara khusus kepada madrasah dalam bentuk penerimaan bantuan yang bertujuan memodernisasikan madrasah. Selanjutnya, intituti madrasah menghendaki pengakuan sebagai lembaga pendidikan agama, oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang pokok pendidikan dan pengajaran Nomor 1950- dimana belajar di lembaga madrasah telah mendapat pengakuan Menteri Agama telah dinggap memenuhi kewajiban belajar.³⁸²

Pemerintah terus meresponi aspirasi ummat Islam yang berusaha menjadikan lembaga pendidikan madrasah sebagai salah satu pilar system pendidikan nasional. Meskipun belum tersedia peraturan yang pasti, madrasah dikembangkan dalam berbagai bentuk yang tidak terbatas pada madrasah agama. Dalam hali ini, pemerintah bersikap realistik dengan memanfaatkan lembaga pendidikan madrasah melalui usaha memodifikasi khususnya, dalam hal kurikulumnya. Madrasah pada semua tingkatan pada awalnya

381Abdurrahman Saleh, *Penyelenggaraan Madrasah Peraturan Perundangan*, Jakarta, Dharma Bakti, 1984, h. 24.

382Badri Yatim dkk, *Sejarah Perkembangan Madrasah*, Jakarta, Depag, 1999, h. 158.

kurikulumnya didominasi oleh pelajaran-pelajaran agama, setahap demi tahap diarahkan untuk mengajarkan mata pelajaran umum. Dengan demikian lulusan madrasah secara kualitatif dapat dianggap sama dengan lulusan sekolah lainnya.³⁸³ Melihat kondisi tersebut dan sebagai respon sejumlah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk memodernisasikan institusi madrasah, dan untuk menyeimbangkan kurikulum pendidikan agama dan umum Depag pada tahun 1963 memperkenalkan model madrasah wajib belajar (MWB). Kurikulumnya memuat pelajaran terpadu antara aspek keagamaan, pengetahuan umum, dan keterampilan.³⁸⁴ Sebagai lembaga pendidikan 8 tahun yang difungsikan untuk mendukung kemajuan ekonomi, industri dan transmigrasi.

Madrasah Wajib Belajar dapat dipandang sebagai salah satu tonggak perkembangan dan pembaharuan madrasah di Indonesia, yang merupakan kontribusi pemerintah Orde Lama pada institusi pendidikan Islam. Model ini pada dasarnya menyusul kebijakan-kebijakan sebelumnya yang sudah sedikit demi sedikit mengusahakan pemberian mata pelajaran umum secara formal dalam lembaga pendidikan tersebut. Madrasah wajib belajar (MWB) adalah puncak perkembangan institusi madrasah pada masa Orde Lama. Diidealisasikan bahwa kurikulum madrasah wajib belajar mengembangkan tiga perkembangan yaitu perkembangan otak atau akal, perkembangan hati atau perasaan, serta perkembangan tangan atau kecekatan/keterampilan.³⁸⁵ Singkatnya madrasah wajib belajar (MWB) adalah sebuah lembaga pendidikan yang menekankan aspek keterampilan, sehingga mampu mencetak tenaga kerja yang siap diserap pasar. Dengan kata lain pelajarannya :

- Pelajaran untuk pengembangan akal disebut kelompok pelajaran pengetahuan alam.
- Pelajaran untuk pengembangan perasaan dan kemampuan atau hati disebut kelompok pelajaran agama.
- Pelajaran untuk pengembangan kecekatan dan keterampilan

383 *Jurnal Madrasah*, vol. 2 no.3, , Jakarta, Depag 1998, h. 24.

384 *Jurnal Madrasah*, vol. 2 no.3, , Jakarta, Depag 1998, h. 24.

385 Muljanto Sumardi, *Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, LPIAK Balitbang Agama Depag, 1977, h. 46-54.

tangan disebut kelompok pelajaran kerajinan tangan.³⁸⁶

Dalam perkembangannya, madrasah wajib belajar (MWB) itu telah berubah menjadi kelas pengembangan, menyesuaikan dengan nomenklatur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Namun sampai sejauh itu, eksistensi madrasah masih dianggap sebagai lembaga pendidikan khusus yang tidak dipandang sederajat dengan lembaga-lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Dikbud.

Oleh karena itu, Departemen Agama terus berusaha untuk memodernkan dunia pendidikan madrasah melalui madrasah wajib belajar (1958-1959), yang mempunyai tujuan:

- Sesuai dengan namanya, madrasah wajib belajar turut berusaha dalam rangka pelaksanaan undang-undang kewajiban belajar di Indonesia. Dalam hubungan madrasah waji belajar (MWB) akan diperlukan mempunyai hak dan kewajiban sebagai sekolah negeri atau sekolah partikelir yang melaksanakan wajib belajar.
- Pendidikan terutama sekali diarahkan kepada pembangunan jiwa bangsa untuk mencapai kemajuan dilapangan ekonomi, industrilisasi dan transmigrasi.³⁸⁷
- Di samping itu, secara pragmatis, melalui madrasah wajib belajar (MWB) ini pemerintah juga berkeinginan mempersiapkan mutu peserta didik untuk dapat hidup mandiri dalam mencari nafkah, terutama dalam lapangan ekonomi, industri, serta transmigrasi. Dengan kata lain, melalui madrasah wajib belajar anak didik tidak hanya diberi pengetahuan agama dan pengetahuan umum saja, tetapi juga keterampilan untuk mendukung kesiapan anak didik berproduksi dengan swadaya. Hal ini disebabkan kebanyakan murid madrasah berasal dari keluarga petani dan pedagang.³⁸⁸

Melihat tujuan madrasah wajib belajar (MWB) di atas, tampak apa yang digagas oleh praktisi pendidikan sekarang mengenai pendidikan *life skill* (kecakapan hidup) yang bertujuan membekali

386Wasty Soemanto, *Landasan Historis Pendidikan Indonesia*, Surabaya, Usaha Nasional, 1983, h. 152.

387Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999, h. 179.

388Badri Yatim dkk, *Sejarah Perkembangan Madrasah*, h. 159.

peserta didik dengan keterampilan hidup dan kehidupan yang secara integrative memajukan potensi generic dan spesifik guna memecahkan dan mengatasi problem kehidupan.³⁸⁹ Telah dilakukan oleh pemerintah Orde lama dalam hal ini Departemen Agama yakni telah menyelenggarakan madrasah wajib belajar (MWB).

Penorganisasian dan struktur kurikulum serta system penyelenggaraan madrasah wajib belajar (MWB) tersebut diatur sebagai berikut:

- Madrasah wajib belajar (MWB) adalah tanggung jawab pemerintah mengenai guru-guru, sarana dan prasarana, apabila madrasah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk dijadikan MWB.
- Madrasah wajib belajar (MWB) menampung murid yang berumur antara 6-14 tahun. Tujuannya untuk mempersiapkan mutu anak murid yang mempunyai keterampilan, sehingga dapat hidup mandiri.
- Lama belajar di madrasah wajib belajar 8 tahun.
- Pelajaran yang diberikan pada madrasah wajib belajar (MWB) terdiri dari tiga kelompok studi, yaitu pelajaran agama, pelajaran umum, dan pelajaran keterampilan, serta kerajinan tangan.
- 25% dari jumlah jam pelajaran digunakan untuk pelajaran agama, sedang 75% untuk pelajaran pengetahuan umum dan ketrampilan atau kerajinan tangan.³⁹⁰

Meskipun muatan pelajaran yang ditetapkan dalam program wajib belajar relatif sedikit (hanya 25%) disbanding muatan pelajaran agama sebelumnya yang telah dilaksanakan di madrasah-madrasah, namun program tersebut pada mulanya memperoleh sambutan dan partisipasi masyarakat yang cukup luas dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu, tidak heran dalam waktu singkat telah tumbuh secara spontan madrasah-madrasah wajib belajar (MWB) yang dikelola masyarakat. Artinya,

389Eko Supriyanto dkk, *Inovasi Pendidikan*, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Press, 2004, h. 147.

390Zuhriani dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, Proyek Pembinaan Prasarana dan sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, h. 79.

masyarakat telah siap untuk menerima kenyataan bahwa dengan madrasah wajib belajar (MWB) mata pelajaran agama jadi mencitu tinggal 25 %, sedangkan 75% lagi digunakan untuk pengetahuan umum dan keterampilan/kerajinan tangan.³⁹¹

Dilaksanakannya madrasah wajib belajar (MWB) tersebut, dimaksudkan sebagai usaha awal untuk memberikan bantuan dan pembinaan madrasah dalam rangka penyeragaman materi kurikulum dan system penyelenggaraannya, dalam upaya peningkatan mutu madrasah Ibtidaiyah,³⁹² oleh karena itu, perencanaan program madrasah wajib belajar pada mulanya oleh pemerintah dilakukan pada beberapa madrasah-madrasah pada tahun 1958. Tetapi kemudian masyarakat secara swadaya mengadopsi atau menerima system madrasah wajib belajar (MWB) ini, terutama madrasah-madrasah yang terletak diwilayah-wilayah pedesaan.

Indikasi ini menunjukkan bahwa program madrasah wajib belajar (MWB) telah membangkitkan semangat para pemilik yayasan pendidikan Islam swasta untuk terus mengembangkan system pendidikan dan mempertahankan lembaga pendidikan yang dikelolanya. Inilah sebenarnya yang menjadi tujuan dan harapan pemerintah.

Dengan kata lain, masyarakat telah secara sadar dan swadaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan madrasah yang sekaligus memperbaiki citra lembaga madrasah dan *out put* lembaga tersebut yang selama itu tertinggal jauh bila disbanding dengan lembaga-lembaga umum lainnya.

Penerimaan masyarakat terhadap program madrasah wajib belajar, yang menyebabkan mereka segera mendirikan madrasah-madrasah wajib belajar atau MWB itu bisa dipahami karena beberapa alasan:

1. Karena alasan pragmatis, bahwa murid-murid sekolah/madrasah bagaimana pun memang harus dibekali dengan pengetahuan umum dan keterampilan agar kelak mereka bisa hidup mandiri dan mampu mencari nafkah.

391Badri Yatim dkk, *Sejarah Perkembangan Madrasah*, h. 158.

392Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, h. 180.

2. Karena alasan teknis, bahwa apabila madrasah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk dijadikan madrasah wajib belajar (MWB), maka semua sarana dan prasarana baik mengenai guru, alat-alat belajar maupun buku-buku pelajarannya akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini tentu saja akan memudahkan atau meringankan beban masyarakat pengelola institusi madrasah.³⁹³

Namun demikian, usaha pemerintah untuk mengembangkan madrasah wajib belajar (MWB) tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan pemerintah, hal ini menemui kendala-kendala yang menyebabkan madrasah wajib belajar berangsur-angsur berkurang dan akhirnya terhenti. Diantara kendala-kendala tersebut antara lain:

- a. Keterbatasan sarana dan prasarana, serta guru-guru yang mampu dipersiapkan oleh pemerintah, kurang tenggapnya masyarakat dan pihak-pihak penyelenggara madrasah.
- b. Umumnya masyarakat berpendapat bahwa madrasah wajib belajar (MWB) kurang memenuhi fungsinya sebagai lembaga pendidikan agama Islam, karena kurangnya persentase pendidikan dan pelajaran agama yang diajarkan.³⁹⁴
- c. Mengenai penyelenggaraan madrasah wajib belajar menemui kesulitan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pendidikan dan pelajaran agama yang diisyaratka.³⁹⁵

Dengan demikian pelaksanaan madrasah wajib belajar (MWB) yang gagas pemerintah Orde Lama dalam rangka memodenisasikan institusi madrasah yang semula menjadi tumpuan harapan berbagai pihak termasuk pemerintah sendiri, akhirnya tinggal menjadi harapan belaka yang sulit direalisasikan dilapangan.

Dari segi pencapaian madrasah wajib belajar (MWB) tidak berjalan secara mulus, dengan kata lain madrasah wajib belajar telah gagal. Namun demikian, yang patut garis tebal adalah usaha pemerintah untuk terus mencari format institusi madrasah yang

393Badri Yatim dkk, *Sejarah Perkembangan Madrasah*, h. 160

394Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, h. 180.

395Jumhur dan Danasaputra, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Khusus Madrasah*, Bandung, CV, Ilmu, 1976, h. 227

ideal terus saja dilakukan. Tampaknya kegagalan madrasah wajib belajar (MWB) dijadikan pengalaman bagi pemerintah untuk belajar dari kegagalan tersebut, hal ini terlihat ketika pemerintah mendirikan madrasah-madrasah negeri, secara lengkap dan terperinci, baik dalam penjejangan maupun materi kurikulum serta system penyelenggaraannya, yang pengelolaannya langsung di bawah Kementerian Agama. Ini dimaksudkan akan menjadi model dan standar dalam rangka memberikan pedoman dan tuntunan secara lebih kongret bagi penyelenggaraan institusi madrasah pasca madrasah wajib belajar (MWB).

Madrasah wajib belajar (MWB) adalah sebuah kebijakan pemerintah dalam rangka memodernisasikan sistim pendidikan madrasah, namun demikian, masalah pengakuan, kesejajaran baik secara kualitas dan kelembagaan, serta tantangan perbaikan mutu dan kualitas terus menjadikan institusi madrasah mencari bentuk dan format yang terbaik yang bisa dikembangkan lembaga pendidikan Islam. Hanya saja yang menjadi catatan bahwa sebesar apapun perhatian pemerintah di dalam melakukan perbaikan dan peningkatan mutu institusi madrasah tidak akan berhasil jika komponen-komponen utama institusi madrasah dalam hal ini adalah masyarakat pendidika muslim itu sendiri tidak turut berpartisipasi dalam usaha peningkatan mutu madrasah. Komunikasi yang baik, sehat efisien sangatlah penting di dalam mendorong percepatan peningkatan mutu dan kualitas madrasah. Inilah yang kurang dari penyelenggaraan madrasah wajib belajar yang dilakukan pemerintah.

b. Menegerikan Madrasah

Pembinaan madrasah yang dilakukan pemerintah secara lengkap dan terperinci baik dalam penjejangan, materi kurikulum, maupun sistem penyelenggaraannya. Untuk pengontrolan yang lebih terpadu terhadap pembinaan tersebut, maka pemerintah sendiri mendirikan madrasah-madrasah negeri. Dengan tujuan untuk menjadi model dan standar dalam rangka memberikan ketentuan secara lebih kongkrit bagi penyelenggaraan madrasah.

Pihak-pihak penyelenggara madrasah diharapkan dapat mencontoh dan mempedomani ketentuan-ketentuan

penyelenggaraan madrasah, dan dengan demikian diharapkan akan tercapai keseragaman mutu dan kualitas. Selain itu diharapkan madrasah-madrasah negeri dapat menjadi koordinator dalam pelaksanaan evaluasi serta pembinaan terhadap madrasah-madrasah swasta.³⁹⁶ Perhatian pemerintah untuk meningkatkan pembinaan madrasah melalui peningkatan status kelembagaanya.

Madrasah negerin yang pertama adalah madrasah Ibtidaiyah yang berasal dari Sekolah Rendah Islam(SRI) yang kemudian disebut Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN). sebanyak 235 pada tahun 1962 berdasarkan keputusan Menteri Agama No. 104 tahun 1926. Madrasah yang diasuh pemerintah kemudian diserahkan kepada kementerian agama pada tahun 1959, yaitu:

- 205 yang diasuh oleh pemerintah daerah Istimewah Aceh
- 19 buah dari daerah Keresidenan Lampung
- 11 buah dari Keresidenan Surakarta³⁹⁷

Akreditasi pembakuan madrasah ke tangan pemerintah yang di sebut dengan madrasah negeri merupakan salah satu bentuk bantuan dan pembinaan pemerintah terhadap madrasah swasta.³⁹⁸ Hal ini dilakukan m,engingat pokok persoalan pada saat itu adalah memecahkan persoalan keberadaan pendidikan agama di sekolah umum dan madrasah, sehingga Departemen Agama merasa perlu mengadakan madrasah negeri.

Penegerian Madrasah Tsanawiyah Swasta dan Madrasah Aliyah Swasta dilakukan pada tahun 1967 berdasarkan keputusan Menteri Agama No. 80 tahun 1967 dengan nama Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri (MTSAIN) dan Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN).

Problem besar yang dihadapi Depag dalam memodernisasikan madrasah terletak pada masalah staf tenaga pengajar, sebahagian besar madrasah tidak memiliki tenaga pengajar lulusan SPG yang menguasai bidang studi umum. Karena itu, JAPENDA harus

396Depag RI, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Dirjen Binbaga, 1986, h. 80

397Abuddin Nata (ed), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendiidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2001, h. 206.

398Badri Yatim dkk, *Sejarah Perkembangan Madrasah*, h. 165.

mencetak sendiri tenaga guru dalam bidang studi umum. Dengan kata lain, persoalan yang paling mendasar di hadapi Departemen Agama dalam upaya memodernisasikan madrasah adalah masalah staf pengajar, selain tenaga administrasi level dua yang kebanyakan dari guru-guru yang mengajar di sekolah umum menjadi tenaga honorer di madrasah. Bahkan banyak tenaga honorer di sekolah umum direkrut dan diangkat sebagai tenaga tetap di madrasah, termasuk dalam hal ini adalah Arifin Tamyang, dan Muljadi.³⁹⁹

Kurikulum yang dikeluarkan Departemen Agama tahun 1962 sesuai SK Menteri Agama tentang kurikulum madrasah Ibtidaiyah nomor 104/1962 adalah sebagai berikut:

Tahun	1	2	3	4	5	6	7
Agama	6	7	11	14	16	10.5	10.5
Bahasa Indonesia	1	1	6	6	6	7	5
Ilmu Kesehatan	0	0	0	2	2	2	1
Berhitung	6	5	7	6	6	5	4
Ilmu Alam	0	0	0	0	0	1	1
Sejarah	0	0	0	1	1	1	1.5
Menulis	2	2	1	1	1	0	0
Menggambar	2	2	1	1	1	1	1
Menyanyi	1	1	1	1	1	1	1
Pendidikana Jasmani	2	2	1	1	1	1	2
Kerajinan Tangan	2	2	2	2	2	2	2
Jumlah	28	28	35	40	40	40	40

Sumber: Petunjuk dalam Membina Madrasah, Jakarta, 1966.

Meskipun telah ada kurikulum standar yang dikeluarkan Departemen Agama pada 1962, namun dalam implementasi dan praktik kurikulum tersebut di setiap madrasah berbeda-beda, hal itu tergantung pada organisasi sosial keagamaan yang menyelenggarakan program pendidikan tersebut. JAPENDA menerapkan perbandingan antara mata pelajaran umum dengan mata pelajaran agama 68 : 32 %.

³⁹⁹Badri Yatim dkk, *Sejarah Perkembangan Madrasah*, h. 167

E. Pembinaan Diversifikasi Kelembagaan Madrasah

Dalam upaya memodernisasikan madrasah dengan menegerikan yang swasta pemerintah sebagai usaha pembinaan status kelembagaan. Pemerintah juga melakukan pembinaan madrasah melalui versifikasi madrasah antara lain sebagai berikut:

1. Didirikannya madrasah wajib belajar pada tahun 1958/1959. MWB dimaksudkan untuk melaksanakan undang-undang wajib belajar di Indonesia dan diberlakukan sebagai sekolah negeri atau sekolah partikular untuk melaksanakan wajib belajar.⁴⁰⁰
2. Ditetapkannya beberapa buah madrasah model yaitu MIN Model 44 buah, MTsN Model 69 buah, dan MAN Model 35 buah. Madrasah model dimaksudkan untuk menjadi pusat pengembangan, percontohan dan menjadi acuan bagi madrasah lain.
3. Madrasah Aliyah program khusus (MAPK) untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli bidang Agama Islam.
4. Mendirikan Madrasah Aliyah Keterampilan (MAK) yang dimaksudkan untuk memberi bekal kemampuan kepada siswa dalam bidang keterampilan tertentu untuk dapat bekerja di masyarakat.
5. Dibukanya Madrasah Tsanawiyah Terbuka sebagai upaya untuk meningkatkan dan mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan 9 tahun.
6. Madrasah Diniyah, madrasah ini hanya mempelajari mata pelajaran agama saja dengan maksud menambah mata pelajaran agama bagi anak-anak yang belajar di sekolah umum. Kemudian didirikan pula Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah sebagai sekolah umum yang bercirkhas Islam. Yang mata pelajarannya umum dan pendidikan agama.

Dengan melihat kebijakan pemerintah terhadap modernisasi madrasah menyiratkan betapa tidak muda mencari dan menemukan bentuk madrasah yang ideal dan tetap sehingga dapat dijadikan model bagi upaya pengembangannya di masa depan. Pengalaman terhadap

⁴⁰⁰Untuk lebih jelasnya tentang MWB lihat Badri Yatim dkk, *Sejarah Perkembangan Madrasah*, h. 157-150

konsep Madrasah Wajib Belajar yang gagal memberikan pelajaran berharga untuk terus membuat konsep model madrasah yang sesuai dengan tuntutan zaman tetapi tetap mempunyai kekhasan agama. Oleh karena itu, secara kelembagaan, madrasah terus mengalami perbaikan-perbaikan, dan penegerian serta pemberian bantuan oleh pemerintah menjadi semacam keharusan untuk menciptakan standar madrasah yang berkualitas.

Model-model Madrasah

Dinamika lembaga madrasah menyebabkan lahirnya beberapa model madrasah yang antara lain: (a) Madrasah swasta dan negeri, (b) madrasah model adalah madrasah konvensional yang diterapi secara khusus untuk menjadi model madrasah yang berkualitas, sehingga dapat menjadi contoh bagi madrasah negeri dan swasta untuk menggerakkan dan meningkatkan kualitas madrasah lain didaerah sekitarnya, (c) madrasah terpadu adalah suatu madrasah yang ingin memberikan konsep keterpaduan dengan melihat madrasah ibtidayah, tsanawiyah, aliyah yang berada dalam satu lokasi sebagai satu kesatuan disekolah. Di mana seluruh aspeknya, baik kurikulum, proses belajar mengajar, perpustakaan, guru, fasilitas pendidikan dapat dipadukan sebagai satu kesatuan berkesinambungan satu sama lain. Dengan kata lain memadukan konsep madrasah unggul dengan madrasah model, (d) model Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) adalah model madrasah aliyah program khusus sebagai upaya mempertahankan madrasah aliyah program ilmu-ilmu agama yang diharapkan dapat menghasilkan siswa yang memiliki kemampuan dasar ilmu agama, bahasa arab yang diperlukan untuk melanjutkan keperguruan tinggi, (e) madrasah aliyah program keterampilan (MAPK) adalah madrasah aliyah yang diberi tambahan program ekstrakurikuler dalam berbagai bidang keterampilan yang terstruktur, (f) model madrasah dan sekolah pondok pesantren adalah model pondok pesantren yang memberi respon terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, dunia pesantren, di mana keterpaduan madrasah dengan nuansa Iptek dan sekolah dengan nuansa agama menjadi suatu kebutuhan ditambah lagi dengan sistem

asrama, (g) model madrasah sekolah dengan *bording school* adalah model madrasah sekolah yang muncul dengan menggunakan sistem pesantren. Suatu sistem yang menekankan metode pengajaran yang diorientasikan pada penguasaan substansi materi keilmuan (bukan target kurikulum).

Madrasah Pasca Undang-undang Nasional No.20 tahun 2003

Institusi madrasah mendapat angin segar ketika adanya kebijakan SKB 3 Menteri yang berisi tentang pengakuan atas kesetaraan antara madrasah dengan sekolah umum dan madrasah dianggap sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam, kurikulumnya sama persis dengan kurikulum sekolah plus agama dengan adanya Undang-undang Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989.

Institusi madrasah mengalami perubahan dengan keluarnya Undang-undang No. 20 tahun 2003 telah memberi peluang yang sama kepada madrasah dan pesantren yang bukan sekolah umum berciri khas Islam untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan dan tidak diskriminasi di mata negara. Kesempatan ini akan membuka peluang kebhinekaan lembaga pendidikan keagamaan, namun dalam posisi status diakui bagian dari sisdiknas.

Dengan demikian tidak diperlukan lagi adanya ujian persamaan dan sejenisnya bagi madrasah yang bukan sekolah umum untuk mengikuti kurikulum sekolah. Kedepan dengan adanya sisdiknas No. 20 tahun 2003, maka menurut Husni Rahim madrasah sudah bisa memilah diri menjadi tiga pola yaitu

Pertama, madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam seperti yang selama ini. Namun harus berani menerjemahkan kurikulumnya tetap 100% walaupun umum sama dengan sekolah dan khusus sama dengan madrasah. Intinya anak didik berkonsentrasi kepada pelajaran utama sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, dengan cara ini hasil yang didapatkan akan lebih meningkat dan bersaing secara fair dengan sekolah, menghasilkan lulusan yang menguasai pengetahuan umum dengan prima, juga menjadi muslim yang baik.

Kedua, madrasah sebagai lembaga pendidikan keagamaan, di mana fokus utamanya adalah pelajaran agama, pelajaran umum hanya sebagai penunjang. Ini diharapkan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai pengetahuan agama dengan baik namun memahami dasar ilmu dan teknologi sebagai pelengkap kehidupan.

Ketiga, madrasah sebagai sekolah kejuruan di mana fokus pelajarannya pada keterampilan (*life skill*) namun sebagai muslim yang baik. Pola pendidikan mengikuti pola sekolah umum kejuruan dengan prinsip seperti sekolah madrasah.⁴⁰¹

F. Penutup

Modernisasi madrasah terus berkembang mengikuti tipe sekolah umum dengan keseimbangan mata pelajaran dengan pengakuan formal dari Departemen pendidikan dan Kebudayaan. Pengakuan ini berupa mutu lulusan madrasah yang dapat disejajarkan dengan mutu lulusan sekolah umum. Kebijakan Modernisasi madrasah yang dilakukan pemerintah di awal kemerdekaan sampai tahun 60-an merupakan langkah untuk membangun sebuah format madrasah modern yang di akui oleh sistem pendidikan nasional. Usaha-usaha telah dilakukan mulai pengakuan terhadap madrasah, penegerian madrasah, serta pembinaan madrasah melalui diversifikasi madrasah. Walaupun upaya-upaya tersebut banyak menemui kegagalan, tetapi paling tidak mengisyaratkan betapa besar perhatian Departemen Agama untuk menemukan bentuk madrasah yang ideal, sehingga dapat dijadikan model bagi upaya pengembangan madrasah yang sesuai dengan konsep modernisasi di era globalisasi.

401 Husni Rahim, *Madrasah Dalam Politik di Indonesia*, h. 91-92.

BAB 11

SKB TIGA MENTERI SEBAGAI BENTUK PENGUATAN DAN PELEMAHAN PERAN MADRASAH

A. Pendahuluan

Keinginan dan perhatian pemerintah dalam hal ini Departemen Agama terhadap modernisasi institusi madrasah melalui kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan, untuk mencari format dan paradigma baru dunia pendidikan madrasah yang ideal sebagai *sample* madrasah lain, terus saja bergulir dalam rangka peningkatan mutu dan eksistensi pendidikan madrasah. Memimjam istilah Azyumardi Azra, pendidikan Islam antara tradisi dan modernisasi menuju milenium baru. Lebih lanjut Azra menjelaskan, bahwa proses-proses historis yang ditempuh pendidikan Islam, seyogyanya menimbulkan refleksi, yang pada gilirannya akan menggrakkan upaya-upaya kreatif dalam rangka membangun peradaban Islam.⁴⁰² Upaya-upaya inilah yang dilakukan pemerintah terhadap institusi madrasah

Upaya konsep integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional menjadi agenda pemerintah. Usaha mengintegrasikan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional telah banyak dilakukan walaupun mengalami hambatan dan kegagalan akan tetapi Depag terus berusaha memodernisasikan institusi pendidikan madrasah. Namun demikian, usaha-usaha memasukkan institusi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional tidak sepenuhnya menguntungkan umat Islam dan mendapat tantangan keras dari

⁴⁰²Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Logos Wacana Ilmu, 2000, h. xvii.

berbagai kelompok umat Islam. Hal disebabkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap melemahkan dan mengasingkan madrasah dari sistem pendidikan nasional. Situasi tersebut menandai ketegangan-ketegangan yang cukup keras dalam hubungan madrasah dan pendidikan nasional.

Dengan demikian makalah ini akan membahas bagaimana latar belakang lahirnya SKB 3 Menteri dan bagaimana implikasinya terhadap institusi madrasah? Selanjutnya tulisan menggunakan sumber-sumber yang otoritatif dan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan historis sosiologis.

B. SKB 3 Menteri Dan Implikasi Terhadap Institusi Madrasah

Secara garis besar perjalanan institusi madrasah pada masa pemerintahan Order Baru mencakup tiga fase. Ketiga fase tersebut adalah pertama, fase sebelum munculnya SKB 3 Menteri (1966-1975), fase kedua munculnya SKB 3 Menteri (1975-1989), dan ketiga, fase integratif (1989-1998). Dalam konteks ini agaknya yang perlu dijelaskan hanya fase kedua atau fase perintisan integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional yang berlangsung 1975 sampai 1989.

Fase kedua inilah yang ditandai dengan lahirnya SKB 3 Menteri yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri, yang dianggap peristiwa yang menghebohkan pada saat itu. Lahirnya SKB 3 Menteri secara umum dilatarbelakangi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya bahwa pada akhir fase pertama 1972 muncul banyak persoalan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam, seperti pengangkatan guru, ijazah, serta kualitas pendidikan dan pengajaran agama. Sedangkan faktor eksternalnya adalah adanya upaya pemerintah untuk menyatukan seluruh lembaga pendidikan termasuk institusi madrasah di bawah Depdikbud dengan dasar inilah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 tahun 1972 yang kemudian dikuatkan dengan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 15 tahun 1975 yang berisi agar Keppres Nomor 34/1972 tersebut dilaksanakan⁴⁰³ Inti dari kedua

⁴⁰³Lihat Atho'Mudzhar, *Religious Education and Politic in Indonesia*, Tesis, belum

keputusan itu adalah agar pelaksanaan pendidikan sepenuhnya dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan. Secara implisit ketentuan ini mengharuskan diserahkannya penyelenggaraan pendidikan madrasah yang telah menggunakan kurikulum nasional-kepada kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.⁴⁰⁴

Kebijakan pemerintah tersebut mengundang reaksi ummat Islam, hal ini diperlihatkan antara lain oleh Musyawarah Kerja Majelis Pertimbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama (MP3A). Institusi ini meyakinkan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam proses pembangunan. Karena itu, madrasah seharusnya dikelola oleh Departemen Agama, sebab institusi inilah yang tahu secara persis seluk beluk pendidikan Agama.⁴⁰⁵

Reaksi ummat Islam ternyata dipahami oleh pemerintah Orde Baru, sehingga pemerintah kemudian mengambil kebijakan yang lebih operasional dalam kaitan dengan madrasah, yaitu melakukan pembinaan mutu madrasah. Sejalan dengan upaya meningkatkan mutu pendidikan madrasah inilah pada tanggal 24 Maret 1975 dikeluarkanlah kebijakan berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri.

Kelahiran SKB Tiga Menteri ini memang antara lain untuk mengatasi kekhawatiran dan kecemasan umat Islam akan dihapuskannya sistem pendidikan madrasah sebagai kongkurensi Kepres dan Inpres di atas. SKB ini dapat dipandang sebagai model solusi yang di satu sisi memberikan pengakuan eksistensi institusi madrasah, dan di sisi lain memberikan kepastian akan berlanjutnya usaha yang mengarah pada pembentukan sistem pendidikan nasional yang integratif.⁴⁰⁶ Di samping itu, SKB 3 Menteri mempunyai tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan madrasah, juga SKB 3 Menteri direalisasikan dengan dikeluarkannya

diterbitkan, h. 95-101. Lihat pula Depag, *Eksistensi dan Derap Langkah Departemen Agama*, Jakarta, Depad RI, 1996, h. 4-73.

404Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, Jakarta, logos, 2005, h. 18

405Maksum, *Madrasah dan Sejarah Perkembangannya*, Jakarta, Logos, 1999, h. 148.

406Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, h. 18

kurikulum baru pada tahun 1976.

Keberadaan SKB 3 Menteri mempunyai dan memiliki nilai positif bagi eksistensi madrasah, walaupun kenyataan banyak madrasah yang tidak mengikuti kurikulum tersebut dan tetap berusaha mempertahankan status madrasah sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan agama Islam sebagai pengajaran pokok.

Salah satu nilai positifnya bahwa melalui SKB 3 Menteri institusi madrasah telah sejajar kedudukannya dengan sekolah-sekolah umum. Hal ini berarti bahwa siswa keluaran dari madrasah pun memiliki kesempatan yang sama dengan para lulusan sekolah umum untuk mengisi dan memainkan peran-peran yang ada di tengah masyarakat.

Nilai positif yang lain dari SKB 3 Menteri adalah bahwa ia telah mengakhiri reaksi keras ummat Islam yang menilai pemerintah terlalu jauh mengintervensi kependidikan Islam yang telah lama dipraktikkan umat Islam. Selain itu kebijakan ini dapat dipandang sebagai pengakuan yang lebih nyata terhadap eksistensi institusi madrasah dan sekaligus merupakan langkah strategis menuju tahapan integrasi madrasah ke dalam system pendidikan nasional yang tuntas.⁴⁰⁷ Dengan demikian SKB tersebut, madrasah memperoleh definisi yang semakin jelas sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah-sekolah umum sekalipun pengelolaannya tetap berada di Departemen Agama.

Sejumlah _diktum dari SKB 3 Menteri ini yang memperkuat posisi dan peran institusi madrasah antara lain:

- Madrasah meliputi tiga tingkatan: MI setingkat SD, MTS setingkat SMP, dan MA setingkat dengan SMA.
- Ijazah madrasah dinilai sama dengan ijazah sekolah umum yang sederajat.
- Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih atas.
- Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.⁴⁰⁸

407 Badri Yatim dkk, *Sejarah Perkembangan Madrasah*, Jakarta, Depag, 1999, h. 178.

408Keluaranya SKB 3 Menteri diharapkan pendidikan Islam terintegrasi dalam system

Mengenai pengelolaan dan pembinaan institusi pendidikan madrasah dinyatakan sebagai berikut:

- Pengelolaan Madrasah dilakukan oleh Menteri Agama.
- Pembinaan mata pelajaran Agama pada madrasah dilakukan oleh Menteri Agama.
- Pembinaan dan pengawasan mutu mata pelajaran umum pada madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.⁴⁰⁹

Dengan adanya SKB 3 Menteri ini maka eksistensi madrasah yang pada mulanya kurang diperhatikan bahkan ingin dimerger di bawah tanggung jawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan semakin kokoh dan kuat. SKB 3 Menteri ini juga merupakan cikal bakal bagi upaya integrasi pendidikan Islam ke dalam system pendidikan nasional.

Menurut Husni Rahim⁴¹⁰ signifikansi SKB 3 Menteri ini bagi umat Islam adalah *pertama*, terjadinya mobilitas sosial dan vertical siswa-siswa madrasah yang selama ini terbatas di lembaga-lembaga pendidikan tradisional. (Madrasah dan Pesantren), dan berbarengan dengan itu *kedua*, membuka kemungkinan anak-anak santri memasuki wilayah pekerjaan pada sector modern.

Di atas segalanya, satu hal yang paling penting dan strategis dari SKB 3 Menteri itu adalah upaya untuk mengintegrasikan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional. Langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut adalah formalisasi dan strukturisasi madrasah. Formalisasi ditempuh dengan menegerikan sejumlah madrasah dengan kriteria tertentu yang diatur oleh pemerintah, di samping itu, pemerintah juga mendirikan madrasah-madrasah negeri baru. Strukturisasi dilakukan dengan mengatur penjenjangan dan perumusan kurikulum yang cenderung sama dengan penjenjangan dan kurikulum sekolah-sekolah di bawah Departemen Pendidikan

pendidikan nasional dan terwujudnya transformasi lembaga pendidikan Islam yang berorientasi pengembangan sumber daya manusia. Baca " Menuntaskan Integrasi Sistem Pendidikan " dalam *Jurnal Madrasah* No. 3 tahun 1997.

409Maksum, *Madrasah dan Sejarah Perkembangannya*, h. 151.

410 Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*,h. 19

dan Kebudayaan.⁴¹¹ Dengan demikian, adanya SKB 3 Menteri itu maka kedudukan madrasah memang telah sejajar dengan sekolah-sekolah umum.

SKB 3 Menteri tersebut jelas mengandung sejumlah implikasi bagi madrasah. Di antaranya adalah masalah keseimbangan kurikulum. Meskipun demikian SKB 3 Menteri telah menandai suatu tahapan kemajuan lembaga pendidikan Islam di Indonesia; dari lembaga pendidikan yang kurang mendapat pengakuan menjadi lembaga pendidikan yang memiliki kesejajaran dengan sekolah umum. Di samping itu, SKB 3 Menteri juga turut meretas jalan bagi munculnya kelas terpelajar muslim yang tidak hanya menguasai pengetahuan agama, tetapi juga pengetahuan umum.⁴¹²

Implikasi lain dari SKB 3 Menteri adalah mengadakan pembenahan kurikulum di madrasah-madrasah lain. Selain itu, pada periode tersebut (1976-1977), Departemen Agama di bawah koordinasi Direktorat Pendidikan Agama bekerjasama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan juga menghasil menyusun buku pedoman pendidikan agama untuk sekolah-sekolah umum, dari Sekolah Dasar (SD) sampai Menengah ke Atas (SMA). Dengan demikian, yang terjadi dengan SKB 3 Menteri tidak hanya modernisasi pendidikan Islam, melainkan juga satu tahapan menuju integrasi pendidikan Islam ke dalam system pendidikan nasional.⁴¹³

Namun demikian adanya SKB 3 Menteri tersebut bukan berarti beban yang dipikul madrasah akan bertambah ringan, akan tetapi justru sebaliknya menjadi semakin berat. Masalahnya, di satu pihak madrasah dituntut harus mampu memperbaiki mutu pendidikan umum sehingga setarap dengan standar yang berlaku di sekolah umum, di lain pihak ia harus tetap menjaga mutu pendidikan agama tetap baik sebagai ciri khususnya. Untuk mencapai tujuan di atas, pemerintah harus meninjau kembali terhadap kurikulum yang berlaku, materi pelajaran, sistem evaluasi dan peningkatan mutu

411Badri Yatim dkk, *Sejarah Perkembangan Madrasah*, h.179.

412Badri Yatim (ed), *Perkembangan Psikologi Agama dan Pendidikan Islam*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2000, h. 18

413Baca Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, h. 7-74.

pengajaran melalui penataran.⁴¹⁴

SKB 3 Menteri itu, kemudian dikuatkan lagi dengan SKB 2 Menteri, antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama No.0299/1984 (DikBud) ;045/1984 (agama) tahun 1984 tentang: "Pengaturan Pembekuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah", yang isinya antara lain: penyamaan mutu lulusan madrasah yang dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah-sekolah umum yang lebih tinggi.⁴¹⁵ SKB 2 Menteri tersebut dijiwai oleh ketetapan MPR No. II/Tap/MPR/1983 tentang perlunya penyesuaian system pendidikan sejalan dengan adanya kebutuhan pembangunan di segala bidang, antara lain dilakukan melalui perbaikan kurikulum sebagai salah satu upaya perbaikan penyelenggaraan pendidikan, baik madrasah maupun sekolah umum.

Substansi dari pembekuan kurikulum sekolah umum dan institusi madrasah ini antara lain:⁴¹⁶

- Kurikulum sekolah umum dan madrasah terdiri dari program inti dan program khusus.
- Program inti untuk memenuhi tujuan pendidikan sekolah umum dan madrasah secara kualitatif sama.
- Program khusus (pilihan) diadalkan untuk memberikan bekal kemampuan siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi bagi sekolah dan madrasah tingkat menengah ke atas.
- Pengaturan pelaksanaan kurikulum sekolah dan madrasah mengenai sistem kredit, bimbingan karir, ketuntasan belajar dan sistem penilaian adalah sama.
- Hal-hal yang berhubungan dengan tenaga guru dan sarana pendidikan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kurikulum akan diatur bersama oleh kedua Departemen tersebut.

Menindaklanjuti SKB 2 Menteri tersebut, lahirlah kurikulum 1984 untuk madrasah, yang tertuang dalam Keputusan Menteri

414Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999, h. 183.

415Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, h. 184

416Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, h. 185

Agama Nomor 99 tahun 1984 untuk madrasah Ibtidaiyah, Nomor 100 tahun 1984 Madrasah Tsanawiyah, dan Nomor 101 tahun 1984 untuk Madrasah Aliyah. Dengan demikian kurikulum 1984 pada hakikatnya mengacu kepada SKB 3 Menteri dan SKB 2 Menteri, baik dalam susunan program tujuan maupun bahan kajian dan pelajaran. Oleh karena itu, rumusan kurikulum 1984 memuat hal sebagai berikut:⁴¹⁷

- Program kegiatan kurikulum Madrasah (MI, Mts, MA) tahun 1984 dilakukan melalui kegiatan intra kurikuler, kokuler dan eks kurikuler, baik dalam program inti maupun program inti.
- Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara cara seseorang belajar dan apa yang dipelajarinya.
- Penilaian dilakukan secara bekesinambungan dan menyeluruh untuk keperluan peningkatan proses dan hasil belajar serta pengelolaan program.

Kurikulum madrasah tahun 1984 terdiri dari program inti dan pilihan. Program inti terdiri dari kelompok Pendidikan Agama dan kelompok Pendidikan Dasar umum. Program pilihan pada MI dan MTs sama terdiri dari 4 bidang studi pilihan yaitu: Keterampilan, seni Budaya, olahraga, dan bahasa daerah. Adapun program pilihan pada MA terdiri dari 2 program pilihan yaitu program pilihan A dan B, sama dengan program pilihan SMA. Khusus kurikulum MI dan MTs tahun 1984, pada 1987 terjadi penyesuaian dan penyempurnaan struktur programnya yakni, melalui SK Menteri Agama No. 45 tahun 1987 tentang penyesuaian struktur Program Kurikulum MIN dan MTsN. Kurikulum MIN dan MTsN yang disesuaikan itu disebut Kurikulum MI/MTs tahun 1984 yang disempurnakan dan berlaku sampai datangnya kurikulum 1994.⁴¹⁸

Dengan demikian, ciri madrasah yang paling menonjol sejak SKB 3 Menteri sampai 1987 adalah menyangkut pelaksanaan sistem pendidikan dan pengajaran yang direalisasikan dengan perubahan dan pengembangan kurikulum. Perubahan demi perubahan yang

⁴¹⁷Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, h. 185

⁴¹⁸Badri Yatim dkk, *Sejarah Perkembangan Madrasah*, h.182.

berlangsung relatif cepat itu menunjukkan bahwa upaya untuk mencari model kurikulum yang tepat bagi institusi madrasah memang bukan pekerjaan yang sederhana, dan mempunyai efek.

Efek penyamaan kurikulum ini adalah bertambahnya beban yang harus dipikul oleh institusi madrasah. Di satu pihak madrasah memperbaiki mutu pendidikan umumnya setaraf dengan standar yang berlaku di sekolah-sekolah. Di lain pihak, bagaimanapun juga madrasah sebagai institusi pendidikan Islam harus menjadi mutu pendidikan agamanya tetap baik.⁴¹⁹ Namun, dengan penguasaan ilmu-ilmu agama hanya 30% termasuk bahasa Arab, tidak cukup memadai bagi alumni MA, untuk memasuki perguruan tinggi Islam, apalagi untuk melanjutkan studi ke Timur Tengah dan menjadi calon-calon ulama.

Kebijakan SKB 3 Menteri secara internal ditubuh kelembagaan madrasah sendiri tidak sepenuhnya terakomodasi atau terselesaikan, di satu sisi memperkuat peran madrasah terhadap sekolah, namun di sisi lain dianggap memperlemah posisi madrasah sebagai lembaga pendidikan agama yang fokus utamanya agama dan pengetahuan umum sebagai tambahan. Bahkan kebijakan ini juga memperlemah munculnya kader-kader ulama. Sementara itu, menyangkut penerapan kurikulum baru kendala yang dihadapi institusi madrasah adalah sulitnya membuat perangkat dan visi baru. Hal ini menurut Mastuhu, merupakan keresahan mendasar bagi madrasah-madrasah, terutama swasta,⁴²⁰ yang pada gilirangnya *out put* madrasah masih sering mendapat perlakuan diskriminatif karena dianggap kemampuan umumnya belum setara dengan sekolah umum. Bahkan ketika memasuki dunia perguruan tinggi ataupun dunia kerja perlakuan diskriminatif tersebut sangat dirasakan oleh lulusan madrasah.⁴²¹ Di samping itu, kenyataannya anak-anak madrasah tetap masih belum mampu bersaing dengan anak-anak sekolah umum dalam memasuki PTU.

Melihat kenyataan di atas, maka dapat diduga *out put* institusi madrasah masih tetap berada pada starata marginal disektor

419Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, h. 20

420 Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta, Logos, 1999, h.58

421Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, h.20

kehidupan modern. Lebih dari itu yang sangat memprihatinkan bahwa SKB 3 Menteri tersebut justru hanya melahirkan anak-anak madrasah yang berpengetahuan setengah-setengah, termasuk dalam pengetahuan agama. Oleh karena itu, tidak heran alumni madrasah Aliyah jurusan sosial dan fisika, misalnya, sering mengalami kesulitan untuk bisa bersaing dengan alumni pesantren agar bisa diterima di UIN karena kurangnya pengetahuan mereka tentang agama. Hal inilah yang turut memperlemah posisi madrasah, sehingga Mastuhu menilai bahwa kelemahan sistem institusi pendidikan madrasah antara lain:⁴²²

- Mementingkan materi di atas metodologi.
- Mementingkan memori di atas analisis dan dialog.
- Mementingkan pikiran vertikal/linear di atas lateral.
- Mementingkan penguatan otak kiri di atas otak kanan.
- Materi pelajaran agamanya yang diberikan masih bersifat tradisional, belum menyentuh aspek rasional.
- Penekanan yang berlebihan pada ilmu sebagai produk final, bukan pada proses metodologinya.

Jika demikian kondisinya, perubahan madrasah, baik pada level institusi maupun kurikulum, juga telah membawah sejumlah implikasi negatif bagi lembaga pendidikan madrasah. Perubahan-perubahan ini bukan hanya melunturkan jatidiri madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam, lebih dari itu juga telah berperan memerosotkan nilai madrasah yang selama ini telah banyak memberikan kontribusi sebagai pusat reproduksi ulama. Tamatan madrasah kini bukan lagi memiliki dasar pengetahuan keislaman yang baik, tetapi justru tidak ada bedanya dengan alumni sekolah-sekolah umum. Ini jelas merugikan institusi madrasah.

Kebijakan SKB 3 Menteri secara eksternal mendapat respon atau hambatan dari masyarakat yang diantaranya mengatakan bahwa dengan SKB 3 Menteri akan mendangkalkan iman umat Islam, hal ini disebabkan karena pelajaran agama hanya 30%, kebijakan itu justru akan mengurangi pengikut *ahlusunnah wal jamaah*, dan dianggap Depag telah dianggap bersekutu dengan pemerintah,

⁴²²Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, h. 59.

serta kekhawatiran umat Islam akan dihapuskannya sistem institusi pendidikan madrasah.⁴²³ Bahkan sebahagian kecil dari mereka berpendapat bahwa SKB 3 Menteri tersebut tidak lain hanyalah upaya yuridis pemerintah untuk melakukan hegemoni terhadap umat Islam. kekhawatiran ini menjadi semakin kuat, bila melihat realitas pendidikan Islam bahwa madrasah berstatus swasta merupakan bagian terbesar (95,42%) dari seluruh madrasah yang ada. Sedangkan madrasah yang berstatus negeri hanya 4,8% saja. Oleh karena itu, sangat wajar bila pelaksanaan SKB 3 Menteri mengalami hambatan dan tantangan sehingga tidak bisa berjalan semulus yang diharapkan.⁴²⁴

Hambatan lain adalah penolakan dari para ulama pesantren yang menganggap kebijaksanaan tersebut sebagai upaya sekularisasi pendidikan Islam. Upaya sekularisasi dilakukan dengan cara mengurangi kurikulum ilmu agama dan menambah kurikulum ilmu umum menjadi sangat dominan, sehingga lulusan madrasah semakin tidak mampu mendalami ilmu agama, yang pada gilirannya ulama semakin langka. Olehnya itu, menolak dengan tegas kebijakan pemerintah yang berupah SKB 3 Menteri.⁴²⁵

Akan tetapi menurut Zakiah Daradjat SKB 3 Menteri justru sangat strategis, yakni sebagai upaya merealisasikan bahwa ajaran Islam adalah rahmat bagi seluruh umat manusia. Hal ini para alumni madrasah berbekal ilmu agama yang mereka dalami dan dapatkan baik dalam keluarga maupun selama di madrasah, dapat memberi warna keislaman pada sekolah atau perguruan tinggi umum.⁴²⁶

Namun demikian, pemerintah dalam hal ini Departemen Agama terus mengsosialisasikan SKB 3 Menteri ini dengan memberikan pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat atau kepada ummat Islam, sehingga dikalangan umat Islam pada saat itu ada sebahagian yang menerima kebijakan tersebut.

423Lihat *Jurnal Madrasah*, vol. 1. no. 3 1997, Jakarta, Depag, h. 4

424 Maksum, *Madrasah dan Sejarah Perkembangannya*, h. vii-xii

425 Lihat Ainurrafiq, *Pemikiran Pendidikan Zakiah Daradjat dan Peranannya dalam Perkembangan Pendidikan Islam*, Disertasi, UIN Jakarta, 2001, h. 195

426Ainurrafiq, *Pemikiran Pendidikan Zakiah Daradjat dan Peranannya dalam Perkembangan Pendidikan Islam*, 195.

Terlepas dari berbagai sisi positif dan negatif sejumlah kebijakan yang dilakukan terhadap institusi madrasah dari SKB 3 Menteri tahun 1975 sampai dengan pembekuan kurikulum 1984 dan penyempurnaan untuk tingkat MI/MTs pada 1987, sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai sejarah panjang di Indonesia, sejak awal berdirinya identik dengan keislaman bahkan sebagai simbol kemajuan lembaga pendidikan Islam di negeri. Hanya saja berbagai problem yang hadapi membuat institusi madrasah semakin dewasa dalam mencari jati dirinya, walaupun tuntutan tetap mempertahankan mutu pendidikan agama yang menjadi ciri khasnya, tetapi sisi lain ia diharapkan mampu menyelenggarakan pendidikan umum secara baik dan berkualitas agar bisa sejajar dengan sekolah-sekolah umum. Ini jelas beban berat yang sangat besar yang dipikul pada institusi madrasah.

Walaupun demikian, dengan adanya SKB 3 Menteri ini modernisasi madrasah dapat dikatakan berhasil. Madrasah-madrasah yang bersedia melaksanakannya, tidak hanya mendapat bantuan guru dari pemerintah. Lebih dari itu juga memperoleh sumber dana baik yang dialokasikan untuk merenovasi bangunan fisik maupun untuk melengkapi fasilitas pembelajaran.⁴²⁷

Kegagalan madrasah dalam memikul beban tersebut hanya akan memperkuat anggapan orang bahwa madrasah adalah semacam “sekolah kepalang tanggung”. Meskipun demikian, semua ini tergantung pada kualitas SDM dilingkungan madrasah sendiri; mulai dari manajemen, finansial, dan kualitas tenaga guru, bersedia melakukan perbaikan, agar institusi madrasah sanggup menerobos dan memanfaatkan peluang.

C. Penutup

Berdasarkan pembahasan, maka dapat dikatakan bahwa institusi madrasah dengan lahirnya SKB 3 Menteri mendapat pengakuan dan persamaan dengan sekolah-sekolah umum baik secara institusi maupun kurikulum. Walaupun banyak problem-problem yang

⁴²⁷Maksum, *Madrasah dan Sejarah Perkembangannya*, h. 152

dihadapinya baik persoalan alumni, tenaga guru, serta kurikulum madrasah tetap selalu mencari solusi dari problem yang dihadapinya, agar *performance* madrasah dapat sesuai dengan tuntutan zaman di era globalisasi.

BAB 12

INSTITUSI PENDIDIKAN MADRASAH DAN SEKOLAH

A. Pendahuluan

Dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia, Madrasah dan sekolah⁴²⁸ adalah dua institusi pendidikan yang sesungguhnya mempunyai peran dalam membangun peradaban anak bangsa. Hanya saja, dua institusi ini seringkali digeneralisasikan di Indonesia, padahal secara historis berbedah,⁴²⁹ hal ini diakui oleh Husni Rahim bahwa persentuhan atau intraksi pendidikan Islam dengan Timur Tengah melahirkan madrasah, sedang intraksi atau pergumulan pendidikan Islam dengan Kolonial Belanda telah membuahkan sekolah Islam.⁴³⁰ Jika menganalisis teorisasi yang dibangun Husni Rahim mengenai munculnya madrasah, maka modernisasi yang dilakukan Abdullah Ahmad di Minangkabau dan Muhammadiyah, bukan modernisasi madrasah tetapi sesungguhnya sekolah Islam.⁴³¹

428Untuk mendapat informasi mengenai bagian ini lebih detail, lihat A. Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, dan Sekolah*, Jakarta, LP3ES, 1986. Lihat juga Badri Yatim dkk, *Sejarah Perkembangan Madrasah*, Jakarta, Depag RI, 1999. dan Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning*, Bandung, Mizan, 1995.

429Dalam Perjalanan sejarah jalur pendidikan madrasah berbedah secara tajam dengan jalur sekolah umum baik dari perspektif melanjutkan studi keperguruan tinggi maupun dalam persoalan lapangan kerja. Lihat Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999, h. 57.

430Kedua lembaga tersebut lahir dari inspirator yang berbedah: satu dari lulusan Timur Tengah modern sedangkan yang lain dari. Lihat Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, h. 8.

431Sekolah Islam yang lahir dari gerakan kooperatif dengan pendidikan Belanda. Seperti sekolah Adabiyah (bukan madrasah) yang menerapkan system klasikal dengan konsekuen yang kemudian tahun 1915 lembaga ini berubah menjadi HIS Adabiyah yang merupakan sekolah Islam yang paling modern pertama di Indonesia. Untuk lebih jelas

Namun demikian, kedua lembaga pendidikan tersebut telah menjadikan pendidikan di Indonesia menjadi tersendiri dari sejarah dan kehidupan bangsa ini. Bahkan pertumbuhan dan perkembangannya dimulai dari tradisional sampai menjadi modern.

Oleh karena itu, makalah ini membahas bagaimana sesungguhnya perbedaan institusi madrasah dengan institusi sekolah? Selanjutnya tulisan menggunakan sumber-sumber yang otoritatif dan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan historis.

B. Wacana Madrasah

Jika memakai teori yang dibangun oleh Stanton dengan menyebut madrasah *the institution of higher learning*-lembaga keilmuan (pendidikan) tinggi,⁴³² atau perguruan tinggi. Maka madrasah Nidzamiyah yang didirikan di Baghdad oleh Nizam al-Mulk (awal abad ke-11/12 masehi)(5-6 Hijriah) sebagai institusi formal pendidikan Islam adalah perguruan tinggi Islam bukan madrasah yang dipahami masyarakat Indonesia,⁴³³ tetapi madrasah di Indonesia merupakan sebagai cikal bakal perguruan tinggi Islam. Hal ini diakui oleh Abuddin Nata⁴³⁴ bahwa pendidikan suatu masyarakat atau negara tidak dapat

lihat Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milinium Baru*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2000, h. 37. lihat juga Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Mahmudian, 19 60. dan Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, dan Sekolah*, h. 35-83.

432Lihat Azyumardi Azra, “ Pendidikan Tinggi Islam dan Kemajuan Sains” dalam Charles Michael Stanton, *Pendidikan Tinggi dalam Islam*, Jakarta, Logos, 1994, h. vi

433 Madrasah di Timur Tengah adalah lembaga pendidikan yang memberikan pelajaran ilmu agama tingkat lanjut sedang di Indonesia madrasah sebagai lembaga pendidikan yang memberikan pelajaran ilmu agama tingkat rendah dan menengah. Lihat Abdur Rachman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa, Visi, Misi dan aksi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, h. 12

434Abuddin Nata adalah salah seorang tokoh yang memulai pendidikannya dengan belajar mengaji al-Qur’an pada ayahnya, belajar di madrasah Ibtidaiyah Jati Pinggir, Tanah Abang Jakarta Pusat, hingga kelas 3, dan dilanjutkan pada madrasah wajib belajar (MWB) Nagrog, Ciampea, Bogor hingga tamat tahun 1968.Selanjutnya pada tahun 1972, ia tamat PGA 4 tahun dan Madrasah Tsanawiyah di alamat yang sama. Sambil ia belajar di kedua lembaga tersebut, ia juga mondok/mengaji kitab kuning di pesantren Nurul Ummah yang letaknya berdekatan dengan kedua lembaga tersebut. Setelah itu, pada tahun 1974, ia menamatkan pendidikan guru agama (tingkat) atas (PGA), Cilegon, Serang Banten. Ketika menempuh pendidikan di PGA ini, ia juga mondok/mengaji kitab kuning di pesantren Jauharotun Naqiyah, Cibeber Serang Banteng. Abuddin Nata, “Tantangan dan Peluang Pendidikan di Indonesia”, Jakarta, 20 Maret 2004, h. 59.

diimpor atau diekspor dari atau kesuatu negara atau masyarakat. Ia harus timbul dalam masyarakat itu sendiri. Ia adalah pakaian yang harus ukur dan dijahit sesuai dengan bentuk ukuran pemakainya, berdasarkan identitas, pandangan, serta nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat atau negara tersebut.⁴³⁵ Walaupun demikian, tidak bisa diabaikan bahwa institusi madrasah mempunyai pengaruh dari jaringan Timur Tengah. Hal ini diakui Maksu mengakui bahwa sejarah madrasah di Indonesia merupakan konsekuensi pengaruh intensif pembaharuan pendidikan Timur Tengah masa modern.⁴³⁶

Madrasah⁴³⁷ merupakan institusi yang tumbuh dan berkembang oleh dan dari masyarakat,⁴³⁸Indonesia seiring dengan masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia.⁴³⁹ Kemunculan madrasah⁴⁴⁰

435Abuddin Nata, "Tantangan dan Peluang Pendidikan di Indonesia", dalam pidato pengukuhan Guru Besar, , h. 1.

436Maksu, *Madrasah dan Sejarah Perkembangannya*, Jakarta, Logos, 1999, h. 81.

437Beragam pengertian Madrasah Perkataan madrasah dalam bahasa Arab adalah bentuk kata ketetapan tempat (zharaf makan) dari akar kata "darasa" secara harfiah madrasah diartikan sebagai tempat belajar para pelajar atau tempat untuk memberikan pelajaran. Sedangkan Departemen Agama merumuskan arti madrasah melalui SKB 3 Menteri 1975 menjelaskan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum. Dan dalam Undang-undang pendidikan Nasional No.2. tahun 1989, madrasah lembaga pendidikan yang berciri khas Islam. Uraian di atas dapat memberikan pengertian bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang mempunyai tata cara yang sama dengan sekolah, mata pelajarannya agama Islam menjadi mata pelajaran pokok, di samping diberikan mata pelajaran umum, serta berciri khas Islam. Lihat Uraian Mehdi Nakosteen, *Kontribusi Islam Atas Dunia Intelektual Barat; Deskripsi Analisis Abad Keemasan*, edisi Indonesia, Surabaya, Risalah Gusti, 1996, h. 66. lihat juga, Ibrahim Anised, *al-Mu'jam al-Wasit*, Kairo, Dar al-Ma'arif, 1972, h. 280. Lihat Surat Keputusan Bersama 3 Menteri (SKB 3Menteri), tahun 1975 pasal I.

438Community based education, merupakan kebijakan yang memberikan keluasan bagi masyarakat untuk ikut serta berperan dalam bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitarnya.

439Madrasah, dalam peta dunia pendidikan Indonesia, memang bukan sesuatu yang *indigenous*, sebagai ditunjukkan oleh kata madrasah itu sendiri yang berasal dari bahasa Arab. Lihat Husni Rahim, Rahim Husni, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, Jakarta, logos, 2005, h. 10.

440Dilihat dari sejarahnya setidaknya-tidakny ada dua faktor penting yang melatarbelakangi kemunculan madrasah, yaitu: *pertama*, adanya pandangan yang mengatakan bahwa sistem pendidikan Islam tradisional dirasakan kurang bisa memenuhi kebutuhan pragmatis masyarakat; *Kedua*, adanya kekhawatiran atas cepatnya perkembangan persekolahan Belanda yang akan menimbulkan pemikiran sekular di masyarakat. Untuk menyeimbangkan perkembangan sekularisme, maka masyarakat muslim-terutama para *reformis*, yang berusaha melakukan reformasi pengembangan pendidikan dan

sebagai lembaga pendidikan Islam yang dimulainya dari bentuk pengajian, dirumah-rumah, terus ke mushallah, mesjid, majelis ta'lim sampai kebangunan madrasah seperti yang kita kenal saat ini, dengan menggunakan sistem tradisional.⁴⁴¹ Bahkan modernisasi madrasah terus bergulir untuk mencari format madrasah⁴⁴² yang ideal, untuk menjadikan madrasah fungsional sebagai salah satu lembaga layanan pendidikan bagi kebutuhan masyarakat yang terus berubah. A. Malik Fajar misalnya memberikan penjelasan bahwa dalam meyongsong perubahan madrasah, maka kebijakan-kebijakan perlu diakomodasi berbagai kepentingan masyarakat.⁴⁴³ Demikian halnya dengan

pemberdayaan madrasah. Lihat Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, h. 183.

441Lihat Husni Rahim, Rahim Husni, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, h. 10. lihat juga A. Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, dan Sekolah*, h. 10. Sebagai penjelasan tambahan lihat. Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Hidakarya Agung, 1993, h. 34.

442Sejarah madrasah di Indonesia yang pernah ada atau model-model madrasah yakni Madrasah Wajib Belajar (MWB), dari sinilah selanjutnya dinamika lembaga madrasah menyebabkan lahirnya beberapa model madrasah yang antara lain: (a) Madrasah swasta dan negeri, (b) madrasah model adalah madrasah konvensional yang diterapi secara khusus untuk menjadi model madrasah yang berkualitas, sehingga dapat menjadi contoh bagi madrasah negeri dan swasta untuk menggerak-kan dan meningkatkan kualitas madrasah lain didaerah, (c) madrasah terpadu adalah suatu madrasah yang ingin memberikan konsep keterpaduan dengan melihat madrasah ibtidayah, tsanawiyah, aliyah yang berada dalam satu lokasi sebagai satu kesatuan disekolah. Di mana seluruh aspeknya, kurikulum, proses belajar mengajar, perpustakaan, guru, fasilitas pendidikan dapat dipadukan sebagai satu kesatuan berkesinambungan satu sama lain. Dengan kata lain memadukan konsep madrasah unggul dengan madrasah model, (d) model Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) adalah model madrasah aliyah program khusus sebagai upaya mempertahankan madrasah aliyah program ilmu-ilmu agama yang diharapkan menghasilkan siswa yang memiliki kemampuan dasar ilmu agama, bahasa arab yang diperlukan untuk melanjutkan keperguruan tinggi, (e) madrasah aliyah program keterampilan (MAPK) adalah madrasah aliyah yang diberi tambahan program ekstrakurikuler dalam berbagai bidang keterampilan yang terstruktur, (f) model madrasah dan sekolah pondok pesantren adalah model pondok pesantren yang memberi respon terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, dunia pesantren, di mana keterpaduan madrasah dengan nuansa Iptek dan sekolah dengan nuansa agama menjadi suatu kebutuhan ditambah lagi dengan sistem asrama, (g) model madrasah sekolah dengan bording school adalah model madrasah sekolah yang muncul dengan menggunakan sistem pesantren. Suatu sistem yang menekankan metode pengajaran yang diorientasikan pada penguasaan substansi materi keilmuan (bukan target kurikulum). Lihat Mulyanto Sumardi, h. 46-54. lihat juga Husni Rahim, Rahim Husni, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, h.159-192.

443Oleh karena itu ada tiga kepentingan: *Pertama*, Kebijakan itu harus memberi ruang tumbuh yang wajar bagi aspirasi utama umat Islam, yakni menjadikan madrasah

Azyumardi Azra⁴⁴⁴berpendapat bahwa institusi madrasah seharusnya mengkaji ulang secara cermat gagasan reposisi madrasah, terutama dalam konteks kekinian. Sebab, bukan tidak mungkin orientasi semacam itu menimbulkan implikasi negatif terhadap eksistensi dan fungsi pokok madrasah itu sendiri.⁴⁴⁵ Dengan kata lain visi institusi madrasah⁴⁴⁶ tidak tercerabut dari fungsinya yang berbasis sekolah *tafaqqun fid dien* dan juga tidak ketinggalan terhadap semua perkembangan yang terjadi di masa kontemporer dan era globalisasi, sehingga institusi madrasah dapat diwujudkan sebagai wahana peradaban modern. Bahkan menurut A. Malik Fajar pelajar keluaran madrasah diharapkan menjadi sumber daya manusia yang memiliki

sebagai wahana untuk membina ruh atau praktek hidup islami. *Kedua*, kebijakan itu menjelaskan dan memperkuat keberadaan madrasah sebagai ajang membina warga negara yang cerdas, berpengetahuan, berkepribadian serta produktif sederajat dengan sistem sekolah. Porsi dari kebijakan ini tidak lain agar pendidikan madrasah sanggup mengantarkan peserta didik memiliki penguasaan secara memadai, yaitu penguasaan pengetahuan dan kemampuan dasar dalam bidang-bidang umum. *Ketiga*, kebijakan itu harus bisa menjadikan madrasah mampu merespon tuntutan-tuntutan masa depan. Lihat A. Malik Fajar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta, Fajar Dunia, 1999, h. 95-96.

444Azyumardi Azra lahir di Lubuk Alung, Sumatera Barat, pada tanggal 4 Maret 1955, adalah Dosen Pascasarjana dan Fakultas tarbiyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada tahun 1986 ia memperoleh beasiswa Fullbright untuk melanjutkan studi di Columbia University, New York. Gelar M.A diperolehnya pada 1988 dari Departemen Bahasa-bahasa dan kebudayaan Timur Tengah, Columbia University. Memperoleh M.A. kedua pada 1989 dan Mphi, pada 1990. Sedangkan gelar Ph.D diperolehnya pula dari Departemen Sejarah Columbia University, pada 1992. Kini ia adalah Direktur Sekolah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Baca Azyumardi Azra, *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih*, Bandung: Mizan, 2000.

445Harus dipahami bahwa dengan menyatakan hal ini, tidak berarti madrasah harus tidak peduli sama sekali terhadap perkembangan di luar dunianya. Sebaliknya madrasah harus menumbuhkan apresiasi dan memberikan respon sepatutnya terhadap semua perkembangan yang terjadi di masa kini dan mendatang. Lihat Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan demokratisasi*, Jakarta, Kompas, 2002, h. 94.

446Visi madrasah yang pertama Islami yang mencerminkan pendidikan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang suasana dan kehidupan para peserta didik, pendidik, kurikulum, dan para penghuni lainnya mengamal ajaran Islam dengan baik. Visi yang kedua, populis yakni institusi ini merupakan pesan utama dari sejarah pendidikan Islam di Indonesia dari masa ke masa. Sejak periode paling dini, madrasah lahir dan berkembang dengan dukungan masyarakat serta terbuka bagi semua lapisan social. Visi ketiga, berkualitas artinya berorientasi pada mutu. Visi keempat, beragam artinya beragam pada madrasah menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan pendidikan. Madrasah sangat menghargai keragaman bentuk dan jenis pendidikan. Lihat Husni Rahim, Rahim Husni, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, h. 40-46.

pengetahuan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara memadai, serta memiliki daya kreativitas yang tinggi.⁴⁴⁷ Oleh karena itu, untuk mencapai hal tersebut menurut Mastuhu dan Abdur Rahman Shaleh⁴⁴⁸ perlu memperbaharui sistem pendidikan

447Lihat A. Malik Fajar, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*, Jakarta, LP3NI, 1998, h. 122-123.

448Menurut Abdur Rahman Shaleh reposisi dunia madrasah dalam memasuki era Indonesia Baru ada beberapa hal harus dibenahi: *Pertama*, pengembangan madrasah dalam mewujudkan visinya, maka madrasah mengembangkan misi untuk menjadikan madrasah yang islami, populis, dan berkualitas. Dimaksudkan dengan Islami, yaitu madrasah yang berciri khas Islam, yang mampu menciptakan anak bangsa yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt, dan berakhlak mulia. Dimaksudkan dengan populis yakni madrasah yang selalu dicintai oleh masyarakat karena tumbuh dan berkembang dari, oleh dan untuk masyarakat, serta lulusannya memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya dimaksudkan dengan berkualitas, yaitu madrasah yang mampu mencetak anak bangsa yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang cukup dan sanggup menghadapi tantangan zaman. *Kedua*, hidup dan berkembangnya madrasah akan bergantung seberapa besar kesadaran umat Islam untuk memelihara kelangsungannya yang harus dibangun berbasis kekuatan masyarakat. Sementara itu dalam hal penyelenggaraan madrasah menekankan tugas pembinaan kearah *school based management* terbuka sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin maju dan berkembang secara demokratis. *Ketiga*, madrasah dalam posisinya memasuki era Indonesia baru, dunia madrasah memerlukan dinamika di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Keempat*, penyelenggaraan madrasah pada gilirannya harus mampu memperbaiki sistem manajerial kualitas sumber daya tenaga kerja pendidikan, sarana prasarana(perpustakaan, laboratorium computer, workshop keterampilan) dan meningkatkan sumber pembiayaan melalui peningkatan peran serta masyarakat pendukungnya. *Kelima*, pembiayaan pendidikan bagi setiap anak bangsa Indonesia belum diperlakukan secara adil dalam memberi layanan pendidikan dan pengalokasian anggaran, antara lain adanya pembedaan pembiayaan pendidikan dan unit *cost* perkapita siswa antara siswa sekolah umum dan siswa madrasah. *Keenam*, peningkatan kualitas mutu pendidikan pada madrasah dalam memasuki masyarakat pada era Indonesia baru harus dilaksanakan untuk memperkuat dan memperkokoh misi, fungsi dan tugas pokok agar madrasah setara(tidak perlu sama) pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan dengan sekolah umum. Di masa mendatang pada era Indonesia Baru harus dapat dihapuskan dikotomi antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Kebijakan manajerial pendidikan perlu diserahkan kepada sekolah. Demikian pula dalam hal pembiayaan operasional pendidikan bagi sekolah swasta perlu ditingkatkan dan diberikan prioritas dalam menentukan sasaran strategisnya. Lihat Abdur Rahman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa; Visi, Misi dan Aksi*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006, h. 77-79.

madrasah,⁴⁴⁹ sehingga kelemahan madrasah bisa diatasi,⁴⁵⁰ sehingga lembaga yang mempunyai karakteristik⁴⁵¹ sendiri dibanding dengan

449Mastuhu mengusulkan untuk perbaikan madrasah: *Pertama*, kurikulum 1994 tidak akan mampu mencapai tujuan ideal, yang antara lain, hilangnya dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, apabila tidak disertai dengan konsep ilmiah; bagaimana mengitrasikan keduanya. *Kedua*, diusulkan setiap mata pelajaran di sekolah manapun harus dilihat dari dua sisi: sebagai *alat* dan *tujuan*. Misalnya, mata pelajaran biologi. Ia bisa dijadikan sebagai alat untuk menumbuhkembangkan Imtaq (iman dan taqwa), tetapi dapat juga dipandang sebagai tujuan untuk menjadi dasar pengembangan ilmu kedokteran. *Ketiga*, perlu dibudayakan penggunaan istilah-istilah baru sebagai pengganti istilah-istilah lama yang menunjukkan adanya dikotomi. Misalnya, tidak menggunakan istilah fakultas agama dan fakultas umum atau fakultas non agama. Lebih tepat digunakan istilah-istilah fakultas ushuluddin, dakwa, tarbiyah, syariah, adab, sebagaimana nama fakultas kedokteran, ekonomi, dan psikologi. Jadi sebut saja dengan nama program studi. *Keempat*, pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah tidak berdiri sendiri. Di atas dan di bawahnya, di kanan dan di kirinya, ada sub system yang sangat menentukan keberhasilan misi pendidikan madrasah. Lihat Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta, Logos, 1999, h. 61-62.

450Kelemahan sistem pendidikan madrasah yaitu: (1) mementingkan materi di atas metodologi, (2) memetingkan memori di atas analisis dan dialog, (3) memetingkan pikiran vertical/linear diatas lateral, (4) mementingkan penguatan otak kiri di atas otak kanan, (5) materi pelajaran agama yang diberikan masih bersifat tradisional belum menyentuh aspek rasional, (6) penekanan yang berlebihan pada ilmu sebagai produl final, bukan pada proses metodologinya dan (7) mementingkan orientasi memiliki di atas menjadi. Lihat Mastuhu *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, h. 59.

451Karakteristik madrasah adalah ciri khas yang melekat pada madrasah yang merupakan kekuatan dari madrasah itu sendiri. Karakteristik madrasah meliputi pertama, Madrasah adalah milik masyarakat (Community Based Education). Madrasah tumbuh dan berkembang dari masyarakat dan untuk masyarakat, karena itu dari segi kuantitas berkembang sangat pesat namun dari segi kualitas perkembangan madrasah sangat lamban. Konsekwensi madrasah yang bersifat "populis/massif" yang selalu cenderung memekar dan belum sempat mendalam. Keterikatan masyarakat terhadap madrasah lebih dinampakkan sebagai ikatan emosional keagamaan yang tinggi. Ikatan ini muncul karena bertemu dua kepentingan-an, yakni hasrat kuat masyarakat untuk berperang serta dalam pendidikan dan motivasi keagamaan untuk tafaqqun fid dien, dengan kekuatan ini, akhirnya masyarakat mempunyai rasa memiliki (sence of biloging) dan rasa tanggung jawab (sence of responsibility) yang tinggi dan dapat menjamin keberlangsungan madrasah. Tetapi dipihak lain madrasah menjadi kendala karena merasa sebagai pemilik dan pendiri. Dan tidak muda ide-ide reformasi. Kedua, madrasah sebagai manajemen berbasis sekolah (school based Management). konsep manajemen berbasis sekolah merupakan konsep yang memberikan kewenangan, kepercayaan dan tanggung jawab yang luas bagi sekolah berdasarkan profesionalisme untuk menata organisasi sekolah, mencari dan mengembangkan serta mendayagukan sumber daya pendidikan yang tersedia, dan memperbaiki kinerja sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan atau sekolah yang bersangkutan. Madrasah sejak awal kemunculannya didasari shool based management. Keberanian madrasah menentukan jenis keunggulan apa dari madrasah dan ciri khas apa yang membedakan dengan madrasah lain. Keragaman dan ketidak ketergantungan dengan pemerintahan pusat dan birokrasi telah membuat madrasah pada masa lalu, banyak yang bergensi. Ketiga,

sekolah menjadi pilihan umat Islam. Sehubungan dengan itu, Azyumardi Azra memberikan penjelasan bahwa kurikulum madrasah seharusnya memiliki dua komponen yakni pendidikan umum dan pendidikan Islam.⁴⁵² dan dapat terintegrasikan atau memimjam istilah Suwito, terciptanya integrasi ilmu-ilmu yang bersumber pada ayat-ayat *qur'aniyyah* dan ilmu-ilmu yang bersumber ayat-ayat *kauniyyah*. Ilmu-ilmu yang bersumber dari ayat-ayat *qur'aniyyah* disebut ilmu agama dan ilmu yang bersumber dari ayat-ayat *kauniyyah* disebut ilmu umum.⁴⁵³ Dengan demikian tujuan lembaga pendidikan

madrasah sebagai lembaga tafaqqun fin dien, konsep dasar dari madrasah adalah untuk memberi kesempatan pada peserta didik mempelajari dan memahami serta mendalami agama sebagai kewajiban dari setiap individu, kemudian meneruskan ilmu yang didapat kepada orang lain. Ini pulalah yang menyebabkan madrasah tidak dapat dipisahkan dari lembaga dakwah yang bukan fokus utamanya. Keempat, madrasah sebagai lembaga kaderisasi dan mobilitas umat, dari proses pendidikan ini melahirkan pribadi muslim yang saleh dengan penguasaan dan pengalaman ajaran Islam yang luas, mendalam, dan konsisten. Lihat Husni Rahim, *Madrasah Dalam Politik di Indonesia*, 38-40.

452Paradigma pengembangan dan penerapan kurikulum berbasis kompetensi seharusnya menjadi titik tolak pembaharuan kurikulum sistem pendidikan madrasah secara keseluruhan. Kebutuhan pembaharuan bagi sistem pendidikan madrasah ini mutlak dilakukan, bukan hanya dalam konteks membangun sistem pendidikan Islam yang distingtif, tetapi juga sekaligus membangun dan mengembangkan keunggulan(*excellence*)atau *quality education vis a vis* sistem pendidikan umum secara keseluruhan. Dalam era otonomi dan desentralisasi, pembaharuan kurikulum jelas relevansinya, jika sistem pendidikan Islam ingin memberikan sumbangan yang lebih bermakna dan signifikan bagi lingkungannya. Lihat Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan demokratisasi*, h. 95-99.

453Lihat Suwito, "Kurikulum Berbasis Kompetensi", dalam *makalah seminar* sambutan atas nama Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, pada acara Workshop, pada Program Studi Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi, Jakarta, 17 April 2003, h. 1 Secara sederhana beliau menjelaskan sebagai berikut:

- a) *Historical Content* Setiap Pendidik hendaknya menjelaskan sejarah lahir dan perkembangan ilmu yang sedang dipelajari sejak awal pertumbuhan sampai sekarang.
- b) *Theoretical Content* Hal ini masih terkait dengan yang di atas pendidik harus dapat menampilkan teori-teori yang pernah dikemukakan oleh para ahli dari masa ke masa. Dengan demikian akan merangsang para peserta didik untuk memperdalam ilmu tersebut. Dan bahkan memiliki keberanian untuk mengembangkan agar memperoleh hal yang baru.
- c) *Practical Content* Setiap bidang ilmu juga perlu penjelasan dari sisi kegunaan praktisnya untuk kepentingan kehidupan. Dengan cara ini diharapkan para peserta didik dapat mengambil manfaatnya setelah mempelajari bidang studi tersebut.
- d) *Case Content* Masih terkait dengan butir c di atas, setiap bidang ilmu perlu dijelaskan pula beberapa studi kasus yang terkait dengan ilmu tersebut. Dengan demikian setiap pendidik mampu memberikan contoh kasus dalam

madrasah⁴⁵⁴ dapat tercapai.

C. Institusi Pendidikan Sekolah

Dalam teori-teori pendidikan dijelaskan bahwa sekolah merupakan salah satu dari tripusat pendidikan, di samping rumah tangga dan masyarakat. Sekolah pada hakekatnya bertujuan untuk membantu orang tua mengajarkan kebiasaan-kebiasaan, baik dalam mena-namkan budi pekerti yang baik, juga diberikan bekal untuk kehidupan dalam masyarakat yang sukar diperoleh dalam rumah tangga.⁴⁵⁵ Pendidikan sekolah adalah bagian dari pendidikan dalam keluarga, yang sekaligus juga merupakan kelanjutan dari pendidikan dalam keluarga. Di samping itu, kehidupan sekolah juga merupakan jembatan bagi anak-anak untuk mengembangkan kehidupannya dalam keluarga dan masyarakat.

Pengertian sekolah yang dimaksud adalah lembaga pendidikan formal yang menekankan inti pelajaran umum bukan mata pelajaran agama. Dengan demikian, lembaga sekolah sangat berbeda dengan lembaga madrasah dan pesantren, hal ini disebabkan lembaga sekolah merupakan lembaga pendidikan umum dengan pelajaran universal dan terpengaruh iklim pencerahan Barat.⁴⁵⁶ Lembaga sekolah untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh pemerintah Belanda pada sekitar dasawarsa 1870-an, yang bertujuan untuk menyiapkan calon

kaitan manfaat praktis suatu bidang ilmu.

- e) *Science and Tecnologi Content* Banyak ayat al-Qur'an yang memerlukan penjelasan dan sisi sains dan teknologi, bukan hanya sisi bahasa dan sastra Arab, ushul fiqh, tajwid atau ilmu yang selama ini dikenal sebagai ilmu agama. Selain akan menjadi lebih jelas, pendekatan secara sains dan teknologi dalam menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis akan lebih memperkuat keyakinan untuk berislam dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
- f) *Islamic Content* Atas dasar keyakinan bahwa semua ilmu dan lainnya yang ada dialam ini berasal dari Yang Maha Satu, maka antara ilmu yang sekarang dikenal sebagai ilmu agama tak mungkin bertentangan dengan ilmu yang kini diyakini dengan ilmu umum.

454Adapun tujuan didirikan madrasah yakni untuk mentransmisikan nilai-nilai Islam, untuk memenu-hi kebutuhan modernisasi pendidikan. Lihat Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Logos wacana Ilmu, 2001, h. 192-193.

455 Haidar Putra Dauliy, *Historisitas dan eksistensi Pesantren, Madrasah, sekolah*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2001, h. 36.

456Lihat Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, dan Sekolah*, h. 1-27.

pegawai pemerintahan kolonial Belanda.⁴⁵⁷ Dengan maksud untuk melestarikan kaum penjajah. Dalam zaman kolonial mulai terdapat lembaga-lembaga pendidikan formal dengan bentuk sekolah seperti yang kita kenal sekarang, sekolah yang tertua sebenarnya terdapat di daerah Maluku, Ternate, Solor, serta sekolah yang tertua didirikan Belanda adalah di Ambon tahun 1607 M. Sistem sekolah di Jawa baru mulai masuk daerah pedesaan tahun 1907 sebanyak 122 buah yang secara resmi sekolah ini disebut Volksschool. Namun untuk melanjutkan dua tahun di sebut Vervolgschool, yang terletak di kota dan kabupaten.⁴⁵⁸

Jenis-jenis sekolah yang didirikan pemerintah kolonial Belanda antara lain: (a) Europeesche Legere School (ELS) didirikan 1817 dan 1920 di Batavia, lembaga ini menerima murid orang Eropa, anak-anak serdadu dari Manado, Ternate, Tidore. Dan beragama kristen. (b) Holladsche Chineesche School (HCS) didirikan 1908, lembaga ini diberikan kepada anak-anak cina. (c) Hollandsche Inlandsche School (HIS) yang didirikan 1914, sekolah ini dimaksudkan bagi anak-anak golongan elite atau golongan sosial atas selama 7 tahun. (d) Meer Unitgebreid Lager Onderwijs (MULO) 1914, sekolah ini dimaksudkan sebagai lanjutan dari HIS yang sejak zaman Jepang hingga sekarang bernama SLTP lama belajarnya 3 tahun.⁴⁵⁹ Selanjutnya sejak dasawarsa 1920-an Belanda sudah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Indonesia.

Pendidikan sekolah yang didirikan Belanda, dengan berbagai kelemahannya harus diakui bahwa metode belajar pada lembaga sekolah lebih baik dan modern. Di samping itu, lembaga pendidikan sekolah lebih menjanjikan lapangan kerja bagi para muridnya setelah menyelesaikan studinya. Oleh karena itu, lembaga sekolah banyak pendidikan muslim yang sebelumnya biasa masuk kelembagaan pendidikan Islam.⁴⁶⁰ Karena itulah kehadiran sekolah dipandang sebagai ancaman bagi para ulama, kiyai, atau syekh, karena mereka

457Lihat Aqib Sumito, *Politik Islam India Belanda*, Jakarta, LP3S, 1985, h. 47.

458Lihat Badri Yatim dkk, *Sejarah Perkembangan Madrasah*, Proyek Peningkatan Madrasah Aliyah Depag RI, 2000, h. 119.

459Untuk lebih jelasnya tentang sekolah lihat Haidar Putra Dauli, *Historisitas dan eksistensi Pesantren, Madrasah, sekolah*, h. 40-43.

460Badri Yatim dkk, *Sejarah Perkembangan Madrasah*, h. 122.

berpendapat bahwa lembaga sekolah akan melahirkan orang pintar pribumi yang sekuler dan penganut pembela kebudayaan Barat dan menjauhkan umat Islam dari ajarannya. Walaupun lembaga sekolah dengan berbagai kelemahannya namun tidak dapat dipungkiri bahwa sekolah telah membawa pengaruh yang sangat besar, manfaat dan faedah bagi bangsa ini. Orang-orang pribumi atau lembaga-lembaga Islam bisa mengenal sistem modern, sistem kelas. Metode belajar mengajar modern dan ilmu pengetahuan umum. Dengan bahasa lain, lembaga sekolah telah berjasa dalam menciptakan orang-orang pribumi terpelajar yang cerdas, pintar, berwawasan luas dan memiliki pola pikir rasional.

D. Perbedaan Madrasah dan Sekolah

Wacana perbedaan kedua institusi ini kurang menarik para perhatian para praktisi pendidikan, padahal dua institusi ini menarik untuk dikaji. Hal ini disebabkan kedua institusi ini lahir dari pergumulan *setting* sosial yang berbedah.

Madrasah dalam fenomena sejarah pendidikan di Indonesia adalah lembaga yang mengalami marginalisasi dan diskriminatif. Namun Institusi madrasah mendapat angin segar ketika adanya kebijakan SKB 3 Menteri yang berisi tentang pengakuan atas kesetaraan antara madrasah dengan sekolah umum dan madrasah dianggap sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam, kurikulumnya sama persis dengan kurikulum sekolah plus agama dengan adanya Undang-undang Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989. Menurut A. Malik Fajar perlahan Institusi madrasah dan sekolah umum mulai pudar, fenomena ini terlihat setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional⁴⁶¹ dan institusi

⁴⁶¹Hal tersebut ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah, serta diberlakukannya kurikulum 1994, di mana madrasah berubah statusnya menjadi sekolah umum yang berciri khas Islam. Dengan demikian madrasah sekarang ini memiliki kedudukan sama dengan sekolah umum lainnya. Perkembangan tersebut membawa implikasi secara mendasar bagi madrasah. Ia yang semula dipandang sebagai institusi pendidikan keagamaan, sekarang ini, di satu sisi, mengalami pengkayaan peran dan fungsi. Di sisi lain, karena tuntutan untuk memperkaya peran dan fungsinya, ia mendapatkan beban tambahan; di samping harus memberikan kurikulum sekolah umum yang setingkat secara penuh, ia juga mesti mempertahankan materi keislaman yang selama ini telah diajarkan. Lihat A. Malik

madrasah mengalami perubahan dengan keluarnya Undang-Undang No. 20 tahun 2003 telah memberi peluang yang sama kepada madrasah dan pesantren yang bukan sekolah umum berciri khas Islam untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan dan tidak diskriminasi di mata negara. Kesempatan ini akan membuka peluang kebhinekaan lembaga pendidikan keagamaan, namun dalam posisi status diakui bagian dari sisdiknas. Dengan demikian tidak diperlukan lagi adanya ujian persamaan dan sejenisnya bagi madrasah yang bukan sekolah umum untuk mengikuti kurikulum sekolah.

Kedepan dengan adanya sisdiknas No. 20 tahun 2003, maka menurut Husni Rahim madrasah sudah bisa memilah diri menjadi tiga pola yaitu: *Pertama*, madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam seperti yang selama ini. Namun harus berani menerjemahkan kurikulumnya tetap 100% walaupun umum sama dengan sekolah dan khusus sama dengan madrasah. Intinya anak didik berkonsentrasi kepada pelajaran utama sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, dengan cara ini hasil yang didapatkan akan lebih meningkat dan bersaing secara fair dengan sekolah, menghasilkan lulusan yang menguasai pengetahuan umum dengan prima, juga menjadi muslim yang baik. *Kedua*, madrasah sebagai lembaga pendidikan keagamaan, di mana fokus utamanya adalah pelajaran agama, pelajaran umum hanya sebagai penunjang. Ini diharapkan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai pengetahuan agama dengan baik namun memahami dasar ilmu dan teknologi sebagai pelengkap kehidupan.

Ketiga, madrasah sebagai sekolah kejuruan di mana fokus pelajarannya pada keterampilan (life skill) namun sebagai muslim yang baik. Pola pendidikan mengikuti pola sekolah umum kejuruan dengan prinsip seperti sekolah madrasah.⁴⁶²

Secara umum melihat perbedaan kedua institusi ini sangat jelas kalau di lembaga madrasah mata pelajaran agama Islam dibagi dalam

Fajar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, Bandung, Mizan, 1998. Bahkan secara umum dapatlah disimpulkan bahwa madrasah dewasa ini mengalami modernisasi dan posisinya telah terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, tanggung jawabnya sama dengan sekolah lain. Lihat juga Fuad Jabali dan Jamhari, (penyunting), *IAIN Modernisasi Islam di Indonesia*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2002.

462Husni Rahim, *Madrasah Dalam Politik di Indonesia*, h. 91-92.

beberapa sub dan lebih banyak⁴⁶³ sedang disekolah umum pelajaran agama Islam digabun hanya dua jam perminggu.⁴⁶⁴ Di madrasah bila siswa berjumpa dengan guru, kepala sekolah atau tenaga kependidikan lainnya saling mengucapkan salam (Assalamu 'alaikum). Sedangkan sekolah umum bisa bermacam-macam ada selamat pagi, siang, dan selamat sore dan ada pula yang saling mengucapkan salam.⁴⁶⁵ Masih banyak perbedaan yang dikemukakan oleh kaum simbolik yang tidak perlu diungkap dalam tulisan ini. Hanya saja jika kerangka simbolik dipakai untuk memotret perbedaan institusi sekolah dan madrasah maka kita akan muda terjebak pada pemahaman kulit luar atau lahiriyah (eksoterik). Sehingga ketika perbedaan-perbedaan tersebut sudah mampu diciptakan disekolah umum maka perbedaan kedua institusi ini menjadi kabur bahkan hilang.

Namun demikian, untuk melihat perbedaan kedua institusi ini dengan memakai kerangka teori tujuan filosofis pendidikan, akan nampak jelas. Para pakar⁴⁶⁶ seperti Al-Jahiz,⁴⁶⁷ dan Ibnu Shanun,⁴⁶⁸

463Yakni sub mata pelajaran yang terdiri dari Al-Qur'an Hadis, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab.

464Namun di dalamnya, pada dasarnya juga meliputi Al-Qur'an-hadis, keimanan (aqidah), akhlak, ibadah, syariah, muamalah, dan sejarah kebudayaan Islam. Lihat Lihat Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, h. 200.

465Selanjutnya di madrasah kegiatan belajar-mengajar didahului dengan ucapan salam dari sang guru atau mungkin ditambah dengan do'a berbahasa Arab, demikian juga pada akhir kegiatan belajar-mengajar. Sedangkan sekolah umum mungkin sebagian besar tidak dilakukan. Lihat Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, Yogyakarta, 2003, h. 177-178.

466Hal ini pun, diakui oleh Munir Muhkam bahwa gagasan utama pendidikan adalah bagaimana melahirkan manusia yang mempunyai daya kritis, kreatif dan keluhuran budi. Munir Muhkam, Humanisasi pendidikan Islam, *Tashwirul Afkar Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan*, Edisi No. 11, 2001, h. 17-18.

467Beliau dilahirkan di Basrah pada tahun 160 H / 755 M. dan meninggal pada tahun 225 H/868 M. corak pemikiran pendidikan al-Jahizh masuk pada kategori pertama yang dikemukakan Hasan Langgulong, berupa sastra yang mengadung bahasan-bahasan tentang tingkalaku manusia serta cara-cara mendidik anak. Penyataan tersebut dapat dipahami bahwa al-Jahizh mempunyai corak pemikiran pendidikan yang bersifat sastra. Lihat Bernard Lewis dkk, *The Encyclopedia Of Islam, Tula Sub Acgicd Pallas*, London Laidens, 1965, h. 101. Lihat juga Abd Syarifuddin Amir, *al-Fiqru al-Tarbawiyah Indi Ibn Muqoffa Wa al-Jahish Wa Abdul Hamid al-Khatib Dar Iqro*, Bairut, 1985, h. 253.

468 Ibnu Sahnun di lahirkan di Kairuna pada tahun 202 H. dan wafat pada tahun 256 dalam usia 54 tahun, dimakamkan di sebelah kuburan ayahnya. Lihat, Ibrahim Muhammad Syafi'I, *Min A'lami al-Tarbiyah al-Islamiyyah (Ibnu Sahnun) Jilid I, Maktab al-Tarbiyyah al-Arabi lidduawali al-Khalilj*, 1988, h. 247-24.

Paulo Freire⁴⁶⁹telah merumuskan bahwa gagasan utama pendidikan memanusiaikan manusia, atau peserta didik.⁴⁷⁰ Untuk menghasilkan peserta didik seperti itu, maka menurut Ahmad Tafsir ada tiga tugas pokok pendidikan yaitu: *Pertama*, membantu murid agar memiliki kemampuan mengendalikan diri atau dengan kata lain pendidikan akhlak. *Kedua*, membantu murid agar menjadi manusia yang mencintai tanah air. Di kita tugas ini mirip benar dengan pendidikan *civic*. Manusia harus memakmurkan alam tempat tinggalnya. Konsep ini kira-kira sama dengan filsafat I Ching tentang hubungan manusia dengan alam. *Ketiga*, membantu murid agar memiliki pengetahuan. Orang Yunani Lama amat menghargai pengetahuan teoritis terutama filsafat. Mereka kurang menghargai pengetahuan.⁴⁷¹

Bila teori yang dibangun para pakar pendidikan di atas digunakan untuk memotret sistem pendidikan madrasah dan sistem pendidikan

Beliau adalah salah seorang tokoh pendidikan yang menuangkan pemikirannya melalui kitabnya yang terkenal *Kitab Adab Al-Mu'allimin*, kitab ini merupakan kitab yang semata-mata memberi petunjuk praktis bagi orang-orang yang terlibat dalam proses pendidikan. Baca **Jauhar, Vol I. No. 1, Desember**, 2000, h. 137-148. Oleh karena itu menurut Ibnu Sahnun dalam kitab ini menghendaki bahwa pendidikan dan pengajaran dapat menumbuhkan kembangkan pribadi anak sesuai dengan nilai-nilai yang benar. Dengan kata lain pendidikan agama yang diberikan kepada anak akan berimplikasi kepada kekuatan akhlak, dan menumbuhkan rasa cinta kepada agama, serta mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dimasyarakat maupun dihadapan Tuhan. Lihat Ibrahim Muhammad Syafi'I, *Min A'lami al-Tarbiyah al-Islamiyyah (Ibnu Sahnun) Jilid I, Maktab al-Tarbiyyah al-Arabi lidduawali al-Khalilij*, h. 261-264.

469Bagi Paulo Freire, pendidikan haruslah berorientasi kepada pengenalan realitas diri manusia dan dirinya sendiri. Karenanya, konsep pendidikan gaya bank hanya akan melahirkan manusia *pembeo* dan tidak munculnya daya kritis pada Murid. Murid pun diperlakukan sebagai bejana kosong yang akan diisi, sebagai sarana tabungan atau penanaman modal ilmu pengetahuan yang akan dipetik hasilnya kelak. Baca Paulo Freire, *The Politic of Education, Culture, and Liberation*, New York, Begin and Garvey, 1985, p. xi

470Peserta didik adalah manusia yang harus menjadi kajian utama pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga menjadi kreatif dan bertanggung jawab akan tindakannya. Lihat Munir Mul Khan, *Nalar Spritual Pendidikan; Solusi Problem Filosofis Pendidikan Islam*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2002, h. 79-80.

471Baca Ahmad Tafsir, "Madrasah yang Termarginalisasi", dalam Jamaluddin (ed), *Mendiskusikan Kembali Eksistensi Madrasah*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2003, h. 29.

sekolah,⁴⁷² maka menurut Ahmad Tafsir sebagai berikut:⁴⁷³ madrasah banyak berhasil dalam akhlak dan *civic*, banyak gagal dalam misi pengetahuan sedang sekolah banyak gagal dalam misi akhlak dan *civic*, dan banyak berhasil dalam misi pengetahuan. Bila dipindahkan dalam matrik, kira-kira begini:

Lembaga	Akhlak	Civic	Pengetahuan
Madrasah :	+	+	-
Sekolah :	-	-	+

Matrik di atas tentu saja amat kasar, bahkan cenderung gegabah. Tetapi bila dijadikan narkoba, mabuk, tawuran pergaulan bebas sebagai indikator kegagalan pendidikan akhlak, mencoret-coret tembok dan membuang sampah sembarangan sebagai indikator kegagalan pendidikan *civic*, dan prestasi dalam UMPTN sebagai indikator keberhasilan pendidikan pengetahuan, kiranya isi matrik di atas sulit untuk di tolak begitu saja. Artinya institusi madrasah hanya melahirkan peserta didik yang cakap secara afektif dan psikomotorik tanpa memiliki aspek kognitif. Sedangkan sekolah hanya melahirkan peserta didik yang mempunyai ilmu pengetahuan tetapi tidak memiliki aspek afektif dan psikomotorik.⁴⁷⁴

472Sekarang sistem sekolah telah amat menyempitkan misi pendidikan, sudah menjadi jauh lebih sempit daripada misi yang dianjurkan orang-orang Yunani Lama. Sekarang misi pendidikan telah menyempit menjadi sekedar ahli dagang, ahli membedah, ahli computer. Keahlian itu harus diakui memang diperlukan bahkan keahlian itu boleh lebih menjurus lagi. Tetapi mestinya yang paling utama ialah mendidik murid itu menjadi manusia lebih dahulu. Sehingga tidak terjadi dehumansasi karena kondisi pendidikan yang tidak memberikan kebebasan peserta didik (manusia), hanya akan melahirkan manusia yang *jumud* dan terbelakang, bahkan nyaris sikap kritis dipasung dan akhirnya pendidikan menjadi pembodohan dan pembohongan generasi. Lihat Jamaluddin (ed), *Mendiskusikan Kembali Eksistensi Madrasah*, h. 29. Bandingkan dengan Francis Wahono, *Kapitalisme Pendidikan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001, h. 10. Baca juga Erost, *Sekolah: Mengajar atau Mendidik ?* Yogyakarta : Kanisius dan Universitas Sanata Dharma, 1998.

473Baca Ahmad Tafsir, "Madrasah yang Termarginalisasi", dalam Jamaluddin (ed), *Mendiskusikan Kembali Eksistensi Madrasah*, 30-31.

474 Dengan dipahaminya, letak dan kedudukan manusia dihadapan Tuhan, sebagai pendidikan pembebasan, pendidikan Islam tidak dapat melepaskan diri dari ketiga domain pendidikan yakni kognitif, afektif dan psikomotorik. Lihat Musli Usa (ed), *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1991, h. 39.

Sehubungan dengan itu, Mastuhu juga menilai bahwa perbedaan tajam antara anak madrasah dengan anak sekolah umum. Anak-anak dari jalur pendidikan madrasah tidak mampu bersaing secara penuh dengan anak-anak dari sekolah umum dalam memasuki PTU. Sebaliknya anak-anak dari jalur pendidikan umum tidak mampu bersaing secara penuh dengan anak-anak madrasah dalam proses studi di IAIN dan meraih lapangan kerja keagamaan.⁴⁷⁵

Untuk memperbandingkan perbedaan institusi madrasah dan sekolah dapat dilihat dari dua sudut yakni kerangka simbolik dan gagasan utama pendidikan yang dirumuskan oleh para pakar di atas, serta kurikulumnya. Namun demikian, institusi madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam, seharusnya bisa dijadikan dasar untuk mengembangkan madrasah sebagai pendidikan alternatif.⁴⁷⁶ Bilamana pemerintah ingin memperbaiki sekolah, sementara uangnya hanya sedikit, sebaiknya mendahulukan madrasah.⁴⁷⁷

E. Penutup

Kesimpulan besar yang bisa ditemukan dalam makalah ini adalah bahwa madrasah dan sekolah adalah dua institusi yang secara *setting* sosial berbedah. Kalau lembaga madrasah melahirkan peserta didik yang mempunyai kecerdasan afektif dan psikomotorik kurang mempunyai kecerdasan kognitif. Sedang institusi sekolah hanya mampu melahirkan peserta didik yang menguasai ilmu pengetahuan atau kognitif, tetapi kurang memiliki kecerdasan afektif dan psikomotorik.

475Perbedaan mendasar antara sistem pendidikan madrasah dengan sistem pendidikan umum itu jelas menunjukkan masih adanya dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Lihat Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, h. 57-58.

476Lihat unir Mulkhan, *Nalar Spritual Pendidikan; Solusi Problem Filosofis Pendidikan Islam*, h.191.

477Hal ini disebabkan: *Pertama*, jumlah madrasah tidak sebanyak sekolah; *Kedua*, kekurangannya tidak serumit sekolah. Kekurangan madrasah hanyalah bahasa Inggris dan MIPA. Proyeknya; penambahan jumlah dan mutu guru bahasa Inggris dan MIPA serta pengadaan peralatannya. Amat sederhana muda di hitung, muda dirancang, mudah dilaksanakan, muda dievaluasi. Lihat Ahmad Tafsir, "Madrasah yang Termarginalisasi", dalam Jamaluddin(ed), *Mendiskusikan Kembali Eksistensi Madrasah*, 30-31.

BAB 13

POSISI PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

A. Pendidikan Islam dalam sistem Pendidikan Nasional

Berdasarkan perjalanan sejarah pendidikan Islam pasca kemerdekaan sampai sekarang dapat digaris bawahi bahwa kalangan nasionalis Islam akhirnya secara yuridis berhasil mengukuhkan keberadaan pendidikan agama dan keagamaan sebagai subsistem pendidikan nasional.

Secara yuridis, posisi pendidikan agama Islam berada pada posisi yang sangat strategis, baik dalam UU SPN No. 2 Tahun 1989 maupun UU SPN No. 20 Tahun 2003. Pada UU SPN No 2 Tahun 1989 dinyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Sementara pada UU SPN No. 20 Tahun 2003 dinyatakan pada pasal 1 ayat 5 bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan perubahannya yang bersumber pada ajaran agama, keanekaragaman budaya Indonesia serta tanggap terhadap perubahan zaman. Dan pada pasal 4 UU SPN Tahun 2003, yaitu, “Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur, sehat, berilmu, kompeten terampil, kreatif mandiri, estetis, demokratis dan

memiliki rasa kemasyarakatan dan kebangsaan.

Pasal 1 ayat 5 dan pasal 4 UU SPN tahun 2003 tersebut memberikan posisi yang sangat strategis bagi pendidikan Islam jika dibandingkan dengan materi pendidikan lainnya. Kekuatan yuridis ini dan kebijakan yang dilakukan secara luhur pendidikan nasional telah cukup banyak memainkan perannya secara positif. Namun sejak awal sampai sekarang, penyelenggaraan pendidikan Islam diliputi kegamangan (sikap mendua antara ilmu umum dengan ilmu Islam) baik yang menyangkut substansi isi pendidikan maupun kelembagaan. Dengan menggunakan pendekatan substansi bukan pendekatan formal tekstual maka substansif bukan pendekatan formal tekstual maka substansi pendidikan nasional relevan dengan pendidikan Islam. Artinya selama Pancasila sebagai ideologi bangsa, kita pahami seperti pemahaman sekarang, di mana kelima sila dari Ketuhanan Yang Maha Esa (ketauhidan) sampai Keadilan sosial dijunjung tinggi sebagai pandangan hidup dan dasar pendidikan maka secara substantif prinsip-prinsip pendidikan nasional relevan dengan pendidikan Islam.

Hal ini dapat dilihat dari substansi yang terkandung dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 pasal 2:3: "Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pasal 3 "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Pasal di atas, dapat dipahami bahwa relevansi substansi pendidikan nasional dan pendidikan Islam terletak pada:

- *pertama*, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar pendidikan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam (Tauhid).
- *Kedua*, pandangan terhadap manusia sebagai makhluk yang berpotensi untuk menjadi manusia bermartabat.
- *Ketiga*, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi

(fitrah dan sumber daya manusia) menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berbudi pekerti luhur; dan berbagai kemampuan untuk memikul tanggung jawab sebagai *khalifah fil ardh*. Perbedaannya hanya terletak pada posisi konsep.

B. Penutup

Ditinjau dari tataran universal karena tidak dibatasi negara dan bangsa tetapi ditinjau dari posisi dalam konteks nasional konsep pendidikan Islam menjadi subsistem pendidikan nasional. Sebagai subsistem pendidikan Islam berfungsi sebagai penunjang pendidikan nasional, sebaliknya pendidikan sebagai suatu sistem mengakses kepentingan pendidikan Islam. Hal ini tercantum pada Undang-undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 dan khusus pendidikan agama dengan Undang-undang tersebut kedudukannya semakin kuat.

BAB 14

PENGAJAR YANG MEMBELAJARKAN

(Gaya Bank vs Hadap Masalah)

A. Pendahuluan

Potret pendidikan yang sejatinya mengembang misi memanusiakan manusia, atau peserta didik yang dapat mencetak generasi-generasi yang berkualitas baik secara keilmuan, maupun moral tampaknya belum mampu terwujud. Kini telah telah digantikan dengan berbagai persoalan, mulai dari maraknya tawuran antar pelajar ataupun antar mahasiswa, kekerasan di sekolah, profesionalisme guru, kasus mencontek massal dan sebagainya adalah bagian dari benang kusut dunia pendidikan yang menjadi perhatian bersama.

Multi persoalan di atas, menurut KH. Abdullah Syukri Zarkasyi karena pendidikan seharusnya tidak hanya menekankan pengajaran pada aspek kognitif, tetapi juga bagaimana membangun sifat mental serta watak anak didik.⁴⁷⁸ Atau aspek afektif dan psikomotorik menjadi titik sentral bagi guru dalam mendesain pembelajaran yang membelajarkan peserta didik. Hal ini diakui oleh Muchtar Buchori dalam bukunya *Praktek Pendidikan dalam Renungan*, yang mengatakan banyak guru yang hanya mengajar tetapi tidak mendidik sehingga tidak pernah berhasil dalam membelajarkan peserta didik⁴⁷⁹ bahkan ironisnya guru hanya pamer ilmu pengetahuan di depan peserta didik, sehingga menjadi guru yang ditakuti dan disegani,

⁴⁷⁸Lihat *Republika* 10 April 2012, h. 5

⁴⁷⁹Muchtar Buchori, *Ilmu Pendidikan dan Praktek Pendidikan*, Jakarta, Muhammadiyah Press, 1994, h.30

tidak untuk kritik di dalam kelas karena akan berakibat pada nilai, dalam konteks inilah peserta didik terbenam dalam kebudayaan bisu (*the culture of silence*), Oleh karena itu, teori pendidikan gaya bank yang dikumandangkan Paulo Freire menjadi kenyataan bahwa dunia pendidikan senantiasa memperlihatkan hubungan harmonis yang melibatkan tiga unsur yakni pengajar, anak didik, dan realitas dunia. Hubungan ketiga obyek tersebut disadari atau tidak sadari (*cognizable*), tidak terdapat pada pendidikan yang selama ini telah mapan. Karena itu, sistem pendidikan menurut Paulo Freire diandaikan sebuah bank (*banking concept of education*) di mana pelajar diberi pengetahuan agar ia kelak dapat mendatangkan hasil dengan lipat ganda. Jadi anak didik adalah obyek investasi dan sumber deposito potensial.⁴⁸⁰

Model pengajaran seperti inilah yang tidak membelajarkan peserta didik. Filosofi pendidikan Paulo Freire merupakan sumber inspirasi para fasilitator pembelajaran yang menggunakan idiom partisipasi, pemberdayaan, dan pembebasan.

Makalah ini membahas Model penganjar yang membelajarkan dengan menggunakan sumber yang otoritatif.

B. Pengajaran Model Gaya Bank sebagai Problem Pembelajaran

Dalam paradigma pembelajaran, Membelajarkan, adalah upaya pendidik untuk membantu 'peserta didik' melakukan kegiatan belajar. Membelajarkan merupakan kegiatan sistematis dan dilakukan secara sengaja oleh pendidik untuk membantu peserta didik agar melakukan kegiatan belajar. Oleh karena itu, konteks mengajar menjadi kata kunci yang sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah proses pendidikan, hal disebabkan adanya intraksi komunikasi antara pendidik dan anak didik. Namun demikian, fakta empiriknya banyak intraksi komunikasi yang dilakukan pendidik dianggap gagal membelajarkan anak didiknya. Fakta inilah yang kemudian mendapat kritikan para pemikir pendidikan seperti Muhammad Abduh (1849-1905) yang menilai bahwa metode pengajaran yang digunakan para guru adalah salah. Ia antara lain menilai bahwa metode pengajaran yang digunakan para guru adalah salah. Guru lebih menekankan

480Paulo Freire, *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan*, h. x.

pada metode hafalan. Abduh secara tegas mengeritik pengajaran di al-azhar Mesir.⁴⁸¹ Sejalan dengan hal tersebut, Abu Hasan al-Amiri (w.381H/992M) juga menekankan untuk tidak mengadakan dikotomi pembelajaran ilmu-ilmu hasil pemikiran dan ilmu-ilmu keagamaan.⁴⁸²

Kritikan di atas, merupakan problem pembelajaran yang tidak pernah membelajarkan peserta didik. Atau dengan kata lain model pembelajaran pasif, yakni guru menerangkan, murid mendengar, guru mendiktekan, murid mencatat, guru bertanya, murid menjawab dan seterusnya.⁴⁸³ Bahkan peserta didik lebih banyak diminta menghafal teks baku dibandingkan mengembangkan pemikiran kreatif. Sehingga dalam jangka panjang, akan mengakibatkan disiplin ilmu rasional menjadi tidak berkembang di dunia Islam, yang akhirnya mempengaruhi pemikiran Islam secara keseluruhan pun terhambat karena tidak ada tantangan serta dorongan.⁴⁸⁴ Hal ini diakui Mohctar Buchori bahwa model pengajaran seperti ini guru terjebak hanya pada perbuatan asyik membeberkan pengetahuan yang dimilikinya dan menikmati kekaguman yang diperlihatkan peserta didiknya atau pamer ilmu pengetahuan.⁴⁸⁵

Dampak dari paradigma pengajaran seperti ini adalah ketakutan dan kebingungan peserta didik pada sang guru, bahkan menurut

481Diantara kritikan yang dimajukan ketika itu ialah: kurikulum al-Azhar banyak menekankan kepada perberdaan pendapat dari pada mempelajari nilai argumentasinya, perbebedaan dari pada arti dan tujuan gramatika bahasa, hukum-hukum fiqh yang timbul dalam saat tertentu dari pada metode penilaian hukum-hukum tersebut untuk dijadikan pedoman. Oleh karena itu Abduh mencari ilmu-ilmu yang disebut oleh Syaikh Darwisy di luar al Azhar. Ilmu-ilmu itu dijumpai pada seorang ulama yang bernama Syaik Hasan Thawil yang mengetahui filsafat, logika, ilmu ukur, soal-soal dunia dan politik. Akan tetapi, Abduh kurang puas dengan pelajaran yang diberikannya. Kepuasan dalam mempelajari filsafat, matematika, teologi dan sebagainya yang ia peroleh dari Jamal al-Din al-Afgani yang datang ke Mesir pada tahun 1870. Suwito, *Pendidikan Yang Membebaskan*, h. 2.

482Setidaknya ada lima alasan yang dimajukan oleh al-Amiri tentang ini: (1) Wahyu tidak bertentangan dengan pendapat akal, (2) Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk mempelajari penciptaan alam, (3) bahwa mempelajari penciptaan alam akan mendapatkan hukum kausalitas, 4) menambah keyakinan, (5) bermanfaat secara nyata bagi kehidupan. Baca Ahamad Abd al-Hamid Ghurab, *Abu Hasan al-Amiri wa Ara'uh al-Tarbawiyah*, dalam, *Min A'lami al-Tarbiyah al-Tarbiyyah al-Arabiyyah al-Islamiyyah*, Jilid II, h. 96-97.

483Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis*, Prenada, Jakarta, 2004, h.89

484Suwito, *Pendidikan Yang Membebaskan*, h. 23.

485Muctar Buchori, *Ilmu Pendidikan dan Praktek Pendidikan*, h. 31

Abuddin Nata guru besar sejarah dan filsafat pendidikan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menilai bahwa model pengajaran otoriter menempatkan guru menjadi satu-satunya *agent of information* atau *agent of knowledge*. Hal ini pada gilirannya membawa konsep pembelajaran yang berpusat pada guru (*teacher centris*).⁴⁸⁶ Guru memberikan sejumlah pengetahuan yang harus dihafal dan dikuasai dengan baik oleh peserta didik, tanpa ada peluang bagi peserta didik untuk mempertanyakan urgensi dan relevansi yang ajarkan oleh guru. Model pengajaran ini disebut pendidikan ala komando yang dilakukan secara hierarkis, dari atas ke bawah dari guru kepada siswa,⁴⁸⁷ guru adalah komandan dan murid adalah bawahan. Guru akan tersinggung apabila murid terlalu banyak bertanya atau mempertanyakan perintah dan intruksi yang diberikan guru kepadanya. Metode yang dipakai dalam pola pendidikan semacam ini pastilah metode ceramah. Tugas murid adalah *menelan tanpa mengunyah*.⁴⁸⁸ Model Pengajaran inilah yang diistilahkan oleh Paul Suparno dalam bukunya *Guru Demokratis di Era Reformasi*, yakni pengajaran feodalistik otoriter dimana guru terjebak dalam teori filsafat pendidikan klasik yang menempatkan peserta didik dianggap *tabula rasa*, kertas putih kosong yang harus diisi guru dengan air pengetahuan.⁴⁸⁹ Lebih para lagi pola feodalisme yang cenderung kepada atasan dan bawahan juga seringkali melandasi pola pengajaran kita. Guru berada di kelas dengan jiwa "*Father knows best*". Guru tahu segalanya dan murid tidak tahu apa. Guru tidak bisa salah dan sebaliknya murid selalu salah. Murid tidak didorong untuk mengembangkan kreativitasnya dengan mengoptimalkan daya imajinasinya dan inovasinya melainkan cukup menghafalkan. Dengan demikian tidak akan pernah menjadi manusia mandiri, tetapi pengekor.⁴⁹⁰

Oleh karena itu, diakui atau tidak model di atas, adalah konsep

486Abuddin Nata, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 149.

487Lihat Muska Mosston, *Teaching from Command to Discovery*, Wadsworth Publishing, Company, California, 1972, h. 35

488Suwito, *Pendidikan Yang Membebaskan*, h. 14

489Paul Suparno, *Guru Demokrasi di Era Reformasi*, Grasindo, Jakarta, 2004, h. 29

490Suwito, *Pendidikan Yang Membebaskan*, h. 14

pendidikan ala gaya bank yang telah dipraktekkan oleh para pendidik dalam proses belajar mengajar, bahkan lebih dari itu, pendidikan gaya bank telah mengakibatkan terjadinya kebekuan berpikir serta tidak munculnya kesadaran kritis pada diri peserta didik. Hal ini dikarenakan pendekatan yang biasa dipakai dalam konsep pendidikan ini adalah pendekatan bercerita (*narrative*) yang mengarahkan peserta didik untuk menghafal secara mekanis apa isi pelajaran yang diceritakan. Dengan demikian, para peserta didik mempunyai tugas, menghafal apa yang disampaikan oleh guru, dengan kata lain, apa yang disampaikan guru itu adalah yang diceritakan tanpa menyadari dan memahami arti dan makna yang sesungguhnya. Lebih buruk lagi, diubahnya menjadi bejana-bejana kosong untuk diisi oleh guru. Semakin penuh ia mengisi wadah-wadah itu, semakin baik pula seorang guru.⁴⁹¹ Oleh sebab itu, pendidikan hanya menjadi sebuah kegiatan menabung, di mana para murid dan guru adalah celengannya dan guru adalah penabungnya, sehingga implikasinya terjadinya dis komunikasi antara guru dan murid, guru menyampaikan pernyataan-pernyataan dan diterima, dihafal dan diulangi dengan patut oleh para murid. Inilah konsep pendidikan gaya bank.

Dalam konsep pendidikan gaya bank, ruang gerak yang disediakan bagi kegiatan murid hanya terbatas pada menerima, mencatat dan menyimpang. Karenanya, pendidikan akhirnya bersifat negatif di mana guru memberi informasi yang harus ditelan oleh murid, yang wajib diingat dan dihapalkan. Secara sederhana Paulo Freire menyusun daftar antagonisme pendidikan gaya bank itu. Menurutnya,⁴⁹² sebagai berikut:

1. Guru mengajar, murid belajar
2. Guru tahu segalanya, murid tidak tahu apa-apa
3. Guru berpikir, murid dipikirkan
4. Guru bicara, murid mendengarkan
5. Guru mengatur, murid diatur
6. Guru memilih dan memaksakan pilihannya, murid menuruti
7. Guru bertindak, murid membayangkan bagaimana bertindak sesuai dengan tindakan gurunya

491 Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*, Jakarta, LP3ES, 2000, Cet III, h. 50.

492 Paulo Freire, *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan*, h. xi.

8. Guru memilih apa yang akan diajarkan, murid menyesuaikan diri
9. Guru mengecaukan wewenang ilmu pengetahuan dengan wewenang profesionalismenya, dan mempertentangkannya dengan kebebasan murid-murid
10. Guru adalah subyek proses belajar, murid obyeknya.

Dari gambaran di atas, dapat terlihat bahwa gurulah yang menjadi pusat segalanya, maka merupakan hal lumrah saja jika murid-murid kemudian mengidentifikasi diri seperti gurunya sebagai prototip manusia ideal yang harus ditiru dan digugu, harus diteladani dalam semua hal. Karena itu, dalam konsep pendidikan gaya bank, pengetahuan merupakan sebuah anugerah yang dihibahkan oleh mereka yang dianggap tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Guru menampilkan diri dihadapan murid-muridnya sebagai orang yang berada pada pihak yang berlawanan, dengan mengaggap mereka mutlak bodoh, maka ia mengukuhkan keberadaan dirinya sendiri. Menurut Paulo Freire dengan mengutip dialektika Hegel mengatakan bahwa dalam konsep pendidikan gaya bank para murid bagaikan budak yang terasing, menerima kebodohan mereka sebagai pengesahan keberadaan sang guru,⁴⁹³ sehingga tidaklah mengherankan jika konsep pendidikan gaya bank memandang peserta didik sebagai makhluk yang dapat disamakan dengan sebuah benda dan gampang diatur. Bahkan sangat efektif untuk membekukan kesadaran kritis dan mereduksi keterlibatan dalam mengubah dunia.

Dengan demikian pendidikan gaya bank juga memiliki kemampuan untuk mengurangi atau menghapuskan daya kreasi pada murid serta menumbuhkan sikap muda percaya. Hal ini menguntungkan kaum penindas. Kaum penindas memanfaatkan humanitarianisme mereka untuk melindungi situasi menguntungkan bagi diri mereka sendiri. Oleh karena itu secara naluriah mereka akan selalu menentang setiap usaha percobaan dalam bidang pendidikan yang akan merangsang kemampuan kritis dan tidak puas dengan dengan pandangan terhadap dunia yang berat sebelah, akan tetapi selalu mencari ikatan yang menghubungkan satu hal-hal lainnya

493 Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*, h. 51.

atau satu masalah dengan masalah lain.⁴⁹⁴

Dari pemahaman konsep pendidikan gaya bank, nampak jelas bahwa peranan pendidik adalah mengatur cara dunia masuk ke dalam diri para peserta didik. Tugasnya adalah mengatur suatu proses yang berlangsung secara spontan, mengisi para murid dengan menabungkan informasi yang ia anggap sebagai pengetahuan yang sebenarnya. Yang termasuk pendidikan gaya bank adalah anggapan akan adanya dikotomi antara manusia dengan dunia, karena itu manusia adalah penontong bukan pencipta.⁴⁹⁵ Atau dengan kata lain, peserta didik diajar untuk tidak melihat ada hubungan apa yang diajarkan dengan apa yang secara nyata dilakukannya. Dalam pandangan ini, manusia lebih merupakan pemilik sebuah kesadaran; suatu jiwa kosong yang secara pasif terbuka untuk menerima apa saja yang disodorkan oleh realitas dunia luar. Hal ini diakui oleh Roger, bahwa konsep pendidikan bank adalah usaha untuk menjadikan manusia sebagai benda yang terkendali (*automaton*), bahkan penolakan terhadap fitrah ontologis mereka untuk menjadi manusia seutuhnya.⁴⁹⁶

Pandangan demikian membawa guru dalam anggapan bahwa murid adalah obyek yang tak berkesadaran, senangtiasa pasif dan menerima apa saja yang diberikan oleh guru. Untuk itu, pendidikan yang bergaya bank ini tidak menyadari bahwa tidak ada ketenraman sejati dalam peranannya yang berlebihan dan berusaha hidup bersama orang lain dalam solidaritas. Orang tidak dapat mencari menangnya sendiri, atau bahkan bersama dengan murid-muridnya. Karena itu, solidaritas menuntut adanya komunikasi sejati, dan konsep gaya bank cenderung mengarahkan pendidik senangtiasa takut dan mejauhi komunikasi.⁴⁹⁷ Sementara itu, teori dan praktek pendidikan yang bergaya bank mengabdikan kepada tujuan-tujuan tersebut dengan cara yang sungguh efisien. Pelajaran-pelajaran yang verbalistik, bahan bacaan yang telah ditentukan, metode-metode untuk menilai ilmu pengetahuan, jarak antara murid dan guru, ukuran-ukuran

494Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*, h. 53.

495Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*, h. 55.

496Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*, h. 54

497Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*, h. 57

bagi kenaikan kelas, segala sesuatu dalam pendekatan siap pakai, hal ini melumpuhkan pikiran. Oleh karena itu, pendidikan gaya bank tidak bisa mengharapkan teologi pembebasan kepada peserta didik. Sebaliknya, pendidikan pembebasan adalah musuh nyata yang akan merongrong dunia pendidikan, selama ini telah mapan dan membuat manusia tak berdaya atau dengan memakai ungkapan Suwito menjadi telmi.

Dengan demikian, konsep pengajaran model ala gaya bank sebagai problematika pembelajaran yang dilakukan pengajar sesungguhnya tidak pernah membelajarkan peserta didik. Pengajar diharapkan mampu mendesain pembelajaran yang dapat membelajarkan peserta didik, atau memimjam istilah Andrias Harefa menjadi manusia pembelajar, jika tidak kritik Paulo Freire terhadap dunia pendidikan yang disebut 'pendidikan gaya bank', masih sangat relevan sampai kini. Pendidikan 'gaya bank' memperlakukan masyarakat atau siswa sekolah sebagai obyek belajar (murid yang harus diajar atau dicekoki ilmu) dengan sifat ANTI DIALOGIS (searah) sehingga terjadilah proses dehumanisasi (penindasan). Hasil dari pendidikan semacam ini adalah 'burung beo' (murid yang pintar karena menghafal atau dimuati informasi sebanyak-banyaknya) tetapi canggung menghadapi realitas sosial atau kehidupan yang nyata. Jika tidak benahi, maka sangat wajar Seorang Ivan Illich dalam bukunya *Deschooling Society* (1971) menghedaki sekolah-sekolah yang telah muncul dan berkembang dinegara-negara ketiga dibubarkan saja. Hal ini disebabkan karena sekolah-sekolah tidak mampu lagi membawa perubahan pada masyarakat, atau membelajarkan peserta didiknya,⁴⁹⁸ dan sekolah diharapkan sebagai sarana memanusiakan manusia, justru sebaliknya pendidikan tidak lagi membebaskan peserta didiknya.⁴⁹⁹

Oleh sebab itu, Hasil dari proses pembelajaran tersebut menurut Abduh hanya akan menghasilkan lulusan dan masyarakat yang *jumud*, membeku, statis, tidak ada perubahan. Oleh karena

498Lihat Ainurrofiq Dawam, *Emoh Sekolah*, Yogyakarta, Inspeal Ahimsakarya Press, 2003, h.. 46

499 Lihat Samsul Bahri, "Urgensi Pendidikan Akhlak bagi Peserta Didik" *Jurnal Dinamika*, Edisi: II/September, 2009, h. 96.

itu, pengajarannya lebih merupakan indoktrinasi tunggal tentang kebenaran yang tak mungkin dibantah. Ruang kelas bagaikan sebuah “penjara” tanpa peluang kreatif. Hal ini diakui oleh Mastuhu⁵⁰⁰ bahwa para peserta didik tidak perlu menanyakan keabsahan dan kebenarannya serta tidak perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya elaborasi, provokatif, dan antisipatif dianggap tidak menghargai guru. Di ruang kelas, peserta didik hampir tak memiliki ruang ekspresi, sosok anak hanya akan berharga di mata guru jika sesuai dengan pendapat guru, pengelola pendidikan, elit agama dan pemerintah selalu menganggap makhluk yang tidak pernah salah atau istilah lain moralitas. Para siswa tidak pernah mengerti, mengalami, dan menyadari kebaikan dan kebenaran di saat paket-paket pembelajaran sudah tersedia. Tuhan pun tak pernah dikenal dan disadari, kecuali sifat-sifat hebat yang harus dihafalkan tanpa bertanya.

Lembaga sekolah disadari atau tidak secara sengaja menjerat generasi ke dalam lorong gelap peradaban. Di ujung lorong itu mungkin tersisa harapan, namun banyak yang tak acuh, dan menerima nasibnya sebagai takdir dari sang Ilahi. Hasil dari proses pembelajaran seperti inilah yang dimaksud Fazlur Rahman dengan *memorizing*, yakni proses pembelajaran yang memakai sistem hafalan daripada sistem pemahaman. Atau dengan kata lain menjadikan belajar berifat studi teks daripada pemahaman.⁵⁰¹ Sinyelemen ini diperkuat oleh Tibi bahwa dunia pendidikan khusus universitas Arab dan Afrika dengan berbagai bidang studinya, berdasarkan semata-mata pada kapasitas belajar model hafalan (*rote learning*) dalam rangka mencapai lulusan.⁵⁰²

Model guru dalam konsep ini, guru pusat segalanya, maka merupakan hal yang lumrah saja jika murid-murid kemudian mengidentifikasi dirinya seperti guru yang harus diteladani dalam semua hal tanpa harus dikritisi. Atau dengan memakai tipologi Indra

500Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta, Logos Wacana, 1999, h. 10.

501Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago, The Universty of Chicago Press, 1982, h. 189.

502Bassam Tibi, *Iskam and the Cultural Accommodation of Social Change*, San Fransisco, Westview Press, 1985, h. 110.

Djati Sidi,⁵⁰³ mengatakan guru adalah birokrat-birokrat kecil.⁵⁰⁴ Inilah yang disebut Paulo Freire pendidikan yang menciptakan “*nekrofil*” dan bukan melahirkan “*biofil*”.⁵⁰⁵ Implikasinya lahir generasi-generasi dufikasi dari guru, sehingga pada gilirangnya akan muncul manusia-manusia penindas. Jika diantara mereka ada yang menjadi pendidik maka tragedi penindasan segera dimulai dalam dunia pendidikan.⁵⁰⁶ Dengan demikian, konsep pendidikan gaya bank merupakan alat dari sebuah sistem penindasan⁵⁰⁷ bukan menjadi kekuatan pengubah (*subversive force*) kearah perubahan dan pembaharuan.

Dari pemahaman konsep pendidikan gaya bank peranan pendidik sangat ototriter, sehingga akan menghilangkan daya kritis dan kreativitas anak didik, serta menumbuhkan sikap pasif dan muda percaya yang tentu saja akan menguntungkan kaum penindas. Padahal sesungguhnya, kepentingan kaum penindas adalah “mengubah kesadaran kaum tertindas, bukan situasi yang menindas mereka”. Sejalan dengan itu pula, dengan meminjam istilah Jean Paul Sarte sebagai pendidikan yang “menguyahkan” (*disgestive*) atau “memberi makan” (*Nutritive*), di mana pengetahuan “disuapkan” oleh guru kepada murid untuk “mengeyangkan mereka”.⁵⁰⁸

Konsep pendidikan di atas, telah menginkari dan menafikan keberadaan anak didik sebagai seorang manusia yang memiliki potensi untuk berfikir. Bahkan konsep pendidikan tersebut sudah tidak netral lagi, melainkan sebagai sarana untuk “mereproduksi”

503Indra Djati Sidi, adalah seorang praktisi pendidikan sekarang menjabat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Depdiknas RI (sejak 1998).

504Untuk lebih jelasnya baca Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar, Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, Jakarta, Paramadina dan Logos Wacana Ilmu, 2001.

505Istilah ini berasal dari ahli psikoanalisa kontemporer Eric Fromm. “Nekrofil” adalah rasa kecintaan pada segala yang tidak memiliki jiwa kehidupan. Artinya bahwa ia tidak memanusaiakan manusia lain dengan kata lain cinta yang menyimpang, sadisme, dimana mencintai ketidak mannisawian. “Biofil” sebaliknya adalah kecintaan pada segala yang memiliki jiwa kehidupan, yang maknawi. Dalam artian mencintai diri sendiri dan orang lain, dan karenanya mencintai kehidupan. Lihat Eric From, *The Heart of Man*, Routledge dan keegan, NY, 1966.

506Baca Paulo Freiere, *The Politic of Education, Culture, and Leberation*, New York, Begin and Garvey, 1985, p. xii.

507Baca Paulo Freiere, *Pendidikan Kaum Tertindas*, Terhemahan Tim Redaksi, Jakarta, LP3ES, 1972, h. 56.

508Baca Paulo Freiere, *Pendidikan Kaum Tertindas*, h. 56.

sistem dan struktur sosial yang tidak adil. Karena itu, Pandangan Hinggins dan Roger sebagaimana dikutip Hasan Langgulung bahwa pendidikan harus menanamkan kembali pendidikan rohani (*spritual*) dan keimanan (*faith*) serta menempatkan pendidikan *al-insaniah* sebagai upaya membangkitkan kembali nilai-nilai fitra peserta didik yang potensial pada posisi yang ideal.⁵⁰⁹ Sebagai bukti bahwa pendidikan harus ditempatkan pada posisi humanisasi bukan dehumanisasi seperti konsep pendidikan gaya bank. Hal ini pun, diakui oleh Munir Muhkam bahwa gagasan utama pendidikan adalah bagaimana melahirkan manusia yang mempunyai daya kritis, kreatif dan keluhuran budi.⁵¹⁰ Bahkan lebih lanjut mengatakan kebijakan pendidikan yang mengabaikan arti keunikan pribadi anak didik cenderung berakhir dengan kegagalan yang menimbulkan tragedi kemanusiaan. Karena itu, teori pendidikan dan pembelajaran hanya akan bermakna jika mampu memahami kepribadian sikap dan perasaan anak didik.⁵¹¹ Oleh karenanya, kegagalan memahami kepribadian anak didik, terdapat di banyak sekolah. Guru banyak tertarik pada usaha peningkatan kemampuan keterampilan dan memberi bimbingan yang mempermudah pertumbuhan emosional anak-anak.⁵¹² Namun jarang berhasil memahami perasaan dan pertumbuhan kepribadian peserta didik. Hal ini dipertegas kembali oleh Paulo Freire bahwa pola pendidikan seperti itu paling jauh hanya akan mampu merubah “penafsiran” seseorang terhadap situasi yang dihadapinya, namun tidak akan mampu merubah “realitas” dirinya sendiri. Manusia menjadi penonton dan peniru, bukan pencipta, sehingga muda dipahami mengapa suatu revolusi yang paling revolusioner sekalipun pada awal mulanya, tetapi digerakkan oleh orang-orang yang dihasilkan oleh sistem pendidikan mapan seperti itu, maka pada akhirnya hanyalah menggantikan simbol-simbol

509Hinggins dan Roger, dalam Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan*, Jakarta, Pustaka al-Husna 1989, h. 200.

510Munir Muhkam, Humanisasi pendidikan Islam, *Tashwirul Afkar Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan*, Edisi No. 11, 2001, h. 17-18.

511Munir Muhkam, Humanisasi pendidikan Islam, h. 25.

512M. Witmee and H. Conttingham, “The Teacher’s Role and Guidance Functions as Reported by elementary Teacher,” *Elementary School Guidance and Counseling*, 1970, h. 12-22.

lama dengan simbol baru yang sebenarnya setali tiga uang yang sesungguhnya sama saja, terkadang jauh lebih buruk.⁵¹³

Dengan demikian, pengajar harus mampu mencari paradigma yang membelajarkan peserta didik. Atau mamakai istilah Zamroni pendidikan untuk demokratisasi.⁵¹⁴

C. Pengajaran Hadap Masalah Paradigma yang Membelajarkan

Membelajarkan sebagai kebalikan mengajar Guru bertugas untuk mengajar (teaching), sedang murid bertugas menerima pelajaran (diajar). Metode yang digunakan disebut metode mengajar (pedagogi) yang sifatnya adalah komunikasi searah (dari guru ke murid) sehingga mengembangkan hubungan hirarkis. Begitu juga dengan penyuluh, meskipun bekerja dengan cara yang lebih partisipatif (penggunaan diskusi dan beragam media), namun intinya adalah sekedar transfer informasi 'dari luar' yang sering tidak relevan dengan realita masyarakat. Membelajarkan adalah mendorong peserta untuk belajar dan saling belajar, bukan mengajari. Fasilitator menggunakan metode pembelajaran orang dewasa (andragogi) yang sifatnya adalah komunikasi multiarah (dari peserta belajar ke peserta belajar, dari fasilitator ke peserta belajar, dan sebaliknya) sehingga mengembangkan proses dialog dan hubungan kesetaraan. Tema-tema belajarnya adalah keseharian, sehingga belajar menjadi relevan dengan kehidupan dan realitas peserta belajar.

Menurut Dede Rosyada dengan mengutip pendapat Hunt dan Moore dalam membelajarkan siswanya perlu memakai konsep *reflective teaching* bahwa guru harus merancang strategi sebelum dan dalam proses pembelajaran. Rancangan strategi sebelum proses pembelajaran harus memperhatikan pengalaman-pengalaman intraksi guru dengan siswa dalam pelajaran yang sama, kelas yang sama dan jam yang sama. Sedangkan rancangan dalam proses pembelajaran harus memperhatikan kondisi actual dan kenyataan

513Paulo Friere sangat mengecam kaum Marxis, disebabkan karena golongan yang paling getol mencap diri mereka sebagai kaum paling revolusioner, atau terhadap siapa saja yang mencap dirinya dan mengajukan revolusi semata-mata sebagai alat perebutan kekuasaan hegemoni.

514Zamroni, *Pendidikan Untuk Demokratisasi*, Bigraf, Yogyakarta, 2001

riil dari siswa saat proses pembelajaran itu pembelajaran berjalan.⁵¹⁵ Strategi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan siswa yang sangat dipengaruhi oleh tingkat penguasaan bahan ajar, emosi, citra diri dan harga diri yang selalu ingin dijunjung tinggi.

Model pembelajaran tersebut merupakan salah satu model dari pembelajaran yang bisa mendinamisasikan siswa dalam proses belajar mengajar, atau dengan kata lain pembelajaran hadap masalah yang sering disebut Paulo Freire kegiatan pembelajaran sebagai proses AKSI REFLEKSI-AKSI atau disebut juga sebagai proses DIALEKTIKA. Refleksi artinya merenungi, menganalisis, atau memaknai suatu peristiwa atau keadaan atau pengalaman, sehingga timbul kesadaran. Kesadaran itu, mendorong suatu tindakan atau aksi. Proses dialektika terjadi karenaperenungan itu menjadi pelajaran dan mendasari aksi berikutnya terutama untuk mengatasi dan mencari jalan keluar dari masalah yang terjadi. Karena itulah, konsep pembelajaran Paulo Freire juga disebut sebagai pendidikan HADAP MASALAH (problem posing). Kita belajar mengenai realitas kehidupan untuk bisa membuatnya lebih baik, itulah tujuan dari kita belajar. Proses pembelajaran aksi-refleksi-aksi terjadi berulang-ulang (bukan hanya satu kali) sehingga sebenarnya membentuk sebuah spiral pembelajaran. Setiap kali sebuah proses dialektika terjadi, akan dilanjutkan dengan dialektika berikutnya, dan begitu seterusnya. Artinya, sebuah proses pembelajaran tidak pernah menjadi rutinitas melainkan sebuah proses perkembangan dan transformasi. Belajar merupakan sesuatu yang terjadi sepanjang hidup.

Pada dasarnya pengajaran hadap masalah adalah suatu usaha untuk menjawab diskomunikasi antara guru dengan murid menuju suasana dialogis. Oleh karena itu, pelaksanaan pengajaran hadap masalah adalah adanya pemecahan masalah dalam proses belajar antara guru dengan murid.⁵¹⁶ Mendinamisasikan peserta didik dalam proses pembelajaran dengan hubungan dialogis merupakan inti dari pengajaran hadap-masalah, sehingga guru tidak lagi menjadi orang yang mengajar, akan tetapi melakukan pembelajaran melalui dialog, dalam hal ini anak didik menjadi subjek yang belajar, yang bertindak

515Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis*, h. 97.

516Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*, h. 61

dan berfikir dan pada saat bersamaan berbicara menyatakan hasil tindakan dan buah fikiran. Jadi keduanya (guru dan murid)⁵¹⁷ saling belajar satu sama lain, saling memanusiaikan. Dengan demikian, dalam proses ini guru mengajukan bahan untuk dipertimbangkan oleh murid dan pertimbangan sang guru sendiri kemudian diuji kembali setelah dipertemukan dengan pertimbangan murid-murid dan sebaliknya.

Pengajaran hadap masalah adalah bagaimana usaha untuk membangun kreativitas peserta didik, hubungan dialogis serta mendorong sikap revolusioner untuk melangkah ke depan membangun masa depan peserta didik. Dengan kata lain, pengajaran hadap masalah sebenarnya mengisyaratkan bahwa dunia pendidikan seharusnya mampu membebaskan seluruh komponen pendidikan baik peserta didik, guru, kurikulum maupun lembaga pendidikannya. Hanya saja, pengajaran hadap masalah lebih memfokuskan bagaimana seorang guru membangun demokratisasi di dalam kelas, harus mampu menciptakan suasana dialogis serta guru harus mampu menjadi seniman⁵¹⁸ Adapun implementasi oprasional pengajaran hadap masalah⁵¹⁹ lebih mengarah pada sistem pembelajaran, yaitu:

Pertama, dengan mengubah paradigma *teaching* (mengajar) menjadi *learning* (belajar). Di mana proses pendidikan yang dianut selama ini diubah dan menjadikan suasananya menjadi proses belajar bersama antara guru dan anak didik. Bukan hanya anak didik yang belajar namun posisi guru juga masih dalam proses belajar. Jadi anak didik tidak hanya didoktrin dengan materi-materi pelajaran tetapi diberikan kebebasan untuk mengembangkan kreativitas dan potensi yang ia miliki.

Kedua, pendidikan harus bersifat *learning to do* (belajar berbuat/hidup). Aspek yang diinginkan dicapai dengan proses ini

517Paulo Frire, menggunakan suatu istilah yang unik dan jelimet, yakni guru yang murid (*teacher pupil*) dan murid yang guru (*pupil teacher*), yang pada dasarnya sekedar menegaskan baik guru maupun murid memiliki potensi pengetahuan, penghayatan, dan pengalaman sendiri-sendiri terhadap obyek realitas yang mereka pelajari, sehingga bisa saja pada suatu saat murid menyajikan pengetahuan penghayatan, dan pengalaman tersebut sebagai *insight* bagi sang guru, seperti yang secara klasik menjadi tugas sang guru selama ini.

518Paulo Freire, *Menjadi Guru Yang Merdeka*, Yogyakarta, LKiS, 2001, h. 36-74

519 Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar*, h. 24-28.

adalah siswa bisa mandiri dengan belajar mengatasi problem yang ia hadapi dalam kehidupan sehari-harinya sebab pendidikan juga diarahkan pada cara mengatasi sendiri masalah yang ia hadapi. *Ketiga, learning to live together* (belajar hidup bersama) dan *terakhir, learning to be*, pendidikan merupakan tempat sarana belajar menjadi diri sendiri yang berkepribadian. Jadi intinya, paradigma pendidikan yang diinginkan adalah *learning how to learn* (belajar bagaimana belajar). Pendidikan tidak hanya berorientasi pada nilai akademik semata yang bersifat pemenuhan aspek kognitif saja tetapi juga berorientasi pada aspek afektif serta psikomotorik. Oleh karena itu, dalam era globalisasi ini pendidikan mampu melahirkan lulusan yang berorientasi masa depan, bersikap progresif, mampu memilah dan memilih secara bijak dan membuat perencanaan dengan baik.

Pengajaran hadap masalah seharusnya mampu menghasilkan anak didik yang memiliki keseimbangan antara penggunaan otak kiri dan otak kanan,⁵²⁰ manusia yang mempunyai kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Dengan kata lain, Pendidikan juga memberikan keseimbangan antara pendidikan jasmani dan rohani, keseimbangan antara pengetahuan alam dan pengetahuan sosial dan budaya serta keseimbangan antara pengetahuan masa kini dan pengetahuan masa lampau.

Dengan demikian dapat dirinci bahwa pengajaran hadap masalah harus mampu melahirkan peserta didik yang mempunyai ciri-ciri; 1) Terbuka dan bersedia menerima hal-hal baru hasil inovasi dan perubahan, (2) berorientasi demokratis dan mampu memiliki pendapat yang tidak selalu sama dengan pendapat orang lain, (3) berpijak pada kenyataan, menghargai waktu, konsisten dan sistematis dalam menyelesaikan masalah, (4) selalu terlibat dalam perencanaan dan pengorganisasian, (5) memiliki keyakinan bahwa segalanya dapat diperhitungkan, (6) menyadari dan menghargai pendapat orang lain, (7) rasional dan percaya pada kemampuan Iptek, (8) menjunjung

520 Dalam psikologi kontemporer dikatakan bahwa otak kiri cenderung bekerja secara linear, matematis, kuantitatif, repetitif, dan parsial. Sedangkan otak kanan cenderung bekerja secara inovatif, kontemplatif, sintetik, holistik dan komprehensif. Komaruddin Hidayah, et.al., *Agama di Tengah Kemelut*, Jakarta, Mediacita, 2001, cet II, h. 93.

tinggi keadilan berdasarkan prestasi, kontribusi, dan kebutuhan, (9) berorientasi pada produktivitas, efektivitas, dan efisien.⁵²¹ Peserta didik yang memiliki ciri-ciri seperti itulah yang harus dihasilkan oleh dunia pendidikan yaitu manusia yang penuh kepercayaan diri (*Self confident*) serta mampu melakukan pilihan secara arif serta bersaing dalam era globalisasi yang kompetitif.⁵²²

Dengan demikian, model pengajaran hadap masalah merupakan model pengajaran yang harus dikembangkan oleh guru baik pada tingkat dasar maupun pada tingkat perguruan tinggi. Hal ini disebabkan model pengajaran hadap masalah adalah model pengajaran yang mampu mendinamisasikan dan membelajarkan peserta didik dalam proses belajar mengajar, sehingga tujuan pendidikan memanusiakan manusia mampu tercapai dan pendidikan sebagai praktek pembebasan. Sebaliknya model pengajaran gaya bank yang mematikan kreativitas, melumpuhkan pikiran, dan tidak membelajarkan peserta didik, saatnya untuk ditinggalkan, karena model seperti hanya akan melahirkan peserta didik jumud alias pembeo.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, tulisan membuktikan bahwa pengajar yang membelajarkan adalah pengajar yang menggunakan model pengajaran hadap masalah, karena model ini mampu membangun kreativitas peserta dan demokratisasi dalam pembelajaran. Sebaliknya model pengajaran ala gaya bank justru mengebiri potensi kreativitas peserta didik yang membawa ke arah pengajaran feodalistik otoriter di mana peserta didik seperti tabula rasa, kertas putih kosong yang harus di isi oleh guru. Namun demikian, fakta empiriknya pertarungan kedua model pengajaran tersebut di atas, masih sangat didominasi oleh model pengajaran ala gaya bank.

⁵²¹Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999, Cet. II, h.47.

⁵²²Abuddin Nata, *Pendidikan Islam di Indonesia; Tantangan dan Peluang*, dalam pidato pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta, 20 Maret 2004, h. 47.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamid Ghurab, Ahamad Abd, *Abu Hasan al-Amiri wa Ara'uh al-Tarbawiyah*, dalam, *Min A'lami al-Tarbiyah al-Tarbiyyah al-Arabiyyah al-Islamiyyah*, Jilid II.
- Bahri,Samsul, “Urgensi Pendidikan Akhlak bagi Peserta Didik” *Jurnal Dinamika*, Edisi: II/September, 2009.
- Buchori, Muchtar, *Ilmu Pendidikan dan Praktek Pendidikan*, Jakarta, Muhammadiyah Press, 1994.
- Dawam, Ainurrofiq, *Emoh Sekolah*, Yogyakarta, Inspeal Ahimsakarya Press, 2003.
- Dede, Rosyada,, *Paradigma Pendidikan Demokratis*, Prenada, Jakarta, 2004.
- Djati Sidi, Indra, *Menuju Masyarakat Belajar, Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, Jakarta, Paramadina dan Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Freire, Paulo, *Menjadi Guru Yang Merdeka*, Yogyakarta, LKiS, 2001, h. 36-74
- , *Pendidikan Kaum Tertindas*, Jakarta, LP3ES, 2000.
- , *The Politic of Education, Culture, and Leberation*, New York, Begin and Garvey, 1985.
- From,Eric, *The Heart of Man*, Routledge dan keegan, NY, 1966.
- Hidayah, Komaruddin, et.al., *Agama di Tengah Kemelut*, Jakarta, Mediacita, 2001.
- Hinggins dan Roger, dalam Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan*, Jakarta, Pustaka al-Husna 1989.
- M. Witmee and H. Conttingham, “The Teacher’s Role and Guidance Functions as Reported by elementary Teacher;” *Elementary*

- School Guidance and Counseling*, 1970.
- Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta, Logos Wacana, 1999.
- Muhkam, Munir, Humanisasi pendidikan Islam, *Tashwirul Afkar Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan*, Edisi No. 11, 2001.
- Muska Mosston, *Teaching from Command to Discovery*, Wadsworth Publishing, Company, California, 1972.
- Nata, Abuddin, *Pendidikan Islam di Indonesia; Tantangan dan Peluang*, dalam pidato pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta, 20 Maret 2004.
- , *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago, The University of Chicago Press, 1982.
- Republika 10 April 2012.
- Suparno, Paul, *Guru Demokrasi di Era Reformasi*, Grasindo, Jakarta, 2004.
- Suwito dalam upacara pengukuhan sebagai guru besar pada tanggal 3 Januari 2002 yang berjudul *Pendidikan yang Memberdayakan*.
- Tibi, Bassam, *Islam and the Cultural Accommodation of Social Change*, San Fransisco, Westview Press, 1985.
- Zamroni, *Pendidikan Untuk Demokratisasi*, Bigraf, Yogyakarta, 2001

BAB 15

KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG KENAIKAN ANGGARAN PENDIDIKAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM

A. Pendahuluan

Menurut Abuddin Nata pendidikan Islam membutuhkan sumber manusia yang andal, memiliki komitmen dan etos kerja yang tinggi, manajemen yang berbasis sistem.⁵²³ Hanya saja untuk melahirkan kualitas SDM yang unggul membutuhkan pendidikan yang bermutu.⁵²⁴ Sementara itu, pendidikan di satu pihak, perangkat lunak pendidikan, termasuk sistem pendidikan dan kualitas SDM guru serta pengelola, masih tersangkut kebijakan tambal sulam. Di pihak lain, sarana dan prasarana pendidikan masih jauh dari memadai karena anggaran biaya pendidikan sangat rendah. Akibatnya menurut KH. Abdullah Syukri Zarkasyi, tingkat akseibilitas anak negeri ini terhadap pendidikan yang bermutu sangat rendah.⁵²⁵

Hal tersebut dapat dimengerti mengingat dunia pendidikan merupakan salah satu pranata yang terlibat langsung dalam mempersiapkan masa depan umat manusia. Kegagalan dunia pendidikan dalam menyiapkan masa depan umat manusia, adalah

523H. Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, h. 18

524Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang seluruh komponen serta berbagai perangkat pendukung lainnya dapat memuaskan peserta didik, pimpinan, guru dan masyarakat pada umumnya. Lihat H. Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, h. 51

525KH. Abdullah Syukri Zarkasyi, *Manajemen Pesantren; Pengalaman Pondok Modern Gontor*, Jawa Timur, Trimurti Press, 2005, h. 1

merupakan kegagalan bagi kelangsungan kehidupan bangsa.⁵²⁶ Oleh karena itu, kebijakan suatu bangsa atau negara mesti dilakukan dalam bidang pendidikan, hal ini dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan suatu bangsa, sehingga menurut Nanang Fattah, pendidikan dapat melahirkan SDM-SDM yang berkualitas, berkarakter, berkompetensi, dan berdaya saing tinggi baik nasional maupun internasional.⁵²⁷

Makalah ini akan membahas kebijakan pemerintah tentang kenaikan anggaran pendidikan dan pengaruhnya dengan pendidikan Islam. Dengan menggunakan sumber-sumber yang otoritatif.

B. Multi Persoalan Pendidikan di Indonesia

Berbagai masalah dalam dunia pendidikan yang belum teratasi. Beberapa masalah tersebut antara lain kinerja yang tidak pas dengan tujuan umum pendidikan nasional, produk pendidikan yang belum siap pakai atau tidak sesuai dengan ketersediaan lapangan kerja, ranking pendidikan kita di mata dunia yang setara dengan negara-negara miskin atau baru merdeka. Dalam situasi seperti itu telah bergulir gelombang reformasi yang menghendaki adanya perubahan. Dengan kata lain, dalam menyongsong berbagai kecenderungan yang aktual tidak ada alternatif lain selain perlu penataan kembali terhadap dunia pendidikan mulai dari filsafat/tujuan pendidikan sampai ke manajemen pendidikan, kurikulum, metode pembelajaran, substansi pengajaran, pendanaan pendidikan.

Kebiasaan pemerintah kita dalam melakukan justifikasi kepentingan program-program dibidang pendidikan adalah berdasar pada pemikiran jangka menengah yang mengaitkannya dengan legalitas kemapanan yang bersifat normative. Akibatnya tujuan pendidikan selalu dirumuskan dalam "bahasa tamsil" yang sangat utopis dan kurang menggambarkan rumusan-rumusan permasalahan

526Lihat H. Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan Islam: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2003, h. 160. Lihat juga Fadhil Al-Jamali, *Menerobos Krisis Pendidikan Dunia Islam*, Jakarta, Golden Terayon Press, 1992, h. 19

527Lihat Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2012, h. iii

dan “prioritas” yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu.

Secara umum pendidikan nasional sedang menghadapi dua tantangan yang berat, yaitu tatangan internal dan eksternal. Secara internal dihadapkan pada hasil-hasil studi internasional yang selalu menempatkan juru kunci untuk pendidikan dan ranking atas untuk korupsi.⁵²⁸ Kondisi semacam ini selalu diucapkan dan diwiridkan secara berulang-ulang, sehingga membentuk konsep bahwa pendidikan Indonesia jelek, tidak bermutu, dan terbelakang. Problema-problema pendidikan semakin kompleks dan semakin sarat dengan tantangan. Kebijakan dan program-program pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, nampak tidak memberi jawaban *solutif* terhadap permasalahan-permasalahan pendidikan yang berkembang.

Kebijakan dan perubahan-perubahan pendidikan kita, kurang memiliki “prioritas” yang ingin dicapai. Katakan saja, persoalan dana pendidikan, persoalan manajemen pendidikan dengan konsep manajemen berbasis sekolah [MBS] dan akreditasi, kebijakan perubahan kurikulum dari KBK menjadi KTSP, persoalan kompetensi dan sertifikasi guru dan dosen, ujian nasional yang menuai protes dari siswa, yang berdampak penyelesaian sekolah di Paket C. Hal yang sangat menyedihkan dalam kebijakan pendidikan di negara yang kita cintai ini. Indikator ini menunjukkan kurang terarahnya kebijakan-kebijakan pendidikan. Beberapa “pakar” dan “pemerhati” pendidikan, mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia selalu dirumuskan dalam “bahasa tamsil” yang sangat “utopis” dan kurang menggambarkan rumusan-rumusan permasalahan dan prioritas persoalan pendidikan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Di sisi lain juga dihadapkan dengan tantangan eksternal yaitu perubahan yang cepat dari lingkungan strategis di luar negara Indonesia. Pasar bebas ASEAN (AFTA) berlaku sejak tahun 2003 yang lalu. Beberapa tahun ke depan, kerja ekonomi Asia Pasifik (APEC) berlaku mulai 2010 untuk negara-negara maju dan 2020 untuk seluruh anggotanya termasuk Indonesia. Jadi, posisi Indonesia tidak bisa mengelak dari tekanan eksternal yang masuk pada persaingan

528 Lihat Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam; Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, h. 71

semakin kompetitif.⁵²⁹

Menghadapi kedua tantangan tersebut, maka perubahan dan inovasi merupakan kata kunci yang perlu dijadikan titik tolak dalam mengembangkan pendidikan nasional pada umumnya. Hanya saja menurut Ketua Komite Reformasi Suyanto, dalam seminar *Strategi Pengembangan Nasional* di Yogyakarta menguraikan panjang lebar bahwa dalam aspek mutu kinerja,⁵³⁰ sistem pendidikan Indonesia belum sesuai dengan harapan nasional, bahkan cenderung menurun.⁵³¹ Hasil studi laporan Bank Dunia No. 16369-IND dari hasil di Asia Timur, menunjukkan bahwa keterampilan membaca siswa kelas IV SD berada pada tingkat terendah.⁵³²

Secara keseluruhan sistem pendidikan Indonesia menempati peringkat terendah di dunia, menurut liga global yang diterbitkan oleh firma pendidikan Pearson pada November 2012. Tempat pertama dan kedua diraih oleh Firlandia dan Korea Selatan. Ranking itu memadukan hasil tes internasional dan data kelulusan antara 2006 dan 2010. Indonesia berada di posisi terbawa bersama Mesiko dan Brasil. Menurut Sir Micheal Barber, penasihat utama pendidikan Pearson negara-negara yang berhasil memajukan pendidikan

529Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam; Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*, h.72

530Tabel Skor kualitas sistem pendidikan pada 12 negara di Asia Skor 0 menunjukkan kualitas sistem pendidikan tertinggi dan skor 10 mencerminkan kualitas sistem pendidikan terendah.

	Negara	Skor	Negara	Skor
1.	Korea Selatan	3.09	7. Malaysia	4.41
2.	Singapore	3.19	8. Hongkong	4.72
3.	Jepang	3.50	9. Philipina	5.47
4.	Taiwan	3.96	10. Thailand	5.96
5.	India	4.24	11. Vietnam	6.21
6.	Cina	4.27	12. Indonesia	6.56

531Lihat Suwito, *Pendidikan Yang Memberdayakan*, dalam upacara pengukuhan sebagai guru besar pada tanggal 3 Januari 2002, Jakarta, h. 7

532Ia memberi contoh dalam skala nasional, berdasarkan studi yang dilakukan menunjukkan rata-rata nilai teks siswa SD kelas VI untuk tiga mata pelajaran pokok (bahasa Indonesia, matematika, dan IPA) adalah 35, 33 dan 37 pada 1976 menjadi 27, 7; 21,5; dan 24, 2 pada tahun 2010. Dibanding dengan standar penguasaan (50%) Tabel nilai rata-rata kemampuan membaca tingkat SD:

Negara	Nilai Rata-Rata
1. Hongkong	75.5
2. Singapura	74.0
3. Thailand	65.1
4. Filipina	52.6
5. Indonesia	51.7

adalah memberikan status tinggi pada guru dan memiliki budaya pendidikan.⁵³³

Pendapat di atas, memberikan pemahaman bahwa sistem pendidikan yang maju adalah bangsa yang memperhatikan secara serius pendidikan, khusus pada mutu guru dan budaya serta anggaran pendidikan. Hal ini diakui Muhaimin bahwa negara-negara tetangga maju karena diikuti dengan tingginya anggaran di bidang pendidikan dan peningkatan kesejahteraan para gurunya.⁵³⁴

Namun demikian, dalam konteks pendidikan Indonesia selama ini terdapat keluhan mengenai rendahnya kualitas SDM terkait mutu lulusan yang dihasilkan oleh sistem pendidikan di Indonesia. Padahal anggaran pendidikan selalu naik dari tahun ke tahun, tetapi kualitas lulusannya tetap rendah dan biayanya semakin mahal. Bahkan dari persoalan-persoalan di atas, paling tidak ada dua hal pokok yang menyebabkan program-program pendidikan dirasakan tumpul dan tidak membumi untuk menjawab persoalan pendidikan di Indonesia : *Pertama*, tidak adanya “*national assessment*” untuk menggambarkan kondisi dan permasalahan pendidikan yang didasarkan pada suatu ukuran kemajuan tertentu [*benchmark*] secara terbuka [*accountable*], sehingga publik dengan mudah mengikuti dan “mengevaluasi” kemajuan pendidikan yang ada. *Kedua*, program-program pendidikan yang dilaksanakan tidak diturunkan dari tujuan-tujuan yang mengacu pada hasil-hasil yang memiliki kriteria pencapaian yang jelas dan dapat terukur realisasinya.⁵³⁵

Gambaran di atas, menunjukkan bahwa dunia pendidikan di Indonesia memang begitu dilematis. Artinya, di satu sisi, tuntutan kualitas pendidikan perlu dikontrol setinggi-tingginya untuk mengejar ketertinggalan begitu jauh dengan negara-negara lain. Sementara di lain, dana operasional yang tersedia untuk bidang pendidikan begitu terbatas. Perlu diakui bahwa pemerintah, sebenarnya telah mengalokasikan sejumlah jenis bantuan untuk dana operasional pendidikan [sekolah].

533Lihat [www. Thelearning curve .Pearson com](http://www.thelearningcurve.com). Report, 2012, h. 40

534Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam; Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*, h.76

535Lihat Ade Cahyana, From: ., akses, tanggal, 16/12/2013, jam.13.10.

Tetapi bantuan tersebut hanya cukup untuk menutup biaya minimal bagi kegiatan-kegiatan pendidikan. Sementara kegiatan yang sifatnya penunjang atau pengembangan, dirasakan belum optimal dan hal ini berakibat pada upaya peningkatan mutu pendidikan itu sendiri.

Berbagai problem fundamental yang dihadapi pendidikan nasional saat ini, yang tercermin dalam “realitas” pendidikan yang kita jalan. Seperti persoalan anggaran pendidikan, kurikulum, strategi pembelajaran, dan persoalan *output* pendidikan kita yang masih sangat rendah kualitasnya. Problem-problem pendidikan yang bersifat metodik dan strategik yang membuahkan *output* yang sangat memprihatinkan. *Output*, pendidikan kita memiliki mental yang selalu tergantung kepada orang lain. *Output* pendidikan kita tidak memiliki mental yang bersifat mandiri, karena memang tidak kritis dan kreatif. Akhirnya, output yang pernah mengenyam pendidikan, malah menjadi “pengangguran terselubung”. Ini artinya, setiap tahunnya, pendidikan nasional kita memproduksi pengangguran terselubung. Mereka itu, adalah korban dari ketidakberesan sistem pendidikan kita yang masing sedang merangka berbenah. Mungkin saja, kita sebagai insan yang berpendidikan, tentu saja terus atau banyaknya berharap akan datangnya perubahan “fundamental” terhadap sistem pendidikan⁵³⁶ di Indonesia.

Dari positif pendidikan di Indonesia dengan melihat adanya prestasi yang baik di masyarakat yang patut diangkat yaitu antara lain: pelajar Indonesia juara Olimpiade Informatika Internasional September 2012; sebanyak 12 santri asal Madura, Jawa Timur, memperoleh medali perunggu dalam event *World Mathematics Team Championship* (WMTC) 2011 yang digelar pada 2-6 November di Beijing China; Santri Pamekasan Juara Hafalan Al-Qur’an se-Asia Pasifik; Delegasi Indonesia mendapatkan gelar juara umum *the 9th ASEAN Skills Competition* (ASC) tahun 2012. Berdasarkan data tersebut, maka kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan menjadi nomor satu untuk meningkatkan mutu pendidikan.

536Suyanto, *Dinamika Pendidikan Nasional Dalam Percaturan Dunia Global*, Jakarta, PSAP Muhammadiyah, 2006, h. viii

C. Kebijakan dalam Bidang Pendidikan

Berbicara persoalan pendidikan adalah juga berbicara tentang kebijakan, karena pendidikan merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk dilaksanakan. Karena pendidikan merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, maka kebijakan pendidikan adalah salah satu kebijakan publik dalam bidang pendidikan. Yang dimaksud dengan kebijakan publik disini adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan.⁵³⁷

Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan pendidikan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa dibidang pendidikan,⁵³⁸ karena salah satu tujuan pembangunan bangsa adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut hendaknya terus-menerus untuk dibangun sehingga akhirnya akan mencapai tujuan yang diharapkan yaitu kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Kesejahteraan ini dapat terwujud manakala manusia yang menjadi warga negara mempunyai tingkat kecerdasan yang memadai, untuk dapat menguasai dan mempraktekkan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki. Agar ilmu yang dimiliki dapat bermanfaat baik bagi dirinya maupun orang lain. Dengan kemampuan keilmuan itulah diharapkan manusia mampu menghadapi, menyelesaikan persoalan kehidupan - yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, rasional dan bertanggungjawab. Hanya saja tingkat kecerdasan tersebut juga harus memperhatikan nilai-nilai moral, baik nilai moral

537H.A.R. Tilar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan; Pengantar Untuk memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai kebijakan Publik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet.II 2009, h.184.

538Menurut Fattah pelaksanaan pendidikan memiliki beberapa hal pokok: (1). Anak didik sebagai individu yang berkembang. (2). Kewibawaan dan tanggung jawab pendidik(pendidikan mengarahkan anak untuk rela dan sadar berpartisipasi dalam setiap proses pendidikan, yang diprakarsai oleh pendidik. (3). Kebebasan dan keterikatan anak didik (memilih strategi yang sesuai). (4) Motivasi dalam kegiatan pendidikan (anak didik jangan jadi penonton tetapi pelaku (subjek) yang belajar. (5) Asas aktivitas dalam kegiatan pendidikan (intraksi pendidik dan peserta didik. Lihat Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, h. 42

keagamaan maupun nilai moral yang telah diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Osman Bakar yaitu obsesi terhadap sains dan teknologi dengan mengenyampingkan nilai-nilai moral dan spiritual yang dijunjung tinggi, merupakan salah satu kemalangan besar dizaman kita ini, kemalangan itu lebih besar lagi jika obsesi tersebut menyangkut kekuasaan materi semata⁵³⁹

Berbagai aturan dan kebijakan perundang-undangan yang ada misalnya, undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah. Menurut hemat penulis aturan ini cenderung bersifat sentralistik daripada desentralistik. Kemudian muncul kebijakan baru yaitu Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU nomor 22 tahun 1999 mengubah pola pembangunan dari sentralistik menjadi desentralistik, dengan memberikan kekuasaan otonom secara luas kepada pemerintah Kabupaten dan Kota.

Efek samping dari pada kekuasaan otonomi yang sangat luas kepada daerah, pada prakteknya mengakibatkan sedikit terhambatnya proses desentralisasi pembangunan dan pelayanan publik, juga pemerintah daerah berpeluang untuk melakukan desentralisasi kekuasaan pada elit-elit politik daerah. Salah satu pesan UU nomor 22 tahun 1999 adalah bahwa daerah mempunyai kewajiban menangani pendidikan yang rambu-rambunya telah dijabarkan dalam Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Bahwa persoalan mendasar dalam desentralisasi pengelolaan pendidikan adalah apa yang seharusnya dilakukan, oleh siapa hal itu dilakukan, dengan cara bagaimana dan mengapa demikian. Dengan semangat pemberian kesempatan otonomi kepada daerah khususnya Kabupaten dan Kota, dan tetap terjaminnya kepentingan nasional yang paling esensial.

Disadari betul bahwa kewenangan dan kekuasaan saja belumlah cukup, dibutuhkan kemampuan daerah untuk mengimplementasikan otonomi daerah. Kemampuan ini bisa diuraikan menjadi sangat luas, mencakup keharusan memiliki wawasan yang mumpuni, kualitas

539Lihat Osman Bakar, *Tawhid and Science: Islamic Perspectives on Religion and Science*, Terj. Yulianto Liputo dan M.S.Nasrulloh, *Tauhid dan Sains: Perspektif Islam tentang Agama dan Sains*, Bandung:Pustaka Hidayah, Edisis kedua dan Revisi, 2008, h. 384.

sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan serta kemampuan menggali dan mengelola pembiayaan.

Dengan demikian melalui pengelolaan yang desentralistik, “diharapkan pendidikan dapat dilaksanakan dengan lebih baik, bermanfaat bagi daerah dan juga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya dengan desentralisasi tersebut tidak dikehendaki terjadinya kemunduran dalam pendidikan dan tidak juga justru melemahkan semangat integrasi nasional.⁵⁴⁰

Kebijakan publik penyelenggaraan pembangunan Indonesia Pasca reformasi ditata dengan pola desentralistik, yaitu dengan lahirnya undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang dilengkapi dengan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Hanya saja kebijakan publik ini menurut hemat penulis terdapat kelemahan, diantaranya adalah adanya kesenjangan kesejahteraan antara pusat dengan daerah. Lihat UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun.⁵⁴¹

Usaha pemerintah dalam membangun pelayanan pendidikan memang terlihat melalui langkah-langkah penyiapan dan penyesuaian perangkat peraturan dan perundang-undangannya. Langkah-langkah ini seiring dengan perubahan tatanan politik pemerintahan, hal ini ditandai dengan disyahnkannya undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) yang dilakukan pemerintah melalui proses yang panjang.⁵⁴² Oleh karena itu, Proses pendidikan merupakan upaya sadar manusia yang tidak pernah ada hentinya. Sebab, jika manusia berhenti melakukan pendidikan, sulit dibayangkan apa yang akan terjadi pada sistem peradaban dan

540 Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (Ed), Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah, Yogyakarta: Adi Cita karya Nusa Kerjasama dengan Depdiknas; Bappenas, 2001, h. 4

541 Lihat UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara bahwa kementerian Agama adalah salah satu kementerian yang bersifat vertikal.

542 Sepanjang semester pertama tahun 2003, berbagai media massa di Indonesia hampir setiap hari memberitakan perkembangan pembahasan dan perdebatan tentang Rencana Undang-undang RUU Sisdiknas), bahkan ada diantara kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan di Undang-undangkannya Sisdiknas tersebut.

budaya manusia.⁵⁴³ Dengan ilustrasi ini, maka baik pemerintah maupun masyarakat berupaya untuk melakukan pendidikan dengan standar kualitas yang diinginkan untuk memberdayakan manusia. Sistem pendidikan yang dibangun harus disesuaikan dengan tuntutan zamannya, agar pendidikan dapat menghasilkan *outcome* yang relevan dengan tuntutan zaman.⁵⁴⁴ Indonesia, telah memiliki sebuah sistem pendidikan dan telah dikokohkan dengan UU No. 20 tahun 2003. Pembangunan pendidikan di Indonesia sekurang-kurangnya menggunakan empat strategi dasar, yakni; *Pertama*, pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, *kedua*, relevansi pendidikan

Ketiga, peningkatan kualitas pendidikan, dan *keempat*, efisiensi pendidikan. Secara umum strategi itu dapat dibagi menjadi dua dimensi yakni peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Pembangunan peningkatan mutu diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas pendidikan. Sedangkan kebijakan pemerataan pendidikan diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan bagi semua usia sekolah.⁵⁴⁵ Dari sini, pendidikan dipandang sebagai *katalisator* yang dapat menunjang faktor-faktor lain. Artinya, pendidikan sebagai upaya pengembangan sumberdaya manusia [SDM] menjadi semakin penting dalam pembangunan suatu bangsa. Untuk menjamin kesempatan memperoleh pendidikan yang merata disemua kelompok strata dan wilayah tanah air sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya perlu strategi dan kebijakan pendidikan, yaitu : [a] menyelenggarakan pendidikan yang relevan dan bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan global, [b] menyelenggarakan pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan [*accountasle*] kepada masyarakat sebagai pemilik sumberdaya dan dana serta pengguna hasil pendidikan, [c] menyelenggarakan proses pendidikan yang demokratis secara

543Suyanto, *Dinamika Pendidikan Nasional Dalam Percaturan Dunia Global*, Jakarta, PSAP Muhammadiyah, 2006, h. 11

544Suyanto, *Dinamika Pendidikan Nasional Dalam Percaturan Dunia Global*, h. 11

545Hujair Sanaky AH., *Paradigma Pendidikan Islam, Membangun Masyarakat Madani Indonesia*, Safiria Insania dan MSI, Yogyakarta, 2003, h. 146

profesional sehingga tidak mengorbankan mutu pendidikan, [d] meningkatkan efisiensi internal dan eksternal pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, [e] memberi peluang yang luas dan meningkatkan kemampuan masyarakat, sehingga terjadi diversifikasi program pendidikan sesuai dengan sifat multikultural bangsa Indonesia, [f] secara bertahap mengurangi peran pemerintah menuju ke peran fasilitator dalam implementasi sistem pendidikan, [g] Merampingkan birokrasi pendidikan sehingga lebih lentur [*fleksibel*] untuk melakukan penyesuaian terhadap dinamika perkembangan masyarakat dalam lingkungan global.⁵⁴⁶

Empat strategi dasar kebijakan pendidikan yang dikemukakan di atas cukup ideal. Tetapi Muchtar Bukhori, seorang pakar pendidikan Indonesia, menilai bahwa kebijakan pendidikan kita tak pernah jelas. Pendidikan kita hanya melanjutkan pendidikan yang elite dengan kurikulum yang elitis yang hanya dapat ditangkap oleh 30 % anak didik, sedangkan 70% lainnya tidak bisa mengikuti. Dengan demikian, tuntutan peningkatan kualitas pendidikan, relevansi pendidikan, efisiensi pendidikan, dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, belum terjawab dalam kebijakan pendidikan kita. Kondisi ini semakin mempersulit mewujudkan pendidikan yang *egalitarian* dan SDM yang semakin merata di berbagai daerah.

Proses menuju perubahan sistem pendidikan nasional banyak menuai kendala serius. Apalagi ketika membicarakan konteks pendidikan nasional sebagai bagian dari pergumulan ideologi dan politik penguasa. Problem-problem yang dihadapi seringkali berkaitan dengan kebijakan-kebijakan [*policies*] yang sangat strategis. Maka, dalam konteks kebijakan pendidikan nasional, menurut Suyanto, banyak pakar dan praktisi pendidikan mengkritisi pemerintah, dianggap tidak memiliki komitmen yang kuat untuk membenahi sistem pendidikan nasional.⁵⁴⁷ Artinya, kebijakan-kebijakan pendidikan kita, kurang menggambarkan rumusan-rumusan permasalahan dan “prioritas” yang ingin dicapai dalam

546Hujair Sanaky AH., *Paradigma Pendidikan Islam, Membangun Masyarakat Madani Indonesia*, h. 146

547Suyanto, *Dinamika Pendidikan Nasional Dalam Percaturan Dunia Global*, h. X-XI

jangka waktu tertentu. Hal ini, “terutama berkaitan dengan anggaran pendidikan nasional yang semestinya sebesar minimal 20%, diambil dari APBN dan APBD pasal 31 ayat 4 UUD Amandemen keempat. Tetapi, sampai sekarang kebijakan strategi belum dapat diwujudkan sepenuhnya, pendidikan nasional masih menyisihkan kegetiran-kegetiran bagi rakyat kecil yang tidak mampu mengecap pendidikan di sekolah.”⁵⁴⁸

Pasca Reformasi tahun 1998, memang ada perubahan fundamental dalam sistem pendidikan nasional. Perubahan sistem pendidikan tersebut mengikuti perubahan sistem pemerintah yang *sentralistik* menuju *desentralistik* atau yang lebih dikenal dengan otonomi pendidikan dan kebijakan otonomi nasional itu mempengaruhi sistem pendidikan.⁵⁴⁹

Untuk mewujudkan misi tersebut mesti diterapkan arah kebijakan sebagai berikut, yaitu : [1] perluasan dan pemerataan pendidikan. [2] meningkatkan kemampuan akademik dan profesionalitas serta kesejahteraan tenaga kependidikan, [3] melakukan pembaharuan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam bidang kurikulum, [4] memberdayakan lembaga pendidikan formal dan PLS secara luas, [5] dalam realisasi pembaharuan pendidikan nasional mesti berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen, [6] meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang dikembangkan oleh berbagai pihak secara efektif dan efisien terutama dalam pengembangan iptek, seni dan budaya sehingga

548Suyanto, *Dinamika Pendidikan Nasional Dalam Percaturan Dunia Global*, h. xi

549Sistem pendidikan kita pun menyesuaikan dengan model otonomi. Kebijakan otonomi di bidang pendidikan [otonomi pendidikan] kemudian banyak membawa harapan akan perbaikan sistem pendidikan kita. Kebijakan tersebut masih sangat baru, maka sudah barang tentu banyak kendala yang masih belum terselesaikan. Otonomi yang didasarkan pada UU No. 22 tahun 1999, yaitu memutuskan suatu keputusan dan atau kebijakan secara mandiri. Otonomi sangat erat kaitanya dengan desentralisasi. Dengan dasar ini, maka otonomi yang ideal dapat tumbuh dalam suasana bebas, demokratis, rasional dan sudah barang tentu dalam kalangan insan-insan yang “berkualitas”. Oleh karena itu, rekonstruksi dan reformasi dalam Sistem Pendidikan Nasional dan Regional, yang tertuang dalam GBHN 1999, juga telah dirumuskan misi pendidikan nasional kita, yaitu mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu, guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin, bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai iptek dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia Suyanto, *Dinamika Pendidikan Nasional Dalam Percaturan Dunia Global*, h. xi

membangkitkan semangat yang pro-aktif, kreatif, dan selalu reaktif dalam seluruh komponen bangsa.⁵⁵⁰

Babarapa kalangan pakar dan praktisi pendidikan, mencermati kebijakan otonomi pendidikan sering dipahami sebagai indikasi kearah “liberalisasi” atau lebih parah lagi dikatakan sebagai indikasi kearah “komersialisasi pendidikan”. Hal ini, menurut Suyanto, semakin dikuatkan dengan terbentuknya Badan Hukum Pendidikan [BHP] yang oleh beberapa pengamat dianggap sebagai pengejawantahan dari sistem yang mengarah pada “liberalisasi pendidikan”.⁵⁵¹ Dampaknya, menurut Darmaningtyas kebijakan pendidikan tidak adil, yang terlalu berpihak pada kepentingan segelintir orang atau konglomerat saja dengan mengorbankan sebagian besar warganya, di satu pihak pemerintah mengeluh tidak memiliki anggaran yang cukup untuk pendidikan, tapi di pihak lain, pemerintah bersedia nomboki bank-bank yang bangkrut.⁵⁵² Persoalan sekarang, apakah sistem pendidikan yang ada saat ini telah efektif untuk mendidik bangsa Indonesia menjadi bangsa yang modern, memiliki kemampuan daya saing yang tinggi di tengah-tengah bangsa lain? Jawabannya tentu belum. Menurut Suyanto, berbicara kemampuan, sebagai bangsa nampaknya belum sepenuhnya siap benar menghadapi tantangan persaingan.⁵⁵³

Berbagai problem fundamental yang dihadapi pendidikan nasional saat ini, yang tercermin dalam realitas pendidikan. Seperti persoalan anggaran pendidikan, kurikulum, strategi pembelajaran, dan persoalan *output* pendidikan kita yang masih sangat rendah kualitasnya. Problem-problem pendidikan yang bersifat metodik dan strategik yang membuahkan *output* yang sangat memprihatinkan. *Output*, pendidikan kita memiliki mental yang selalu tergantung kepada orang lain. *Output* pendidikan kita tidak memiliki mental yang bersifat mandiri, karena memang tidak kritis dan kreatif. Akhirnya, *output* yang pernah mengenyam pendidikan, malah menjadi “pengangguran terselubung”. Ini artinya, setiap tahunnya,

550Soedjiarto, "Memahami Arahan Kebijakan GBHN 1999-2004 tentang Pendidikan Sebagai Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Membangun Peradaban Negara bangsa Indonesia", MAKALAH, Yogyakarta, Primagama-IPSI-PGRI, 1999, h. 1-20

551Suyanto, *Dinamika Pendidikan Nasional Dalam Percaturan Dunia Global*, h. xi

552Lihat Darmaningtyas, *Pendidikan Rusak-Rusakan*, Yogyakarta, LkiS, 2007, h. 24

553Suyanto, *Dinamika Pendidikan Nasional Dalam Percaturan Dunia Global*, h. 11

pendidikan nasional memproduksi pengangguran terselubung. Mereka itu, adalah korban dari ketidakberesan sistem pendidikan kita yang masing sedang merangka berbenah. Mungkin saja, kita sebagai insan yang berpendidikan, tentu saja terus atau kebanyakan berharap akan datangnya perubahan “fundamental” terhadap sistem pendidikan di Indonesia.⁵⁵⁴

D. Kebijakan Anggaran Pendidikan

Menurut Nanang Fatah, biaya pendidikan sesuatu hal yang paling mendasar bagi keberhasilan pencapaian program pendidikan.⁵⁵⁵ Ibarat sebuah kereta, maka anggaran pendidikan,⁵⁵⁶ dipandang sebagai kuda yang akan menarik kereta tadi. Jadi kalau kuda (biaya) kuat, kereta (pendidikan) akan berjalan dengan baik, tetapi banyak pendidikan yang lemah karena faktor biaya kurang.⁵⁵⁷ Sehubungan dengan itu, Mulyasa menegaskan bahwa, biaya merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi, dan bagian yang takterpisahkan dalam kajian pengelolaan pendidikan.⁵⁵⁸

Secara ideal, sebenarnya dunia pendidikan harus mampu berjalan beriringan dengan dunia luar. Akan tetapi, kendala utama yang dihadapi adalah komitmen pemerintah yang tidak terfokus pada prioritas dalam hal dana pendidikan baik pada masa lalu dan masa kini. Akibatnya idealisme tersebut masih jauh dari impian, jauh dari kenyataan dan hanya menjadi mitos. Maka yang menjadi persoalan sekarang apakah pemerintah atau bangsa Indonesia ini sadar bahwa pendidikan merupakan kunci utama untuk menghadapi persaingan

554Suyanto, *Dinamika Pendidikan Nasional Dalam Percaturan Dunia Global*, h. viii

555Lihat Nanang Fatah, *Standar Pembiayaan Pendidikan*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2012, h. iii

556Paling tidak ada tiga pengertian tentang anggaran pendidikan. *Pertama*, anggaran untuk sector pendidikan. Selain untuk anggaran pendidikan masyarakat umum, dalam pengertian ini juga termasuk pendidikan yang diselenggarakan oleh departemen lain selain Depdiknas. *Kedua*, anggaran Depdiknas, yaitu anggaran pendidikan nasional yakni semua anggaran pembangunan. *Ketiga*, anggaran pendidikan nasional, yakni semua anggaran pendidikan di semua departemen, termasuk anggaran rutin untuk gaji PNS dan biaya rutin operasional lembaga.

557Lihat Nanang Fatah, *Standar Pembiayaan Pendidikan*, h. iii

558E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002, h. 167

dengan dunia luar. Apakah pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki komitmen untuk menentukan sektor pendidikan adalah faktor kunci bagi pembangunan bangsa dan negara ini.

Dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional pada Bab XIII ayat (1) menjelaskan bahwa pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Karenanya pemerintah tidak merupakan satu sistem yang lepas dengan pihak swasta dan masyarakat. Hubungan pemerintah, swasta dan masyarakat merupakan hubungan yang tidak terpisahkan dalam peranannya meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan. Oleh karena itu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat, baik dalam pembiayaan maupun tenaga dan fasilitas. Artinya peran swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan sangat menentukan. Hal ini sesuai dengan pandangan Nanang Fatah bahwa “ ada kecenderungan mengenai sumber-sumber anggaran pendidikan pada umumnya berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, orang tua mirid dan sumber lain. Sedangkan pengeluarannya dipergunakan untuk (1), pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran, (2), pengeluaran untuk tata usaha sekolah, (3), pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah,(4), kesejahteraan pegawai, (5), administrasi, (6), pembinaan teknis edukatif, (7), pendataan”⁵⁵⁹

Dilihat dari komitmen pemerintah Indonesia menempatkan anggaran pendidikan dibawah standar yaitu 8% dalam anggaran belanja dan pendapatan negara [APBN] yang semestinya sebesar minimal 20%,⁵⁶⁰ bahkan semua komponen menghendaki, termasuk usulan dari pengurus besar PGRI agar anggaran pendidikan mendapat alokasi 25% dari APB. Anggaran pendidikan yang memadai untuk dapat menjadikan SDM bangsa Indonesia berkualitas setarap dengan tingkat pelayanan pendidikan di negara maju hanya tinggal impian. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebenarnya kesadaran pemerintah Indonesia atas masalah pendidikan sangat rendah

559Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet.v. 2009, h. 23-24

560Suyanto, *Dinamika Pendidikan Nasional Dalam Percaturan Dunia Global*, h. xi

dibandingkan perhatian pada sector lain. Dengan rendahnya subsidi anggaran di bidang pendidikan menjadi indikator betapa bidang ini masih jauh dari “ruh” dan harapan reformasi. Oleh karena itu, formula pembiayaan dan subsidi pendidikan yang berkeadilan.

Sumber biaya pendidikan pada tingkat makro (nasional) berasal pendapatan negara dari sektor pajak, misalnya dari pemanfaatan sumber daya alam dan produksi nasional lainnya, yang lazim dikategorikan kedalam gas dan non migas, keuntungan dari ekspor barang dan jasa, usaha-usaha negara lainnya, termasuk dari disvestasi saham pada perusahaan negara (BUMN), bantuan dalam bentuk grant (hibah) dan pinjaman luar negeri (loan) baik dari lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, ADB, IDB, JICA, maupun pemerintah, baik kerjasama multilateral maupun bilateral. Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (4) yaitu negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.⁵⁶¹

Semua komponen bangsa mengakui bahwa pendidikan merupakan prioritas utama dalam pengembangan sumber daya manusia. Tapi anggaran pendidikan hanya memperoleh alokasi sebesar 8% dalam anggaran belanja dan pendapatan negara [APBN]. Semuanya menghendaki agar anggaran pendidikan mendapat alokasi 25% dari APBN. Anggaran pendidikan yang memadai untuk menjadikan SDM bangsa Indonesia setara dengan tingkat pelayanan pendidikan di negara maju hanya tinggal impian, hanya mitos. Dapat diperhatikan bahwa alokasi anggaran pendidikan seharusnya menjadi urutan utama untuk pengembangan sumber daya manusia Indonesia, tetapi kenyataan anggaran pendidikan selalu terkalahkan untuk kepentingan pembangunan sektor lain terutama untuk sektor ekonomi.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Bab IX pasal 62 menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri dari;

⁵⁶¹Tim Bela Bangsa, UUD 1945 dan Perubahannya, Jakarta: Belabook Media, 2010, h. 42

(1) biaya investasi, meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja, (2) Biaya operasi, meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan, bahan atau peralatan pendidikan yang habis pakai dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak asuransi, dan (3) biaya personal, yang merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.⁵⁶²

Jika melihat anggaran pendidikan 2011 sebesar Rp266,6 triliun, tetap saja masih perlu perbaikan, sehingga 2012 anggaran pendidikan naik menjadi Rp286,9 triliun,” Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar Bantuan Operasional Siswa (Dana BOS) diberikan merata, siswa setingkat SMP memiliki hak atas dana BOS, begitupun siswa miskin, termasuk sertifikasi para guru. “Kalau itu yang kita tingkatkan maka kesejahteraan pun akan mengikuti ada tunjangan profesi ada tunjangan khusus yang beliau-beliau sebut tadi,” ungkapnya. Dalam kesempatan itu, presiden mengharapkan semua guru semakin profesional, semakin bermartabat dan semakin sejahtera.⁵⁶³

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Siti Juliantari, mengatakan, pungutan yang terjadi di sekolah dan perguruan tinggi tetap ada, dan jumlahnya cenderung meningkat hampir di setiap tahunnya. Kondisi ini, menurutnya, berbanding terbalik dengan kenaikan anggaran pendidikan nasional yang mencapai Rp 286,6 triliun untuk tahun anggaran 2012. Angka ini lebih tinggi dibandingkan anggaran tahun sebelumnya, Rp 266,9 triliun. “Harusnya dengan peningkatan anggaran, pungutan di sekolah dan uang kuliah dapat menurun tanpa harus mengurangi mutu layanan pendidikan itu sendiri.⁵⁶⁴ Ia menilai, tidak berpengaruhnya kenaikan

562Lihat Masykur H Mansyur, “Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Islam,” Telah Dipublikasikan di *Majalah Ilmiah Solusi Unsika* ISSN 1412-86676 Vol. 10 No. 22 Ed. Mar - Mei 2012, h. 5

563<http://edukasi.kompas.com/read/2012/06/21/14473354/Anggaran>. diakses tanggal 24 Desember 2013

564Lihat, Siti Juliantari, “Anggaran Pendidikan Naik tetapi ke Mana Larinya,” *Kompas*, Kamis 21/6/2012

anggaran pendidikan terhadap pengurangan biaya dan peningkatan mutu pendidikan terjadi karena praktik korupsi di sektor pendidikan yang semakin marak. “Anggaran pendidikan telah menjadi banjakan ramai-ramai antara pemerintah pusat dan daerah, anggota DPR/DPRD, serta pengusaha yang terkait dengan pendidikan,” ujarnya. Berdasarkan catatan ICW, dalam kurun 2004-2011, penegak hukum telah menindak pelaku korupsi pendidikan sebanyak 233 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 138,2 miliar. Pelaku korupsi tersebar mulai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dinas pendidikan, kepala sekolah, anggota DPR, dan anggota DPRD.

Anggaran pendidikan dalam RAPBN 2013 sebesar Rp 331,8 triliun atau naik 6,7 persen dibandingkan dengan anggaran pendidikan 2011 dan 2012. Dengan demikian, pemerintah tetap dapat memenuhi lagi amanat konstitusi agar mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan hal itu ketika menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013 beserta Nota Keuangannya, di depan Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Kepala Negara merasa bersyukur karena setiap tahun alokasi anggaran pendidikan dapat terus ditingkatkan. Jika tahun 2011 anggaran pendidikan telah mencapai Rp 266,9 triliun dan tahun ini, jumlahnya meningkat menjadi Rp 310,8 triliun. Kepala Negara berharap supaya anggaran pendidikan yang semakin besar itu digunakan dengan sebaik-baiknya guna meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas jangkauan pemerataan pendidikan.

Untuk meningkatkan partisipasi pendidikan di semua jenjang pendidikan, alokasi anggaran pendidikan tetap kita prioritaskan untuk melanjutkan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 45,0 juta siswa setingkat SD/MI/Salafiyah Ula dan SMP/MTs/Salafiyah Wustha,” kata Yudhoyono. Dikatakannya, pemerintah juga akan memulai pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU), antara lain melalui penyediaan BOS pendidikan menengah bagi 9,6 juta siswa SMA/SMK/MA. Guna mendukung pelaksanaan PMU tersebut, pemerintah sedang mempersiapkan penyediaan guru serta

pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan. Pelaksanaan PMU diharapkan dapat meningkatkan APK jenjang menengah, memperkecil disparitas antar daerah, dan memperkuat pelayanan pendidikan vokasi. Melalui anggaran pendidikan itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan 216 Unit Sekolah Baru (USB), dan lebih dari 4.550 Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK/SMLB. Dijelaskannya, pemerintah juga melakukan rehabilitasi ruang-ruang kelas SMA/SMK/MA yang rusak, serta memulai rehabilitasi sekitar 23.000 ruang kelas SMA/SMK yang rusak berat, dan sebanyak 30.350 ruang kelas SD/SMP yang rusak sedang. “Dengan anggaran pendidikan itu, kita akan melanjutkan penyediaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) bagi sekitar 14,3 juta siswa/mahasiswa, dan memberikan beasiswa prestasi bagi sekitar 220 ribu siswa/mahasiswa.”⁵⁶⁵

Memperhatikan realitas yang ada betapa menyaksikan bagaimana kompleksitas sistem anggaran yang ada, betapa rumitnya, birokratisnya kaku dan sebagainya (sangat kompleksitas), belum lagi melibatkan berbagai instansi yang masing-masing mempertahankan egonya masing-masing. Pada era otonomi daerah sekarang ini yang salah satu tujuannya adalah menyederhanakan dan memangkas birokrasi dalam sistem penganggaran pendidikan, termasuk juga sektor lainnya, belum banyak perubahan terjadi. Alokasi anggaran pendidikan tetap saja kompleks dan fragmentaris dengan akibat terjadi in-efisiensi, kebocoran atau penghamburan

Terkait dengan kebijakan pembiayaan (pendanaan) pendidikan perlu pola dasar kebijakan pendanaan yang terfokus dan komprehensif. Untuk mengukur dampak biaya pendidikan terhadap mutu proses dan hasil belajar terdapat asumsi sebagai berikut: *Pertama*, berangsur-angsur dikembangkan kebijakan yang tidak membedakan sekolah negeri dan swasta, *Kedua*, bagi sekolah, baik negeri maupun swasta yang dana masyarakatnya cukup besar, pemerintah tidak perlu memberikan subsidi yang sama dengan sekolah yang akumulasi dana masyarakatnya kecil. *Ketiga*, perlu dicari varian-varian yang dapat dipakai untuk mendinamisasikan pendanaan pendidikan

⁵⁶⁵Lihat <http://www.pikiran-rakyat.com/node/200381> diakses tanggal 23 Desember 2013

yang mengarah ke satu pola. *Keempat*, subsidi parsial dipakai untuk menolong institusi yang lemah, misalnya dengan diberikan bantuan gedung, guru atau bantuan lain yang memberi efek ganda.⁵⁶⁶ Analisis kebijakan pembiayaan dalam pendidikan termasuk dalam kajian kebijakan publik” yang menggunakan prinsip-prinsip ekonomi, sehingga sebagian besar analisis ekonomi, baik mikro maupun makro dapat digunakan untuk menganalisis masalah-masalah pendidikan. Analisis kebijakan pembiayaan ini meliputi mekanisme penentuan anggaran pendidikan serta keberadaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) atau biasa dikenal dengan istilah MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Peran atau kewajiban pemerintah dalam pembiayaan pendidikan terlihat dengan adanya program BOS/M (bantuan Operasional Sekolah/Madrasah), sebagaimana terjelaskan dalam buku Panduan BOS, Pengelolaan Keuangan serta Monitoring dan Evaluasi buku tersebut menjelaskan tentang petunjuk pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah, Petunjuk Teknis Keuangan Bantuan Operasional Sekolah, serta Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi. Sementara keterlibatan masyarakat khususnya orang tua peserta didik dalam pembiayaan pendidikan, belum ada standar minimum maupun maksimum yang terikat secara yuridis. Keterlibatan masyarakat lebih didasarkan pada kebijakan yang ada dalam Dewan Komite Sekolah.

Disisi lain, masih minimnya akses masyarakat, terutama masyarakat bawah untuk bisa memperoleh layanan pendidikan yang bermutu bagi anak-anaknya, sebagai akibat dari kurangnya komitmen pemerintah dan rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, sehingga mereka tidak mampu menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah yang bermutu. Padahal, jika ditilik dari hak memperoleh pendidikan sebagai hak asasi bagi setiap warga negara, maka pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk menyediakan fasilitas dan pendanaannya bagi pendidikan yang bermutu). PaUng tidak saat ini pemerintah baru terfokus pada pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁵⁶⁶Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (ed.), *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Adicita Karya Nusa, 2001, hal. 73-75.

mengamanatkan bahwa, setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut, pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) serta satuan pendidikan yang sederajat. Signifikansi dalam masalah ini adalah apakah target pendidikan untuk semua (*Education For All*)⁵⁶⁷ bisa terwujud.

Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan peran serta masyarakat terutama orang tua peserta didik sebagai pengguna jasa pendidikan untuk ikut serta dalam membiayai pendidikan.⁵⁶⁸ Inilah yang kemudian menimbulkan persoalan cukup pelik, seperti “bola salju” (*snow ball*) yang akhirnya tidak jelas siapa yang bertanggung jawab dalam masalah pendidikan ‘wajib belajar’, sementara dana pendidikan yang disediakan pemerintah dirasa belum cukup untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan yang bermutu. Persoalan

⁵⁶⁷*Education For All* diperkenalkan oleh UNESCO, di Bangkok dengan nama ‘Asia-Pasifik Programme for Education for All (APPEAL) telah berkembang dengan pesat dan telah menjadi program pemerintah yang sangat penting. *The World Summit on Education for All* Jontien tahun 1990 telah menghasilkan deklarasi dunia tentang pendidikan untuk semua, yang tujuan akhirnya adalah memenuhi kebutuhan belajar anak-anak, pemuda, dan orang dewasa. Komitmen UNESCO tentang pendidikan untuk semua melalui forum pendidikan dunia (*World Education Forum*) yang dilaksanakan di Dakar, Senegal, pada tanggal 26-28 April 2000 telah menghasilkan enam kesepakatan: *Pertama*, memperluas dan meningkatkan mutu perawatan dan pendidikan anak usia dini, terutama anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung. *Kedua*, menjamin semua anak menjelang tahun 2010, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam kesulitan, dan mereka yang termasuk etnis minoritas, mempunyai akses untuk menyelesaikan pendidikan dasar yang berkualitas. *Ketiga*, menjamin agar kebutuhan belajar bagi generasi muda dan orang dewasa terpenuhi melalui akses yang adil pada program-program belajar dan pendidikan keterampilan hidup (*life skill*) yang sesuai. *Keempat*, menurunkan tingkat buta huruf orang dewasa sebesar 50% dari keadaan sekarang menjelang tahun 2015, terutama kaum perempuan dan akses yang adil dalam pendidikan dasar dan pendidikan berkelanjutan bagi semua orang dewasa. *Kelima*, menghapus disparitas gender di pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan sehingga mempunyai akses dan prestasi yang sama dalam pendidikan dasar dengan kualitas yang baik. *Keenam*, memperbaiki semua aspek kualitas dan menjamin keunggulannya, sehingga hasil-hasil belajar yang diakui dan terukur dapat diraih oleh semua siswa, terutama di bidang keaksaraan, angka dan ketrampilan hidup. Lihat A. Malik Pajar, *Holistika Pemikiran Pendidikan*, Jakarta, PT. Raja Grafiika Persada, 2005, h. 251-253.

⁵⁶⁸Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang SISDIKNAS tahun 2003, pasal 46 ayat 1 yang berbunyi: “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.”

ini semakin 'blunder' karena tidak adanya standarisasi seberapa besar orang tua peserta didik harus mengeluarkan biaya ketika hendak menyekolahkan anaknya di Sekolah Dasar yang bermutu. Biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua siswa baru mencapai angka hingga jutaan rupiah untuk Sekolah Dasar tertentu. Sehingga hanya orang-orang yang mampu secara finansial (kelas masyarakat ekonomi menengah dan atas) yang mempunyai keleluasaan untuk memilih sekolah yang *kualified* (bermutu).

Terkait dengan dikurirkannya BOS (Biaya Operasional Sekolah) sebagai tindak lanjut dari Program Kompensasi Pengurangan (penghapusan) Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM), di mana seluruh sekolah dasar atau yang sederajat dan menengah atau yang sederajat, baik negeri maupun swasta mendapat dana BOS. Tetapi faktanya, di luar itu (dana BOS) masih banyak 'tarikan' atau iuran-iuran lain yang cukup besar dan bervariasi di beberapa sekolah dasar yang bermutu dengan argumentasi untuk peningkatan mutu pendidikan atau prestasi siswa. Walhasil, masyarakat/ orang tua ibarat 'sapi perah' bagi sekolah, yang setiap saat bisa diminta sumbangan pendidikan.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang bermutu adalah sekolah-sekolah yang mempunyai dukungan finansial besar dari masyarakat (orang tua). Akibatnya anak-anak dari kelompok masyarakat ekonomi lemah terpaksa harus merelakan dirinya mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah yang hanya mengandalkan subsidi pemerintah tersebut (BOS) yang mutu pendidikannya tidak dijamin. Meski di antara mereka ada anak yang memiliki kemampuan dasar (kecerdasan) yang baik, namun tidak diterima di sekolah yang bermutu karena orang tuanya tidak mampu. Akibat lanjut, para luaran (*output*) dari sekolah yang kurang (tidak) bermutu otomatis tidak bisa (kalah) bersaing dengan anak-anak yang luaran sekolah-sekolah yang bermutu.

Sebagai catatan kritis, sistem penganggaran pendidikan di Indonesia menurut Clark sangat rumit, dan di sana tidak terdapat mekanisme yang teratur untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai pembiayaan sekolah atau membandingkan perbedaan

biaya-biaya antar jenjang pendidikan. Tidak ada data komprehensif mengenai biaya dan penganggaran pendidikan di sekolah dan masyarakat sebagai bahan bagi pemerintah dalam mengembangkan dan menentukan kerangka kebijakan mobilisasi, alokasi sumber-sumber, dan efektivitas penggunaan biaya pendidikan.⁵⁶⁹ Oleh sebab itu tidak mengherankan ketika banyak kasus di sekolah yang mengandalkan pembiayaan sekolah dengan menarik dana yang sangat besar kepada masyarakat (wali siswa). Apalagi dengan berlindung kepada konsep MBS dan otonomi sekolah yang sekarang sedang menjadi kebijakan pendidikan nasional kita, seakan sekolah memperoleh legitimasinya untuk menarik dana masyarakat untuk pembiayaan pendidikan.

Di sinilah peluang terjadinya komersialisasi pendidikan dengan berbagai alasan: *Pertama*, subsidi pemerintah untuk biaya operasional sekolah sangat terbatas sehingga tidak mungkin mengandalkan dana sepenuhnya dari pemerintah. Sementara kebutuhan sekolah dan tuntutan mutu pendidikan memerlukan dana yang tidak sedikit. *Kedua*, konsep MBS yang berbasis otonomi sekolah memungkinkan pihak sekolah secara mandiri untuk mencari dana dan mengelolanya. Apalagi jika kerangka MBS tidak dipahami oleh pengelola pendidikan secara benar, maka pemungutan dana dilakukan menurut keinginan sekolah untuk biaya operasional pendidikan tanpa batas kewajaran. Orang tua siswa sebagai unsur masyarakat yang berhubungan langsung dengan sekolah akan menjadi sasaran pertama dalam pendanaan. *Ketiga*, tidak adanya standarisasi penarikan biaya pendidikan dari Dinas terkait, membuka peluang bagi sekolah melakukan pungutan secara liar (bebas). Sebagai akibatnya, sekolah-sekolah mahal yang menjual mutu hanya dapat dijangkau oleh sekelompok kecil masyarakat.⁵⁷⁰ Hal ini juga sebenarnya mengingkari garis kebijakan

⁵⁶⁹Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan: Pembuka Ruang Kreativitas, Inovasi dan Pemberdayaan Potensi Sekolah dalam Sistem otonomi Sekolah*, Bandung: Alfabeta, 2007, h. 218

⁵⁷⁰Meski pada kenyataannya, komersialisasi pendidikan ini belum menyentuh pada lembaga-lembaga pendidikan madrasah, karena secara faktual juga memang belum ada lembaga pendidikan madrasah yang betmutu (memiliki mutu pendidikan yang berkelas, seperti sekolah standar nasional atau bertaraf internasional), sehingga belum laku jual, apalagi memasang tarif seperti yang dilakukan oleh lembaga pendidikan sekolah yang berkelas nasional atau internasional.

pendidikan kita yaitu pendidikan untuk semua (*education for all*) dan tidak sejalan dengan semangat demokrasi pendidikan.

Untuk menghindari komersialisasi dalam pendidikan, maka perlu dilakukan identifikasi segala kebutuhan dan kemampuan pemenuhan kebutuhan tersebut. Alokasi kebutuhan sekolah seperti keperluan operasional pengajaran, operasional administrasi dan perkantoran, operasional laboratorium, operasional perpustakaan, perawatan dan pemeliharaan, penggantian barang-barang keperluan mendesak, kebersihan dan kesehatan harus dapat diidentifikasi oleh pihak sekolah bersama masyarakat. Untuk memenuhi kriteria dan kebutuhan siswa juga sudah termasuk mahal, karena itu diperlukan dana dan SDM yang mengurusnya. Dan karena faktor mutu merupakan faktor utama, maka investasi untuk keperluan pendidikan dan sekolah sangat diperlukan sebagai prioritas, karenanya kepala sekolah harus dapat menghitung tiap item kebutuhan dan mengalokasikan anggarannya, kemudian mengatur strategi untuk pemenuhannya.

E. Kenaikan Anggaran Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam

Secara akademik keluaran dari pendidikan pendidikan Islam (madrasah) bahkan sampai pada tingkat pendidikan tinggi Islam (semisal jurusan PAI di Fakultas Tarbiyah) senyatanya menghasilkan lulusan yang menguasai keilmuan Islam, dan secara sosial memiliki tanggung jawab dengan keilmuan yang diperolehnya, Arah reformasi pendidikan, sebagaimana diungkap Dede Rosyada, adalah demokratisasi dalam pengembangan *stakeholder* dan pengelolaan pendidikan, yang didukung oleh komunitasnya sebagai kurikulum dan program pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, serta kontributor dalam penyelenggaraan proses pendidikan.⁵⁷¹ Dengan demikian reformasi pendidikan (agama) Islam harus berangkat dari konsep revitalisasi pendidikan agama yang sudah lama menjadi kebutuhan umat Islam Indonesia. Istilah revitalisasi memberi implikasi dan justifikasi bahwa pendidikan Islam itu pernah Vital'

⁵⁷¹Lihat Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta : Kencana, 2007, h. 11.

tetapi sekarang mandul. Hampir bisa dipastikan bahwa sebagian umat Islam sepakat dengan asumsi kemandulan ini, meskipun dengan respon yang berbeda-beda. Dalam rangka revitalisasi, maka kiblat umat Islam harus merujuk kembali pada permata yang sudah hilang (*heritage in the golden age*),⁵⁷² merekonstruksi serta mereformulasi konsep pendidikan Islam yang mampu menyikapi perubahan zaman. Sehingga sejarah peradaban Islam yang ditandai dengan hubungan harmonis antara timu agama dan pengetahuan umum dapat terbangun kembali.

Menurut Abuddin Nata dalam bukunya *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan⁵⁷³ Islam dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, telah terintegrasi, oleh karena itu, para pengelola pendidikan terbuka peluang untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam.⁵⁷⁴ Mutu pendidikan Islam dalam perspektif manajemen pendidikan, maka pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumen (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya pendidikan Islam dalam hal ini madrasah. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan (di sekolah/madrasah) tidak berjalan. Biaya (*cost*) dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis penyelenggaraan yang berkenaan

572Abdurrahman Mas'ud, "Reformasi Pendidikan Agama Menuju Masyarakat Madani" dalam Ismail (ed.), *Pendidikan Islam Demokratisasi dan Masyarakat Madani* Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, 2000, h. 25

573Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang seluruh komponen serta berbagai perangkat pendukung lainnya dapat memuaskan peserta didik, pimpinan, guru dan masyarakat pada umumnya.

574Sisdiknas tidak hanya mencakup pendidikan formal tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), melainkan juga termasuk pendidikan keagamaan, yakni Madrasah Diniyah dan Pesantren, serta pendidikan diniyah non formal, yakni pengajian kitab, majelis taklim. Dengan dimasukkannya, pendidikan agama dan keagamaan ini ke dalam undang-undang tersebut menunjukkan kesungguhan yang tinggi dari pemerintah, agar mutu pendidikan Islam dapat ditingkatkan. Lihat H. Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, h. 52-55

dengan semua jenis penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang, barang dan tenaga yang dapat diuangkan). Dalam pengertian ini misalnya, iuran siswa adalah jelas merupakan biaya, tetapi semua sarana fisik, baik sekolah maupun guru juga adalah biaya.⁵⁷⁵

Dalam perspektif anggaran, pendidikan Islam yang dikelola Kementerian Agama terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Pengelolaan anggarannya masih tetap terpusat di Kementerian Agama RI; berbeda dengan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak termasuk instansi vertikal yang biaya pendidikannya diserahkan pada pemerintah Kabupaten /Kota. Alasannya bahwa agama tidak termasuk yang diotonomikan atau didesentralisasikan. Menurut hemat penulis, alasan ini perlu diberi catatan khusus, karena tampaknya maksud awalnya adalah kenapa urusan agama tetap dipegang oleh pemerintah pusat, adalah dalam pengertian tentang pembinaan kehidupan beragama, yang kemungkinannya bukan meliputi pendidikan yang dibinanya.⁵⁷⁶

Akibatnya kedudukan madrasahpun menjadi tanggung, yaitu tetap dikelola oleh pemerintah pusat (secara terpusat – menggantung keatas) pada saat yang sama, semua sekolah lainnya telah didesentralisasikan pengelolaannya. Karenanya madrasah menjadi sebuah anomali pada era otonomi yang berkembang dewasa ini. Salah satu akibatnya pembiayaan madrasah tidak diperhitungkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Karena madrasah dianggap telah memperoleh dana dari pemerintah pusat melalui jalur Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Terlepas dari sumber pembiayaan yang vertikal bagi madrasah dan otonomi daerah bagi sekolah, maka pada prinsipnya anggaran pendidikan terus mengalami kenaikan. Pemerintah dewasa ini cenderung untuk terus menerus meningkatkan anggaran pendidikan.

Salah satu tujuannya adalah untuk mengimbangi beban yang ditanggungi oleh orang tua murid. Karenanya, peningkatan anggara

⁵⁷⁵Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2003, hal. 4.

⁵⁷⁶Masykur H Mansyur, "Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Islam," h. 5

pemerintah untuk sektor pendidikan sesungguhnya bertujuan untuk mengimbangi besarnya kontribusi keluarga agar minimal tidak terlalu timpang, sehingga pemerintah yang selama ini sangat berperan dalam mengendalikan sekolah secara moral cukup memiliki legitimasi dalam memainkan perannya.⁵⁷⁷

Dari pemahaman di atas, bahwa secara yuridis pendidikan Islam menjadi kuat, namun demikain problem mendasar yang dihadapi masalah mendasar yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam (madrasah) adalah mutu pendidikan dan pendanaan, baik madrasah yang dikelola oleh pemerintah (madrasah negeri) maupun madrasah yang dikelola oleh masyarakat (madrasah swasta), sehingga masih memprihatinkan jika dilihat dari mutu pendidikannya. Beberapa problem yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam (madrasah) selama ini adalah:⁵⁷⁸

(1) Lemahnya segi manajemen. Dalam hal ini pengelolaan madrasah belum benar-benar diarahkan kepada penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan profesional, baik dari perencanaan, programming, proses pembelajaran sampai pada evaluasinya. Masih banyak madrasah yang dikelola atas dasar “asal jalan” (terutama madrasah-madrasah swasta yang hidup segan mati tak hendak’ (*wujuduhu ka’adamihfy*). (2) SDM yang kurang memadai dan kurang *mumpuni* profesional). Tidak dipungkiri bahwa masih banyak para pengelola dan tenaga pendidik di madrasah yang masih belum memenuhi standar profesionalisme untuk sebuah penyelenggaraan pendidikan yang bermutu (*kuafafied*). Etos kerja yang didasari pada semboyan ihlas beramal malah menjadi alat legitimasi untuk berbuat asal jalan dan semaunya. Padahal penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tidak bisa demikian. Belum lagi tenaga pendidik yang dimiliki madrasah masih banyak ditemui terjadi *mis-match* (ketidaksesuaian) antara disiplin keilmuaan yang dimiliki dan tanggung jawab keilmuan yang diampunya (misalnya lulusan madrasah aliyah atau

577Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan dasar dan Menengah, Rujukan bagi Penetapan Kebijakan Pembiayaan Pendidikan pada Era Otonomi dan manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, Cet.V, 2010, h. 94

578Ahmad Arifi, “Anggaran Pendidikan dan Mutu Pendidikan, Respon Kebijakan Anggaran 20% “, dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. V, No. 1, 2008, h. 120

lembaga pendidikan agama mengempu pelajaran umum).

(3) Imput siswa yang pada umumnya bukan anak-anak yang memiliki tingkat kecerdasan bagus karena masuk ke madrasah bukan menjadi pilihan pertama. Pendidikan madrasah masih menjadi kelas dua setelah pendidikan sekolah, sehingga umumnya orang tua baru mau memasukkan ke madrasah apabila anaknya tidak diterima di sekolah umum (terutama di sekolah yang bermutu/ unggulan). (4) dana yang minim. Pengelola madrasah merasa kerepotan untuk mengadakan penyelenggaraan yang bermutu, sementara tuntutan pendidikan bermutu harus didukung oleh dana yang besar.

Secara umum Mastuhu melihat kelemahan mendasar dari madrasah adalah Kelemahan sistem pendidikan Islam yaitu: (1) mementingkan materi di atas metodologi, (2) memetingkan memori di atas analisis dan dialog, (3) memetingkan pikiran vertical/linear diatas lateral, (4)mementingkan penguatan otak kiri di atas otak kanan, (5) materi pelajaran agama yang diberikan masih bersifat tradisional belum menyentuh aspek rasional, (6) penekanan yang berlebihan pada ilmu sebagai produl final, bukan pada proses metodologinya dan(7) mementingkan orientasi memiliki di atas menjadi.⁵⁷⁹

Melihat kelemahan di atas, Abdur Rahman Shaleh menjelaskan reposisi dunia madrasah dalam memasuki era Indonesia Baru ada beberapa hal harus dibenahi:⁵⁸⁰ *Pertama*, pengembangan madrasah dalam mewujudkan visinya, maka madrasah mengembangkan misi untuk menjadikan madrasah yang islami, populis, dan berkualitas. Dimaksudkan dengan Islami, yaitu madrasah yang berciri khas Islam, yang mampu menciptakan anak bangsa yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt, dan berakhlak mulia. Dimaksudkan dengan populis yakni madrasah yang selalu dicintai oleh masyarakat karena tumbuh dan berkembang dari, oleh dan untuk masyarakat, serta lulusannya memmiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Selajutnya dimaksudkan dengan berkualitas, yaitu madrasah yang mampu mencetak anak bangsa yang memiliki

579Lihat Mastuhu *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta, Logos, 1999, h. 59.

580Lihat Abdur Rahman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa; Visi, Misi dan Aksi*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006, h. 77-79.

kemampuan dan keterampilan yang cukup dan sanggup menghadapi tantangan zaman. *Kedua*, hidup dan berkembangnya madrasah akan bergantung seberapa besar kesadaran umat Islam untuk memelihara kelangsungannya yang harus dibangun berbasis kekuatan masyarakat. Sementara itu dalam hal penyelenggaraan madrasah menekankan tugas pembinaan kearah *school based management* terbuka sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin maju dan berkembang secara demokratis. *Ketiga*, madrasah dalam posisinya memasuki era Indonesia baru, dunia madrasah memerlukan dinamika di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Keempat*, penyelenggaraan madrasah pada gilirannya harus mampu memperbaiki sistem manajerial kualitas sumber daya tenaga kerja pendidikan, sarana prasarana(perpustakaan, laboratorium computer, workshop keterampilan) dan meningkatkan sumber pembiayaan melalui peningkatan peran serta masyarakat pendukungnya. *Kelima*, pembiayaan pendidikan bagi setiap anak bangsa Indonesia belum diperlakukan secara adil dalam memberi layanan pendidikan dan pengalokasian anggaran, antara lain adanya perbedaan pembiayaan pendidikan dan unit *cost* perkapita siswa antara siswa sekolah umum dan siswa madrasah. *Keenam*, peningkatan kualitas mutu pendidikan pada madrasah dalam memasuki masyarakat pada era Indonesia baru harus dilaksanakan untuk memperkuat dan memperkokoh misi, fungsi dan tugas pokok agar madrasah setara(tidak perlu sama) pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan dengan sekolah umum. Di masa mendatang pada era Indonesia Baru harus dapat dihapuskan dikotomi antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Kebijakan manajerial pendidikan perlu diserahkan kepada sekolah. Demikian pula dalam hal pembiayaan oprasional pendidikan bagi sekolah swasta perlu ditingkatkan dan diberikan prioritas dalam menentukan sasaran strategis.

Dengan kata lain, menurut Zamroni Pendidikan dalam Perspektif Reformasi, perlu dilakukan penataan kembali (restrukturisasi) dalam penyelenggaraan pendidikan, bahkan rekonstruksi pendidikan yang tidak hanya bersifat perombakan kurikulum, tetapi lebih pada merombak sistem, struktur dan proses

pendidikan. Demikian juga orientasi pendidikan Islam perlu diarahkan kepada capaian mutu pendidikan yang secara substansial benar-benar menunjukkan pendidikan yang bermutu.⁵⁸¹ Ditambah lagi dengan dukungan alokasi anggaran pendidikan 20% dari total keseluruhan APBN, lembaga pendidikan pendidikan Islam (sekolah khususnya madrasah) sangat mungkin untuk melakukan segera dengan langkah-langkah strategis yang pasti dan terarah menuju pendidikan yang bermutu, sehingga upaya merubah citra madrasah sebagai lembaga pendidikan kelas dua (bahkan *under estimate*) jika dibanding pendidikan sekolah berangsur-angsur dapat dicapai. Mutu pendidikan tidak bisa terlepas dari pendanaan yang besar. Sarana dan prasarana pendidikan (gedung, perpustakaan dsb.) yang memadai, kualitas guru, dan tersedianya laboratorium sekolah dan fasilitas lainnya sangat berpengaruh bagi penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Akan tetapi persoalan manajemen pendidikan (khususnya madrasah) juga menjadi persoalan mendasar yang perlu dibenahi, bahkan perlu dilakukan reformasi sistemik. Reformasi pendidikan madrasah menjadi alternatif untuk mewujudkan cita-cita pendidikan yang ideal dan bermutu. Oleh sebab itu, anggaran pendidikan yang 20 % perlu disikapi secara cerdas dan profesional. Jika tidak, malah tidak menutup kemungkinan, dengan berlimpahnya dana yang disediakan pemerintah tersebut justru memunculkan persoalan baru, yakni mampukah sekolah-sekolah mendistribusikan (mengalokasikan) dana yang tersedia untuk menjamin mutu pendidikan. Bagi pengelola pendidikan madrasah tidak hanya berlomba-lomba untuk membangun sarana fisik semata, akan tetapi juga konsep peningkatan mutu pendidikan harus jelas, terutama berkaitan dengan sumber daya dan modal insani madrasah guru dan tenaga kependidikan) yang dimiliki harus menjadi perhatian utama. Dengan anggaran pendidikan 20% tersebut, madrasah diharapkan dapat mengejar ketertinggalannya mutu pendidikannya dari sekolah. Dengan demikian, adanya anggaran pendidikan yang semakin besar dari alokasi APBN diharapkan upaya untuk mencapai dan mewujudkan pendidikan yang bermutu di madrasah lebih cepat

581Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*, Yogyakarta, Bayu Indra Grafika, 2000, h. 43.

tercapai.⁵⁸² Di tahun 2013 pendidikan Islam mendapat kenaikan anggaran pendidikan menurut Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Nur Syam mengatakan, tahun ini ada peningkatan jumlah anggaran peningkatan kualitas pendidikan sebesar Rp43 triliun. Sebelumnya anggaran untuk Pendis hanya sebesar Rp 37 triliun dan Rp39 triliun. Kenaikan anggaran tersebut guna bagian dari peningkatan kualitas pendidikan Islam dalam meningkatkan kesejahteraan para guru. Menurutnya, anggaran tersebut akan dipergunakan guna memberikan tunjangan dalam memberikan sertifikasi kepada guru dan dosen, gaji pegawai dan belanja pegawai sebesar Rp6,6 triliun. Padahal, kita hanya naik sekitar Rp3 triliun. Permasalahannya ada pada gaji dan belanja pegawai serta tunjangan guru dan dosen. Itulah masalah yang dihadapi, katanya. Lanjut dia, selama ini belanja pegawai bisa sampai menghabiskan anggaran sebesar 51 persen selain itu 49 persen untuk kepentingan BOS dan pembangunan gedung-gedung pendidikan. Sedangkan, anggaran untuk pendidikan hanya sebesar 10 persen.⁵⁸³

F. Kesimpulan

Kajian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kenaikan anggaran pendidikan terhadap pendidikan Islam, khususnya pada lembaga madrasah, bahkan anggaran pendidikan yang 20% perlu disikapi secara cerdas dan profesional. Jika tidak, malah tidak menutup kemungkinan, dengan berlimpahnya dana yang disediakan pemerintah tersebut justru memunculkan persoalan baru, yakni mampukah sekolah-sekolah mendistribusikan (mengalokasikan) dana yang tersedia untuk menjamin mutu pendidikan. Bagi pengelola pendidikan madrasah tidak hanya berlomba-lomba untuk membangun sarana fisik semata, akan tetapi juga konsep peningkatan mutu pendidikan harus jelas, terutama berkaitan dengan sumber daya dan guru dan tenaga kependidikan, yang dimiliki harus menjadi perhatian utama.

582Ahmad Arifi, "Anggaran Pendidikan dan Mutu Pendidikan, Respon Kebijakan Anggaran 20% ", h. 126

583<http://nasional.sindonews.com/read/2013/05/01/15/744046/pendidikan-islam-mendapat-kucuran-anggaran-rp43-triliun> diakses tanggal 23 Desember 20013.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jamali, Fadhil, *Menerobos Krisis Pendidikan Dunia Islam*, Jakarta, Golden Terayon Press, 1992.
- Arifi, Ahmad, "Anggaran Pendidikan dan Mutu Pendidikan, Respon Kebijakan Anggaran 20% ", dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. V, No. 1, 2008.
- Bakar, Osman, *Tawhid and Science: Islamic Perspectives on Religion and Science*, Terj. Yulianto Liputo dan M.S.Nasrulloh, *Tauhid dan Sains: Perspektif Islam tentang Agama dan Sains*, Bandung:Pustaka Hidayah, Edisi kedua dan Revisi, 2008.
- Cahyana, Ade, From: ., akses, tanggal, 16/12/2013, jam.13.10.
- Darmaningtyas, *Pendidikan Rusak-Rusakan*, Yogyakarta, LkiS, 2007.
- Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (Ed), *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adi Cita karya Nusa Kerjasama dengan Depdiknas; Bappenas, 2001.
- Fatah, Nanang, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet.v. 2009.
- _____, *Standar Pembiayaan Pendidikan*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2012.
- _____, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2012.
- Fajar, A. Malik, *Holistika Pemikiran Pendidikan*, Jakarta, PT. Raja Grafiika Persada, 2005.
- H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan; Pengantar Untuk memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai kebijakan Publik*, Yogyakarta, Pustaka

- Pelajar, Cet.II 2009.
- <http://edukasi.kompas.com/read/2012/06/21/14473354/Anggaran>. diakses tanggal 24 Desember 2013
- <http://www.pikiran-rakyat.com/node/200381> diakses tanggal 23 Desember 2013
- Juliantari, Siti, "Anggaran Pendidikan Naik tetapi ke Mana Larinya," *Kompas*, Kamis 21/6/2012
- Mansyur, Masykur H," Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Islam," Telah Dipublikasikan di *Majalah Ilmiah Solusi Unsika* ISSN 1412-86676 Vol. 10 No. 22 Ed. Mar - Mei 2012.
- Mastuhu *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta, Logos, 1999.
- Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam; Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mulyasa, E., *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mas'ud, Abdurrahman, "Reformasi Pendidikan Agama Menuju Masyarakat Madani" dalam Ismail (ed.), *Pendidikan Islam Demokratisasi dan Masyarakat Madani* Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo bekerja sarna dengan Pustaka Pelajar, 2000.
- Nata, Abuddin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012.
- _____, *Manajemen Pendidikan Islam: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2003.
- Rosyada, Dede, *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta : Kencana, 2007.
- Sanaky AH., Hujair, *Paradigma Pendidikan Islam, Membangun Masyarakat Madani Indonesia*, Safiria Insania dan MSI, Yogyakarta, 2003.
- Shaleh, Abdur Rahman, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa; Visi, Misi dan Aksi*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006.
- Soedjiarto, "Memahami Arah Kebijakan GBHN 1999-2004 tentang

- Pendidikan Sebagai Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Membangun Peradaban Negara bangsa Indonesia*”, MAKALAH, Yogyakarta, Primagama-IPSI-PGRI, 1999.
- Supriadi, Dedi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2003.
- Suyanto, *Dinamika Pendidikan Nasional Dalam Percaturan Dunia Global*, Jakarta, PSAP Muhammadiyah, 2006.
- Syukri Zarkasyi, KH. Abdullah, *Manajemen Pesantren; Pengalaman Pondok Modern Gontor, Jawa Timur*, Trimurti Press, 2005.
- Tim Bela Bangsa, *UUD 1945 dan Perubahannya*, Jakarta: Belabook Media, 2010.
- UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2009.
- www. Thelearning curve .Pearson com. Report*, 2012.
- Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*, Yogyakarta, Bayu Indra Grafika, 2000.

BAB 16

PARADIGMA PEMBELAJARAN CONDITIONING DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

A. Pendahuluan

Paradigma pembelajaran, sebagai upaya pendidik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar yang kegiatannya sistematis dan dilakukan secara sengaja oleh pendidik untuk membantu peserta didik agar melakukan kegiatan belajar. Karena itu, konteks pembelajaran menjadi kata kunci yang sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah proses pendidikan,⁵⁸⁴ hal disebabkan adanya intraksi komunikasi antara pendidik dan anak didik.⁵⁸⁵

Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah usaha mempengaruhi emosi, intelektual, dan spritual seseorang agar mau belajar dengan kehendaknya sendiri.⁵⁸⁶ Namun demikian, pembelajaran menjadi debat akademik sepanjang sejarah pembelajaran, hal ini disebabkan banyaknya problem yang terjadi dalam dunia pembelajaran baik guru, khususnya pada peserta didik, sehingga melahirkan teori belajar dalam pembelajaran. Hanya saja, menurut Ahmad Tafsir dalam pembelajaran guru seharusnya

584Lihat Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis*, Jakarta, Kencana, 2004, h. 89

585Dalam proses pembelajaran terdapat tiga unsur yang saling terkait yaitu *in put*, *proses*, dan *out put*. *In put* adalah masukan awal yang berupa siswa, proses merupakan olahan dari *in put* dan *out put* serta *out put* adalah hasil olahan *in put*. Thoifuri, *Menjadi Guru Inisator*, Semarang, ReSAIL, 2007, h. 107

586Abuddin Nata, *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*, Jakarta, Kencana, 2009, h. 85.

mengajarkan cara belajar dan mau belajar sendiri, bukan mengajarkan bahan pengajaran,⁵⁸⁷ karena itu, kaidah ini membutuhkan pendekatan pembelajaran yang digunakan guru. Richard Anderson yang dikutip Sabri, mengajukan dua pendekatan, yakni pendekatan yang berorientasi kepada guru(*teacher centered*) dan pendekatan yang berorientasi pada siswa(*student centered*).⁵⁸⁸

Teori pendekatan pertama disebut transmisi kultural dimana tugas utama guru adalah meneruskan informasi atau nilai-nilai kepada peserta didiknya.⁵⁸⁹ Namun secara pragmatis diantara sekian banyak teori yang berdasarkan hasil eksperimen terdapat ada tiga macam yang sangat menonjol yakni⁵⁹⁰: connectionism, classical contidioning, dan operant conditioning. Teori-teori tersebut merupakan ilham yang mendorong para ahli melakukan eksperimen-eksperimen lainnya untuk mengembangkan teori baru.

Makalah ini membahas teori belajar contidioning dalam perspektif Islam, dengan menggunakan pendekatan deskriptis analisis, serta menggunakan sumber-sumber yang otoritatif.

B. Teori Pembelajaran *Conditioning*

Salah satu teori belajar psikologi⁵⁹¹ adalah teori belajar

587Menurut prinsip ini hakikat pembelajaran ialah melatih murid belajar sendiri dan mau belajar sendiri. Guru hanyalah seorang penolong murid dalam mencapai tujuan itu. Lihat Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1999, h. 27

588Pendekatan pertama disebut tipe otokratis dan kedua tipe demokratis. Ahmad Sabri, *Strategi Belajar Mengajar dan Micro Teaching*, Jakarta Ciputat Press, 2010, h. 10

589Konsep pendekatan ini hingga saat ini cukup mendominasi lembaga pendidikan. Hal ini terjadi, karena pendidikan sering menjadi alat politik dari penguasa atau para pembuat kebijakan dalam bidang pendidikan. Konsep ini cukup berhasil membawahkan manusia sesuai kehendak orang yang merancanginya, namun gagal dalam memberikan peluang kepada masyarakat untuk berkembang sesuai dengan bakatnya. Abuddin Nata, *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*, h. 141

590Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, Bandung, Rosdakarya, 2013, h. 103

591Konsep belajar dalam teori empirisme atau yang lebih dikenal kertas tabula rasa yang berpendapat bahwa anak dilahirkan berada dalam kekosongan seperti kertas putih yang belum ditulisi yang tidak membawa apa-apa, tetapi justru berisi dengan daya-daya perbuatan yang dikembangkan lebih lanjut. Namun teori belajar ini tidak memberi batasan pada nilai-nilai tertentu, sehingga melahirkan rumpun teori-teori belajar. Pengagagas teori Empirisme adalah John Locke, baca Baharuddin, "Aliran Empirisme dan Konsep Fitrah, Komparasi antara Pemikiran Pendidikan John Locke dengan

behaviorisme yang di dalamnya bermacam-macam teori, seperti teori conditioning yang berpijak pada sebuah asumsi bahwa anak tidak membawa potensi-potensi apa dari kelahirannya. Perkembangan anak ditentukan oleh faktor lingkungan sekolah, masyarakat, keluarga dan budaya, religi dan sebagainya.⁵⁹²Bahkan aliran ini menurut Hasan Langgulung sangat menjunjung tinggi eksperimental yang dianggap sebagai tiang sains sebagai psikologi ilmiah.⁵⁹³Ironisnya teori belajar ini hanya fokus pada tingkah laku tetapi menghilangkan makna jiwa yang sesungguhnya,⁵⁹⁴ sehingga semua definisi-definisi teori belajar yang dikemukakan ilmuwan tidak bisa lepas teori psikologi pendidikan Barat yang mengatakan belajar terjadinya perubahan pada diri individu yang belajar baik aktual maupun potensial.⁵⁹⁵

Model belajar seperti inilah sehingga seorang Guru Besar Swiss Gunar Mirdal peraih hadiah Nobel di Bidang Ekonomi mengatakan definisi belajar hanya membekali murid-murid dengan paspor guna membebaskan diri dari keterampilan tangan, dan akhlak.⁵⁹⁶ Bahkan Fadhlī al-Djamali seorang ilmuwan Muslim berkebangsaan Irak yang hijrah ke Tunisia kemudian menjadi Guru Besar dalam Ilmu Pendidikan di Universitas Tunis mengatakan

Pendidikan Islam”, dalam *Jurnal Foramadiah, Kajian Pendidikan dan Keislaman*, STAIN Ternate, Vol. 1. No. 1 Juni 2005, h. 72.

592Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner*, Jakarta, Rajawali Press, 2010, h. 175

593Hasan Langgulung, *Kreativitas dan Pendidikan Islam, Analisis Psikologi dan Filsafatnya*, Jakarta, Pustaka Al-Husna, 1991, h. 97-98

594Makna jiwa adalah daya hidup rohaniah yang bersifat abstrak, dan menjadi penggerak dan pengatur sekalian perbuatan pribadi (*organic behavior*), mulai dari hewan hingga manusia. Abuddin Nata, *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*, h. 53. Lihat juga Hasan Langgulung, *Kreativitas dan Pendidikan Islam, Analisis Psikologi dan Filsafatnya*, h. 97.

595E. Waker belajar adalah suatu rangkaian proses kegiatan respon yang terjadi dalam proses belajar –mengajar yang menimbulkan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh/ atau perubahan-perubahan sebagai akibat dari pengalaman. Lihat Edwar E. Waker, *Conditioning and Instrumen Learning*, Terjemahan, Jakarta, UI Press, h. 2. Untuk lebih lengkapnya definisi tentang belajar lihat, Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta Kalam Mulia, 2002, h. 26. Belajar adalah sesuatu kegiatan anak didik dalam menerima, menanggapi serta menganalisa bahan-bahan pelajaran yang disajikan oleh pengajar, yang berakhir pada kemampuan untuk menguasai bahan pelajaran yang disajikan. H.M. Arifin, *Hubungan Timbal Balik Agama di Sekolah dengan Rumah Tangga*, Jakarta, Bulan Bintang, 2012, h. 20

596Suwendi, *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam*, Jakarta, Rajagrafindo Persada,

teori dan konsep pendidikan UNESCO (United Nation Education Scientific and Culture Organisation), hanya menganalisis tentang fisik, dan melupakan segi-segi rohaniah dan akhlak dalam konsep kehidupan manusia.⁵⁹⁷ Karena itu, semua teori yang dibangun baik teori belajar konvergensi, behaviorisme dan aliran-aliran psikologi, semua lebih dikenal dengan kesejatraan hidup duniawi karena landasan filsafahnya adalah *anthropocentric*, sedangkan Islam dapat digolongkan kepada *theocentric*. Pendidikan apapun bentuknya baik yang mendasarkan pada falsafah *anthropocentric* maupun *thocentric* tetap mengakui adanya kebebasan dan sekaligus keterikatan. Kebebasan mengandung sebuah pengertian bahwa peserta didik hakikatnya mempunyai kemampuan untuk berhasil dalam belajar. Adapun keterikatan mengandung pengertian bahwa setiap usaha bisa mengalami kegagalan karena berbagai faktor. Hanya saja kalau landasan yang dipakai falsafah *anthropocentric* maka praktis unsur dunia semata, akan tetapi keterikatan dalam falsafah *theocentric* yang tersentu adalah mengandung pemahaman keterikatan duniawi dan akhirat.⁵⁹⁸

Dari keterangan di atas, nampak jelas bahwa aliran pendidikan konvergensi dan aliran psikologi Barat lainnya mendasarkan pada falsafah *anthropocentric* hanya memandang bahwa kesejatraan peserta didik pada aspek duniawi saja, sedangkan Islam yang berlandaskan pada falsafa *theocentric* memandang bahwa kebahagiaan anak didik ketika menghadirkan Tuhan dalam tingkah lakunya dalam sehari-hari. Hal ini menurut Abdur Rahman Shaleh jika teori ilmiah dijadikan sebagai teori pendidikan, maka kita mesti meninggalkan semau fakta-fakta metafisika, karena itu, teori pendidikan berdasarkan al-Qur'an tidak memisahkan antara fakta ilmiah dengan metafisika, menjadi terpadu dan menyeluruh.⁵⁹⁹ Untuk itu, teori pendidikan Islam harus mampu mengintegrasikan seluruh potensi yang dimiliki peserta didik pada pola pendidikan

597 Fadhil al-Djamali, *Menerebas Krisis Pendidikan Dunia Islam*, Jakarta, Golden Terayon Press, 1988, h. 41

598Suwito, *Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Ibn Miskawaih*, Disertasi tidak diterbitkan, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1995, h. 40.

599Abdurrahman Shaleh Abdullah, *Teori-Teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, h. 24-25

yang ditawarkan, baik potensi yang ada pada aspek jasmani maupun rohani, intelektual, emosional, serta moral etis religius dalam diri peserta didik. Dengan ini pendidikan Islam akan membantu peserta didiknya untuk mewujudkan sosok insan paripurna yang melakukan dialektika pada semua potensi yang dimiliki.

Kelemahan mendasar dari konsep belajar behaviorisme (*conditioning*) adalah paradigma tentang makna jiwa dimana basisnya adalah jiwa empiris dan positif yang didasarkan pada pengalaman, yaitu dengan mencoba mengadakan penelitian, membandingkan, menganalisis, mencari titik persamaan dan perbedaan, kemudian menarik kesimpulan.⁶⁰⁰ Dengan kata lain teori belajar *conditioning* meniadakan jiwa metafisis (dibalik sesudah nyata),⁶⁰¹ sehingga desain pembelajaran *conditioning* pada peserta didik adalah pengontrolan yang sangat kuat terhadap tujuan, materi, lingkungan serta pengukuran hasil belajar, yang seringkali secara fragmatis para guru dan siswa lebih memetingkan prestasi kognitif dari pada afektif dan psikomotorik.⁶⁰² Hasilnya mazhab teori belajar *conditioning* hanya berbasis pada tingkah laku dan tidak pada jiwa yang mengakibatkan tingkah laku, maka teori belajar *conditioning* adalah sains tingkah laku (*behavioral science*),⁶⁰³ yang memandang manusia tidak mempunyai kebebasan. Bahkan unsur rohaniah manusia sudah tidak dianggap penting dalam kesehatan mental.⁶⁰⁴

Teori ini jika ini dianalisis dalam kaca mata Ibn Miskawaih dengan teori jiwa manusia yang dikutip Suwito yang mengatakan pada diri manusia ada daya bernaflu (*al-bahimiyyat*). Daya ini terwujud dalam aktivitas jasmani untuk makan-minum, tumbuh dan berkembang. Daya kebuasan dan keberanian (*al-ghadabiyyat*). Daya ini melahirkan isyarat-isyarat gerak menangkap melalui indera

600Abuddin Nata, *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*, h. 62

601Yang mempertanyakan apa jiwa itu, ada atau tidak, dari mana asalnya dan bagaimana bentuknya.

602Lihat Marwan Saridjo (penyunting), *Mereka Berbicara Pendidikan Islam Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Rajagrafindo, 2009, h. 131.

603Lihat Hasan Langgulang, *Kreativitas dan Pendidikan Islam, Analisis Psikologi dan Filsafatnya*, h. 284-288

604Lihat Hasan Langgulang, *Manusia dan Pendidikan*, Jakarta, Al-Husna Zikra, 1986, h. 308

yang berguna bagi hidup seperti bersuara kalau lapar dan merab-raba untuk mempeoleh makanan. Daya yang terakhir daya berfikir (*al-nathiqat*), daya ini secara bertahap bisa mencapai kesempurnaan yang disebut oleh Ibn Miskawaih dengan aqil. Tingkat tertinggi daya ini adalah daya kerinduan kepada kebajikan mutlak sehingga mampu menerima pancaran al-hikmat dari Tuhan. Daya ini dikatakan sebagai daya kemalaikatan dan ketuhanan.⁶⁰⁵ Dengan berfikir, manusia dapat belajar dengan melakukan *trial and error* secara intelektual. Dalam proses berfikir, manusia sering menghadirkan beberapa macam solusi atas permasalahan yang didapatkannya sebelum akhirnya mereka menjatuhkan pilihan pada satu solusi. Oleh karena itu, para psikolog mengatakan bahwa berfikir merupakan proses belajar yang paling tinggi dan didapat melalui pengajaran serta penelitian.⁶⁰⁶ Maka teori pembelajaran conditioning hanya sampai pada bernafsu (*al-bahimiyyat*). potensi atau daya pertama dorongan jasmani, ego, yakni dorongan untuk berfikir, super ego yakni untuk mencapai hal-hal yang memiliki nilai moral dan diri (*self*) atau nafs.⁶⁰⁷

Dengan demikian, teori pembelajaran conditioning hanya membahas tentang tingkah laku tidak pada makna jiwa, sehingga semua konsep yang dibangun tentang teori belajar berdasarkan fakta empiris. Dalam teori Ibn Miskawaih belajar behaviorisme (conditioning) hanya berada pada penguatan daya atau potensi jasmani nafsu (*al-bahimiyyat*). Atau memakai istilah sufi unsur nasut (kemanusiaan) mendominasi dan hilangnya unsur lahut (ketuhanan).⁶⁰⁸ Dalam teori pendidikan Islam nafs menjadi kunci bagi para tokoh Islam dalam merumuskan konsep pembelajaran. Dalam pandangan Al-Qur'an nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna, dan berfungsi menampung serta mendorong manusia untuk berbuat kebaikan dan keburukan, karena itu, aspek batin

605Lihat Suwito, *Konsep Pendidikan Akhlaq Menurut Ibnu Miskawaih*, h. 94-95. Untuk jelasnya baca Ibn Miskawaih, *Tahzib al-Akhlaq wa tathhir al-A'raq*, di edit oleh Hasan Tamim, Beirut, Mansyurat Dar-al-Maktabat al-Hayat, cetakan II, 1398, h. 37 dan 110-112

606M. Utsman Najati, *Al-Qur'an dan Ilmu Jiwa Agama*, terjemahan Ahmad Rifai Usman, Bandung, Pustaka, 2005, h. 169

607Abuddin Nata, *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*, h. 71

608Abuddin Nata, *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*, h. 70

manusia ini di diperhatikan yang lebih besar di dalam Al-Qur'an. Hal ini sejalan dengan ayat:

وَتَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَهَمُّهَا فُجُورُهَا وَتَفْوَاهَا ۘ

Artinya: Demi nafs serta penyempurnaan ciptanya Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. (QS. Al-Syams, 91: 7-8).

Kata mengilhamkan pada ayat tersebut mengandung arti, bahwa Tuhan memberi potensi pada nafs yang terdapat dalam diri manusia, dan melalui nafs⁶⁰⁹ tersebut, manusia dapat mendorongnya untuk melakukan kebaikan dan keburukan.⁶¹⁰

Sistem nafsani manusia terdiri dari elemen-elemen *qalb*, *aql*, *ruh*, *bashirah* dan *fitrah* dengan fungsi masing-masing sebagai subsistem,⁶¹¹ yang mempunyai hubungan seperti dikatakan Abdul Razzaq Kasyani salah seorang tokoh mazhab Ibn al-'Arabi lewat takwilnya dalam Surat al-Nur ayat 35:

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۗ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۗ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۗ نُورٌ عَلَى نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ

609Al-Qur'an menyebut *nafs* dengan berbagai kata jadian yang terulang sebanyak 303 kali. Tetapi jiwa juga disebut Al-Qur'an dengan term lain yakni: *aql*, *qalbu*, dan *bashirah*. Sisi dalam Manusia dan sebagai pengrak tingkah laku. (QS. 13: 11)

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Bagi tiap-tiap manusia ada beberapa Malaikat yang tetap menjaganya secara bergiliran dan ada pula beberapa Malaikat yang mencatat amalan-amalannya. dan yang dikehendaki dalam ayat ini ialah Malaikat yang menjaga secara bergiliran itu, disebut Malaikat Hafazhah. Tuhan tidak akan merobah Keadaan mereka, selama mereka tidak merobah sebab-sebab kemunduran mereka.

610M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudlui atas Berbagai Persoalan Umat, Bandung, Mizan, 1996, Cet, III, h. 286

611Achmad Mubarak, Psikologi Qur'ani, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2001, h. 5-6

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus[1039], yang di dalamnya ada pelita besar. pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya)[1040], yang minyaknya (saja) Hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁶¹²

Menurut Beliau: hati adalah substansi yang bercahaya dan terpisah antara roh dan jiwa. Melalui hatilah kemanusiaan sejati (*al-insaniyyah*) terwujud. Para filosof menyebutnya jiwa rasional. Roh adalah dimensi batinnya dan jiwa hewan adalah tanggungannya serta dimensi lahirnya yang terletak diantara dia (hati dan jasad).⁶¹³

Dari pemahaman konsep *nafs* di atas, maka tokoh-tokoh pendidikan Islam dalam merumuskan konsep pembelajaran sangat lengkap, misalnya Ibnu Miskawaih merumuskan konsep belajar adalah terwujudnya perubahan sikap batin yang mampu mendorong secara spontan untuk melahirkan semua perbuatan yang bernilai baik.⁶¹⁴ Sementara Menurut Al-Ghazali proses belajar adalah usaha orang itu untuk mencari ilmu karena itu belajar itu sendiri tidak terlepas dari ilmu yang akan dipelajarinya. Berkaitan dengan ilmu, Al-Ghazali berpendapat ilmu yang dipelajari dapat dari dua segi,

612 Yang dimaksud lubang yang tidak tembus (misykat) ialah suatu lobang di dinding rumah yang tidak tembus sampai kesebelahnya, biasanya digunakan untuk tempat lampu, atau barang-barang lain.[1040] Maksudnya: pohon zaitun itu tumbuh di puncak bukit ia dapat sinar matahari baik di waktu matahari terbit maupun di waktu matahari akan terbenam, sehingga pohonnya subur dan buahnya menghasilkan minyak yang baik.

613Lihat Ahmad Tafsir, *Filsafat Ilmu, Mengurai Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Pengetahuan*, Bandung, Rosdakarya, 2010, h. 144-145

614Abuddin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam; Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta, Raja Grafindo, 2000, h.11

yaitu ilmu sebagai proses dan ilmu sebagai objek. *Pertama*, sebagai proses, Al-Ghazali mengklasifikasikan ilmu menjadi tiga. *Pertama* ilmu hissiyah yakni ilmu yang didapatkan melalui penginderaan, misalnya seseorang belajar melalui alat pendengaran, penciuman, maupun penglihatan. *Kedua*, ilmu Aqliyah yakni ilmu yang didapatkan melalui kegiatan berfikir, misalnya masalah teoritis yang berhubungan dengan hal-hal abstrak maupun non-abstrak. *Ketiga*, ilmu Ladunni yakni ilmu yang didapatkan langsung dari Tuhan tanpa melalui proses penginderaan maupun berfikir melainkan melalui hati dalam bentuk ilham.

Kedua, sebagai objek, Al-Ghazali membagi ilmu menjadi tiga macam. *Pertama*, ilmu pengetahuan yang tercela secara mutlak baik sedikit maupun banyak seperti sihir. *Kedua*, ilmu pengetahuan yang terpuji baik sedikit maupun banyak. Dan *Ketiga*, ilmu pengetahuan yang dalam kadar tertentu terpuji tetapi bila mendalaminya tercela seperti ilmu ketuhanan, cabang ilmu filsafat. Karena bila ilmu-ilmu tersebut didalami akan menimbulkan kekufuran. Menurut Al-Ghazali ilmu terdiri dari dua jenis, yaitu ilmu kasbi dan ilmu ladunni. Ilmu kasbi adalah cara berfikir sistematis dan metodik yang dilakukan secara konsisten dan bertahap melalui proses pengamatan, penelitian, percobaan dan penemuan. Ilmu Ladunni adalah ilmu yang diperoleh orang-orang tertentu dengan tidak melalui proses perolehan ilmu pada umumnya tetapi melalui proses pencerahan oleh hadirnya cahaya ilahi dalam qalbu. Menurut Al-Ghazali pendekatan belajar dalam menuntut ilmu dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan ta'lim insani dan ta'lim rabbani.⁶¹⁵

Menurut al-Zarnuji, teori belajar adalah bernilai ibadah dan mengantarkan seseorang untuk memperoleh kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Karenanya, belajar harus diniati untuk mencari ridha Allah, kebahagiaan akhirat, mengembangkan dan melestarikan Islam, mensyukuri nikmat akal, dan menghilangkan kebodohan. Adapun dimensi ukhrawi, Al-Zarnuji menekankan agar belajar adalah proses untuk mendapat ilmu, hendaknya diniati untuk

615Baharuddin dan Wahyuni, E.N., *Belajar dan Teori Belajar*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group. 2010, h. 24-30

beribadah. Artinya, belajar sebagai manifestasi perwujudan rasa syukur manusia sebagai seorang hamba kepada Allah SWT yang telah mengaruniakan akal. Lebih dari itu, hasil dari proses belajar-mengajar yang berupa ilmu (kemampuan dalam tiga ranah tersebut), hendaknya dapat diamalkan dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kemaslahatan diri dan manusia. Buah ilmu adalah amal. Pengamalan serta pemanfaatan ilmu hendaknya dalam koridor keridhaan Allah, yakni untuk mengembangkan dan melestarikan agama Islam dan menghilangkan kebodohan, baik pada dirinya maupun orang lain. Inilah buah dari ilmu yang menurut al-Zarnuji akan dapat menghantarkan kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat kelak.⁶¹⁶ Sedangkan Yusuf al-Qarhawi memberi pengertian pembelajaran adalah pendidikan manusia seutuhnya; akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya; akhlaknya dan keterampilan. Karena pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup, baik dalam dan peran serta menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatan, manis dan pahitnya.⁶¹⁷

Dari rumusan teori belajar di atas, maka dapat dipahami teori belajar dalam pendidikan Islam menjadi terpadu antara duniawi dan akhirat. Dengan kata lain apa yang ada dalam al-Qur'an, dan praktikan Nabi Muhammad Saw, dan diikuti pendidik Muslim bahwa teori pembelajaran adalah menghubungkan dan menyatukan antara faktor dalam dan luar, lahiriah dan batiniah. Firman Allah Swt pada QS. Arrum, 30 yakni:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak*

616Abuddin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam; Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*, h. 109

617Yusuf al-Qardhawi, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al-Banna*, terj, Bustani A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad, Jakarta, Bulan Bintang, 1980, h. 39.

mengetahui.⁶¹⁸

Ayat di atas, menjadi petunjuk tentang adanya watak asli yang diwarisi dalam diri anak (didik), yaitu fitra itu. Dalam firman-Nya lagi:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”.

Firman Allah tersebut menurut Fadhil al-Djamali adalah dalil perlunya melakukan usaha proses pembelajaran dari aspek diri manusia. Dan dengan kemampuan yang ada untuk tumbuh dan mengembangkan keterbukaan diri yang bersumber dari fitrah itulah maka pendidikan secara oprasional adalah hidayah.⁶¹⁹ Inilah yang dikatakan Ramayulis bahwa teori pembelajaran dalam Islam mengakui adanya pengaruh lain yang memberi corak dan warna tersendiri bagi pembentukan kepribadian anak didik, yaitu faktor hidayah yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya dalam rangka pengembangan fitrah manusia, karena itu hidayah (petunjuk Allah) itu ada tiga: Pertama, hidayah akal(Aql), kedua, hidayah hati (Qalb), ketiga, agama (Din).⁶²⁰ Bagi Fadhil al-Djamali teori pembelajaran dalam Islam dari segi oprasional dapat sebagai hidayah (petunjuk) dan penangkal.⁶²¹

Dari pemahaman di atas tentang konsep *nafs*, maka konsep dalam Islam akan berimplikasi pada teori pembelajaran itu sendiri, antara lain : (1) Pendidikan dilakukan oleh pendidik yang benar-benar kompeten dibidangnya, tanpa terkelupasnya nilai agama pada dirinya. (2).Pendidikan dilakukan dengan berdasarkan normatif ilahiyah. (3). Pendidikan dilakukan sesuai dengan potensi anak didik.

618Fitrah Allah: Maksudnya ciptaan Allah. manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama Yaitu agama tauhid. kalau ada manusia tidak beragama tauhid, Maka hal itu tidaklah wajar. mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungan.

619Fadhil al-Djamali, *Menerebas Krisis Pendidikan Dunia Islam*, Jakarta, h. 50

620Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, h. 284.

621Fadhil al-Djamali, *Menerebas Krisis Pendidikan Dunia Islam*, h. 51-57

(4). Pendidikan tidak hanya sekedar berorientasi pada kehidupan kekinian, akan tetapi juga berorientasi pada kehidupan ukhrawi. (5). Pendidikan harus bertanggung jawab penuh pada perkembangan anak didik, baik masyarakat, maupun kepada Allah. (6). Pendidikan harus merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan sunnatullah. (7). Pendidikan harus melibatkan semua saluran baik saluran formal, informal maupun non formal, dalam upaya mengembangkan pribadi anak didik, sehingga mampu menangkal nilai-nilai amoral.⁶²²

1. *Conditioning classic* : Ivan Pavlov dan John. B. Wetson

Teori ini bertitik tolak pada pandangan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku. Artinya anak (siswa) sebagai *organisme* yang merespon terhadap stimulus dari dunia sekitarnya.⁶²³ Namun demikian, dalam teori ini ada pembiasaan klasik (*classical conditioning*) yang berkembang berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan Ivan Pavlov (1849-1936), seorang ilmuwan besar Rusia yang berhasil menggondol hadiah Nobel pada 1909. Pada dasarnya *classical conditioning* adalah sebuah prosedur penciptaan refleksi baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleksi tersebut.⁶²⁴

Kata *classical* yang mengawali nama teori ini semata-mata dipakai untuk menghargai karya Pavlov yang dianggap paling dahulu di bidang *conditioning* (upaya pembiasaan) dan untuk membedakannya dari teori *conditioning* lainnya, dan teori ini juga disebut *respondent conditioning* (pembiasaan yang dituntut).⁶²⁵ Dalam penelitiannya tentang respon binatang pada sebuah kondisi. Pavlov dalam penelitiannya setiap pagi senantiasa membawa makanan untuk anjing-anjingnya sambil membunyikan bel. Setiap bel berbunyi, anjing-anjingnya tahu bahwa makanan segera tiba sehingga air liurnya keluar, suatu ketika, pavlov datang membunyikan bel, tanpa makanan, air liur anjing tetap keluar, sehingga dia menyimpulkan

622Samsul Nizar, *Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam*, h.94.

623Syafuruddin Nurdin, *Guru Profesional dan Impelmentasi Kurikulum*, Jakarta, Ciputat Press, 2005, h. 37

624Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, h. 104

625 Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, h. 104

bahwa anjing itu akan memberi respon yang sama pada bunyi bel tanpa atau dengan makanan.⁶²⁶ Dengan kata lain, hasil percobaan mengatakan bahwa gerakan refleks itu dapat dipelajari dan berubah karena mendapat latihan pembiasaan.⁶²⁷

Tabel. 1. Eksperimen pembiasaan klasik

Sebelum Eksperimen		
Pemberian makanan (UCS)	→	air liur keluar (CR)
Bunyi bel (CS)	→	tidak ada respon
Eksperimen/Latihan		
Bunyi bel (CS)	→	pemberian makanan (UCS)
Setelah Eksperimen		
Bunyi bel (CS)	→	air liur keluar (CR)
Dalam pengkondisian klasik, stimulus netral menjadi terasosiasi dengan sebuah reflek.		
Bel, stimulus netral, menjadi terasosiasi dengan refleks air liur.		

Berdasarkan eksperimen inilah yang kemudian menginspirasi Watson untuk mengembangkan teori S-R. Secara utuh Watson mempercayai teori Pavlov, bahwa seseorang akan menjadi sesuatu yang dikondisikannya. Manusia hanya dibekali sedikit emosi, dan sedikit reflek. Melalui pengkondisian emosi-emosi dan reflek itu dipasang. Kepribadian seseorang merupakan akumulasi reflek yang dikondisikan. Bahkan ada satu pernyataan beliau yang sangat spektakuler, “beri saya selusin bayi sehat, saya akan jadikan mereka seperti apa yang saya mau dokter, pengacara, artis, pedagang, pemimpin politik, dan bahkan pencuri sekalipun. Mereka akan menjadi sesuatu yang baru lepas dari bakat dan kebiasaan ras leluhurnya.⁶²⁸ Eksperimen yang dilakukan tentang perasaan takut pada anak dengan menggunakan tikus atau kelinci. Dari hasil percobaannya dapat ditarik kesimpulan bahwa perasaan takut pada

⁶²⁶Lihat Marwan Saridjo (penyunting), *Mereka Berbicara Pendidikan Islam Sebuah Bunga Rampai*, h. 32

⁶²⁷H. Djaali, *Psikologi Pendidikan*, h. 85

⁶²⁸Matthe H. Olson Hergenhahn BR, *Theories of Learning*, Terjemahan, Jakarta, Prenada Media, Jakarta, 2008, h. 214

anak dapat diubah atau dilatih. Anak-anak pada mulanya tidak takut kepada kelinci dibuat menjadi takut pada kelinci. Kemudian anak tersebut dilatih pula sehingga tidak takut lagi pada kelinci.⁶²⁹

Teori Watson ini dapat disimpulkan bahwa segala tingkah laku manusia juga merupakan hasil *contiditioning*, yaitu hasil latihan atau kebiasaan bereaksi terhadap syarat atau pransang tertentu yang dialami dalam kehidupannya. Kelemahan mendasar dari teori ini adalah bahwa belajar itu hanyalah terjadi secara otomatis dan keaktifan serta penentuan pribadi dalam belajar tertentu saja seperti belajar tentang keterampilan tertentu dan pembiasaan pada anak-anak kecil.

2. Teori *Operant Conditioning*, (Burrhus Frederick Skinner, 1904-1990).

Teori pembiasaan perilaku respons (*operant Conditioning*) ini merupakan teori belajar yang paling muda dan masih sangat berpengaruh dikalangan ahli psikologi belajar masa kini, yang dianggap kontroversi, dengan teori pembiasaan perilaku responnya. Karya tulisnya yang masyur berjudul *About Behaviorsm* diterbitkan pada tahun 1974. Tema pokok yang mewarnai karya-karyanya adalah bahwa tingkah laku itu terbentuk oleh konsekuensi-konsekuensi yang timbulkan oleh tingka laku itu sendiri.⁶³⁰

Teori ini membuat eksperimen dilaboratorium dengan memasukan tikus yang telah dilaparkan dalam kotak yang disebut “Skinner box” yang dilengkapi dengan berbagai peralatan, yaitu tombol, alat pemberi makanan, penampung makanan, lampu yang dapat diatur nyalanya, dan lantai yang dapat dialiri listrik. Karena dorongan lapar, tikus berusaha untuk mencari makanan. Selama tikus bergerak ke sana ke sana ke mari untuk keluar dari box, tidak sengaja ia menekan tombol, makanan keluar. Secara terjadwal diberikan makanan secara bertahap sesuai peningkatan perilaku yang ditunjukkan si tikus, proses ini disebut *shapping*.

629H. Djaali, *Psikologi Pendidikan*, h. 85

630Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, h. 106

Tabel. II. Operant Conditioning

Eksperimen	
Respon (menekan Pengungkit)	Stimulus (Hadiah Manan)
Waktu berlalu	
Respon terkondisikan	Stimulus terkondisikan (hadiah makanan)
<p>Dalam pengkondisian operan, pembelajaran beroperasi di lingkungan tertentu dan menerima sebuah imbalan bagi perilaku tertentu (operasi). Pada akhirnya ikatan antara operasi (penekanan pengungkit) dan stimulus imbalan (makanan) pun terbentuk.</p>	

Konsep di atas dapat dipahami, bahwa Skinner mengatakan bahwa unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan. Maksudnya adalah pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan stimulus respons akan semakin kuat bila diberi penguatan.⁶³¹ Karena itu, Skinner membuat bentuk-bentuk penguatan yang terdiri dari dua yaitu: penguatan positif dan penguatan negatif. Bentuk-bentuk penguatan positif berupa hadiah, perilaku, atau penghargaan. Bentuk negatif antara lain menunda atau tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan atau menunjukkan perilaku tidak senang.⁶³²

Dalam aplikasinya pada dunia pembelajaran menurut Santrock guru berusaha untuk memodifikasi perilaku antara lain dengan proses penguatan, yaitu memberi penghargaan pada perilaku yang diinginkan dan tidak memberi imbalan apa pun pada perilaku yang tidak tepat.⁶³³ Karena itu, Skinner memadam bahwa belajar akan berjalan dengan baik apabila: (1) Informasi yang akan dipelajari disajikan secara bertahap. (2). Pembelajar segera diberi umpan balik (*feedback*) mengenai akurasi pembelajaran mereka, yakni setelah belajar mereka segera diberi tahu apakah mereka sudah memahami informasi dengan benar atau tidak. (3). Pembelajar mampu belajar dengan caranya sendiri. (4). Tujuan pembelajaran harus dirumuskan secara spesifik sebelum proses pembelajaran dimulai, sehingga bisa dengan mudah untuk diukur hasil-hasilnya. (5). Proses belajar harus

631 Lihat Marwan Saridjo (penyunting), *Mereka Berbicara Pendidikan Islam Sebuah Bunga Rampai*, h. 136

632Suyono dan Hariyanto, *Belajar dan Pembelajaran, Teori dan Konsep Dasar*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2012, h. 65.

633 John W. Santrock, *Psikologi Pendidikan*, Terjemahan, Jakarta, Prenada Media, 2008, h. 273

dimulai dari yang muda dan secara bertahap menuju pada informasi-informasi yang kompleks.⁶³⁴

Menurut Dede Rosyada, tidak ada yang salah dengan teori ini, khususnya bagi pembelajaran yang membawa misi perubahan perilaku, karena teori ini menawarkan yang sudah lebih dahulu memiliki pengalaman serupa, dan pengalaman-pegalamannya itu sudah teruji oleh waktu sehingga bisa terhindar dari *misleading*.⁶³⁵ Hanya saja lingkungan belajar benar-benar dikontrol, sesuai dengan desain guru dan kelas adalah milik guru untuk mengajar, bukan milik siswa untuk belajar. Guru sangat penting posisinya untuk menentukan *rewarding, reinforcement*, atau tindakan untuk mencapai tujuan. Fungsi guru dalam teori ini adalah menyajikan stimulus tertentu yang dapat membangkitkan respon siswa berupa hasil belajar yang diinginkan.⁶³⁶ Bahkan teori ini, dalam waktu relatif singkat, anak didik dapat diperoleh penguasaan dan keterampilan yang diharapkan dan para murid akan memiliki pengetahuan yang siap dipakai, serta akan tertanam pada diri setiap pribadi kebiasaan belajar secara rutin dan disiplin.⁶³⁷

Padahal menurut Muhibbin Syah, teori belajar hasil eksperimen di atas, Ivan Pavlov, Watson, Skinner, secara prinsipil bersifat behavioristik dalam arti lebih menekankan timbulnya perilaku jasmaniah yang nyata dan dapat diukur.⁶³⁸ Teori-teori itu juga bersifat otomatis-mekanis dalam menghubungkan stimulus dan respon, sehingga terkesan seperti kinerja mesin atau robot. Diantara kelemahan-kelemahan teori-teori ini adalah: (1) proses belajar itu dapat diamati secara langsung, padahal belajar adalah proses kegiatan mental yang tidak dapat disaksikan dari luar kecuali sebagian gejalanya; (2) proses belajar bersifat otomatis-mekanis, sehingga terkesan seperti gerakan mesin dan robot, padahal setiap siswa memiliki *self-direction* (kemampuan mengarahkan diri) dan

634Matthe H. Olson Hergenhahn BR, *Theories of Learning*, h. 128

635Marwan Saridjo (penyunting), *Mereka Berbicara Pendidikan Islam Sebuah Bunga Rampai*, h. 139

636Syafuruddin Nurdin, *Guru Profesional dan Impelmentasi Kurikulum*, h. 37

637Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta, Ciputat Press, 2002, h. 178.

638 Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, h. 107

self control (pengendalian diri) yang bersifat kognitif, dan karenanya ia bisa menolak merespons jika ia tidak menghendaki, misalnya karena lelah atau berlawanan dengan hati. (3) proses belajar manusia yang dianalogikan dengan perilaku hewan itu sangat sulit diterima, mengingat mencoloknya perbedaan karakter fisik dan psikis antara manusia dan hewan.⁶³⁹

Menurut Usman kelemahan mendasar dari teori ini yakni: (1) Dapat menghambat inisiatif siswa, di mana inisiatif dan minat siswa yang berbeda dengan petunjuk guru dianggap suatu penyimpangan dan pelanggaran dalam pengajaran yang diberika. (2) Menimbulkan penyesuaian secara statis kepada lingkungan. (3). Membentuk kebiasaan yang kak, artinya seolah-olah siswa melakukan sesuatu secara mekanis, dan dalam memberikan stimulus siswa dibiasakan betindak secara otomatis. (4) Dapat menimbulkan *verbalisme*, terutama pengajaran yang bersifat menghafal dimana siswa dilatih untuk dapat menguasai bahan pelajaran tanpa befikir secara logis.⁶⁴⁰

Teori ini dapat dikatakan menafikan keberadaan kesadaran dan jiwa manusia dengan menyatakan penelitian hanya pada yang tampak dan itu adalah perilaku. Dengan kata lain bahwa penggunaan berbagai teori tersebut hanya cocok untuk menjelaskan hal yang bersifat fisik, dan tidak sepenuhnya cocok untuk menjelaskan hal-hal yang bersifat non fisik sebagaimana yang terdapat pada binatang. Karena itu, ketidakmemadaian teori tersebut, antara lain disebabkan pada konsep dasar memandang manusia dan aktivitasnya semata-mata ditentukan oleh aturan fisika dan kimia. Padahal manusia yang sesungguhnya adalah merupakan suatu bentuk kehidupan yang lebih tinggi dan lebih kompleks daripada sekedar yang dapat diterangkan melalui aturan-aturan yang berlaku bagi materi.⁶⁴¹

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa teori *operant conditioning* adalah pengembangan teori Pavlov (S-R). Yang menjadi fokus utama teori ini adalah

639Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, h. 107. Untuk lebih kritik teori tersebut baca Suyono dan Hariyanto, *Belajar dan Pembelajaran, Teori dan Konsep Dasar*, h. 68-69.

641Abuddin Nata, *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*, h. 143-144

pemberian *reinforcement* (penguatan) terhadap organisme (subyek) sesaat setelah memberikan respons terhadap suatu stimulus. Pemberian *reinforcement* ini diprogramkan sedemikian rupa supaya terjadi pengulangan atau peningkatan respons. Proses ini secara teriotis merupakan upaya pembentukan tingkah laku (*operant conditioning*). Dengan kata lain, tingkah laku dapat dikondisikan atau diprogramkan sesuai dengan yang dikehendaki. Dalam konteks pembelajaran, berhasil atau tidaknya aplikasi teori ini di lapangan, kunci utamanya terletak pada guru.

Dalam aplikasi teori *operant conditioning* B.F Skinner ini dalam dunia pendidikan mempunyai beberapa kelemahan yaitu: *Pertama*, proses belajar dalam Skinner dipandang dapat diamati secara langsung, padahal belajar merupakan proses kegiatan mental yang tidak dapat disaksikan dari luar secara menyeluruh kecuali sebagian gejalanya, walaupun pada akhirnya teraplikasi dalam bentuk tingkah laku. *Kedua*, proses belajar dianggap bersifat otomatis mekanis sehingga terkesan seperti gerakan mesin atau robot, padahal setiap siswa memiliki *self-regulation* (kemampuan mengatur diri sendiri) dan *self-control* (pengendalian diri) yang bersifat kognitif sehingga siswa bisa menolak merespons jika ia tidak menghendaki. *Ketiga*, keseringan merespons sebagai ukuran belajar bisa berlaku untuk tingkah laku yang sederhana tetapi tidak cocok untuk tingkah laku yang kompleks.

C. Teori Pembelajaran *Conditioning* dalam Islam

Teori pembelajaran *conditioning*, kajian yang mendudukan siswa sebagai inividu yang pasif, karena itu, Seharusnya orang yang bertugas orang-orang yang bertugas dalam bidang pendidikan, khususnya gurunya, menyediakan obat penyembuh segala penyakit yang dilaporkan oleh masyarakat. Akan tetapi kenyataannya justru sebaliknya, mereka sendiri malah menjadi orang sakit. Jika demikian, benarlah pepatah Arab yang menyatakan **طبيب يداوي الناس وهو مريض**: Seorang dokter yang mengobati orang sakit padahal ia menderita sakit. Hal ini membuktikan bahwa teori *conditioning* ini hanya mempelajari bagaimana peserta didik meng-copy and

paste pengetahuan yang dipahami pengajar.⁶⁴² Tetapi kajian tentang pengajarnya sesuatu yang cenderung dilupakan dan diabaikan. Padahal dalam pembelajaran hubungan pendidik dan peserta didik tidak bisa dipisahkan dalam proses pembelajaran yang dialogis. Hal ini terlihat dalam konsep pembelajaran Islam menurut Imam Al-Ghazali hendaknya pendidik memberikan kasih sayang, dan hendaknya pendidik mengamalkan ilmunya, perbuatannya sesuai apa yang dikatakan.⁶⁴³

Jika teori Skinner dan Ivan Pavlov dengan pemberian penguatan atau penghargaan atau *reinforcement* ini dikaitkan dengan teori pendidikan dalam Islam (Al-qur'an), maka dapat dipahami bahwa kedua teori tersebut saling berhubungan dan adanya kesesuaian. Artinya bahwa jauh sebelum teori *reinforcement* dari Skinner ini muncul, Islam telah terlebih dahulu menawarkan teori yang senada. Dalam Islam penguatan (*reinforcement*) sama dengan ganjaran dan dalam Al-qur'an disebutkan bahwa segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia dalam kehidupannya di dunia ini akan mendapatkan ganjaran Allah SWT baik di dunia maupun di akherat kelak.

فَاتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Pahala dunia dapat berupa kemenangan-kemenangan, memperoleh harta rampasan, pujian-pujian dan lain-lain. (QS, 3 : 148).

Dengan demikian, maka siswa dalam sistem pendidikan Islam harus diberi motivasi sedemikian rupa dengan ganjaran atau penguatan itu tidak boleh berlebihan,, sebab pemberian penguatan yang berlebihan akan berakibat sampingan yang negatif, sebagaimana hadist Nabi bahwa:

Artinya: "Hendaklah engkau memberikan ganjaran seperlunya saja karena apabila memberi hadiah atau ganjaran itu berlebih-

642Suyono dan Hariyanto, *Belajar dan Pembelajaran, Teori dan Konsep Dasar*, h. 70

643Ramayulis dan Samsul Nizar, *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam*, Jakarta, Ciputat Press, 2005, h. 12

lebih, itu tidak dikehendaki karena berakibat negatif atau tidak baik” (HR. Bukhari).

Teori tentang pemberian penguatan atau reinforcement atau penghargaan ini dapat berlaku pada keseluruhan bentuk pendidikan, semua jenjang dan usia si terdidik. Dalam pandangan Islam teori pembelajaran conditioning khususnya pada reinforcement bukan hal yang baru sebab dalam al-Qur’an surat al-Faatihah:

Bila seorang muslim mengulang-ulangi ucapan dalam setiap rakaat sholatnya sehari-hari, semata-mata hal itu, dilakukan untuk memperoleh hidayah dari pada-Nya, dalam segenap aspek kehidupannya, juga dalam proses belajar mengajar.⁶⁴⁴ Dalam surat al-Mulk ayat 3 dan 4:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۚ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفْوُتٍ ۗ فَارْجِعِ
الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ۚ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ حَاسِمًا
وَهُوَ حَسِيرٌ

Artinya: yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, Adakah kamu Lihat sesuatu yang tidak seimbang.4. kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun dalam Keadaan payah.

Dengan kata lain, teori belajar *conditioning* sudah ada dalam Al-qur’an dan dilakukan umat Islam dan dari konsep inilah kemudian melahirkan rumusan teori pembelajaran pembiasaan dan pengulangan serta penguatan. Ibnu Sina misalnya, sudah menggunakan talqin suatu metode yang cara kerjanya berulang-ulang sampai mereka hafal.⁶⁴⁵ Di samping itu juga, Ibnu Sina menggunakan metode

644 Fadhil al-Djamali, *Menerebas Krisis Pendidikan Dunia Islam*, h. 52.

645Metode ini digunakan untuk mengajarkan membaca al-Qur’an yang dimulai dengan cara mendengarkan bacaan Al-Qur’an kepada anak didik. Setelah itu, anak didik tersebut disuruh mendengarkan dan mengulangi bacaan tersebut perlahan-lahan dan dilakukan berulang-ulang, hingga di hafal.

pembiasaan, agar proses pembelajaran bisa tercapai secara efektif, khususnya dalam mengajarkan akhlak.⁶⁴⁶ Inilah yang diistilahkan Skinner sebagai teori penguatan. Selanjutnya konsep pembelajaran Ibn Jama'ah sangat menekankan tentang pentingnya menciptakan kondisi yang mendorong timbulnya kreativitas para siswa, dengan cara pengulangan secara terus menerus.⁶⁴⁷ Menurut Ibn Jama'ah bahwa kegiatan pembelajaran tidak hanya digantungkan sepenuhnya pada pendidik selaku orang yang memberikan informasi dan ilmu pengetahuan, melainkan juga anak didik.⁶⁴⁸

Ulasan di atas, tentang konsep pembelajaran *conditioning* memberikan pemahaman bahwa sudah ada di dalam ajaran Islam, bahkan para ulama merumuskan teori belajar *conditioning* tidak memisahkan guru dan anak didik. Dengan ungkapan lain, bahwa proses pembelajaran tidak gantungkan sepenuhnya kepada pendidik, tetapi juga anak didik. Namun demikian, Islam merangkul teori tersebut sambil menghargai dan sekaligus mengoreksi, memperbaiki, dan menyempurnakannya. Melalui proses penyempurnaan ini, Islam mengakui adanya nilai yang absolut dan universal yang harus ditanamkan oleh guru kepada peserta didik secara indoktrinatif, dan mengakui pula ada nilai-nilai lokal yang relatif dapat dipilih dalam rangka menjabarkan nilai-nilai yang bersifat universal.

Selain itu, Islam mengakui adanya fakta eksperimental, juga memberitahukan adanya aspek metafisika yang bersifat moral, dan memiliki implikasi psikologi dan sosiologi. Karena itu, berbagai pandangan tentang anak dalam hubungan dengan hukum-hukum Tuhan tersebut, harus digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan berbagai komponen pendidikan khususnya pada teori-teori belajar yang selama ini sudah terbangun dan teraplikasi dalam dunia pembelajaran. Jika dinalisis konsep Belajar *conditioning*, maka telaah teori *conditioning* dan teks Al-

646Abuddin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam; Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*, h. 122 Lihat juga Ramayulis dan Samsul Nizar, *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam*, h. 33-34.

647Lihat Asma Hasan Fahmi, *Mabadi at-Tarbiyah al-Islamiyah*, terjemahan Ibrahim Husein, *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1979, Cet I, h. 122

648Abuddin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam; Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*, h. 122

Qur'an (ditambah dengan hadits), maka perbandingan konsep Islam dan teori Psikologi kontemporer Barat (*conditioning*) adalah sebagai berikut :

Perbandingan	Islam	Psikologi Barat
Instrumen	Hati dan akal	akal
Metode	<i>Uswah, bil hikmah, bil amtsal</i>	Conditioning (behaviorisme).
Aspek yang aktif	Kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual	Kognitif, afektif, psikomotorik
Tujuan	Taqwa	<i>Self Actualization</i>

Dari analisis di atas, maka didapatkan beberapa rumusan konseptual mengenai belajar dalam pandangan Islam. Pertama, dalam Islam, instrumen (alat) untuk mendapatkan pengalaman atau pengetahuan baru adalah akal dan hati. Akal (*al-aql*) berfungsi menjelaskan sesuatu lebih kepada ranah yang lebih umum dan praktis dan hanya mampu menjangkau hal-hal empiris , sedangkan hati (*qalb*) mampu memahami sesuatu secara lebih mendalam, baik hal-hal yang sifatnya fisik (empiris) maupun metafisik. akal mengelola informasi yang didapatkan melalui suatu proses, sedangkan hati menerima ilmu yang melalui suatu proses maupun *ladunni*. Kedua, secara metode, Islam menggabungkan metode *Uswah, bil hikmah, dan bil amtsal* dimana ketiga metode itu mencakup pendayagunaan potensi manusia. Misalnya saja, *Uswah* mendayagunakan potensi psiko-motorik, *bil-hikmah* menggunakan potensi afektif dan spiritual, sedangkan *bil-amtsal* mendayagunakan potensi kognitif manusia.

D. Kesimpulan

Kajian membuktikan beberapa kesimpulan: *Pertama:* bahwa paradigma teori belajar behaviorisme hanya mempelajari psikologi empiris positif, yang menghilangkan makna jiwa dari tingkah laku. Sementara itu, teori belajar dalam Islam memandang makna jiwa dan tingkah laku menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. *Kedua,* kajian ini juga membuktikan bahwa teori belajar *conditioning*, teori belajar paling rendah dalam teori Ibn Miskawaih yakni hanya penguatan daya nafsu al-bahimiyyat, (jasmani) belum sampai daya

al-ghadabiyyat dan yang tertinggi daya *al-nathiqat*.

Ketiga, penelitian ini juga membuktikan teori belajar *conditioning* bukan hal yang baru, karena sudah ada Ibnu Sina menggunakan talqin suatu metode yang cara kerjanya berulang-ulang sampai mereka hafal dan menggunakan metode pembiasaan dalam proses pengajaran. *Keempat*, dalam Islam, belajar instrumen (alat) untuk mendapatkan pengalaman atau pengetahuan baru adalah akal dan hati. Akal (*al-aql*) berfungsi menjelaskan sesuatu lebih kepada ranah yang lebih umum dan praktis dan hanya mampu menjangkau hal-hal empiris, sedangkan hati (*qalb*) mampu memahami sesuatu secara lebih mendalam, baik hal-hal yang sifatnya fisik (empiris) maupun metafisik. akal mengelola informasi yang didapatkan melalui suatu proses, sedangkan hati menerima ilmu yang melalui suatu proses maupun *ladunni*. secara metode, Islam menggabungkan metode *Uswah, bil hikmah*, dan *bil amtsal* (seperti yang berhasil kami himpun), dimana ketiga metode itu mencakup pendayagunaan potensi manusia. *Uswah* mendayagunakan potensi psiko-motorik, *bil-hikmah* menggunakan potensi afektif dan spiritual, sedangkan *bil-amtsal* mendayagunakan potensi kognitif manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Djamali, Fadhil, *Menerebas Krisis Pendidikan Dunia Islam*, Jakarta, Golden Terayon Press, 1988.
- al-Qardhawi, Yusuf, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al-Banna*, terj, Bustani A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad, Jakarta, Bulan Bintang, 1980.
- Arief, Armai, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta, Ciputat Press, 2002.
- Arifin, H.M., *Hubungan Timbal Balik Agama di Sekolah dengan Rumah Tangga*, Jakarta, Bulan Bintang, 2012.
- Baharuddin dan Wahyuni, E.N., *Belajar dan Teori Belajar*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group. 2010.
- Baharuddin, "Aliran Empirisme dan Konsep Fitrah, Komparasi antara Pemikiran Pendidikan John Locke dengan Pendidikan Islam", dalam *Jurnal Foramadiah, Kajian Pendidikan dan Keislaman*, STAIN Ternate, Vol. 1. No. 1 Juni 2005.
- E. Waker, Edwar, *Conditioning and Instrumen Learning*, Terjemahan, Jakarta, UI Press, 2001.
- H. Djaali, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2012.
- Hasan Fahmi, Asma, *Mabadi at-Tarbiyah al-Islamiyah*, terjemahan Ibrahim Husein, *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1979.
- Langgulung, Hasan, *Kreativitas dan Pendidikan Islam, Analisis Psikologi dan Filsafatnya*, Jakarta, Pustaka Al-Husna, 1991.
- Langgulung, Hasan, *Manusia dan Pendidikan*, Jakarta, Al-Husna Zikra, 1986.
- Miskawaih, Ibn, *Tahzib al-Akhlaq wa tathhir al-A'raq*, di edit oleh

- Hasan Tamim, Beirut, Mansyurat Dar-al-Maktabat al-Hayat, cetakan II, 1398.
- Mubarok, Achmad, *Psikologi Qur'ani*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2001.
- Najati, M. Utsman, *Al-Qur'an dan Ilmu Jiwa Agama*, terjemahan Ahmad Rifai Usman, Bandung, Pustaka, 2005.
- Nata, Abuddin, *Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner*, Jakarta, Rajawali Press, 2010.
- _____, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam; Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta, Raja Grafindo, 2000.
- _____, *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*, Jakarta, Kencana, 2009.
- Nizar, Samsul, *Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam*, Jakarta, Ciputat Press, 2005.
- Nurdin, Syafruddin, *Guru Profesional dan Impelmentasi Kurikulum*, Jakarta, Ciputat Press, 2005.
- Olson Hergenbahn, Matthe H. BR, *Theories of Learning*, Terjemahan, Jakarta, Prenada Media, Jakarta, 2008.
- Ramayulis dan Samsul Nizar, *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam*, Jakarta, Ciputat Press, 2005.
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta Kalam Mulia, 2002.
- Rosyada, Dede, *Paradigma Pendidikan Demokratis*, Jakarta, Kencana, 2004.
- Sabri, Ahmad, *Strategi Belajar Mengajar dan Micro Teaching*, Jakarta Ciputat Press, 2010.
- Saridjo, Marwan (penyunting), *Mereka Berbicara Pendidikan Islam Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Rajagrafindo, 2009.
- Shaleh Abdullah, Abdurrahman, *Teori-Teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudlui atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung, Mizan, 1996.
- Suwendi, *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2004.
- Suwito, *Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Ibn Miskawaih*, Disertasi tidak diterbitkan, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

1995.

Suyono dan Hariyanto, *Belajar dan Pembelajaran, Teori dan Konsep Dasar*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2012.

Syah, Muhibbin, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, Bandung, Rosdakarya, 2013.

Tafsir, Ahmad, *Filsafat Ilmu, Mengurai Ontologi, Epistimologi, dan Aksiologi Pengetahuan*, Bandung, Rosdakarya, 2010.

_____, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1999.

Thoifuri, *Menjadi Guru Inisator*, Semarang, ReSAIL, 2007.

Usman, Basyiruddin, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*, Jakarta, Ciputat Press, 2005.

W. Santrock, John, *Psikologi Pendidikan*, Terjemahan, Jakarta, Prenada Media, 2008.

BAB 17

ESENSI GURU DALAM VISI-MISI PENDIDIKAN KARAKTER : PERSPEKTIF ISLAM

A. Pendahuluan

Gunnar Myrdal peraih hadiah Nobel di bidang ekonomi, melalui penelitiannya, menjelaskan bahwa keterpurukan negara-negara terbelakang dalam bidang ekonomi, hal ini disebabkan karena faktor akhlak (Suwendi, 2004: 170). Hal ini diakui juga oleh Syed Muhammad Naquib Al-Attas, bahwa kemuduran umat Islam saat ini karena kelalaian mendesain dan merumuskan konsep pendidikan yang berbasis pendidikan adab dan akhlak atau karakter. (al-Attas, 1981: 178) Mengingat begitu urgennya akhlak atau karakter, maka institusi pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menanamkan melalui proses pembelajaran.

Pendidikan karakter menurut Ahmad Tafsir adalah sama pendidikan akhlak dalam pandangan Islam yakni kepribadian yang memuat tiga komponen yakni pengetahuan, sikap, dan perilaku. (Tafsir dan Madjid, 2011: iv). Hal inilah yang dikatakan Ibn Miskawai bahwa akhlak itu adalah sifat atau keadaan yang tertanam dalam jiwa paling dalam yang selanjutnya lahir dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan lagi. (Miskawai, 1934: 40) Dengan demikian suatu perbuatan karakter atau akhlak setidaknya memiliki lima ciri yaitu: (1) perbuatan yang sudah tertanam dalam dan mendarah daging dalam jiwa. (2) perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran lagi. (3) perbuatan yang muncul

atas pilihan bebas dan bukan paksaan. (4) perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya bukan rekayasa dan (5) perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah semata. (Abuddin Nata, 2012: 164) Atau dengan kata lain pendidikan karakter keperibadian anak didik yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtuis*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berfikir, bersikap, dan bertindak. (Asmawan Sahlan dan angga Prastyo, 2012: 13).

Nilai-nilai ini menurut Muhammad Ali Musrshafi dalam bukunya *kaifa Turrabbi Thiflak*, bahwa internalisasi nilai-nilai karakter pendidikan adalah cermin yang di dalamnya mengatur bagaimana mendidik individu dan mempersiapkannya untuk mengarungi kehidupan. (Ali Murshafi, 2009: 86-86). Oleh karena itu, pendidikan karakter seharusnya membawa peserta didik ke pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, dan akhirnya ke pengamalan nilai secara nyata. peran keluarga dan sekolah dipandang sebagai lembaga penting yang turut berperan dalam mendidik anak. (Mochtar Buchori, 2009: 87).

Lembaga pendidikan dan dalam hal ini guru dewasa ini dihadapkan pada tuntutan yang semakin berat, terutama untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu menghadapi berbagai dinamika perubahan yang berkembang dengan sangat cepat. Perubahan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan dinamika perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga menyentuh perubahan dan pergeseran aspek nilai dan moral dalam kehidupan masyarakat. Fakta empiriknya, dekadensi moral dan karakter buruk yang ditunjukkan siswa sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dunia pendidikan. Kekerasan yang dilakukan pelajar kian memprihatinkan. (Dimiyati, 2010: 85).

Kondisi demikian, persoalan karakter atau akhlak memang tidak sepenuhnya terabaikan oleh lembaga pendidikan. Akan tetapi, dengan fakta-fakta seputar kemerosotan karakter ini menunjukkan bahwa ada kegagalan pada institusi dunia pendidikan, dalam konteks pendidikan formal di sekolah, bisa jadi salah satu penyebabnya karena pendidikan di Indonesia lebih

menitikberatkan pada pengembangan intelektual semata. (Zubaidi, 2012: 5). Aspek-aspek yang lain yang ada dalam diri siswa, yaitu aspek afektif dan kebajikan moral kurang mendapatkan perhatian. (Koesoema, 2009: 5). Inilah yang dikatakan (Lickona, 2012: 55-57) sekolah dan guru harus mendidik karakter, khususnya melalui pengajaran yang dapat mengembangkan rasa hormat dan tanggung jawab peran guru sebagai model dalam pembelajaran karakter dan kebajikan moral tanggung jawab. Dalam tugasnya sebagai pendidik dan pengajar, guru berinteraksi dengan siswa, sangat penting bagi para guru untuk melayani dan berperan sebagai model pengembang karakter dengan membuat penilaian dan keputusan profesional yang didasarkan pada kebajikan sosial dan moral.

Dengan demikian makalah ini akan membahas esensi guru dalam pendidikan karakter perspektif pendidikan Islam dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis dan menggunakan sumber yang otoritatif.

B. Esensi Guru dalam pendidikan Karakter

Guru dalam perspektif dunia pendidikan adalah salah satu komponen yang menjadi indikator kemajuan pendidikan, hal ini disebabkan guru memegang peranan penting dalam mencerdaskan peserta didik. Tentu saja pernyataan ini harus dibarengi kerja profesional yang merupakan sebuah keniscayaan dalam proses pendidikan. Guru kini melupakan komitmen yang dibangun cendekiawan pendidikan Ki Hajar Dewatara yang berbunyi *ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, dan tut wuri handayani*. (Thoifuri, 2007: 15).

Dalam proses pendidikan guru adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Hal ini disebabkan guru tidak hanya menjalankan fungsi alih ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi juga berfungsi untuk menanamkan nilai (*values*), serta membangun karakter (*Charcter building*) peserta didik. Secara jujur bahwa dalam proses pendidikan yakni belajar mengajar, sangat ditentukan oleh faktor guru, bahkan guru adalah pahlawan tanpa

jasa. Kedudukan guru memang belum bisa disejajarkan dengan penyandang profesi lain seperti dokter, hakim, wartawan, dan insiyur. Karena itu, secara jujur diakui bahwa guru amat penting dan tidak seorang pun yang bisa baca tulis tanpa adanya guru.

Guru sebagai aktor utama dalam praksis pendidikan selama ini belum memperoleh apresiasi yang baik oleh pemerintah termasuk masyarakat. Sebagai penyandang profesi, kedudukan guru masih berada di kelas bawah dibandingkan dengan profesi lain. Padahal tugas yang disandang guru tidak lebih ringan bila dibandingkan dengan profesi lainnya, karena guru berhadapan dengan manusia yang senantiasa menghabiskan enegik psikis dari pada fisik. Guru adalah salah satu komponen dalam proses belajar mengajar yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan.

Kenyataan yang terjadi dalam dunia pendidikan adalah rendahnya kualitas dan kualifikasi guru dalam proses belajar mengajar, hal ini terjadi pada pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, dalam menghadapi persaingan globalisasi guru dituntut bersaing dengan pekerja profesional lainnya, seperti ekonomi, globalisasi misalnya menuntut teknologi produksi yang semakin lama semakin tinggi hasilnya, sehingga berakibat pada semakin tinggi kualitas dan kompetensinya yang dituntut kepada para guru.

Problematika yang dihadapi pendidikan saat ini adalah masih banyaknya para guru yang mengajar di sekolah-sekolah tidak berdasarkan pada kualifikasi dan kompetensi dasar, (H. Syaukani, HR, 2002, :94) atau bidang keahlian pada mata pelajaran yang diajarkan, karena dalam proses pembelajaran mereka hanya menekankan pada materi pelajaran sementara teknik dan metode mengajar cenderung diabaikan, sehingga akhirnya kegiatan belajar mengajar menjadi vakum dan monotong sehingga guru kehabisan bahan/materi pelajaran dan siswa tidak memiliki kemampuan atau keterampilan yang diharapkan.

Esesnsi guru dalam literatur kependidikan Islam biasa disebut sebagai *ustadz*, *mu'allim*, *murabby*, *mursyid*, *mudarris*, dan *mu'addib*. (Muhaimin, 2003: 209). Kata *ustadz*, biasa digunakan

untuk memanggil seorang profesor. Ini mengandung makna bahwa seorang guru dituntut untuk komitmen terhadap profesionalisme dalam mengemban tugas. Kata *mu'allim*, berasal dari kata *'ilm* yang berarti menangkap hakekat sesuatu. Hal ini mengandung makna bahwa seorang guru dituntut untuk mampu menjelaskan hakikat ilmu pengetahuan yang diajarkannya, serta menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya, dan berusaha membangkitkan siswa untuk mengamalkannya.

Kata *murabbi* berasal dari kata dasar *Rabb*. Tuhan adalah sebagai *Rabb al-'alamin* dan *Rabb al-nas* yakni menciptakan, mengatur, dan memelihara alam seisinya termasuk manusia. Di lihat dari pengertian ini, jadi tugas guru adalah mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi, sekaligus mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat dan alam sekitarnya. Kata *mursyid* dalam arti tersebut guru harus berusaha menularkan penghayatan (*transinternalisasi*) akhlak/kepribadiannya kepada peserta didiknya, baik yang berupa etos ibadah, etos kerja, belajar, maupun dedikasinya yang mengharap ridha Allah semata. Dalam konteks ini mengandung makna bahwa guru merupakan model atau sentral identifikasi diri, yaitu pusat panutan dan teladan bahkan konsultan bagi peserta didiknya. Kata *mudarris* berasal dari akar kata *darasa-yudrusu-darsan wa durusan wa dirasatan*, yang berarti: terhapus, hilang, bekasnya, menghapus, menjadikan usang, melatih serta mempelajari. Maka tugas guru adalah berusaha mencerdaskan peserta didiknya, menghilangkan ketidaktahuan, atau memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan mereka sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan. Sedangkan kata *mu'addib* berasal dari kata *adab* yang berarti moral, etika, dan adab atau kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir dan batin. Kata peradaban (Indonesia) juga berasal dari kata *adab*, sehingga guru adalah orang yang beradab sekaligus memiliki peran dan fungsi untuk membangun peradaban (*civilization*) yang berkualitas di masa depan. (Muhaimin, 2003: 209).

1. Dari hasil telaah terhadap istilah-istilah dan makna guru dalam kajian literatur kependidikan Islam ditemukan bahwa guru

adalah orang yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

2. Mempunyai Komitmen terhadap profesionalitas, yang melekat pada dirinya sikap dedikatif.
3. Mempunyai komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap *continous improvement*.
4. Menguasai Ilmu dan mampu mengembangkan serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya, atau sekaligus melakukan *transfer ilmu pengetahuan, internalisasi*, serta *amaliah* (implementasi).
5. Mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi, serta mampu mengatur memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, alam sekitarnya.
6. Mampu menjadi model atau sentral *identifikasi diri*, atau menjadi pusat panutan, teladan dan konsultan bagi peserta didiknya.
7. Memiliki kepekaan intelektual dan informasi, serta memperbaharui pengetahuan dan keahlian secara berkelanjutan, dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat kemampuannya.
8. Mampu bertanggung jawab dalam dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan (Muhaimin, 2003: 216-217).

Secara komprehensif Ahmad Tafsir memberikan kesimpulan mengenai esesnsi guru dalam perspektif Islam dalam bukunya *Ilmu Pendidikan Islam*, secara sederhana guru adalah pendidik yang mengajar dikelas. Islam mendudukan guru pada martabat yang tinggi, setingkat di bawah martabat nabi dan rasul. Sementara tugas guru adalah mendidik dengan cara mengajar, memberi contoh, membiasakan dan lain-lain. Kemudian syarat guru adalah dewasa, sehat lahir batin, ahli, dan berkepribadian muslim. Sifat guru semua sifat yang mendukung (melengkapi) syarat tersebut. Di antara sifat-sifat itu, sifat kasih sayang amat diutamakan (Ahmad Tafsir, 1994: 121-134).

Namun demikian, dalam buku *Ilmu Pendidikan Islam* karangan Ahmad Tafsir dengan mengutip tokoh-tokoh pendidikan Islam

seperti: Al-Abrasyi (1974: 131) menyebut guru Islam memiliki sifat 19, sedangkan Asma Hasan Fahmi (1979:167-164) sifat guru Islam ada 4. Juga Mahmud Yunus (1961: 56-57) yang direduksi oleh Ahmad Tafsir sifat guru Islam ada 10. Semua yang disebutkan sifat-sifat atau model guru Islam sudah lengkap. (Ahmad Tafsir, 1994: 125-134). Namun ada hal yang menurut penulis penting untuk dimasukkan sebagai sifat guru Islam yang harus dan wajib dimiliki setiap guru Islam yakni:

1. Sifat berani: sifat berani adalah tuntutan yang harus dipenuhi oleh setiap guru. Mengakui kesalahan tidak mengurangi harga diri seseorang. Berani bukan saja dalam mengungkap kebenaran atau menegur siswa bermoral rendah atau berakhlak buruk. Tetapi juga mengakui kekurangan guru.
2. Sifat Jiwa Humor yang Sehat; dampak positif yang ditimbulkan guru dari senda gurau adalah terciptanya suasana nyaman di ruangan kelas. Bahkan humor yang sehat dapat menghilangkan rasa jenuh yang menghinggapi para murid.

Secara mikro, suatu upaya yang ditempuh lebih berorientasi pada aspek sistem operasional intraksi proses belajar mengajar: *Pertama*, tenaga pendidik yang memiliki kompetensi profesional, baik secara akademik maupun kepribadian. Oleh karena itu, pendidik adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan seluruh potensi anak didik, baik afektif, kognitif dan psikomotor.

Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mereka mencapai kedewasaannya, mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, khalifah di muka bumi, sebagai makhluk sosial, dan sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri. (Armai Arief, 2002: 72). Tugas seorang pendidik yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan hati manusia untuk ber-*taqqarrub* kepada Allah. (Muhaimin dan Abdul Mujib, 1993: 165). Bahkan tugas pendidik sebagai *warasat al-anbiya*, yang pada hakikatnya mengembang misi *rahmatan li al-'alamin*, yaitu suatu misi yang mengajak manusia untuk tunduk dan patut

pada hukum-hukum Allah, guna memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian misi ini dikembangkan kepada pembentukan kepribadian yang berjiwa tauhid, kreatif, beramal saleh dan bermoral tinggi. (Ramayulis, 2002: 85)

Tugas yang diemban tenaga pendidik (guru) merupakan tugas berat dan memerlukan profesionalisme. Jika guru mampu tampil secara profesional dari hari ke hari dalam melaksanakan tugasnya maka akan baik pulalah dunia pendidikan. Sehingga dapat memperbaiki situasi pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan sebab guru adalah komponen pendidikan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Karena itu, pendidikan tak akan pernah ada kontribusi dan inovatif bila guru tidak diberdayakan.

Dengan demikian, profesionalisme guru yang tinggi niscaya menjadi salah satu kunci keberhasilan pendidikan karakter. Tugas pendidik dalam konteks ini, meliputi: (1). Penyucian, yakni pengembangan, pembersihan dan mengangkat jiwa peserta didik kepada nilai Rabbani penciptanya, menjauhi semua bentuk kejahatan, dan menjaga agar peserta didik senantiasa berada pada nilai fitrahnya yang hanif, (2). Pengajaran, yakni melakukan proses pengalihan berbagai pengetahuan dan akidah kepada akal dan hati kaum mukmin (peserta didik), agar mereka senantiasa mampu merealisasikannya dalam setiap aktivitas tingkah laku sehari-hari. (Abdurrahman An Nahlawi, 1995: 170).

Maka tanggung jawab pendidik adalah, mendidik individu supaya beriman kepada Allah dan melaksanakan syari'atnya, mendidik diri supaya beramal saleh, dan mendidik masyarakat untuk saling menasehati agar tabah dalam menghadapi kesusahan, beribadah kepada Allah serta menegakkan kebenaran. (Abdurrahman An Nahlawi, 1995: 18-19)

Melihat kenyataan tersebut, tanggung jawab pendidik bukan hanya sebatas tanggung jawab akhlak terhadap anak didik, akan tetapi lebih jauh dari itu. Pendidik mempertanggung jawabkan atas segala tugas yang dilaksanakannya kepada Allah. Kesemua dimensi di atas, adalah sebuah sistem komponen pendidikan yang saling berkaitan antara satu dan lainnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

(Abd. Gafur, 1989: 15)

Dengan demikian dapat dipahami esensi guru pada pendidikan karakter dalam pandangan Islam menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari tugas seorang guru. Dengan bahasa lain, guru harus mempunyai karakter yang memiliki kompetensi kepribadian yang baik sebagai salah satu syarat guru yang profesional. Guru semacam ini sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, terutama membangun karakter peserta didik yang mandiri, kreatif inovatif, berani mengambil tanggung jawab atas keputusan yang diperhitungkannya, memiliki integritas pribadi, bermoral, dan berakhlak mulia, berusaha mengambil hikmah dan manfaat atas determinasi alam dan determiansi pada dirinya. (Abuddin Nata, 2011: 249)

Lebih lanjut Hasan Langgulung memberikan pemahaman tentang esesnsi guru dalam pendidikan karakter yakni guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai motivator dan fasilitator proses belajar, Yang dimaksud dengan proses belajar mengajar yakni realisasi dan aktualisasi sifat-sifat Ilahi pada manusia. Artinya pengembangan potensi-potensi anak didik adalah tugas dan tanggung jawab guru, sehingga jelas bahwa pengajaran adalah psikologi terapan yang meliputi keseluruhan tingkah laku guru yang berintraksi dengan muridnya secara kognitif, efektif, dan spritual. (Hasan Langgulung, 2001: 76-77)

Pemahaman di atas, Islam sangat memposisikan guru sangat mulia dan memadam guru sama dengan posisi orang tua. Ali bin Abu Thalib pernah mengucapkan: kalau ada orang yang mengajari saya satu huruf saja, maka saya bersedia menjadi budaknya. Sehingga disini sangat jelas bahwa esensi guru bukan sekedar melakukan *transfer of knowledge* saja tetapi juga punya andil dalam membentuk karakter peserta didik.

Sehubungan dengan itu, bahwa mengajar harus didasarkan pada psikologi Islam, yang didasarkan atas konsepsi Islam terhadap fitrah manusia. Bahkan lebih lanjut ia menjelaskan bahwa guru bukan hanya mengajar mata pelajaran tetapi telah mengajarkan mata pelajaran psikologi Islam. Ia harus mengembangkan peserta

didik yang memiliki kepercayaan secara Islam tentang manusia dan sikapnya, serta mampu mengembangkan potensi-potensi peserta didik menjadi *Insan Kamil*. (Hasan Langgulung, 2001: 78)

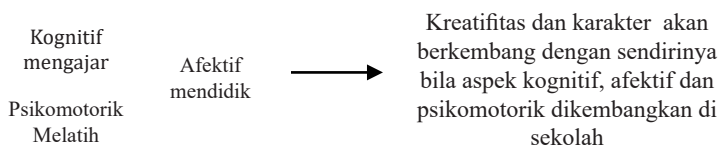
C. Visi –Misi Guru Dalam Pendidikan Karakter

Visi dan misi guru dalam pendidikan adalah paradigma memuliakan kemanusiaan manusia, dimana terbangunnya karakter cerdas pada diri peserta didik untuk kehidupan secara berkarakter cerdas dalam berbagai bidang dan wilayah kehidupan. Sedangkan misi seorang guru adalah mampu mengangkat dan menimplementasikan kaidah-kaidah pendidikan karakter cerdas yang dilandasi oleh kaidah keilmuan pendidikan, kondisi praksis dan tindakan praktik yang efektif dan efisien. (Prityinto dan Belferik Manullang, 2011: 83-84).

Dalam mewujudkan visi dan misi guru dalam pendidikan karakter akan sangat ditentukan oleh kualitas dan peran guru dalam mendesain pembelajaran peserta didik, oleh karena itu, visi dan misi pendidikan karakter bisa terlaksana dalam proses pembelajaran *das sollen* guru melakukan (*Three in one*) fungsi yaitu: *Pertama*, pengajaran yang memberikan pengetahuan dan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang ditetapkan.

Kedua, mendidik dimana guru memberi contoh tuntunan, petunjuk dan keteladanan yang dapat diterapkan atau ditiru siswa dalam sikap dan perilaku yang baik (akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari siswa). *Ketiga*, melatih dimana guru membimbing dan memberi contoh dan petunjuk gratis yang berkaitan dengan gerakan, ucapan dan perbuatan lainnya. (HM. Hajar Dewantara, 2012: 8-10).

Lihat gambar di bawah ini :



Gambar di atas, tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan dalam membentuk karakter anak. Namun

demikian, visi dan misi guru dalam pendidikan karakter dalam ranah Islam lebih komprehensif dimana guru sebagai pertama, *ulul al-bab*. Berdasarkan petunjuk Al-Qur'an surat al-Imran (3) ayat 190-191,

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ ۱۹۰ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka.

Dari ayat dapat diketahui bahwa visi guru menjadi orang yang memiliki keseimbangan antara daya pikir dan daya nalar dengan daya zikir dan spiritual. Maka seorang guru mengembang misi mempergunakan dayanya seoptimal mungkin untuk melakukan amal ma'rif dan nahi mungkar. *Kedua*, visi dan misi *al-ulama*. Berdasarkan petunjuk Qur'an Surat Fathir, (35) ayat 27-28

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَعَرَايِبٌ سُودٌ ۚ وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ ۚ كَذَٰلِكَ ۚ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

Artinya : Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat. Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama.

Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

Dari pemahaman dapat diketahui bahwa sebagai ulama ia menjadi orang yang mendalami ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian dan semakin mendekati diri kepada Allah. *Ketiga*, visi dan misi *al-Musakki*. Berdasarkan petunjuk Al-Qur'an surat Al-Baqarah, 2:129,

رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya: Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seseorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.

serta surat Ali 'Imran (3) ayat 164,

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Artinya: *Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan Al hikmah. dan Sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.*

Dengan demikian, bahwa visi guru sebagai *al-Muzakki* adalah menjadi orang yang memiliki mental dan karakter yang mulia. Sedangkan misinya adalah membersihkan dirinya dan anak didiknya dari pengaruh akhlak yang buruk serta menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. *Keempat*, visi dan misi *ahl al-dzikir*. Berdasarkan petunjuk surat Al-Anbiya ayat 7,

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۖ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Kami tiada mengutus Rasul-Rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang-laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada Mengetahui.

Dengan visi guru menjadi orang yang menguasai ilmu pengetahuan dan memiliki *expert judgment*, keahlian yang diakui kepakarannya sehingga menjadi tempat bertanya, rujukan, dan memiliki otoritas untuk memberikan pembenaran atas berbagai temuan ilmiah. Misinya memperbaiki, membimbing, meluruskan, mengingatkan, dan memberikan keputusan atas perilaku yang dilakukan anak didiknya.

Kelima, visi dan misi *al-rasikhuna fi al-'ilm*. Berdasarkan petunjuk Al-Qur'an surat Al-Nisa, (4) ayat 162

لَكِن الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ ۚ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah (pengetahuan) Allah Maha meliputi segala sesuatu.

diketahui visinya guru menjadi orang yang memiliki kemampuan bukan hanya pada tataran fakta dan data, melainkan mampu memberi makna atau melakukan proses inferensial terhadap data dan fakta tersebut. Misinya guru mengembang untuk memberikan makna, semangat dan dorongan kepada anak didik dan masyarakat sekitarnya agar meningkatkan kualitas hidupnya dengan cara menghayati, memahami dan mendalami makna yang terkandung di dalamnya. (Abuddin Nata, 2012: 347-351).

Uraian tersebut di atas, memperlihatkan bahwa petunjuk Al-Qur'an tentang visi dan misi guru jauh lebih lengkap dari teori yang bangun mengenai visi dan misi guru di luar Islam. Bahkan dengan visi dan misi tersebut, maka guru profesional bukan hanya memiliki kompetensi akademik, paedagogik, kepribadian dan social, melainkan memiliki misi pengabdian, pensucian diri,

mengembangkan ilmu secara terus menerus sambil mendekati diri kepada Allah, senantiasa mengingatkan masyarakat dari melakukan kekeliruan serta mampu memberikan pencerahan intelektual, moral dan sepiritual.

Lebih lanjut visi dan misi seorang guru dalam perspektif Islam tersebut akan memiliki implikasi yang luas. Implikasi tersebut antara lain dirinya bukan hanya sebagai agen pembelajaran yang tunduk pada hukum transaksional profesional, melainkan sebagai pengembang misi suci yakni menyelamatkan manusia dari kehancuran dan membawanya kepada kemajuan. (Abuddin Nata, 2012: 353). Sejalan dengan itu, menurut Sobari akan terciptalah model pembelajaran yang efektif pada pendidikan karakter dengan: (1) memahami situasi dalam belajar, (2) merencanakan pelajaran, (3) merencanakan tugas-tugas, (4) melaksanakan kegiatan belajar mengajar, (5) evaluasi kegiatan belajar, dan (6) menindaklanjuti. (Sobari Sutikno, 2007: 31).

Azra secara kongkrit menjelaskan jika visi dan misi pendidikan karakter yang dilakukan guru dapat terwujud, maka pendekatan usaha pembentukan pendidikan karakter atau akhlak setidaknya setidaknya melalui tahapan yakni: *Pertama*, menerapkan pendekatan *modeling* atau *uswatun hasanah* yakni dimana guru bertindak dan mensosialisasikan serta menegakkan nilai-nilai akhlak dan moral yang benar melalui model dan teladan. (Azyumardi Azra, 2002: 176-177) Oleh karena itu, dalam mendidik karakter sangat dibutuhkan sosok menjadi modeling.

Model dapat ditemukan oleh peserta didik dilingkungan sekolah. Semakin dekat model pada peserta didik akan semakin muda dan efektiflah pendidikan karakter tersebut. Peserta didik butuh contoh nyata, bukan hanya contoh yang tertulis dalam buku apalagi contoh khayalan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Berk yang dikutip Sit Masganti, perilaku moral diperoleh dengan cara yang sama dengan respons-respons lainnya, yaitu melalui *modeling* dan penguatan. (Zubaidi, 2012: 235).

Kedua, menjelaskan atau mengklarifikasi kepada peserta didik secara terus menerus tentang berbagai nilai yang baik dan yang buruk. *Ketiga*, menerapkan pendidikan berdasarkan karakter (*character-*

based education).

Hal di atas bisa dilakukan dengan menerapkan *character-based approach* ke dalam setiap mata pelajaran yang ada di samping mata pelajaran khusus untuk pendidikan karakter, seperti pelajaran agama, sejarah, Pancasila, dan sebagainya. Memandang kritik di atas, maka perlu dilakukan reorientasi baik dari segi isi/muatan, metode dan pendekatan, sehingga mereka tidak hanya menjadi verbalisme dan sekedar hafalan, tetapi betul-betul berhasil membantu pembentukan akhlak atau karakter. (Azyumardi Azra, 2002: 176-177).

Sehubungan dengan itu, Didin Hafidhuddin menjelaskan esensi guru dalam pendidikan karakter dilakukan dengan beberapa hal:

- a. Memadukan nilai-nilai agama pada semua mata pelajaran. Diharapkan para pendidik banyak berdialog secara intensif dengan pendidik dalam bidang yang lain.
- b. Mendesain kurikulum pendidikan agama diperguruan tinggi yang memadukan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, sehingga proses pembelajaran dan evaluasinya tidak hanya pada aspek pengetahuan keagamaan, tetapi juga sikap dan prilaku.
- c. Para pendidik agama mengusahakan dirinya menjadi contoh teladan bagi para anak didiknya.
- d. Selalu berusaha memperbaharui materi dan metode mengajar dengan menggunakan perangkat teknologi modern
- e. Mempelopori kegiatan-kegiatan dakwah di kampus, seperti kajian para dosen maupun mahasiswa. (Didin Hafidhuddin, 2011: 28).

D. Mal--Praktik Pendidikan: Penghambat Pendidikan Karakter

Potret pendidikan yang sejatinya mengembang misi memanusiakan manusia, atau melahirkan generasi-generasi yang berkualitas baik secara keilmuan, maupun moral tampaknya belum mampu terwujud. Kini telah telah digantikan dengan berbagai persoalan, mulai dari maraknya tawuran antar pelajar ataupun

antar mahasiswa, kekerasan di sekolah, profesionalisme guru, kasus mencontek massal dan sebagainya adalah bagian dari benang kusut dunia pendidikan yang gagal mendesain pendidikan berbasis karakter. Alias terjadi *mal-praktik* dalam proses pembelajaran.

Multi persoalan di atas, menurut KH. Abdullah Syukri Zarkasyi karena pendidikan seharusnya tidak hanya menekankan pengajaran pada aspek kognitif, tetapi juga bagaimana membangun sifat mental serta watak anak didik. (Republika, 2012: 10) Atau aspek afektif dan psikomotorik menjadi titik sentral bagi guru dalam mendesain pembelajaran yang membelajarkan peserta didik. Hal ini diakui oleh dalam buku *Praktek Pendidikan dalam Renungan*, yang mengatakan banyak guru yang hanya mengajar tetapi tidak mendidik sehingga tidak pernah berhasil dalam membelajarkan peserta didik (Mughtar Buchori, 1994: 30) bahkan ironisnya guru hanya pamer ilmu pengetahuan di depan peserta didik, sehingga menjadi guru yang ditakuti dan disegani, tidak untuk kritik di dalam kelas karena akan berakibat pada nilai, dalam konteks inilah peserta didik terbenam dalam kebudayaan bisu (*the culture of silence*).

Bahkan problem besar pendidikan yakni citra kualitas dan berengking tinggi tersebut dicapai oleh sekolah dengan menenpuh dengan berbagai macam cara untuk mengejar target 100% kelulusan dengan melakukan nmenugaskan para pendidiknya untuk memperbaiki jawaban-jawaban muridnya.

Semua ini dilakukan demi pencitraan sekolah tersebut berhasil Ujian Akhir Nasional (UAN) 100%. Ironisnya keadaan berkembang pada saat pendidikan karakter dijadikan sebagai landasan filosofi pendidikan, sedangkan para guru terlibat dengan aksi ketidakjujuran. (Nirwan Syafrin, 2011: 110)

Bahkan lebih lanjut Nirwan menjelaskan bahwa lembaga pendidikan tidak lagi berorientasi pada pembinaan akhlak dan penanaman adab dan iman, tapi pencarian selebar kerta yang bernama ijazah. Perlahan, tapi pasti lembaga pendidikan hari ini beralih fungsi dari mencetak manusia unggulan berkarakter dan beradab mulia menjadi pabrik penghasil barang beranama manusia, yang hanya punya pikiran tetapi tidak berkarakter. (Nirwan Syafrin,

2011: 110)

Diakui atau tidak persoalan di atas, dalam aplikasinya dan desain pendidikan karakter yang dilakukan oleh guru sering mengalami hambatan atau inilah yang sering disebut dalam dunia pembelajaran. Oleh karena itu, Sa'udun Akbar mengidentifikasinya ada tiga *mal-praktik* dalam pembelajaran yaitu:

Pertama, persoalan orientasi taksonomik. Berpuluh-puluh tahun praktik pendidikan telah berkiblat pada taksonomi Bloom yang memilah-milah ranah pendidikan menjadi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kalaulah taksonomi Bloom tersebut benar, dalam praktiknya cenderung terpleset pada pengembangan aspek kognitif. Praktik pendidikan terlalu *overkognitif*. Bahkan, beberapa mata pelajaran yang awalnya diniatkan untuk memperkuat pendidikan karakter, misalnya pendidikan moral Pancasila, pendidikan Budi pekerti, pendidikan Agama dan pendidikan kewarganegaraan, juga cenderung *overkognitif*.

Kedua, kurang adanya keseimbangan antara aspek pikir dengan hati dalam praktik pendidikan. Dua kekuatan ini dalam praktiknya cenderung lebih memperkuat (mempertajam) pikiran daripada hati. Pendidikan seharusnya mampumencerdaskan pikiran dan mempertajam hati sekaligus. Pikiran manusia dapat diasah dan dipertajam atau dicerdaskan melalui berbagai macam ilmu pengetahuan *empiric*. Pikiranlah yang dapat menerima kebenaran ilmu pengetahuan yang cenderung bersifat rasional. Hati manusia dapat dipertajam di asah dengan agama. Hatilah yang bisa menerima kehadiran Tuhan. (Sa'dun Akbar, 2011: 4-6)

Ketiga, kurang adanya keseimbangan pengembangan antara *Programmed Curriculum* dengan *Hidden Curriculum*. (Soebijantoro, 2006: 108-115) Kurikulum adalah seluruh upaya satuan pendidikan untuk mempengaruhi belajar. Belajar terjadi kalau terjadi perubahan perilaku. Belajar bisa saja terjadi baik di ruang kelas, taman bermain, atau diluar sekolah sekalipun. Kurikulum tidak sekedar program pendidikan yang direncanakan secara tertulis saja, kurikulum bisa saja pengalaman-pengalaman belajar lain, meskipun tidak tertulis tetapi mampu mengembangkan dan merubah perilaku. (Sa'dun

Akbar, 2011: 4-6)

Dengan demikian, uraian di atas dapat di atasi, jika saja para guru bersedia melakukan inovasi dan kreativitas untuk memformulasikan pendidikan karakter secara seimbang melalui implementasi dalam pembelajaran. (Novan Ardy Wiyani, 2013: 128) Sejalan dengan itu, pendidikan karakter akan mengacu pada empat pilar pendidikan universal yang dikembangkan UNESCO yaitu:

Learning to know yang berarti belajar untuk memperoleh pengetahuan. *Learning to do* yaitu belajar untuk memiliki kompetensi dasar dalam hubungan dengan situasi dan tim kerja yang berbeda-beda. *Learning to live to gather* yakni belajar untuk mampu mengapresiasi dan mengamalkan kondisi saling tergantung, keanekaragaman, saling memahami dan perdamaian inter dan antar bangsa. *Learning to be* yaitu belajar untuk mengaktualisasikan diri sebagai individu dengan kepribadian yang bertanggung jawab. (Ekosupriyanto, 2004: 131)

Empat pilar di atas, sejalan dengan gagasan pendidikan yang berbasis pada karakter, oleh sebab itu pendidikan karakter adalah proses pendidikan yang melibatkan aspek kognitif, emosi, dan aspek fisik sehingga menghasilkan akhlak mulia dan praktiknya dapat diukir menjadi *habit of the mind, habit of the heart, and habit of the hands*. (Novan Ardy Wiyani, 2013: 138)

Guru dalam proses pembelajaran dapat mendesain ketigal hal tersebut, sehingga pendidikan karakter bisa terlaksana dalam pembelajaran tidak sebaliknya yakni terjadinya *mal-praktik* yang dapat membunuh karakter dan kreatifitas anak didik, oleh karena itu, pendidikan karakter memerlukan keterlibatan guruku adalah telandanku dan seluruh komponen pendidikan. Inilah yang dikatakan Naquib Al-Attas bahwa tujuan akhir pengajaran yaitu menghasilkan manusia yang beradab atau istilah *ta'dib*. (Syek Muhammad Naquib al-Attas, 1981:178).

Dalam konteks ini, penulis merekomendasikan beberapa hal:

1. Aktualisasi nilai-nilai pendidikan karakter seperti tolong menolong, mengutamakan orang lain, kasih sayang, kejujuran, dan amanah dalam berkativitas baik di dalam kelas maupun

dilingkungan di sekolah.

2. Peran guru dalam memberikan komentar, komparasi, serta meng-istimbath nilai-nilai pendidikan karakter
3. Memotivasi anak untuk mengungkapkan pendapatnya secara bebas.
4. Memberi hadiah kepada siswa yang rajin dan giat memperlihatkan jiwa tolong menolong, sebagai hasil pendidikan dari pendidikan karakter
5. Hendaknya guru menjadi teladan yang baik di depan anak didik dan berupaya meningkatkan pribadi dan kemampuan agar dapat membantu anak didik dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan.
6. Membangun jalinan komunikasi dengan anak didik tanpa mengurangi penghormatan mereka kepada guru.

E. Kesimpulan

Dari pembahasan ini, makalah ini menyimpulkan bahwa esensi guru pada visi-misi pendidikan karakter dalam kajian Islam sangat urgen. Hal disebabkan karena beberapa indikator yaitu:

1. Guru dalam kajian Islam merangkum semua aspek yang ada dalam pendidikan karakter sebagai *ustadz*, *mu'allim*, *murabby*, *mursyid*, *mudarris*, dan *mu'addib*.
2. Dari segi tanggung jawab pendidik bukan hanya sebatas tanggung jawab akhlak terhadap anak didik, tetapi juga guru menjadi *role model* dari kehidupan anak didik, bahkan lebih jauh dari itu, guru mempertanggung jawabkan atas segala tugas yang dilaksanakannya kepada Allah.
3. Dengan visi-misi *ulul al-bab*, *al-ulama*, *al-Musakki*, *ahl al-dzikh*, *al-rasikhuna fi al-'ilm*. Maka esensi guru pada pendidikan karakter dalam ranah Islam sangat komprehensif dari apa yang dirumuskan oleh ilmuwan Barat. Maka guru professional bukan hanya memiliki kompetensi akademik, paedagogik, kepribadian dan sosial, melainkan memiliki misi pengabdian, pensucian diri, mengembangkan ilmu secara terus menerus sambil mendekati diri kepada Allah, senantiasa mengingatkan masyarakat dari

melakukan kekeliruan serta mampu memberikan pencerahan intelektual, moral dan sepritual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Madjid dan Andayani, *Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2011
- Akbar, Sa'dun, "Revitalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar", dalam *Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Malang, Universitas Negeri Malang, 2011.
- Ali Murshafi, Muhammad, *Bagaiman Mendidik Anak Agar Cerdas dan Berbakti*, Surakarta, Ziyad Vizi Media, 2009.
- Ardy Wiyani, Novan, *Membumikan Pendidikan Karakter di SD*, Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2013.
- Arief, Armai, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta, Ciputat Press, 2002.
- Asmawan Sahlan dan angga Teguh Prastyo, *Desain Pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter*, Yogyakarta, Aruzz Media, 2012.
- Azyumardi, Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional; Rekonstruksi dan Demokratisasi*, Jakarta, Kompas, 2002.
- Buchori, Muchtar, *Ilmu Pendidikan dan Praktek Pendidikan*, Jakarta, Muhammadiyah Press, 1994.
- Dewantara, HM. Hajar, *Pendidikan Karakter; Pemberdayaan Guru Agama dalam Pembentukan Karakter Islami*, Yogyakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam, FIAI UII, 20 Juni 2012.
- Dimiyati, *Peran Guru Sebagai Model Dalam Pembelajaran Karakter dan Kebajikan Moral Melalui Pembelajaran Jasmani*, dalam *Cakrawala Pendidikan*, Yogyakarta, UNY, Mei 2010, Th, XXIX, Edisi Khusus Dies Natalis UNY.
- Gafur, Abd, *Disain Instruksional*, Solo, Tiga Serangkai, 1989.

- H. Syaukani, HR, *Titik Temu dalam Dunia Pendidikan; Tanggung Jawab Pemerintah, Pendidik, Masyarakat dan Keluarga dalam Membangun Bangsa*, Jakarta, Nuansa Madani, 2002.
- Hafidhuddin, Didin, Konsep Pendidikan Karakter Berbasis Pendidikan Agama, dalam *jurnal Pendidikan Islam, Ta'dibuna*, Vol 1/No. 1/ Juni 2011.
- Koesoema dalam Kompas, 1 Desember 2009.
- Langgulong, Hasan, *Pendidikan Islam dalam Abad 21*, Jakarta, Al-Husna Zikra, 2001.
- Lickona, Thomas, *Education for Character, How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*, terj. Jakarta, Bumi Aksara, 2012.
- Miskaawaih, Ibn, *Tahzib al-Akhlaq wa Tathir al-'Araq*, Mesir al-Matba'ah al-Misriyah, 1934.
- Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam; kajian Filosofis dan kerangka Oprasional*, Bandung, Trigenda Karya, 1993.
- Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003.
- Nahlawi, Abdurrahman An, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*, Jakarta, Gema Insani Press, 1995.
- Naquib al-Attas, Syek Muhammad, *Islam and Sekularisme*, Bandung, Pustaka, 1981.
- Nata, Abuddin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Jakarta, Grasindo, 2012.
- Prayitno dan Belferik Manullang, *Penedidikan Karakter dalam Pembangunan Bangsa*, Jakarta, Grasindo, 2011.
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, Kalam Mulia, 2002.
- Republika 10 April 2012.
- Soebijantoro, "Kecerdasan Emosional dalam Konteks Hidden Curriculum," dalam *Jurnal Pendidikan*, Vol. 12 No. 1, Juni 2006, h. 108-115.
- Supriyanto, Eko, *Inovasi Pendidikan; Isu-Isu Baru Pembelajaran, Manajemen dan Sistem Pendidikan di Indonesia*, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Press, 2004.

- Sutikno, M. Sobari, *Mengagas Pembelajaran Efektif dan Bermakna*, Mataram, NTP Press, 2007.
- Suwendi, *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2004.
- Syafrin Manurung, Nirwan, "Problematika Pendidikan Islam Kontemporer, dalam *jurnal Pendidikan Islam, Ta'dibuna*, Vol 1/ No. 1/ Juni 2011.
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1994.
- , *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung Remaja Rosdakarya, 2012.
- Thoifuri, *Menjadi Guru Inisiator*, Semarang, RaSAIL Media Group, 2007.
- Zubaidi, *Desain Pendidikan Karakter, Konsepsi dan Aplikasi dalam Lembaga Pendidikan*, Jakarta, Kencana, 2012.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan demokratisasi*, Jakarta, Kompas, 2002.
- “Akar-Akar Pembaruan Islam di Indonesia”, dalam *Muhammadiyah Kini dan Esok*, Ed. Din Syamsuddin, Jakarta, Pustaka Panji Mas, 1990.
- , *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2000.
- , *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih*, Bandung: Mizan, 2000
- A. Steenbrink, Karel, *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, Jakarta, LP3ES, 1986.
- A. Karel Steenbrink *Beberapa aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, Jakarta, Bulan Bintang, 1984.
- Abd Syarifuddin Amir, *al-Fiqru al-Tarbawiyah Indi Ibn Muqoffa Wa al-Jahish Wa Abdul Hamid al-Khatib Dar Iqro*, Bairut, 1985.
- Abdur Rahman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa; Visi, Misi dan Aksi*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006.
- Ali, Mukti *Beberapa Persoalan Agama Dewasa ini*, Jakarata, Raja wali Press, 1988.
- Anised, Ibrahim, *al-Mu’jam al-Wasit*, Kairo, Dar al-Ma’arif, 1972.
- Ansharullah, *Konsep Pendidikan dalam Adat Minangkabau*, Tesis yang tidak terbitkan, Jakarta, Uneversitas Muhammadiyah, 2001.
- Aqib Sumito, *Politik Islam India Belanda*, Jakarta, LP3S, 1985.
- Arief, Armai, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta, Ciputat Press, 2002.
- Arifin, Imron, *Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Peasantren*,

- Malang, Kalimashada Press, 1993.
- Bernard Lewis dkk, *The Encyclopedia Of Islam, Tula Sub Acgide Pallas*, London Laidens, 1965.
- Bruinenssen Martin Van, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*, Bandung, Mizan 1995.
- Darban, “ Kiai dan Politik pada Zaman Kerajaan Islam”, dalam majalah *Pesantren*, No.2/Vol V1998.
- Dauly, Haidar Putra, *Historisitas dan eksistensi Pesantren, Madrasah, sekolah*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2001.
- Dawam, Ainurrofiq, *Emoh Sekolah*, Inspeal Ahimsakarya Press, Yogyakarta, 2003.
- Depag RI, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Dirjen Binbaga, 1986.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.
- Dhofier Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren*, Jakarta, LP3ES, 1983
- Djamaluddin dan Abdullah Aly, *Kapita Seleka Pendidikan Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 1998.
- Djati Sidi, Indra, *Menuju Masyarakat Belajar; Menggagas paradigma Baru Pendidika*, Jakarta, Paramadina, 2001.
- Dobbin Cristine, *Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah : Sumatra Tengah 1784-1847*, Terj. Lillian D. Tedjasukandhana, Jakarta, 1998.
- Fajar, A. Malik, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*, Jakarta, LP3NI, 1998.
- Fajar, A. Malik,, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, Bandung, Mizan, 1998.
- Falakh Fajrul, *Pesatren dan Proses-Politik Demokratis*, dalam *Pesantren Masa Depan*, Penyungting, Marzuki Wahid, Suwendi, Bandung, Pustaka Hidayah, 1999.
- Francis, Wahono, *Kapitalisme Pendidikan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001.
- Freier, Paulo, *The Politic of Education, Culture, and Leberation*, New York, Begin and Garvey, 1985, h. xi

- , *Pendidikan Kaum Tertindas*, Jakarta, 2000.
- Fuad Jabali dan Jamhari, (penyunting), *IAIN Modernisasi Islam di Indonesia*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Fuad Mohd Fachruddin, *Perkembangan Kebudayaan Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1985.
- H. Syaukani, HR, *Titik Temu daslam Dunia Pendidikan*, Jakarta, Nuansa Madani, 2002.
- H.A. Timur Djaelani, *Kebijaksanaan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam*, Jakarta, Dharma Bhakti, 1982.
- H.M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1991.
- Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup*, Jakarta, Bulan Bintang, 1979.
- Hanun, Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Logos wacana Ilmu, 2001.
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999.
- Horikoshi Hiroko, *Kiai dan Perubahan Sosial*, terj. Umar Basalain dkk, Jakarta, P3M, 1987.
- Husni, Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Logos wacana Ilmu, 2001.
- Husni, Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, Jakarta, logos, 2005.
- Ismail dkk (ed), *Paradigma Pendidikan Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001,
- Jauhar, Vol I. No. 1, Desember**, 2000.
- Jurnal Madrasah*, vol. 5 no. 2001, Jakarta, Depag.
- Kartanegara, Mulyadhi, *Mozaik Khazanah Islam*, Jakarta, Paramadina, 2000.
- Kartanegara, Mulydhi, *Menembus Batas Waktu Panorama Filsafat Islam*, Bandung, Mizan, 2002.
- Langgulong Hasan, *Asas-asas Pendidikan Islam*, Jakarta, Al-Husna Zikra, 2000.
- Madjid Nurcholish, *Bilik-Bilik Pesantren : Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta, Paramadina, 1997.
- Maksum, *Madrasah dan Sejarah Perkembangannya*, Jakarta, Logos,

- 1999,
- Maskuri Abdillah, "Peningkatan Kualitas Pendidikan Madrasah",
Dalam *Jurnal Madrasah*, vol. 1. no. 2 1996, Jakarta, Depag.
- Mastuhu, *Dinamika Pendidikan Pesantren*, Indonesia, Netherlands
coorporation in Islamic Studies, seri Inis, XX, jakarta, 1994.
- , *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta, Logos
Wacana Ilmu, 1999.
- Mochtar, Afandi, *Membedah Diskursus Pendidikan Islam*, Jakarta,
Kalimah, 2001.
- Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam; kajian
Filosofis dan kerangka Oprasional*, Bandung, Trigenda Karya,
1993.
- , *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam,
di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, Jakarta, Raja
Grafindo Persada, 2007.
- , *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, Yogyakarta,
2003.
- Muhkan, Abdul Munir *Runtuhnya Mitos Politik Santri*, Yogyakarta,
Sipress, Cet I, 1992.
- , Humanisasi pendidikan Islam, *Tashwirul Afkar Jurnal
Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan*, Edisi No. 11,
2001.
- , *Nalar Spritual Pendidikan; Solusi Problem Filosofis
Pendidikan Islam*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2002.
- Musli Usa, (ed), *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta*,
Yogyakarta, Tiara Wacana, 1991.
- Nakosteen, Mehdi, *Konstrubusi Islam Atas Dunia Intelektual Barat;
Deskripsi Analisis Abad Keemasan*, edisi Indonesia, Surabaya,
Risalah Gusti, 1996.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan
Gerakan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1994.
- Nata (ed), Abuddin, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan
Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta,
Grasindo, 2001.

- , *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997.
- , *Metodologi Studi Islam*, Jakarta, Raja Grafindo, 2000,
- , adalah salah seorang tokoh yang memulai pendidikannya dengan belajar mengaji al-Qur'an. Nata, Abuddin, "Tantangan dan Peluang Pendidikan di Indonesia", Jakarta, 20 Maret 2004.
- , *Paradigma Pendidikan Islam*, Jakarta, Grasindo, 2001.
- , Pendidikan Berbasis Masyarakat dalam Perspektif Islam, dalam *Jauhar, Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual*, Vol. 2, No, 2, Jakarta, IAIN Jakarta, 2001
- , *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Wali Press, 2001.
- , *Tokoh-Tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Nizar, Samsul, *Filsafat Pendidikan Islam; Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*, Jakarta, Ciputat Press, 2002.
- Noor,Daliar *Gerakan modernisasi Islam Di Indonesia 1900-1942*, Jakarta, LP3ES, 1991.
- Purbawakacana, Sugarda, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*, Jakarta, Gunung Agung, 1970.
- Raharjo Dawam (ed), dalam *Pesatren dan Pembaruan*, Jakarta, LP3ES, 1985.
- Raharjo Dawam, *Pergulatan Dunia Pesatren*, Jakarta, LP3ES, 1989.
- Rahim, Husni, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Logos wacana Ilmu, 2001.
- Rahim, Husni, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, Jakarta, logos, 2005
- Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago, The Universty of Chicago Press, 1982.
- Rahmat,Jalaluddin, *Islam Alternatif*, Bandung, Mizan, 1991.
- Rosyada, Dede, *Paradigma Pendidikan Demokratis; Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta, Kencana, 2003.

- Sanaky, Hujair, A.H., Permasalahan dan Penataan Pendidikan Islam Menuju Pendidikan Bermutu” *Jurnal El-Tabawy*, No. 1. Vol. I, 2008.
- , *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia*, Yogyakarta. 2003.
- , “ Reformasi Pendidikan Islam Suatu Keharusan Untuk Memasuki Millenium III”, dalam *Jurnal Pendidikan Ta’dib*, No. 4 Maret 2001.
- Sardar, Ziauddin, *Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim*, Terj, Bandung, Mizan, 1998
- Saridjo, Marwan, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, Jakarta, CV. Amisco, 1996.
- Sekolah: Mengajar atau Mendidik ?* Yogyakarta : Kanisius dan Universitas Sanata Dharma, 1998.
- Shaleh, Abdur Rachman, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa, Visi, Misi dan aksi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.
- Shaleh, Abdurrahman dkk, *Pedoman Pembinaan Pondok Pesantren*, Jakarta, Binbaga Islam, Depag RI, 1982.
- Smith, Willam , *Conscientizacao, Tujuan Pendidikan Paulo Freire*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001.
- Soebahar, Abd. Halim, *Wawasan Baru Pendidikan Islam*, Jakarta, Kalam Mulia, 2002.
- Solahuddin, Soleh, *Urgensi Reformasi Pendidikan Nasional dalam Menuju Indonesia Baru Menggagas Reformasi Total*, (ed), Musa Kazhim, Pustaka Hidayat, 1986.
- Soroyo, “ Antisipasi Pendidikan Islam dan Perubahan Sosial Menjangkau Tahun 2000”, dalam buku Muslih Usa (ed), *Pendidikan Islam di Indonesia antara Cita dan Fakta*, Yogyakarta, Tiara Wacana , 1991.
- Stanton, Charles Michael, *Pendidikan Tinggi dalam Islam*, Jakarta, Logos, 1994.
- Suwito, “Kurikulum Berbasis Kompetensi”, dalam *makalah seminar* sambutan atas nama Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, pada acara Workshop, pada Program Studi Agribisnis Fakultas

- Sains dan Teknologi, Jakarta, 17 April 2003.
- , dalam pidato Pengukuhan Guru Besar Pemikiran dan Pendidikan Islam, 3 Januari 2002, “*Pendidikan Yang Memberdayakan*”.
- , *Konsep Pendidikan Ahklak Menurut Ibn Miskawaih*, Disertasi, Pascasarjana IAIN, Jakarta, 1995..
- , *Konsep Pendidikan Ahklak Menurut Ibn Miskawaih*, Disertasi, Pascasarjana IAIN, Jakarta, 1995.
- Syani, Abdul, *sosiologi dan Perubahan masyarakat*, Lampung, Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Tafsir Ahmad, “Madrasah yang Termarginalisasi”, dalam Jamaluddin (ed), *Mendiskusikan Kembali Eksistensi Madrasah*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Tafsir, Ahmad dkk, *Cakrawala Pendidikan Islam*, Bandung, Mimbar Pustaka, 2004.
- , *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung, Remaja Rosadakarya, 1994.
- Teba, Sudirman, *Islam Orde Baru Perubahan Politik dan Keagamaan*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1993. n Nata, *Manajemen Pendidikan Islam: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2003.
- Tibi, Bassam *The Krisis of Modern Islam: A. Preindustrial Culture in the Scientific-Technological Age*, Salt Lake City, Universitas of Utah Press, 1988.
- , *Iskam and the Cultural Accommodation of Social Change*, San Fransisco, Westview Press, 1985.
- Tilaar, H. R., *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*, Bandung Rosdakarya, 2000.
- Wahid, Abdurrahman, *Muslim di Tengah Pergumulan*, Jakarta, Lapenas, 1983.
- Wijaya, Cecep dkk, *Upaya Pembaharuan dalam Pendidikan dan Pengajaran*, Bandung, Remaja Karya, 1992.
- Wirjosukarto, Amir Hamza *Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran Islam*, Jember, Muria Offset, Cet IV, 1985.

- Yatim, Badri, dkk, *Sejarah Perkembangan Madrasah*, Jakarta, Depag RI, 1999.
- Yatim, Badri, dkk, *Sejarah Perkembangan Madrasah*, Jakarta, Depag, 1999.
- Yunus Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Hidakarya Agung, 1996.
- Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*, Jakarta, Paramadina, 1999.

PROFIL PENULIS



Nama : Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd
NIP/NIK : 196202101992032002
Jenis Kelamin : Perempuan
TTL : Tilamuta, Februari -10-1962
Status : Kawin
Agama : Islam
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya/IV/d
Jabatan Fungsional Akademik : Rektor IAIN Kendari
Perguruan Tinggi : IAIN Kendari
Alamat : Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga Kendari
Telp./Faks. 0401-3193710
Alamat Rumah : BTN Beringin Blok H No. 7 Watubangga
Kendari
Telp./Faks. : 0401-3194867/ HP. 081355672789
E-mail : izzahawad@gmail.com
izzah_awad@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Jenjang	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Bidang Studi
1989	Sarjana (S1)	IAIN Alauddin Makassar	Ushuluddin / Dakwah
2002	Magister (S2)	Universitas Negeri Malang	Bimbingan Konseling
2011	Doktoral (S3)	Universitas Islam Negeri Makassar	Pendidikan dan Keguruan

PENGALAMAN JABATAN

Jabatan	Institusi	Tahun
Ketua Prodi BPI	STAIN Kendari	2002 s.d. 2008
Ketua Jurusan Dakwah (PJS)	STAIN Kendari	2005 s.d. 2006
Anggota Senat Mewakili Unsur Dosen	STAIN Kendari	2002 s.d. 2006
Anggota Senat Mewakili Unsur Dosen	STAIN Kendari	2006 s.d. 2008
Anggota Senat Mewakili Unsur Dosen	STAIN Kendari	2012 s.d. 2016
Ketua/Anggota Senat Mewakili Unsur Dosen	STAIN Kendari	2017 s.d. Skrg

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Organisasi	Jabatan
2005- sekarang	Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN)	Anggota
2011	Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa Lingkup STAIN Kendari	Pembina

KARYA TULIS ILMIAH

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2007	Studi Tentang Eksistensi Dosen Penasehat Akademik dan Kaitannya dengan Mahasiswa yang Mengalami Kesulitan Belajar di STAIN Kendari	Al-Izzah Jakarta, .ISSN, 1978-9726
2008	Dasar-Dasar Bimbingan Konseling	Buku / Referensi Fatiya Makassar, ISBN, 978-979-3267-.85-2
2010	Problematika Dakwah (Dakwah dan Budaya)	
2010	Isu-isu Kontekstual Dalam Pendidikan (Sertifikasi Guru, Pendidikan Gratis, dan Ujian Nasional)	Jurnal Al-Ta'dib, Volume 4 No. 1. ISSN, 1979-4908.
2011	Pendidikan Islam Masa Bani Abbasiyah Tanpa Dikotomi	Jurnal Al-Munzir, Volume 4, No. 1, ISSN, 1979-4894.
2011	Konsep Amanah Dalam Perspektif AlQur'an dan Bimbingan Konseling	Jurnal Al-Munzir. Volume 4 No.2. ISSN, 1979-4894.
2012	Pendidikan Islam Dalam Membentuk Pribadi Sehat	Jurnal Shautut Tarbiyah: 26 Th. XVIII, ISSN, 0852-5358.
2012	Perilaku Belajar	Buku/Referensi Penerbit: STAIN Kendari Press. ISBN 978-602-95946-3-8.

PROFIL PENULIS



Dr. Samsul Bahri, MA. Anak keempat dari enam bersaudara yang lahir di Kendari 24 Maret 1974, Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar, tahun 1980-1986 di Kendari. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN kendari), tahun 1987-1990. Madrasah Aliyah Negeri Pesri, 1990-1993. Program Strata 1 (S1) pada Fakultas pendidikan agama Islam STAIN, tahun 1993-1997. Program Pascasarjana Studi Islam (S2) Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2000-2003. S3. Di Universitas Ibn Khaldun Bogor (UIKA) konsentrasi pendidikan Islam. Karya ilmiah (buku) yang telah dihasilkan, Paradigma Baru Dalam Pendidikan 2008. Ilmu Pendidikan, Diktat, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2005. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia 2012, Kapita Selekta Pendidikan Islam 2012, Pemikiran Pendidikan dalam Islam, 2009.

PROFIL PENULIS



Nama : Dr. Batmang,S.Ag,M.Pd
Nip : 197412312000031028
TTL : Batu Putih,31 Desember 1974
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Lektor Kepala / Wakil Rektor II
Alamat : Perumahan Cempaka Indah Blok G/17.
Baruga Kota Kendari
No,HP : 082393252774 / 085335970275
Email : batmang_75@yahoo.com /
batmangiainkdi@gmail,co.id

Riwayat Pendidikan :

1. SI IAIN Alauddin Ujung Pandang di Tarbiyah Pendidikan Bahasa Arab Tahun 1997
2. S2 Universitas Negeri Jakarta Bahasa, Pendidikan Bahasa Arab Tahun 2010
3. S3 Universitas Negeri Jakarta, Pendidikan Bahasa Arab Tahun 2013

Riwayat Jabatan :

1. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Tahun 2018 2019
2. Wakil Rektor II Tahun 2019 -2023

PROFIL PENULIS



Nama : Dr. Muh. Shaleh, M.Pd
NIP/NIK : 196608011992031002
NIDN : 2001086602
NPWP : 14.594.260.3-811.000
Jenis Kelamin : Pria
TTL : Bungku, Agustus-01-1966
Status : Kawin
Agama : Islam
Gol / Pangkat : VI/a/Pembina
Jabatan Fungsional Akademik : Lektor Kepala
Perguruan Tinggi : IAIN Kendari
Alamat : Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga Kendari
Telp./Faks. : 0401-3193710
Alamat Rumah : BTN Beringin Blok H No.7 Watubangga
Kendari SULTRA
Telp./Faks. : HP. 085319002699
E-mail : bungku.66@gmail.com
: muhshaleh@iainkendari.ac.id

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Jenjang	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Bidang Studi
1990	Sarjana (S1)	IAIN Alauddin Kendari	Tarbiyah/ PAI
2002	Magister (S2)	Universitas Negeri Malang	Bimbingan Konseling
2017	Doktor (S3)	Universitas Negeri Jakarta	Pend. Anak Usia Dini

PENGALAMAN JABATAN

Jabatan	Institusi	Tahun
Ketua Prodi PAI	STAIN Kendari	2002 s.d. 2008

KARYA TULIS ILMIAH

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2008	Filsafat Pendidikan Islam	Sadra